

RELASI KIAI DAN KEKUASAAN: MENGUAK RELASI KIAI DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM POLITIK LOKAL

Ahmad Subakir

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Ridwan Nasir, MA

S T A I N
Kediri Press

**Relasi Kiai dan Kekuasaan:
Menguak Relasi Kiai dan Pemerintahan Daerah dalam Politik Lokal**

Penulis

Ahmad Subakir

Desain Cover

Audina

Tata Letak

Qotrunnada

Penerbit:

STAIN Kediri Press

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Tlp. (0354) 689282, FAX (0354) 686564.

©STAIN Kediri

STAIN Kediri Press, 2018

xxvi+229 hlm.; 14.5 x 21 cm

ISBN: 978-602-8167-81-9

Cetakan Pertama, April 2018

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur pada Allah SWT, akhirnya buku ini dapat diterbitkan. Kesempatan, ruang dan waktu yang luar biasa diberikan oleh-Nya, sehingga ditengah kesibukan saya masih bisa menulis karya ini. Mudah-mudahan Allah akan tetap melimpahkan rahmat-Nya pada saya, sehingga proses kreativitas dan produktivitas masih diberikan pada saya.

Buku ini berawal dari penelitian (desertasi) yang merupakan syarat bagi selesainya program doctoral yang saya tempuh. Pengerjaannya cukup melelahkan, meskipun juga ada suka dan duka ketika meneliti maupun menuliskan laporan berupa tulisan yang harus dipertanggungjawabkan. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana proses terbentuknya relasi sosial antara kiai dengan pejabat pemerintah di kota Kediri. Lalu saya juga ingin mengetahui apa motif-motif pejabat pemerintahan kota Kediri dan Apa pula motif-motif kiai dalam membangun relasi sosial pada ranah kekuasaan masing-masing. Alhamdulillah, akhirnya juga menemukan alasan mengapa muncul klasifikasi sosial *kekiaian* dalam interrelasi pejabat pemerintah kota Kediri dengan kiai.

Harus saya akui bahwa studi sosiologis merupakan kajian yang sangat menarik bagi saya, mengingat kajian ini akan membawa kita pada pemahaman tentang bagaimana agama

adalah produk sejarah yang muncul dari masyarakat, dan ia berinteraksi dengan relasi dalam hubungan-hubungan sosial. Posisi Kiai dalam masyarakat merupakan kajian sosiologi keagamaan yang menarik. Di tengah masyarakat yang dinamis dan perkembangannya sangat cepat, saya juga ikut mencoba melihat bagaimana pola hubungan mereka dengan kekuasaan.

Mengambil kota Kediri sebagai titik pijak untuk melihat pola hubungan kiai dengan kekuasaan akan memudahkan bagi saya karena kota ini merupakan salah satu kota yang cukup diwarnai dengan nuansa religi di mana kiai banyak berperan dalam mengendalikan dinamika masyarakat. Hubungan antara kiai dengan pemerintah kota akan menghasilkan gambaran tentang pola hubungan kiai dengan kekuasaan, melihat apa motivasi kiai membangun hubungan dengan pemerintah, bagaimana pola hubungan yang dikembangkan, serta bagaimana efeknya bagi proses sosial-politik yang terjadi.

Apa yang saya uraikan dalam buku ini tak lepas dari peran para pembimbing penelitian ini. Sehingga penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, mulai dari awal penelitian, proses penulisan, sampai selesaiannya disertasi ini, terutama kepada: Rektor Universitas Merdeka Malang, Dr. Kridawati Sadhana MS, yang telah memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata tiga ini; Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Depag RI, Prof. Dr. H. Machasin atas izin dan dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang strata tiga; Prof. Dr. H. Agus Sholahudin, MS sebagai promotor dan Prof. Dr. H. Kasuwi Syaoban, M.Ag. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kearifan, disertai penataan pemikiran yang lebih sistematis dan memberikan berbagai referensi pendukung mulai proses penelitian sampai selesaiannya penulisan karya ini; Prof. Dr. I Made Weni, SH., MS sebagai kopromotor dan Ketua

Program Studi Ilmu Sosial yang telah banyak memberikan motivasi, pengarahan mulai proses penelitian sampai selesainya penulisan disertasi yang menjadi buku ini. Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE, MM, Direktur Program Pascasarjana yang memberikan izin dan motivasi selama penulis mengikuti program Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang. Seluruh dosen program doktor Universitas Merdeka Malang, antara lain: Prof. Dr. H. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA, Prof. Dr. H. Irfan Islani, MPA., Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA., Prof. Dr. Kabul Santoso MS., Prof. Dr. Salladien., Prof. Dr. H. Agus Sholahuddin, MS., Dr. Kridawati Sadhana, MS., Prof. Dr. I. Made Weni, SH., Dr. Sanapiah S. Faisal, dan Dr. Ir. Didik Kusumahadi, MS., Prof. Dr. Bonaventura, Ng, MS, Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si. kepada semuanya haturkan terimakasih atas jasa-jasanya yang telah memberikan cakrawala baru yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dalam ilmu sosial sebagai dasar untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat.

Seluruh kiai dan pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini, kami sampaikan terima kasih atas informasi dan dukungannya, serta kami mohon maaf atas kelancangan kami merekam wawancara-wawancara informal kami. Seluruh kolega dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri yang banyak memberikan masukan dan ide-ide segar untuk mengembangkan disertasi ini. Seluruh Karyawan dan staf Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang yang telah banyak membantu masalah-masalah administrasi, seluruh staf Perpustakaan Universitas Merdeka Malang, staf Perpustakaan STAIN Kediri, staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan bantuan penelusuran literatur.

Ucapan terimakasih tak lupa saya haturkan pada seluruh keluarga besar penulis, terutama istri kedua Hj. Sri Lestasi S.Pd., atas dorongan, pengorbanan waktu dan perhatian yang tersita

akibat mengikuti program doktor ini. Lebih khusus pada Ibunda tercinta Hj. Siti Niswatin yang selalu memberi dorongan spirit pada penulis. Pada almamater ruhani penulis, Nahdlotul Ulama (NU) Kota Kediri, yang banyak memudahkan terlaksanannya penelitian dan penulisan karya ini—sekaligus memberikan inspirasi secara terus-menerus—, juga saya ucapkan terimakasih yang dalam dan tulus.

Segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan oleh semua pihak semoga menjadi amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa penjelasan, uraian, eksplorasi yang terekam dalam penelitian ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan demikian penulis persilahkan kepada segenap pembaca untuk melakukan verifikasi ulang atas temuan-temuan dalam penelitian ini, sehingga semakin memperkaya literatur dunia kiai dengan segala pernik-perniknya, serta akan menambah studi sosial di negeri ini. Penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam dan bagi kita semua, amin.

Kediri, 11 Februari 2018,

Ahmad Subakir

PENGANTAR

Prof. Dr. H. Ridwan Nasir, MA

Sungguh berbahagia saya diberi kesempatan untuk menuliskan kata sambutan terhadap terbitnya buku yang berasal dari desertasi ini. Pertama-tama, saya sungguh mengapresiasi karena hasil penelitian yang dibukukan ini memberikan gambaran tersendiri tentang kajian mengenai posisi Kiai dalam kancah politik. Berikutnya, kajian dari hasil penelitian ini jelas akan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sosial, budaya, khususnya masalah hubungan antara agama dan masyarakat yang terus saja mengalami dinamika yang luar biasa.

Dalam situasi politik negara yang tambah ruwet sekarang ini, posisi Kiai dan Ulama amatlah dipertaruhkan (*in a stake*). Kenapa demikian, karena wilayah politik seringkali menjadi ajang bagi kegiatan yang identik dengan upaya beroleh kekuasaan semata—dan seringkali kekuasaan itu tak berpihak pada rakyat. Dan ketika Ulama atau Kiai berhubungan dengan politik dan kekuasaan, maka setidaknya bukan hanya citra suatu sosok manusia atau kelas tertentu yang tampak, tetapi juga memunculkan citra terhadap agama (Islam). Karena Ulama dan Kiai adalah orang yang berada pada garis depan penampakan keberagaman di masyarakat.

Harus diakui bahwa peran Kiai dan Ulama dalam politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (negara). Karenanya juga akan diketahui hubungan Islam dengan negara. Dan seringkali

Islam dan para ulama atau kiainya larut dalam kepentingan politik negara tersebut. Kajian tentang hal itu banyak mengingatkan kita pada fenomena Kiai dan Ulama di jaman Orde Baru Soeharto. Menurut Muhammad Asfar (*Ulumul Qur'an*, Vol. VI/No. 5/Thn. 1996), setidaknya ada tiga fenomena yang menandai kenyataan hegemoni negara atas agama Islam. Pertama, adanya fenomena kebulatan tekad yang dilakukan ulama. Seringkali dalam peristiwa pemilihan umum dan pencalonan presiden selalu didahului dengan kegiatan dukungan atau kebulatan tekad yang dilakukan ulama terhadap calon presiden atau wakilnya. Bahkan dalam situasi “kritis” dan menentukan ulama dapat dijadikan sebagai alat legitimasi (sumber dukungan) oleh pihak penguasa.

Kedua, fenomena sowan politik yang dilakukan ulama ke pejabat-pejabat tinggi baik pusat maupun daerah. Bahkan tindakan tersebut dianggap sebagai pijakan atau strategi perjuangan politik umat. Sowan politik ini—yang kadang juga merupakan kunjungan pejabat ke pesantren atau komunitas agama—dianggap mempunyai arti penting bagi kemaslahatan umat di bawahnya.

Ketiga, adanya fenomena di kalangan ulama atau elit agama untuk mencari legitimasi ke pusat kekuasaan jika terjadi konflik di antara sesamanya. Sebagai kompensasinya, pencarian dukungan pada kekuasaan itu sama saja berarti memberi dukungan pada kekuasaan tanpa melihat bagaimana wajah kekuasaan yang dijalankan. Seringkali konflik kepentingan di antara elit organisasi massa Islam dicarikan legitimasi ke pemerintah, bukan diselesaikan dengan mekanisme demokratis berdasarkan suara dari bawah. Fenomena usaha pendongkelan terhadap Gus Dur, gejala pasca mukhtamar Cipasung dengan munculnya sikap tidak puas kelompok Abu Hasan, misalnya, dicurigai banyak kalangan rekayasa pihak pemerintah Orde Baru.

Di era pasca-Orde Baru, keberpihakan kiai pada kekuasaan tidak begiti monolitik. Meskipun demikian, watak elitisme para

kiai nampaknya memang sulit untuk dihilangkan. Konflik antar kiai secara tak terelakkan juga terjadi ketika berebutan untuk kekuasaan seperti kasus konflik Gus Dur dengan Hasyim Muzadi, di tingkatan bawah (basis) juga terjadi friksi politik antar kiai. Friksi kiai tidak sera merta diikuti dengan friksi di tingkatan massa pada pemilu 2004 kemarin, bahkan basis kiai dan ulama di Jawa Timur tidak memenangkan calon dari para kiai, suara mayoritas justru dilimpahkan pada pasangan SBY-Jusuf Kalla. Sekali lagi muncul tesis bahwa kepolitikan kiai tidak begitu diminati oleh masyarakat.

Politik uang inilah yang nampaknya akan menjadi godaan kiai untuk menjalankan fungsi moral-etiknya yang selama ini dilihat oleh masyarakat, khususnya orang-orang yang mematuhiinya. Kalau kiai tidak mampu menahan godaan politik uang dalam berbagai macam pencatutan politik, bahkan jika moral etika dan agama yang diajarkannya tidak bisa mengatasi atau setidaknya mencegah tindakan korupsi atau berbagai *abuse of power*, di masa depan akan terjadi perubahan norma-norma yang terjalin dalam hubungan kiai dengan masyarakat.

Dari kondisi itu, jujur, tak sedikit banyak kalangan yang berharap agar Kiai dan Ulama menjauh dari peran politik kekuasaan, terutama yang membuat posisinya elitis dan jauh dari basisnya (posisi kulturalnya). Kalau kiai dikatakan sudah meninggalkan pesantren dan lebih asyik dengan "mainan" bernama jagat politik, tentulah kiai itu akan marah dan berapi-api memberikan apologi. Peralnya, perkataan demikian identik dengan memperlakukan kiai tak lebih lebih dari "raga yang kehilangan makna" atau mencemari citra sakral kekiaian dirinya. Kiai telah dijebloskan dalam dimensi "nihilisme nilai".

Kiai berpolitik atau sebagai *broker* politik di Indonesia bukanlah fenomena yang baru. Sejak proses pembentukan negara Indonesia, kiai cukup memiliki peran penting. Selain mengurus pondok pesantren, di jaman perjuangan mereka juga terlibat

dalam pengorganisasian massa. Bahkan hingga pemilu 2004 yang lalu, posisi dan peran kiai dalam politik masih cukup terasa.

Peran kiai dalam politik, terutama sebagai simpul massa atau patron, lahir karena hubungan kiai dengan masyarakat diatur oleh norma-norma yang diambil dari pemahaman mereka tentang agama dan juga adat istiadat. Di Jawa Timur, terutama daerah “tapal kuda”, norma-norma yang lahir dari pemahaman para kiai tersebut sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Tetapi perubahan politik dan transformasi masyarakat secara luas juga diikuti oleh perubahan-perubahan dalam hubungan kiai dengan massanya, termasuk perubahan norma-norma yang ada. Perubahan norma ini terkait dengan perubahan penafsiran kembali atas agama dan adat-istiadat. Dikaitkan dengan adat karena keterkaitan orang Jawa terhadap Islam—yang dinyatakan oleh Mark Woodward dalam bukunya “*Islam Jawa*” sebagai “kekuatan dominan keyakinan dan ritus keagamaan mereka serta pembentuk sifat dasar interaksi sosial kehidupan keseharian mereka”—juga mempengaruhi perubahan-perubahan dalam dunia sosial yang lebih luas yang terkait dengan pemahaman baru orang Jawa terhadap Islam.

Menurut Dr. Endang Turmudi dalam *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan* (2004), perubahan dalam norma dan struktur sosial yang lebih luas ini sangat krusial sekaligus melahirkan pertanyaan berkaitan dengan munculnya sebuah tatanan baru yang mengatur pola baru hubungan antar kiai dan masyarakat atau antara berbagai segmen dalam masyarakat Jawa, termasuk di dalamnya adalah pengakuan berbagai kelompok yang ada terhadap “lokasi sosial” baru mereka. Perubahan struktur yang luas telah, di satu sisi, melahirkan aturan hokum dan sosial politik baru seperti Pilkada langsung sekarang ini; tetapi di sisi lain, perubahan-perubahan sosial itu juga memicu pemahaman dan pemikiran baru. Misalnya di lingkungan ulama dan kiai mulai muncul generasi kiai muda yang kritis, demokratis, dan berbau modern yang juga memunculkan antitesis dari norma-norma

lama. Meskipun kiai tetap berfungsi sebagai sentral informasi dan bimbingan masyarakat, lahirnya generasi baru kiai yang kritis ini bukan hanya melahirkan kalangan Islam muda yang kritis juga terhadap kepemimpinan kiai, tetapi juga memberikan alternatif mengenai adanya bentuk-bentuk kepemimpinan yang lain. Dengan demikian, posisi kiai dan pola kepemimpinan kharismaniknya akan berubah secara tak terelakkan.

Generasi baru kiai dan kaum muda Islam yang kritis juga menggoyahkan posisi kiai yang terhormat dan sakral. Era transisi menuju demokrasi yang telah (dan sedang) berlangsung sekarang ini telah membebejati pola-pola kepemimpinan dan hubungan kekuasaan yang lama. Tumbangnya rejim represif di bawah Orde Baru, yang juga dilegitimasi oleh sebagian besar generasi tua kiai, juga memberanikan masyarakat untuk mengkritik kiai kalau terbukti salah, misalnya yang korup atau mengambil uang dari harta wakaf yang dikelolanya.

Studi dalam buku ini memang tidak mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan itu, tetapi berangkat dari upaya meneliti kembali bagaimana motif Kiai dalam berhubungan dengan pemerintah serta apasaja modal sosial yang digunakannya; kemudian menghasilkan pola-pola relasi yang dapat dilihat antara Kiai dan Pemerintah (dalam hal ini mengambil tempat penelitian di Kota Kediri).

Saya sepakat bahwa kadangkala kecurigaan yang terlalu besar pada Kiai—mungkin akibat dari praktek-praktek hubungan Kiai dengan kekuasaan yang kadang terlalu digeneralisir—akan membawa pada pandangan yang kurang objektif. Antara kiai satu dan lainnya tidak sama. Tetapi pola-pola relasi kiai dengan masyarakat dan kekuasaan tentunya harus diteliti seiring dengan perubahan yang ada di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2008-2009 yang kira-kira Indonesia telah mengalami banyak perubahan, terutama sejak Orde Baru dianggap berakhir dengan jatuhnya

presiden kedua RI, Soeharto. Pun upaya reformasi telah beranjak lebih dari satu dekade. Pola-pola lama kiai dan kekuasaan yang dibangun oleh politik Orde Baru yang korporatis telah rontok. Kiai tak sepenuhnya terhegemoni oleh negara. Dilihat dari orientasi politiknyapun semakin bervariasi.

Karena itulah, studi pola hubungan Kiai dengan pemerintah daerah (sebagai representasi negara) yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Subakir ini layak untuk diapresiasi. Orde Baru yang membuat kekuasaan sentralistik, diganti dengan otonomi daerah yang membuat kekuasaan negara berpindah ke daerah (kabupaten dan kota) juga akan membawa konstelasi politik yang tentu berbeda pula dari jaman dulu. Kondisi sosio-ekonomi daerah memberi basis bagi tingkah-laku politik masyarakatnya. Dengan demikian relasi kuasa antara kiai dengan pemerintah daerah (kota) tentu menunjukkan gambaran yang seharusnya kita ketahui.

Untuk keperluan itu, penelitian yang dapat kita baca dalam buku ini amatlah berguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kiai berrelasi atas dasar perintah agama sementara pejabat pemerintah mendasarkan kepentingan tugas-tugas pemerintahan dan menjaga keseimbangan stabilitas sosial. Dari sinilah kemudian melahirkan perubahan tata nilai *amar ma'ruf nunkar*. Perubahan tata nilai menjadikan kiai mulai melakukan kalkulasi dalam membangun relasi dengan pejabat, siapa mendapatkan apa. Sekalipun demikian perubahan tersebut tetap dalam bingkai fikih.

Relasi tersebut berimplikasi bagi kedua belah pihak, artinya terjadi simbiosis mutualisme, pejabat pemerintah mudah melaksanakan program-programnya, kiai ikut serta menjadi mediator konflik di tengah-tengah masyarakat, kiai mengembangkan *Syiar* Islam mendapat *back up* dari pemerintah, akses kiai dalam pemerintahan semakin besar, kiai sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan implikasi yang nyata adalah adanya bantuan fisik mengalir ke pesantren, masjid, mushalla, jamaah atau kelompok binaan kiai.

Hasil penelitian yang mungkin unik dan bernuansa lokalitas adalah pola dimana relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri telah melahirkan klasifikasi kiai sesuai dengan teritorial pejabat pemerintah, sehingga muncul *Kiaine Camat*, *Kiaine Walikota*, *Kiaine Gubernur*. Munculnya kelas-kelas kiai ini karena pejabat pemerintah dalam teritorial tertentu memerlukan kiai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. *Kiaine Camat* adalah kiai yang menjadi mitra camat dalam menjalankan tugas-tugasnya, kalau ada masalah dalam teritorial tersebut maka kiai akan diajak serta dalam penyelesaiannya, begitu juga dengan *Kiaine Walikota*. Klasifikasi itu terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah karena kiai memegang mandat surat keputusan menjadi pengurus NU. Tetapi juga karena Kiai memiliki kualitas pribadi, misalnya keturunan kiai, kemampuan menguasai kitab kuning, lulusan pesantren X, latar belakang pendidikan. Seringkali, aktifitas sosial politik yang dilakukan kiai juga menjadi modal sosial. Semakin luas aktifitas yang diikuti oleh kiai, maka akan semakin menunjukkan tingginya kelas kiai. Klasifikasi ini juga menunjukkan bahwa semakin lengkap kharisma seorang kiai, maka ia akan dengan mudah naik dari satu ke kelas yang lebih tinggi.

Sebuah ikhtiar yang luar biasa dari saudara Subakir sebagai seorang peneliti sekaligus pemimpin sekolah tinggi agama, buku ini diharapkan menjadi kajian yang melengkapi kajian-kajian tentang Kiai yang telah ada. Terbitnya buku ini kita harapkan akan memperkaya analisa sosial kita mengenai agama dan posisi-posisi yang berkaitan dengan status sosial-budaya berbasis agama. Selamat pada saudara Ahmad Subakir. Selamat membaca!

Surabaya, 28 Januari 2018

Prof. Dr. H. Ridwan Nasir, MA

GLOSSARY

- Akherat : Hari kemudian, alam kehidupan setelah mati.
- Ansor : Atau Gerakan Pemuda Ansor, nama gerakan organisasi kepemudaan NU
- Asas tunggal : Prinsip dalam ideologi nasional, Pancasila, yang diberlakukan sebagai asas tunggal bagi semua partai politik dan organisasi massa pada tahun 1985
- Bait al mal wa al tanwil*** : Perbendaharaan umat islam
- Barokah : Bertambahnya kebaikan
- Baziz : Singkatan dari Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah
- Bengkrengan : Pertengkaran
- Bid'ah : Praktik ibadah yang telah bercampur dengan kebudayaan lokal atau praktek ibadah yang tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun hadis
- Brandal*** : Orang yang suka berlaku onar

Da'i	: Juru dakwah
Dakwah	: Seruan, ajakan kepada agama Islam
Dakwah	: Kegiatan penyebaran ajaran agama Islam
Dewan Syuro	: Dewan penasehat
Diayahi	: Diemban, dipikul, dilaksanakan (suatu pekerjaan atau tugas)
Diniyah	: Bersifat keagamaan
Diniyah	: Berarti keagamaan, dalam ungkapan <i>Sekolah Diniyah</i> , sekolah keagamaan
Disio-sio	: Ditelantarkan, dizhalimi
Elit	: Orang-orang terbaik/pilihan dalam suatu kelompok masyarakat
Falaq	: Ilmu tentang perjalanan bumi dan langit untuk menghitung hari, bulan, tahun, disebut juga ilmu perbintangan atau astronomi
Fatwa	: Petuah agama Islam
Fenomena	: Hal-hal yang bisa disaksikan oleh panca indera dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah
Fiqih	: Ajaran Islam yang menyangkut masalah hukum
Fundamental	: Yang sangat kuat mempertahankan azas atau prinsip

- Gus : Panggilan putra laki-laki seorang kiai, atau panggilan seorang kiai muda, juga berarti *bagus*. Meskipun sudah berumur, panggilan gus tetap diberikan kepada putra kiai, jika perempuan dipergunakan istilah *ning*.
- Hadis : Semua perkataan, perbuatan, ketetapan nabi Muhammad Saw.
- Hakam : Arbiter dalam penyelesaian konflik
- Haram : Dilarang dari segi hukum Islam,
- Haul : Ulang tahun kelahiran atau kematian. Di pondok pesantren, haul digunakan untuk memperingati seorang kiai yang telah meninggal dunia setiap tahun sekali
- Ibadah : Pengabdian kepada tuhan (Allah)
- Ijma' : Kesepakatan para ulama dalam masalah hukum Islam
- Imam : Orang yang memimpin Shalat berjamaah, tokoh yang dihormati di lingkungan umat Islam
- Jamaah : Golongan atau kelompok
- Jihad : Berjuang dengan berbagai cara
- Jihad fi sabilillah : Berjuang dengan berbagai cara, dengan menggunakan pikiran, penemuan, ilmu dan fisik sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

- Khatam** : Penutup atau menutup, istilah ini dipergunakan oleh santri apabila telah menyelesaikan pelajaran atas satu kitab (buku) atau al-qur'an. Khataman di pondok pesantren biasanya ditandai dengan upacara tertentu dan pesta makan minum.
- Khidmah** : Mengabdikan
- Khilafiyah** : Digunakan untuk menyebut beberapa persoalan yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam
- Kitab Kuning** : Sebutan populer untuk kitab-kitab (buku-buku) Islam klasik, yang biasanya dicetak pada kertas berwarna kuning.
- Kyai** : (Kiai yang menjadi rujukan...), *kiyai camat* adalah kiai yang menjadi rujukan camat, *kiyai wali kota* adalah kiai yang menjadi rujukan walikota
- Linuwih*** : Memiliki kemampuan (ilmu) di atas rata-rata
- Madrasah** : Sekolah, digunakan untuk menyebut sekolah yang lebih mengutamakan pelajaran-pelajaran agama Islam daripada pengetahuan umum.
- Majelis Syuro** : Pimpinan tertinggi partai Kebangkitan Bangsa

- Majelis taklim : Majelis umat Islam yang secara berkala berkumpul untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama
- Masjid : Tempat peribadatan umat islam yang minimal menampung 40 orang, memiliki fungsi yang lebih luas daripada mushala, baik sebagai tempat ibadah (shalat, khutbah), tempat pendidikan, diskusi.
- Mau'idhah hasanah : Nasehat yang baik, biasanya dimaksudkan untuk menunjuk ceramah agama (Islam)
- Mazhab : Aliran atau faham dalam agama Islam.
- Mituhu : Sikap selalu melaksanakan apa yang diperintahkan (seseorang), dalam hal kepemimpinan berarti sikap loyal kepada pemimpin yang dijadikan panutan
- Moncer : Gemilang
- Mubaligh : Juru dakwah agama Islam, yang memberikan ceramah-ceramah agama
- Mufti** : Pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam
- MUI : Singkatan dari Majelis Ulama Indonesia
- Mursyid Tarekat : Orang yang memiliki hak untuk membimbing dan membaiai anggota tarekat
- Mushola : Masjid kecil atau ruang untuk sholat
- Mustasyar : Penasehat yang terdapat di pengurus pengurus NU dalam seluruh tingkatan

Nabi	:	Orang yang diangkat oleh Tuhan menerima wahyu
Ngopeni	:	Menjaga dan memperhatikan secara seksama
Nguri-nguri	:	Menjaga agar tetap hidup
Pahala	:	Ganjaran, adalah hadiah yang dijanjikan di akherat
Panotogomo	:	Pengawal agama
Paternalisme	:	Sistem hubungan antara pemimpin dan rakyatnya seperti hubungan bapak dengan anak
Pengajian	:	Kegiatan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam
Pengajian	:	Pengajaran agama Islam yang biasanya dibimbing oleh seorang guru, ustad, kiai atau mubaligh.
Pengayom	:	Orang yang melindungi dan menjaga orang lain atau kelompok
Penghulu	:	Pejabat urusan Agama Islam di tingkat kecamatan dalam kantor Departemen Agama
Pengurus Besar	:	Pengurus NU tingkat pusat
Pengurus Cabang	:	Pengurus NU tingkat kota/kabupaten
Pengurus Ranting	:	Pengurus NU tingkat kelurahan/desa

Pengurus Majlis Wakil Cabang	:	Pengurus NU tingkat kecamatan
Pengurus Wilayah	:	Pengurus nu tingkat provinsi
Pondok Pesantren	:	Istilah yang digunakan untuk menyebut sekolah Islam tradisional. Istilah tersebut memiliki variasi di beberapa daerah. Di Jawa dan Madura digunakan istilah <i>pondok</i> ; di Aceh digunakan istilah <i>meunasah</i> , dan di Sumatera Barat digunakan istilah <i>surau</i>
Qiyas	:	Perbandingan atau analogi sebagai metode pengambilan hukum Islam
Rais 'Am	:	Jabatan tertinggi di NU pada tingkat Nasional
Ranting	:	Perwakilan NU tingkat kelurahan atau desa
Ri'asah	:	Kepemimpinan atau kekuasaan
Santri	:	Pelajar yang mendalami agama Islam di pondok pesantren
Selamatan	:	Upacara yang dilakukan untuk beberapa momen penting kehidupan keluarga untuk mohon selamat
Semaan	:	Pertemuan untuk mendengarkan (menyimak) para penghafal al-Qur'an (<i>huffadz</i>) melantunkan ayat al-Qur'an yang mereka hafal.

- Simbol : Unsur pembicaraan yang bersifat arbiter, atau yang maknanya ditentukan oleh definisi sosial dan bukan pewarisan biologis. Atau suatu temuan sosial yang menunjuk pada makna yang dianut bersama
- Sowan : Berkunjung
- Stratifikasi sosial : Kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat yang memiliki tingkat kekuasaan, privelege, dan prestise sosial yang tidak sama
- Syuriah : Struktur tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijaksanaan organisasi Nahdlatul Ulama
- Syuriah : Pimpinan tertinggi NU
- Ta'shil al ushul : Nilai-nilai universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, berbuat baik kepada sesama, kejujuran dan lain sebagainya
- Tafsir : Interpretasi terhadap al-Qur'an atau Hadis yang dilakukan oleh ulama-ulama
- Tahsilul ushul : Merealisasikan nilai-nilai universar (asasi)
- Tanfidziyah : Pelaksana tugas sehari-hari dalam NU yang mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus syuriah
- Tanfidziyah : Pelaksana organisasi NU

Tarekat	: Jalan menuju Tuhan dengan metode khas dan biasanya dikait-kaitkan dengan keberadaan tokoh sufi dan bersifat esoteris
Tasawuf	: Sufisme, mistik Islam
Tauhid	: Kemahaesaan Allah, monoteisme
Tausiyah	: Perihal memberikan nasehat atau petunjuk dalam hal agama Islam
Teologi	: Ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan
Ukhuwah Islamiyah	: Persaudaraan antar umat Islam
Umara	: Para pejabat, penguasa
Umat	: Masyarakat beragama, seluruh masyarakat muslim (istilah tersebut dalam bahasa Indonesia sering ditambahi menjadi umat Islam)
Ushul fikih	: Kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar logika dalam pengambilan keputusan di bidang hukum Islam (fiqih)
Walisongo	: Sembilan wali Jawa yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di pulau Jawa
Waliyyul amri ad-daruri bisy-syaukah	: Gelar kepada presiden Soekarno pada bulan Maret 1954 oleh para ulama Indonesia untuk memberikan pengesahan terhadap kekuasaannya

- Zakat : Sejumlah tertentu dari harta seseorang yang wajib disumbangkan kepada yang berhak
- Ziarah : Kunjungan ke makam para wali atau leluhur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	iii
SAMBUTAN	vii
GLOSSARY	xv
DAFTAR ISI	xxv
1. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Masalah yang Mengemuka	9
Kerangka Konseptual	10
Pendekatan Penelitian	18
Lokasi Penelitian	21
Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan	23
Data yang Diperlukan	24
Sumber Informasi	25
Teknik dan Instrumen Pengumpul Data	27
Keabsahan dan Kerangka Analisis Data	29
Penarikan Kesimpulan	36
2. WACANA TENTANG POSISI KIAI DAN BIROKRASI DALAM DINAMIKA RELASI KUASA DAN MASYARAKAT	37
Kiai: Asal-Usul Istilah dan Variannya	37
Kiai dan Nahdhatul Ulama'	48

Bentuk-Bentuk Peran Kiai	53
Orientasi Sosial Politik Kiai	60
Tiga Jenis Politik Kiai.....	63
Pejabat, Birokrasi dan Karakteristiknya	65
Pasang Surut Relasi Kiai dan Pejabat	69
Perspektif Relasi Kiai-Pejabat dan Teori Terkait.....	73
Perubahan Sosial Perspektif Dinamika Relasi Kiai-Pejabat	81
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	84
3. RELASI KIAI DAN PEJABAT DI KOTA KEDIRI.....	95
Demografi Lokasi Penelitian.....	95
Kehidupan Umat Beragama	99
Relasi Kiai dan Pejabat Pemerintah Kota Kediri	102
Relasi Birokrat Pemerintah Kota Kediri dan Kiai	136
Bentuk-Bentuk Peran Sosial Politik dan Relasi Kiai di Kediri	164
Ringkasan Temuan Hasil Penelitian.....	170
4. HASIL PENELITIAN.....	175
Proses Inter-Relasi Kiai dan Pejabat Pemerintah Kota Kediri	176
Motif Kiai Menjalin Relasi dengan Pemerintah	180
Motif Pejabat Membangun Relasi dengan Kiai	194
Implikasi Relasi Kiai dan Penguasa	197
Sumber Kewibawaan Kiai	206
Rekonstruksi Model Teoritik	213
DAFTAR PUSTAKA.....	219

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kiai adalah sebutan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Istilah ini merujuk kepada tokoh tertentu yang memiliki kemampuan yang memadai dalam ilmu agama (Islam). Karena kemampuannya yang demikian itu, kiai mendapatkan pengakuan dan memperoleh penghormatan yang lebih di tengah-tengah masyarakat.

Menurut penuturan Zamakhsyari Dhofier (Dhofier: 1982; 55) awalnya sebutan kiai dimaksudkan untuk menunjuk pada tiga obyek, ketiga obyek itu adalah; *Pertama* kiai diperuntukkan untuk gelar benda pusaka atau sesuatu yang dikeramatkan, misalnya *Kiai Selamet*, sebagai nama bagi kerbau milik Keraton Solo yang dikeramatkan, Kiai Garudayaksa, Kiai Jaladara, Kiai Ratapralaya dll, adalah pusaka di Keraton Yogyakarta.

Kedua, sebutan ini diberikan sebagai gelar orang tua pada umumnya, yang biasanya di tulis dengan Ki, sebagaimana sebutan kepada Ki Hajar Dewantoro, Ki Bagus Hadi Kusumo dll. *Ketiga*, sebagai gelar yang diberikan kepada ahli agama Islam

yang memiliki pesantren dan mengajarkan ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab kuning (klasik) kepada santrinya.

Sebenarnya, istilah kiai untuk menyebut seorang ulama adalah merupakan istilah *khas* masyarakat Jawa. Karena individu-individu masyarakat Jawa sangat dominan di pentas nasional Indonesia dalam berbagai masalah, utamanya masalah yang menyangkut dakwah dan pengembangan agama Islam, maka istilah kiai kemudian juga digunakan oleh masyarakat selain Jawa.

Istilah kiai setara dengan *ajengan* di Jawa Barat, (Yoga Adiana Attarmizi, M. Yazid Kalam:1999) *Tuan Guru* di NTB, *Mulla* di Afghanistan, Syaikh di tanah Arab (Rifa'i. M Romli,:2005). Istilah kiai sendiri tidak mesti merujuk pada mereka yang ahli dalam bidang agama dan memiliki pesantren. Istilah tersebut juga diberikan kepada guru ngaji atau imam masjid yang pengetahuan agamanya "lebih" dibanding masyarakat sekitarnya. Lebih dari itu semua, yang penting adalah pengakuan masyarakat sendiri kepada mereka yang dianggap kiai (Moesa, Ali Maschan: 2008: 60).

Disamping pengakuan, faktor penting bagi kekaiian seseorang, menurut Greg Fealy unsur lain yang juga menentukan adalah pesantren. Pesantren adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut sekolah Islam tradisional. Istilah tersebut memiliki variasi di beberapa daerah. Di Jawa dan Madura digunakan istilah *pondok*; di Aceh digunakan istilah *meunasah*, dan di Sumatera Barat digunakan istilah *surau* (Fealy, Greg. 2003:23).

Sampai pada era 1980-an profil dan sosok kiai bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya, berperan sebagai tokoh sentral yang memiliki wewenang (meski tidak formal) yang amat sangat luas sekali yang tidak hanya terbatas pada wilayah agama atau spiritual saja, akan tetapi juga merambah hampir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kiai juga berperan dalam masalah ekonomi, dalam penguasaan lahan persawahan misalnya, pada awalnya umumnya

mereka memiliki sawah yang cukup luas. Demikian juga halnya dalam masalah sosial politik yang cukup pelik. Sebagai pemimpin agama, kiai memiliki peran penting di tengah-tengah masyarakat. Bahkan sejak masa penjajahan Belanda, sebut saja KH. Mas Mansur, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Kahar Muzakkir —untuk menyebut beberapa nama saja— adalah para kiai yang sangat berperan dalam memobilisir massa untuk melawan penjajah, dimana fatwa kiai dapat dengan mudah untuk menggerakkan masyarakat berjuang mewujudkan kemerdekaan.

Di tengah-tengah masyarakat mereka adalah guru bangsa, tempat merujuk segala persoalan dan di tengah-tengah percaturan politik menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, peran mereka juga cukup besar dalam berpartisipasi mendirikan negara. Dalam setiap even atau persoalan politik kiai selalu dilibatkan, bahkan tidak jarang birokrasi (pejabat pemerintahan) mendatangi kiai untuk meligitimasi kekuasaannya. Sehingga mereka tidak hanya petani, politisi, ekonom, ahli agama tetapi juga pembuat keputusan (*decision maker*) yang cukup efektif dalam sistem sosial masyarakat Jawa. Dengan posisi seperti itu, hubungan kiai dan masyarakat bersifat paternalistik, sebagaimana bapak dan anak. Kiai sebagai bapak memiliki peran dan wewenang yang sangat besar, sedangkan masyarakat sebagai anak tidak memiliki kemampuan yang memadai di hadapan kiai (Faqih , Ahmad, 2004:131).

Istilah birokrasi menurut Blau & Meyer, (1971) dalam Setiawan berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, yang

bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktifitas-aktifitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi bersekala besar. Birokrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi kerja, prinsip hirarki, peraturan-peraturan, impersonality, kualifikasi teknis, dokumen-dokumen tertulis, dan kelangsungan kerja dalam organisasi (Setiawan, Ahmad, 1998:4-10).

Setelah reformasi berjalan satu dekade, sikap dan perilaku masyarakat belum banyak berubah, kiai masih memiliki pengaruh yang demikian kuat dalam kehidupan mereka. Memang di beberapa daerah sebagian masyarakat sudah menunjukkan sikap yang proporsional dalam memandang dan memperlakukan kiai, tapi jumlah mereka masih sangat terbatas.

Di lingkungan tertentu kiai memiliki peran dominan, ia menempati posisi elit. Saat Pemilu tiba atau Pilkada Jawa Timur misalnya, para petinggi partai politik berebut berkunjung ke sejumlah kiai, bahkan, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung pada akhir Ramadan tahun 2003 sempat bersilaturahmi kepada Kiai Fawaid dan Kiai Hasan yang ujung-ujungnya adalah meminta dukungan politik dari para kiai, dengan harapan masyarakat pengikut dua kiai tersebut memberikan suara mereka kepada partai atau calon tertentu (Suara Merdeka: 1 Desember 2003). Ini menunjukkan bahwa sampai kini kiai masih dianggap “mesin pendulang suara” yang bisa menggiring suara umat kepada partai atau calon kepala daerah tertentu (Sofyan, Ahmadi, 2006). Dalam konteks kajian ilmu politik, tokoh demikian disebut elit, dan ia merupakan kebutuhan setiap masyarakat.

Realitas di tengah masyarakat menunjukkan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok orang yang memiliki kualitas tertentu yang ia kuasai dengan baik, sementara kehadiran soial politik mereka sangat diperlukan. Konsepsi tentang elit ini pada saatnya melahirkan situasi sosial baru yang mencerminkan adanya dinamika masyarakat, karena dalam struktur masyarakat

dalam menjalani tatanan kehidupannya akan ada orang yang memerintah dan kelompok yang diperintah (Ummatin, Khoiru: 2002: 23). Dengan demikian hubungan antara kiai dan masyarakat telah lama terlembagakan dalam bentuk norma patron-klien.

Pola patronase antara kiai dan masyarakat ini tidak terbatas oleh wilayah teritorial, bahkan bisa lintas kota dan provinsi. Hal ini terjadi karena beberapa masalah yang bisa diselesaikan oleh kiai, diantara beberapa hal itu bisa disebut antara lain:

- 1) Santri yang belajar di sebuah pesantren tidak hanya datang dari satu kota, tetapi lintas kota, bahkan lintas provinsi dan lintas Negara.
- 2) Santri yang telah lulus kemudian mendirikan pesantren untuk masyarakat sekitarnya. Jaringan antara kiai dan santri —yang kemudian mendirikan pesantren semakin meluas— itulah aset yang dimiliki institusi kiai.

Pengaruh kepemimpinan dan jaringan kiai yang semakin luas memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar, baik pemerintah maupun partikelir. Keberadaan dan posisi kiai yang demikian ini memudahkannya untuk berperan sebagai “agen” penyampaian pesan-pesan “pemerintah” tentang pembangunan misalnya, dan dalam beberapa kasus masyarakat lebih mudah menerima program pembangunan dan program pemerintah bila disampaikan oleh seorang kiai. Hal ini menunjukkan betapa “kiai” dalam konstruksi klasifikasi masyarakat Jawa memiliki posisi cukup istimewa.

Pejabat pemerintah menyadari posisi kiai yang begitu menentukan dalam mempengaruhi tindakan masyarakat dan dalam membimbing mereka untuk menerima langkah-langkah tertentu, atau kebijakan tertentu dari pemerintah, maka bisa dimengerti bila pejabat pemerintah juga memperlakukan kiai sedemikian rupa, sehingga membentuk jalinan relasi dengan kiai dalam menjalankan roda pemerintahan yang sedang mereka emban.

Secara riil, baik kiai dan pemerintah memiliki kekuasaan di tengah masyarakat. Kiai memiliki kekuasaan dalam bidang agama karena kultur dan budaya, sementara pejabat memiliki kekuasaan karena undang-undang. Maka kedua belah pihak menjalin kerjasama untuk tujuan tertentu, bahkan kadang mereka menggunakan kekuasaannya untuk saling menawar dan mencari keuntungan. Dari perspektif ini, kekuasaan kiai cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan sosial-politik masyarakat, karena kiai telah lama menjadi “rujukan” dalam masalah-masalah agama (Islam), bahkan umat Islam di Indonesia untuk melakukan hal-hal duniawi membutuhkan legitimasi kiai, dalam hal menentukan hari pernikahan atau hari untuk memulai usaha, misalnya masyarakat sering meminta nasehat kiai. Peran kiai yang demikian, sering disebut “legitimitor keagamaan”.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, program Keluarga Berencana (KB) dianggap sukses dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Dan untuk meraih kesuksesan ini, peran dan andil kiai sangat besar. Sebagai mitra pemerintah, peran tersebut terus berlanjut sampai sekarang, bahkan dalam beberapa konflik di daerah, pemerintah selalu menjadikan kiai sebagai mediator. Dalam sebuah konflik antara NU dan Muhammadiyah di Wonosobo yang terjadi akibat perbedaan pilihan partai, pemerintah tidak mampu melakukan *win-win solution*, KH Muntaha— salah seorang kiai pengasuh pesantren di daerah itu— menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik tersebut (Mubin, Nurul:2006: 74; Haramain, Malik dan MF Nur Huda, 1999). Kedua belah pihak yang bertikai akhirnya bisa menerima solusi yang diberikan oleh kiai tersebut.

Di sinilah kiai berperan sebagai stabilisator untuk menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai patron, kiai selalu mendapatkan posisi lebih di tengah-tengah masyarakat, bahkan di sejumlah daerah seperti Madura misalnya, masyarakatnya dikenal sangat relegius sosok dan figur kiai lebih

didengar suaranya daripada pemerintah yang mempunyai otoritas formal. (Nurhasim, Moch.:2005: 27-76).

Tak heran jika dalam perspektif sosiologis konstruk bangunan relasi sosial antara kiai dan pejabat menjadi bahasan yang sangat menarik bagi penelitian sosial, karena didalamnya terdapat dua tumpu kekuasaan yang berbeda di tengah masyarakat menyatu dalam sebuah relasi. Penelitian Pradjarta Dirdjosanjoto (1993:155-159) menemukan adanya sumber kewibawaan kiai terdiri dari lima faktor: *Pertama* superioritas dalam bidang agama yang melebihi orang awam. Implikasinya kiai tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama tetapi juga memiliki kekuatan supranatural.

Kedua, sebuah kenyataan menunjukkan bahwa kiai (pesantren) tidak hanya berkedudukan sebagai guru, pemimpin pesantren, tetapi sekaligus sebagai pemilik pesantren. Kedudukan ini memberikan otoritas yang sangat kuat di lingkungan pesantren. *Ketiga*, adanya jaringan antar kiai yang bersumber dari beberapa basis pesantren dengan jaringan perkawinan merupakan simbol jaringan yang paling menonjol, sehingga di antara kiai pesantren memiliki hubungan kekerabatan dengan kiai pesantren lainnya.

Keempat, adanya relasi kiai dengan pemerintah dan pusat-pusat kekuasaan di luar seperti partai politik, organisasi (NU) dan LSM. Relasi-relasi tersebut merupakan basis kekuasaan kiai. *Kelima*, kualitas pribadi seorang kiai dalam menguasai materi hukum Islam dan juga adanya garis keturunan dengan kiai terdahulu. Masyarakat berkeyakinan bahwa orang yang memiliki garis keturunan dengan kiai (Gus-Ning) memiliki ilmu *laduni* (A Busyairi Harits, 2004) atau ilmu pemberian Allah yang diberikan sejak lahir (Dirdjosanjoto, Pradjarta 1999: 155-158).

Dari lima sumber di atas kenyataannya tidak semua kiai memilikinya kelima-limanya. Namun semakin lengkap sumber kewibawaan yang dimiliki kiai semakin tinggi pula wibawa seorang kiai. Sumber-sumber kewibawaan akan mengantarkan

kiai berada pada level lokal, nasional bahkan internasional, dan level-level itu sangat bergantung pada kesempurnaan sumber kewibawaan yang dimiliki.

Relasi yang dibangun antara kiai dan pejabat pemerintah kadang terjadi sedemikian rupa, ada timbal balik antar kedua belah pihak, di satu sisi birokrasi memperoleh keuntungan, karena program-program kerja pemerintah bisa berjalan, di sisi lain misi kiai untuk melakukan syiar atau dakwah Islam mendapat dukungan dari penguasa setempat.

Peneliti menyadari penelitian dengan tema besar kehidupan kiai telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian ini berusaha melengkapi temuan penelitian-penelitian sebelumnya tentang relasi kiai dan penguasa, dan penelitian ini menjadi menarik karena di beberapa tempat ada sejumlah kiai yang memiliki peran ganda (*multiple roles*) —sebagai pejabat pemerintah dan kiai sekaligus.

Menguraikan kehidupan kiai tidaklah mudah, karena ada cukup banyak tembok yang harus dilalui ketika kehidupan kiai digelar dan dibeber. Penentangan tidak hanya datang dari institusi kiai tetapi juga dari para pengikut yang memiliki loyalitas cukup tinggi dan orang-orang yang merasa kepentingannya terusik, bisa penguasa politik, petinggi partai maupun pejabat pemerintahan.

Latar belakang dan orientasi kiai berrelasi dengan pejabat, secara merata mendasarkan orientasinya pada kerangka *amar makruf nahi mungkar* dan ini merupakan perintah agama, maka apa yang dilakukan oleh kiai dalam menjalin relasi dengan pejabat dimaknai sebagai pengembangan *Syi'ar dan Dakwah* Islam yang tengah diemban oleh kiai.

Namun dalam aplikasinya ada beberapa strategi yang berbeda antara satu kiai dengan kiai lainnya dalam relasi ini. Ada yang bisa lebih dari sekedar menjadi *balance* dari sebuah kekuatan pejabat dan ada yang bisa menjadi kontrol, dan ada juga yang bisa bertindak sebagai pengendali dari rancangan

program kebijakan yang menyangkut banyak orang. Kesemuanya ini bergantung pada tingkat kewibawaan dan posisi tawar kiai dimata pejabat yang bersangkutan.

Buku ini adalah hasil penelitian tentang posisi penting kiai dalam relasinya dengan kekuasaan. Sudah jamak diketahui bahwa hubungan kiai dan masyarakat bersifat paternalistik, sebagaimana bapak dan anak. Dengan mengambil tempat penelitian di Kota Kediri, ditemukan gambaran tentang bagaimana pejabat pemerintah kota Kediri menjalin relasi dengan kiai. Ada tradisi saling mengundang antar kedua belah pihak, misalnya dalam acara PHBN, pelantikan pejabat, kiai diundang oleh pejabat, begitu juga ketika dalam acara keagamaan, pejabat diundang oleh kiai. Tradisi saling mengundang berlanjut menjadi tradisi saling mengunjungi yang kemudian tercipta interrelasi.

MASALAH YANG MENGEMUKA

Penelitian yang kemudian saya bukukan ini diawali dengan upaya untuk menjawab masalah pokok berikut: *pertama*, pola hubungan dan bentuk relasi sosial yang terbangun dalam interrelasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri. *Kedua*, Alasan-alasan terbangunnya relasi kiai dan Pejabat pemerintah kota Kediri. *Ketiga*, Dampak relasi bagi kiai dan pejabat pemkot Kediri. *Keempat*, Terjadinya klasifikasi kiai dalam relasi tersebut.

Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab:

1. Bagaimana proses terbentuknya relasi kiai dengan pejabat pemerintah Kediri ?
2. Apa motif-motif pejabat pemerintahan kota Kediri dan Apa pula motif-motif kiai dalam membangun relasi sosial pada ranah kekuasaan masing-masing ?
3. Mengapa muncul klasifikasi sosial *kekiaan* dalam interrelasi pejabat pemerintah dengan kiai ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomen-fenomen sebagaimana fenomen-fenomen itu sendiri yang menyingkapkan diri kepada kesadaran. Penelitian bertolak dari subjek (manusia) serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada “kesadaran murni”. Untuk mencapai bidang kesadaran murni, peneliti membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Dengan demikian fenomenologi dapat dijelaskan sebagai metode kembali ke benda itu sendiri (*Zu den Sachen Selbst*), demikian terjadi karena benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni.

KERANGKA KONSEPTUAL

Hasil penelitian ini menunjukkan relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri disadari sepenuhnya oleh masing-masing pihak sekalipun antara kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri memiliki *concern* dan tugas yang berbeda, relasi tersebut telah menghasilkan pola hubungan simbiosis mutualis. Hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Landasar berpikir kiai membangun relasi didasarkan atas perintah agama, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun dalam perjalanan panjangnya *amar ma'ruf* sedikit bergeser, karena pejabat membangun relasi hanya demi kepentingan tugas-tugasnya dalam pemerintahan. Di sinilah kemudian yang melahirkan perubahan tata nilai *amar ma'ruf munkar*. Perubahan tersebut menyebabkan kiai mulai melakukan kalkulasi atau hitung-hitungan dalam relasi tersebut, siapa mendapatkan apa. Sekalipun demikian perubahan tersebut tetap dalam kerangka kaidah *Ushul fikih*. Dalam kaidah fikih menyatakan: *legitimasi hukum menyangkut hal-hal atau perilaku tertentu tergantung pada penyebabnya*.

Relasi ini membawa dampak bagi masing-masing pihak, ini artinya telah terjadi simbiosis yang sedemikian rupa sehingga

kiai menjadi mitra pejabat pemerintah dalam mensosialisasikan program-programnya, kiai ikut serta menjadi mediator konflik di tengah-tengah masyarakat, di sisi lain kiai juga mendapatkan keuntungan. Syiar Islam mendapatkan *back up* dari pemerintah, akses kiai dalam pemerintahan semakin besar, sehingga kiai selalu dilibatkan, dan bantuan fisik mengalir ke pesantren, masjid, mushalla, jamaah atau kelompok yang menjadi binaan kiai.

Relasi kiai dan pejabat memunculkan klasifikasi kiai sesuai dengan teritorial pejabat pemerintahan, sehingga muncul istilah Kiaine Camat, Kiaine Walikota, Kiaine Gubernur. Munculnya klasifikasi kiai ini karena pejabat pemerintah dalam teritorial tertentu memerlukan kiai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Klasifikasi itu muncul karena beberapa hal, a) Mandat menjadi pimpinan atau Pengurus dalam organisasi NU, b) Kualitas pribadi, misalnya keturunan kiai, kemampuan menguasai kitab kuning, lulusan pesantren tertentu, latar belakang pendidikan, c) aktifitas sosial politik, semakin luas aktifitas yang diikuti maka semakin tingginya kelas kiai. Semakin lengkap kharisma seorang kiai, maka mudah naik dari satu ke kelas yang lebih tinggi.

Pada tataran teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah perbendaharaan ilmu-ilmu sosial tentang relasi kiai dan pejabat pemerintah (penguasa). Sekalipun relasi ini pernah diwarnai konflik namun tetap menghasilkan simbiosis mutualis antara kedua belah pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kiai dan pejabat pemerintah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hubungan yang harmonis antara kiai dan pejabat, menjadi preseden baik bagi masyarakat. Pada tataran praktis hasil penelitian bermanfaat untuk membangun relasi yang sama di daerah atau kawasan lain yang memiliki budaya paternalistik sebagaimana di kota Kediri.

Ada beberapa proposisi yang saya lontarkan dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, pola hubungan antara kiai dan pejabat

pemerintah (penguasa) bersifat simbiosis mutualis, karena ada kepentingan bersama yang menyatukan mereka. *Kedua*, alasan kiai menjalin relasi dengan pejabat adalah dalam rangka syiar agama, dengan menggandeng pejabat akan terjadi dakwah secara borongan.

Ketiga, alasan pejabat pemerintah menjalin relasi dengan kiai karena masyarakat masih menganut pola paternalistik dan kiai berposisi sebagai elit, apa yang dilakukan oleh kiai akan dilakukan oleh masyarakat. Posisi elit inilah yang menjadi alasan pejabat pemerintah menjalin relasi dengan kiai.

Keempat, adanya relasi kegiatan dakwah mendapatkan support dari pemerintah, sementara program-program pejabat (pemerintah) mendapatkan dukungan dari kiai. *Kelima*, relasi kiai dan pejabat memunculkan klasifikasi kiai sesuai dengan teritorial pejabat pemerintah, camat berrelasi dengan kiai yang mempunyai pengaruh dan kharisma pada tingkat wilayah itu, walikota berhubungan dengan kiai yang mempunyai pengaruh pada wilayah yang dalam kekuasaannya, dan demikian seterusnya.

Keenam, ada beberapa sumber kewibawaan yang bisa dimiliki kiai untuk mendapatkan pengaruh dimata masyarakat, sumber-sumber itu antara lain; Sebagai putra kiai, Kualitas pribadi, Aktifitas sosial dan politik, serta posisi pemegang jabatan tertinggi dalam strata kepengurusan organisas Nahdlatul Ulama, mulai dari ranting hingga pengurus besar.

Penelitian ini berusaha memotret “fenomena sosial keagamaan”. Menurut Suprayogo obyek penelitian seperti ini berarti merupakan usaha untuk meneliti fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama dan penyikapkan masyarakat terhadap agama itu sendiri. (Suprayogo & Tobroni, 2001: 16-17).

Dalam kaca mata fenomenologi, fenomena sosial keagamaan semacam ini dapat diasumsikan sebagai sebuah *aksi* yang dimunculkan dari aktifitas yang diperankan oleh kiai dalam membangun relasi dengan pejabat pemerintah kota Kediri

yang dilatarbelakangi dari tata nilai yang dianut dan diyakini oleh kedua belah pihak yang melakukan relasi. Sehingga secara konseptual amatan terhadap pokok masalah dalam penelitian ini dapat di tegaskan dalam 2 (dua) bentuk utama yang meliputi: *Pertama* fenomena sosial yang ditimbulkan oleh agama berupa struktur, pranata sosial, dan dinamika masyarakat. Agama yang memiliki dimensi spiritual, intelektual, mistikal dan institusional adalah landasan bagi terbentuknya suatu masyarakat kognitif. Agama dengan demikian adalah awal bagi terbentuknya suatu komunitas atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama, yang memungkinkan berlakunya suatu pengetahuan yang sama pula. Organisasi kiai misalnya terbentuk akibat dari ikatan atau latar belakang yang sama. Sebagai sebuah komunitas, “masyarakat kognitif” memiliki simbol-simbol, struktur, doktrin, sosial dan implementasi serta dinamika kesejarahannya.

Kedua, penyikapian masyarakat terhadap agama, seperti pola pemahaman, *stereotype* komitmen dan tingkat keberagamaan dan perilaku sosial sebagai manifestasi keyakinan doktrin agama. Dari pola pemahaman muncul skripturalisme, fundamentalisme, modernisme dan tradisionalisme. Dari perilaku sosial politik lahir, kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung (Turmuzi, Endang, 2004).

Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian agama yang disebut kedua, yaitu perilaku sosial politik kiai dalam dinamika aksi-interaksi dalam sosiologi termasuk wilayah sosiologi mikro. Ancangan teori mikrokospis menurut Dede Utomo dalam Bungin (2004: 12-13) melibatkan perhatian pada yang obyektif, (seperti pelaku/aktor), tindakan (aksi) serta pola perilaku dan interaksi yang benar-benar bisa diamati (*observable*) maupun yang subyektif, seperti konstruksi sosial atas realitas.

Dasar pemikiran teori sosial mikro adalah penekanan pada tindakan oleh pelaku yang relatif bebas dalam mengekspresikan

kehendaknya. Kalaupun ada kendala terhadap tindakan, hal itu muncul dalam interaksi dengan aktor-aktor lain. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti bisa melihat bagaimana kiai dan pejabat di Kediri dalam posisi sosial mereka masing-masing saling berinteraksi.

Sementara perubahan sosial yang mengitari dunia kiai di Kediri digunakan pendekatan definitif Moore. Menurutnya perubahan sosial adalah perubahan penting dalam struktur sosial, sedangkan struktur sosial mencakup pola-pola perilaku dan interaksi sosial (Lauer, Robert H. :1993: 4). Dengan mengamati perilaku dan interaksi sosial antara kiai dan pejabat memudahkan mengungkap fenomena sosial keagamaan atau pemaknaan kiai terhadap ajaran agama terkait dengan masalah-masalah politik. Dalam berinteraksi dengan pejabat tidak jarang para kiai berperan sebagai aktor, misalnya kiai menjadi anggota tim sukses sekaligus juru kampanye calon pejabat setempat, bisa lurah, Bupati, Gubernur atau bahkan Presiden. Pada posisi ini dapat dilihat bahwa kiai memegang dua peranan kunci, agama di satu sisi, dan politik di sisi lainnya, dan dalam banyak kasus, perselingkuhan politik dan agama menghasilkan sesuatu yang heboh. Perspektif pelaku (*emik*) dipergunakan untuk mengungkap pemaknaan agama dan politik oleh kiai dalam menjalin interaksi dengan pejabat menurut pemahaman masing-masing dalam berbagai aspek sosial.

Dalam perspektif ini teori kontruksi sosial berger akan menuntun peneliti memahami lebih jauh bagaimana realitas sosial yang ada dalam dunia kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri dari sudut pandang masing-masing, juga teori ini dimaksudkan untuk memotret bangunan kehidupan sosial keduanya baik sebelum ataupun setelah melakukan relasi untuk kepentingan yang berbeda.

Karena paradigma pemaknaan agama dan politik bisa berbeda-beda baik dari segi sikap maupun persepsi, maka

diperlukan pendapat Thomas Kuhn. Menurut Kuhn sebagaimana dikutip oleh Salim, paradigma adalah seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan, baik tindakan keseharian maupun tindakan ilmiah (Agus Salim, 2006: 63). Sementara Guba (1990) mengartikan paradigma sebagai (i) *a set of assumptions*, dan (ii) *beliefs concerning*, yaitu asumsi yang dianggap benar (*given*). Dengan demikian untuk sampai pada asumsi itu, diperlukan sebuah tindakan empiris, dalam bentuk pengamatan. Dalam konteks penelitian ini masyarakat Kediri, termasuk para penguasanya telah memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sedemikian rupa terhadap para kiai.

Untuk memahami Dinamika Interaksi Kiai Dan Pejabat di Kediri digunakan konsep interaksi Lauer. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial, sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan (Guba, 1990: 16). Menurut Herbert Blumer interaksi sosial terjadi pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu (Margaret Poloma, 1994: 264-266).

Relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri yang telah terjadi selama ini telah memberikan gambaran munculnya fenomena bangunan sosial yang terjadi antara elit sosial ditengah masyarakat kota Kediri. dan karena relasi itu terjadi terus menerus dalam tata kehidupan sosial masyarakat, maka muncul konstruksi sosial dalam berkehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan dan menumbuhkan tata nilai tersendiri.

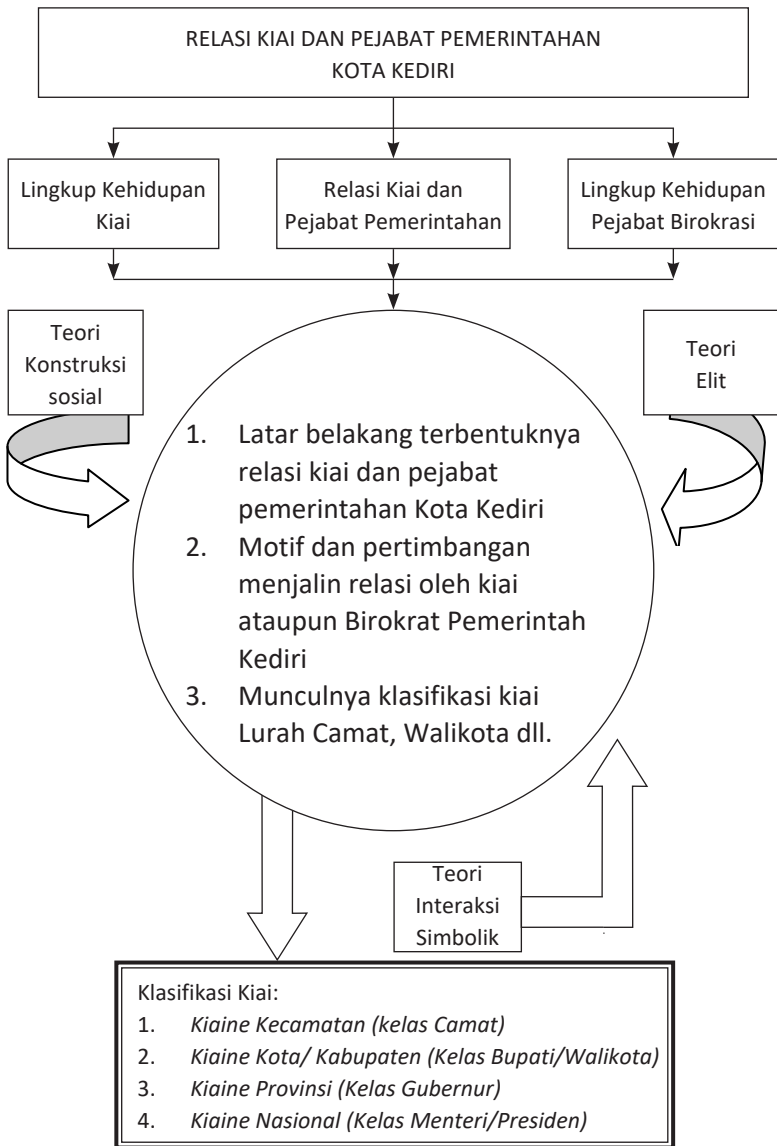
Fenomena sosial ini, bila ditilik dari teori kontruksi sosial memberikan penjelasan atas munculnya konstruksi baru dalam paham masyarakat tentang hubungan relasi yang terbangun antar elit sosial tersebut, sehingga bangunan relasi yang terjadi antara kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri berdiri sebagai penguat dari teori konstruksi sosial yang telah ada.

Dalam merancang dan melaksanakan penelitian ini, peneliti secara maksimal telah berupaya untuk memahami secara utuh aspek kehidupan kiai, yang mencakup;

- i) latar belakang pendidikan;
- ii) latar belakang ekonomi;
- iii) latar belakang budaya dan politik, dan menjadi informasi awal tentang fenomena kehidupan kiai yang akan disusun dan dirumuskan secara gradual, mulai dari informasi yang kongkrit sampai yang abstrak, seperti konsep dan teori.

Kesemuanya informasi yang dapat dihimpun secara sistematis akan disusun dengan cara berpikir dan cara kerja tertentu. Cara kerja untuk menggunakan informasi secara lebih luas digambarkan dalam rumusan kerangka berpikir yang terdiri dari serangkaian pernyataan sistematis, baik berupa kerangka teori maupun kerangka berpikir logis, sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini bisa benar-benar menjadi potret dari sebuah proses relasi sosial yang terjadi dan apa adanya dalam obyek penelitian.

Dengan demikian hubungan unsur yang ada dalam penelitian ini yang meliputi masalah pokok, landasan teori, kerangka berpikir, pisasu analisis, pendekatan teori yang dipergunakan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan rancangan penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah diagram kerangka kerja berpikir sebagai berikut:



Bagan 1. Kerangka Konseptual Penelitian

PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini bermaksud mengungkap dinamika relasi kiai dan pejabat pemerintahan di kota Kediri. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan atas penafsiran peneliti. Dalam hal ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moelong, Lexi J. 1999: 4).

Dengan demikian pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Robert, Bogdan & Steven J. Taylor, 1992: 21). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang terkadang merupakan sesuatu yang sulit diketahui dan dipahami. Penelitian kualitatif juga diharapkan mampu menjelaskan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kuantitatif.

Alasan lain menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif terdapat lima ciri pokok. *Pertama*, penelitian kualitatif mempunyai latar belakang alami dan peneliti sendiri berperan sebagai instrumen inti. *Kedua*, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. *Ketiga*, penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada produk. *Keempat*, penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara induktif. *Kelima*, makna sangat penting dalam penelitian kualitatif (Zamroni, 1992: 81).

Namun perlu dicatat bahwa penelitian kualitatif memungkinkan adanya kedekatan emosional karena subyektifitas peneliti tidak dibuat netral untuk mencapai kebenaran obyektif. Karena itu, untuk melakukan penelitian kualitatif dibutuhkan ketrampilan tertentu. Ketrampilan tersebut dimaksudkan agar

peneliti waspada, menganalisis secara kritis, mengenal dan menghindarkan dari prasangka-prasangka, mendapatkan data-data yang betul-betul valid, serta berfikir secara abstrak. Untuk melakukan hal tersebut, tegas Strauss dan Corbin, seorang peneliti kualitatif memerlukan suatu teori dan kepekaan sosial, kemampuan untuk mempertahankan jarak analisis ketika pada saat yang sama menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu dan pengetahuan teoritis untuk menginterpretasikan apa yang diobservasinya (Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 1997: 12).

Menurut Sanapiah Faisal (2004: 26) penelitian kualitatif lahir dan berkembang dari tradisi ilmu-ilmu sosial Jerman yang sarat diwarnai pemikiran filsafat ala Platonik sebagaimana tercermin pada pemikiran Kant maupun Hegel. Dari sinilah kemudian berkembang ilmu sosial intepretivisme yang mengunggulkan pendekatan penelitian kualitatif sebagai satu-satunya cara yang handal dan relevan untuk memahami fenomena sosial.

Sementara menurut Moleong, penelitian kualitatif akan melihat hubungan sebab akibat (Moelong, (Lexy J. 1994: 4). Dalam konteks ini menurut tradisi positivisme manusia dipandang sebagai makhluk jasmaniyah yang sehari-hari berperilaku atau melakukan respon bergantung pada stimulus yang menerpa dirinya atau bergantung pada tuntutan organismik yang secara alamiah tersimpan dalam diri manusia. Ini berarti perilaku manusia tidak lebih daripada suatu respon yang sifatnya otomatis dan mekanistik, penyebabnya bisa kekuatan dari dalam dirinya (faktor organismik) atau kekuatan dari luar dirinya (faktor struktur sosial). Karena itu suatu fenomena sosial dipandang sebagai akibat atau fungsi dari bekerjanya faktor-faktor dan atau struktur sosial tertentu (Faisal, Sanapiah & Bungin 2004: 26).

Penelitian dimaksud adalah penelitian sosial agama, karena ilmu pengetahuan sosial dengan berbagai metode dan paradigma, dikembangkan dalam rangka mengkaji perilaku manusia, tak terkecuali perilaku dalam beragama. Dengan demikian penelitian

disebut sebagai penelitian agama atau penelitian sosial bukan karena metodologinya tetapi didasarkan pada obyek yang dikaji. Obyek studi yang menentukan metode bukan sebaliknya (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001: 17). Menurut Mattulada dalam M. Rusli Karim (1989: 1-5) untuk menentukan metode yang relevan dalam mengkaji agama sebagai fenomena sosial bisa dilakukan dengan perangkat ilmu sosial, artinya cara, metode, teknik dan peralatan ilmu sosial bisa mengamati dengan cermat perilaku manusia sehingga menemukan segala unsur yang menjadi komponen terjadinya perilaku itu.

Metode sosiologi mengkaji posisi dan peranan tertentu dari seseorang atau sekelompok orang. Posisi dan peranan itu menyatakan diri dalam kehidupan bersama, sehingga kehidupan sosial bisa terselenggara melalui hubungan-hubungan fungsional dalam masyarakat, yang bersumber dari kedudukan dan peranannya dalam kehidupan umat beragama (Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001: 19).

Menurut Atho' Mudzhar (2002: 12-13) ada lima gejala agama yang bisa dijadikan sasaran penelitian.

Pertama, scripture, biasanya berupa naskah-naskah kitab suci sumber ajaran dan simbol-simbol agama. *Kedua* penganut atau pemuka agama, yang meliputi, sikap, perilaku dan penghayatan atas agama tersebut yang dimanifestasikan dalam sikap pemuka ataupun penganutnya. *Ketiga*, ritus-ritus, lembaga-lembaga, ibadat-ibadat, seperti shalat, haji, puasa, perkawinan dan waris. *Keempat*, alat-alat, seperti masjid, gereja, lonceng, peci dan sebagainya. *Kelima*, organisasi keagamaan tempat penganut agama berkumpul dan berperan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Gereja Katolik, Gereja Protestan, Ahmadiyah dan lain sebagainya.

Posisi kiai sebagai elit dalam sebuah komunitas (pesantren, jamaah, atau kelompok yang lebih luas), telah menyebabkan komunitas di sekelilingnya untuk mengikuti sikap dan perilakunya

tidak hanya dalam hal bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang-bidang lain. Perilaku kiai yang demikian menjadi obyek penelitian sosial agama.

LOKASI PENELITIAN

Dipilihnya Kediri sebagai lokasi penelitian, disamping karena kota Kediri hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yakni kecamatan Kota, kecamatan Mojoagung dan kecamatan Pesantren yang relatif terjangkau, juga atas pertimbangan beberapa hal: *Pertama*, pada tahun 2000 para kiai di daerah ini berhasil bertindak atas nama pemerintah untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara manajemen PT. Gudang Garam dengan para pekerjanya dalam aksi mogok massal, yang membuat ekonomi Kediri hampir lumpuh total. Prestasi ini mengindikasikan bahwa kiai di sini tidak hanya menjadi tokoh panutan dan pemuka agama saja, akan tetapi lebih dari itu kiai mempunyai kepedulian sosial kemasyarakatan yang lebih luas.

Kedua, Kediri termasuk salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki sejumlah pesantren besar, setelah Jombang, tercatat sejumlah Kiai terkenal dari daerah ini di antaranya: KH Idris Marzuki, Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH. Anwar Iskandar, (mantan pimpinan tertinggi PKB Jawa Timur) Syekh Ihsan Jampes, penulis yang sangat terkenal di luar negeri (Jazirah Arab), dan lain sebagainya.

Ketiga, peneliti sudah cukup lama berinteraksi dengan kiai selama peneliti aktif di organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Pengalaman ini menjadi modal awal dan memudahkan peneliti menjalin komunikasi dengan kiai dan mempercepat pengenalan lapangan.

Keempat, peneliti juga sebagai pegawai negeri sipil mempunyai akses dan kesamaan sistem administrasi dengan pejabat pemerintahan, sehingga dengan birokrasi pemerintahan di kota Kediri telah mempunyai akses, sehingga memudahkan untuk mencari data-data yang diperlukan.

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Kediri yang secara administratif Kota ini terdiri dari 3 (tiga) wilayah kecamatan, Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan terdiri dari 46 (empat puluh enam) kelurahan.

Di wilayah ini terdapat banyak lembaga pendidikan Pondok Pesantren mulai dari kecil, sedang hingga besar, Disebut Pondok Pesantren kecil karena santri yang menimba ilmu didalamnya kurang dari 100 (seratus) orang santri. Dan Pondok sedang biasanya santrinya dibawah 1.000 (seribu) santri, serta Pesantren Besar dihuni oleh lebih dari 1000 (seribu) santri.

Secara kuantitas di Kota Kediri ada ada 3 (tiga) Pesantren Besar yakni Hidayatul Muhtadi'ien Lirboyo yang jumlah santrinya mencapai 10.000 (sepuluh ribu) santri putra putri, Pesantren LDII yang membina Santri lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) an santri putra putri, dan Pesantren Al Mahrusiyah yang mempunyai santri 2.500 an (dua ribu lima ratus) santri putra putri. Dan ada 4 (empat) Pesantren Sedang, Al Huda, As Sa'idiyah Al Ishlah dan Al Amien, Sementara dan ada 5 (lima) pesantren Kecil, Al Husna, Al Ma'una Sari, Salafiyah, Manbaul Khikam dan Pesantren Aves Sina.

Masing-masing pesantren diasuh oleh seorang atau beberapa orang kiai yang biasanya sekaligus sebagai pemilik pesantren tersebut. Selain yang mengasuh pondok pesantren, di Kota Kediri juga dikenal beberapa kiai yang tidak mempunyai pesantren, akan tetapi sumber kewibawaan kekiaiannya diperoleh dari MUI, Masjid, Langgar ataupun ketokohan seseorang dalam bidang Agama Islam.

Di Kota Kediri disamping terdapat organisasi kiai yang dibentuk secara nasional oleh pemerintah yang di sebut MUI, juga terdapat beberapa organisasi keagamaan yang menghimpun tokoh dan ummat dalam suatu agama atau beberapa tokoh agama dalam satu aliran tertentu, semisal NU, Muhammadiyah, LDII dan tarekat. Juga terdapat perkumpulan tokoh dari beberapa agama

yang berlainan yang disebut dengan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama.

Keberagaman keyakinan aliran dalam satu agama ataupun berlainan agama nampaknya membuat tokoh agama di kota ini memberikan iklim yang kondusif bagi terciptanya tatanan sosial masyarakat beragama secara harmonis di Kota ini, di lain pihak penataan pola strategi managerial birokrasi pemerintahan tertata sedemikian rupa juga merupakan faktor pendukung terjadinya suasana yang ada selama ini.

Kondisi inilah yang menarik untuk dicermati lebih lanjut apa, mengapa dan bagaimana pola hubungan relasi antar tokoh agama tersebut dengan pejabat pemerintah dalam membentuk relasi.

SATUAN ANALISIS DAN SATUAN PENGAMATAN

- **Satuan Analisis**

Satuan Analisis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah organisasi para kiai, yaitu Nahdlatul Ulama Cabang Kota Kediri. Dalam organisasi ini terhimpun para kiai dengan berbagai latar belakang. Organisasi ini berusaha membangkitkan semangat para pengikutnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam organisasi ini kiai memiliki kedudukan sentral, baik sebagai pendiri, pemimpin, pengendali organisasi, maupun sebagai penutan kaum nahdliyin. Nahdlatul Ulama (NU).

Tiga pilar kekuatan organisasi NU terletak pada para kiai yang tergabung dalam syuriah dan tanfidziyah, serta pesantren dengan masyarakat pengikutnya.

- **Satuan Pengamatan**

Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah; dua pilar kekuatan organisasi NU, yang meliputi: *Pertama* para kiai yang tergabung dalam syuriah dan tanfidziyah dengan segenap jajaran

struktur organisasi yang ada mulai dari Cabang (struktur organisasi pada tingkat kabupaten/kota), MWC. (struktur organisasi pada tingkat kecamatan), dan Ranting (struktur organisasi pada tingkat Desa/Kelurahan).

Kedua, kiai pesantren dengan pengikutnya, serta pejabat pemerintahan kota Kediri atau mantan pejabat dalam jajaran pemerintah (camat/kapolsek, bupati/walikota/Kapolsres/Komandan Kodim) atau mantan birokrat yang tersebar di wilayah Kota Kediri, mulai tingkat kecamatan sampai kabupaten/Kota, dan fenomena perubahan sosial politik dalam dinamika interaksi Kiai dan Pejabat pemerintah di Kota Kediri.

Melalui pendekatan ini penelitian tentang fenomena sosial keagamaan yang didekati dengan pendekatan sosiologis akan memunculkan gejala-gejala, fenomena dan postulat tentang: motivasi, sikap, cara berpikir, emosi, minat, kerjasama, kompetisi, akomodasi, dan pertentangan dari seluruh satuan pengamatan.

DATA YANG DIPERLUKAN

Sesuai dengan fokus dan kerangka konseptual dalam penelitian, jenis data yang diperlukan meliputi:

1. Data tentang organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi satuan analisis dan satuan pengamatan. Deskripsi NU bisa menggambarkan secara utuh perjalanan dan perkembangan, karakteristik serta kekhasan organisasi ini yang menjadi ketetapan dalam satuan analisis dan satuan pengamatan dalam penelitian.
2. Informasi tentang perubahan sosial politik dalam dinamika interaksi Kiai-Pejabat di Kota Kediri sehingga memunculkan stratifikasi kiai, dan seluruh unsur satuan analisis dan pengamatan. Informasi ini diharapkan bisa menangkap semua fenomena sosial politik dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

3. Data pendukung lainnya dalam bentuk teori, konsep, literasi termasuk di dalamnya literasi dan teori dalam penelitian kualitatif.

SUMBER INFORMASI

Sumber informasi dalam bentuk data dan fakta realitas sosial keagamaan dalam penelitian ini bisa diperoleh melalui dua sumber, 1) manusia, 2) non manusia. Dalam hal kebutuhan data, sumber informasi dari manusia menjadi informasi pokok dan utama. Manusia sebagai sumber informasi dalam pengamatan fenomena sosial keagamaan bisa diperoleh di antaranya dari: 1) KH. Fuad Taqiyudin Yunus Nawawi, H. Muhammad Salim, Pengurus NU Majelis Wakil Cabang Kecamatan Pesantren, 2) KH. Khalil Asy'ari, Pengurus NU Majelis Wakil Cabang Kecamatan Mojojoto, 3) KH. Abu Bakar Abdul Jalil, Mantan Pengurus NU Majelis Wakil Cabang Kecamatan Mojojoto, 4) KH. Anwar Iskandar, Pengurus NU Cabang Kota Kediri, 5) KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, KH. Wildan Mukholladun, Pengurus NU Cabang Kota Kediri dan KH. Sholeh Abdul Jalil.

Dari pejabat pemerintah, adalah 1) M. Yasin, mantan camat Mojojoto dan Camat Kota, 2) Drs. Suko Wahyono, mantan Camat Kota, 3) Rahmat Basuki, Camat Pesantren, 4) Drs. Didik Catur Mantan Camat Pesantren 5) Drs. H. Bambang Basuki Hanugerah, MM, (Ketua Bapeko, Plt Sekda) 6) A. Maschut, mantan Walikota Kediri, 7) Totok Imam Komandan Kodim 0809 Kediri dan lain sebagainya dan Ir. Bambang Basuki, H. Ketua Bapeko.

Sedangkan sumber informasi non manusia, di antaranya berupa dokumen, seperti, 1) AD/ART NU, 2) Majalah, 3) Naskah, 4) Buletin, 5) Catatan-catatan penting, dan 6) literatur-literatur yang bisa ditemukan dalam organisasi NU, kesemuanya perlu diseleksi secara tepat agar bisa memberikan informasi yang akurat tentang fenomena sosial keagamaan yang menjadi fokus pengamatan.

Sedangkan data pendukung lain yang bisa diperoleh dari sumber non manusia bisa berupa peristiwa, kejadian maupun kasus-kasus yang pernah terjadi selama ini, juga pengamatan peneliti tentang, 1) aksi-reaksi, 2) interaksi, dan 3) korelasi dalam dinamika interaksi kiai-pejabat di Kota Kediri.

Manusia sebagai sumber informasi pokok dalam penelitian kualitatif disebut informan, agar bisa menggeneralisasikan fenomena keagamaan yang diteliti sangat terkait dengan masalah sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposif* (*purposive sampling*), sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Tapi tentunya penetapan ini didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu. Jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Hendarso dalam Bagong Suyanto (1995: 297) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, sampel tidak ditentukan secara random (acak), karena penelitian ini tidak bermaksud untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif dilakukan pada komunitas sosial dengan jumlah tertentu. Karena itu, sampel penelitian kualitatif ditentukan secara *purposif*, atau bahkan tidak disebut sebagai sampel tapi disebut sebagai setting atau obyek penelitian.

Kriteria dan kategori kiai yang dijadikan sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi pengurus atau mantan pengurus NU mulai tingkat cabang, Majelis wakil cabang sampai ranting,
- 2) Sering atau pernah dikunjungi dan mengunjungi pejabat;
- 3) Mempunyai kelompok pengajian rutin, baik dalam bentuk klasikal maupun non klasikal;
- 4) Berpredikat sebagai pengasuh Pondok Pesantren, pemimpin yayasan atau sebagai ustadz dalam sebuah komunitas masyarakat penganut agama.

Untuk kategori pejabat pemerintahan adalah mereka yang telah atau sedang mengemban amanat jabatan strategis dalam pemerintahan, mulai Camat sampai Wali Kota dan pejabat yang setingkat dengannya, mengenai jumlah (kuantitas) menyesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan di lapangan. Sedangkan pemilihan Kota Kediri sebagai lokasi penelitian karena daerah ini terkenal sebagai kantong-kantong kiai dengan segala fariannya.

TEKNIK DAN INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dipergunakan beberapa teknik dan instrumen pengumpul data. Sesuai sifat dan karakter penelitian ini, disamping digunakan instrumen pendukung peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, hal ini dimaksudkan untuk menentukan jenis dan sumber data yang dianggap tepat dan sesuai dengan jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Selain peneliti bertindak sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen lain berupa alat bantu suara (*recorder*), perekam gambar (*photo*), alat tulis dan pencatat data/informasi (buku catatan, pensil, bolpoin), teman diskusi dan pencatat skrip di samping pedoman umum observasi dan wawancara.

Sesuai dengan jenis dan sumber data yang akan dihimpun dalam penelitian ini, maka prosedur yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut;

- **Pengamatan**

Peneliti terlibat langsung dengan obyek dan subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti lebih banyak bertindak sebagai

orang yang “ngaji” kepada kiai, sehingga penelitian ini dengan mudah bisa memahami dan mendeskripsikan secara utuh tentang komunitas Kiai yang tergabung dalam NU di wilayah Kota Kediri. Ali Formen dalam Agus Salim (2006:127-128) menyatakan bahwa peneliti sosial bisa memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi.

James Spradley dalam Ali Formen menyatakan bahwa tahap-tahap dalam penelitian fenomenologi setelah peneliti menetapkan lokasi penelitian, adalah melakukan pengamatan langsung (*direct observation*) dan berperan sebagai pengamat (*partisipant observation*) serta mencatat, dan merekam data dari obyek pengamatannya, kemudian membuat deskripsi dan analisis tertulis tentang obyek kajiannya (Salim, Agus, 2006: 128).

- **Wawancara**

Metode wawancara yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan wawancara terbuka (*open ended interview*). Wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan data, juga untuk mengetahui pandangan-pandangan para informan yang mungkin belum dituangkan dalam bentuk tulisan atau dokumen-dokumen lainnya. Dua bentuk wawancara dilakukan berulang kali dengan intensitas tinggi. Peneliti tidak begitu saja percaya pada informan, melainkan berupaya untuk mengecek dan merecek dalam kenyataan melalui pengamatan.

Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, draft wawancara disusun secara obyektif sebagai pedoman di lapangan. Namun daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang bersifat ketat. Draft wawancara disusun semi terbuka, tidak tertutup, sehingga dimungkinkan untuk dapat mendalami lebih jauh apa yang disampaikan oleh informan (Burhan Bungin, 2004:62-63).

Dalam mentranskripsi hasil wawancara dengan informan kiai, peneliti memilih sistem transkripsi yang memungkinkan mengungkap bagaimana jawaban informan yang sesungguhnya. Menurut Wetherel dan Potter, transkripsi yang baik bisa memperlihatkan bagaimana jawaban informan dan sebagian merupakan hasil evaluasi wawancara terhadap informan (Jorgensen, Marianne W. 2007: 225).

- **Dokumentasi**

Untuk melengkapi prosedur pengumpulan data dan informasi, peneliti juga menggunakan prosedur pengumpulan data penunjang. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari sumber-sumber non manusia yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kiai.

Penggunaan metode ini dimaksudkan sebagai pelengkap atas kebenaran data dari pengumpulan data melalui observasi dan interview dalam bentuk data yang sudah didokumentasikan atau dicatat dalam system pengarsipan NU. Dengan cara demikian, diharapkan dokumen ini bisa merecek atau membandingkan dengan data yang diperoleh melalui metode dan sumber lainnya (Jorgensen, Marianne W.; 2007:225).

Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan, dengan tetap menjaga konsistensi dan ketelitian dalam penggunaan teknik-tekniknya, sehingga informasi yang diperoleh memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif.

KEABSAHAN DAN KERANGKA ANALISIS DATA

- **Keabsahan Data**

Untuk menetapkan kesahihan dan keandalan (reliabilitas) data dalam penelitian kualitatif, menurut Moelong dan Sayekti diperlukan teknik pemeriksaan dengan menggunakan 4 (empat) kriteria:

1. Kredibilitas (kepercayaan), dilakukan dengan cara, a) memperpanjang waktu pengamatan (tinggal dengan responden), b) pengamatan secara tekun dan terus menerus dalam waktu tertentu (untuk memperoleh data secara lebih mendalam), c) triangulasi. Dalam mempraktekkan cara ini akan ditempuh cek dan recek dengan :
 - a) Menggunakan sumber yang berbeda
 - b) Menggunakan metode yang berbeda
 - c) Menggunakan peneliti yang berbeda
 - d) Peer debriefing (diskusi dengan teman sejawat)
 - e) *Member check* (pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam pengumpulan data)
2. Transferabilitas (keteralihan), bahwa generalisasi suatu penemuan bisa berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh dalam sampel yang secara representative mewakili populasi.
3. Dependabilitas atau auditabilitas, sebagai paradigma alamiah berfungsi melengkapi dan sekaligus pengendali dalam penelitian kualitatif untuk saling mendukung reliabilitas yang biasa digunakan dalam penelitian non-kualitatif. Teknik ini bisa dapat dilakukan dengan, 1) pengamatan oleh dua atau lebih pengamat, 2) checking data, 3) audit trail atau menelusur dari data kasar (Bungin, Burhan,; 2003: 168-169).
4. Konfirmabilitas, atau menguji dan mengecek kembali data yang telah di himpun melalui beberapa alat pengumpul data tersebut. Cara yang ditempuh dalam melakukan uji sah metode ini adalah mengulang kembali penggalian data yang sama pada sumber yang sama pula, atau mengkonfirmasi kembali atas data yang telah diperoleh dari sumber lain yang berkait atau diyakini mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh.

- **Kerangka Analisis Data**

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan. Fenomenologi, dengan demikian, bisa dimaknai sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang tampak. Lorens Bagus memberikan dua pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita (Bungin, Burhan,; 2004:17-19).

Sebagai sebuah arah baru dalam filsafat, fenomenologi dimulai oleh Edmund Husserl (1859 – 1938), untuk mematok suatu dasar yang tak dapat dibantah, ia memakai apa yang disebutnya metode fenomenologis. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh besar dalam mengembangkan fenomenologi. Namun istilah fenomenologi itu sendiri sudah ada sebelum Husserl. Istilah fenomenologi secara filosofis pertama kali dipakai oleh J.H. Lambert (1764). Dia memasukkan dalam kebenaran (*alethiologia*), ajaran mengenai gejala (*fenomenologia*). Maksudnya adalah menemukan sebab-sebab subjektif dan objektif ciri-ciri bayangan objek pengalaman inderawi (*fenomen*) Christine Daymon & Immi Holloway, (2008:229-230).

Immanuel Kant memakai istilah fenomenologi dalam karyanya Prinsip-Prinsip Pertama Metafisika (1786). Maksud Kant adalah untuk menjelaskan kaitan antara konsep fisik gerakan dan kategori modalitas, dengan mempelajari ciri-ciri dalam relasi umum dan representasi, yakni fenomena indera-indera lahiriah.

Hegel (1807) memperluas pengertian fenomenologi dengan merumuskannya sebagai ilmu mengenai pengalaman kesadaran, yakni suatu pemaparan dialektis perjalanan kesadaran kodrati menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Fenomenologi

menunjukkan proses menjadi ilmu pengetahuan pada umumnya dan kemampuan mengetahui sebagai perjalanan jiwa lewat bentuk-bentuk atau gambaran kesadaran yang bertahap untuk sampai kepada pengetahuan mutlak. Bagi Hegel, fenomena tidak lain merupakan penampakan atau kegejalaan dari pengetahuan inderawi: fenomena-fenomena merupakan manifestasi konkret dan historis dari perkembangan pikiran manusia.

Edmund Husserl memahami fenomenologi sebagai suatu analisis deskriptif serta introspektif mengenai kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman-pengalaman langsung; religius, moral, estetis, konseptual, serta indrawi. Perhatian filsafat, menurutnya, hendaknya difokuskan pada penyelidikan tentang *Labenswelt* (dunia kehidupan) atau *Erlebnisse* (kehidupan subjektif dan batiniah). Penyelidikan ini hendaknya menekankan watak intensional kesadaran, dan tanpa mengandaikan praduga-praduga konseptual dari ilmu-ilmu empiris.

Sebagai metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga seorang peneliti sampai pada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomen-fenomen sebagaimana fenomen-fenomen itu sendiri menyingkapkan diri kepada kesadaran. Kita harus bertolak dari subjek (manusia) serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada “kesadaran murni”.

Untuk mencapai bidang kesadaran murni, peneliti harus membebaskan diri dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. Dengan demikian fenomenologi dapat dijelaskan sebagai metode kembali ke benda itu sendiri (*Zu den Sachen Selbst*), dan ini disebabkan benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang murni.

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell (1998:54), Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden (Christine Daymon & Immi Holloway, 2008:229-230).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kerangka analisis ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut;

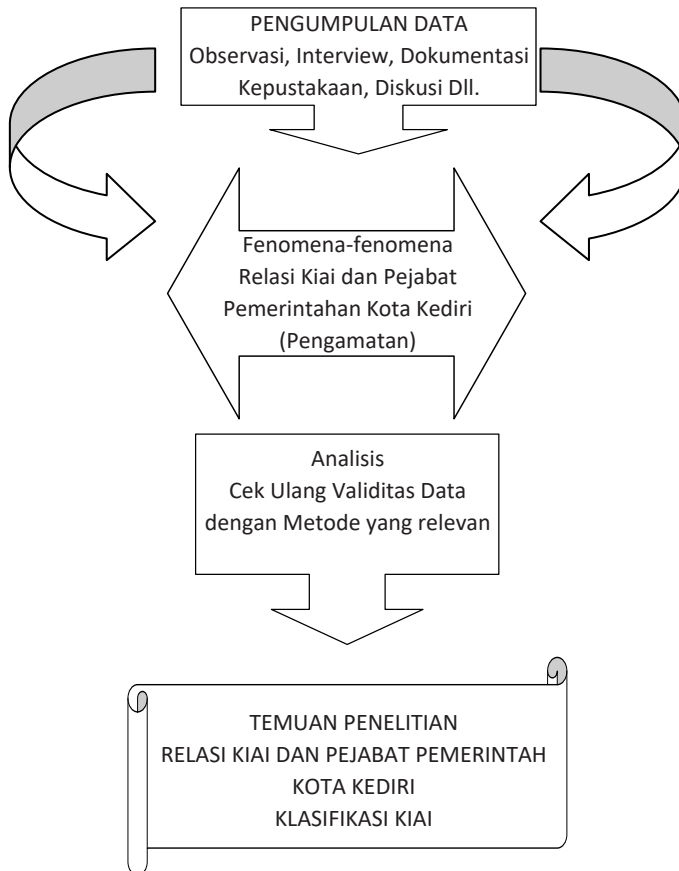
- a. Mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan kemudian membaca dan membuat catatan pinggir terhadap data-data yang dianggap penting, kemudian melakukan pengkodean data.
- b. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari *phenomenon* yang tidak mengalami penyimpangan).
- c. Mengumpulkan pernyataan tersebut ke dalam unit makna, lalu ditulis gambaran bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
- d. Mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena hingga menemukan esensi dari fenomena tersebut' dilanjutkan dengan mengembangkan *textural description*

(mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).

- e. Memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut, dan menuangkannya dalam laporan pengalaman setiap partisipan, kemudian menuangkannya dalam tulisan. (Septiana K. Santana, 2007:92-94)

Dengan menggunakan kerangka analisis ini diharapkan cara kerja dalam mengupas peran aktor sosial, dalam konteks penelitian relasi kiai dengan Pejabat pemerintah Kota Kediri bisa diungkap secara lebih dalam. Karena menurut Agus Salim cara para aktor sosial menjalankan tugasnya bisa menjelaskan tempat mereka hidup belajar menghadapi masalah, memilih alternatif, dan melaksanakan pilihannya secara konsisten (Salim, Agus, : 2006:206).

Dan untuk mempermudah mencerna kerangka analisis penelitian ini dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Bagan 2. KERANGKA ANALISIS DATA PENELITIAN

Pengumpulan data dari Kiai dan Pejabat Pemerintahan kota Kediri, dilakukan melalui observasi langsung yang dilengkapi dengan perekam untuk memotret obyek penelitian, di samping itu juga dilakukan dengan interview, atau wawancara mendalam dan terbuka, mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam bentuk buletin, majalah, artikel, dan arsip-arsip lain yang ada pada sumber data. Hasil observasi dan interview dan data lain yang berupa informasi, yang mempunyai perspektif emik, adalah

merupakan fenomena relasi Kiai dan Pejabat Pemerintahan Kota Kediri.

Sesuai teori fenomenologi, peneliti datang ke lokasi tidak membawa teori ataupun konsep, peneliti hanya melengkapi diri dengan interview guiden dan membiarkan interview berjalan apa adanya, dengan harapan akan menghasilkan temuan baru dari kiai dan pejabat yang menjadi obyek penelitian. Kemudian dengan teori fenomenologi peneliti mencoba menyusun proposisi-proposisi sebagai sebuah bangunan teori fenomenologi relasi kiai dan pejabat di wilayah Kediri.

PENARIKAN KESIMPULAN

Verifikasi data yang telah diperoleh melalui berbagai instrumen dilakukan selama penelitian berlangsung, reduksi data, dilakukan setelah data terkumpul secara memadai kemudian dilakukan cek kesahihan data sesuai dengan struktur dan jenis data yang diperoleh, kemudian dirumuskan kesimpulan sementara dalam penelitian ini.

Setelah seluruh komponen data dan perangkat instrumen disesuaikan dengan analisis yang cukup dan dianggap benar-benar lengkap barulah di tarik kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian mata rantai pengumpulan data yang diperlukan.

WACANA TENTANG POSISI KIAI DAN BIROKRASI DALAM DINAMIKA RELASI KUASA DAN MASYARAKAT

KIAI: ASAL-USUL ISTILAH DAN VARIANNYA

Kiai adalah sebuah atribut sosial yang lahir dari masyarakat. Istilah ini bukanlah sebuah status dalam keagamaan yang ditentukan oleh syariat. Kiai juga bukan titel yang bisa diklaim oleh seseorang karena jenjang pendidikan. Munculnya istilah kiai, karena masyarakat menyebutnya demikian.

Biasanya suatu masyarakat menyebut seseorang dengan sebutan kiai, karena kapasitas dan peran yang dimilikinya, yaitu, seseorang yang memiliki kapasitas ilmu agama di atas rata-rata dan berperan mengajarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sesuatu yang dimunculkan oleh masyarakat, maka kriteria dan standar seseorang disebut kiai berbeda-beda sesuai dengan penilaian masyarakat setempat.

Menurut Zamakhsyari Dhofier awalnya istilah kiai dimaksudkan untuk menyebut tiga hal. *Pertama* kiai

diperuntukkan untuk gelar terhadap benda-benda pusaka atau yang sesuatu yang dikeramatkan, misalnya *Kiai Selamet*, sebagai nama bagi seekor kerbau milik Keraton Solo yang dikeramatkan, *Kiai Garudayaksa*, *Kiai Jaladara*, *Kiai Ratapralaya* dan lain-lain, adalah nama-nama pusaka di Keraton Yogyakarta yang dianggap keramat.

Kedua, sebutan ini diberikan sebagai gelar kepada orang tua pada umumnya, dan pada perjalanannya sebutan itu menjadi “ki” sebagaimana sebutan untuk Ki Bagus Hadikusumo, dll. *Ketiga*, sebagai gelar yang diberikan kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan ilmu-ilmu agama tersebut yang bersumber dari kitab-kitab kuning (klasik) kepada santrinya (Dhofier, Zamahsyari 1982:55).

Istilah kiai sering diidentikkan dengan *ulama*. al Qur’an menyebut kata *ulama* sebanyak dua kali dalam pengertian yang berbeda, keduanya dapat disebutkan masing-masing berupa: *Pertama*, dalam konteks ajakan al Qur’an untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang, dan manusia, yang diakhiri dengan ayat:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)

Innama yakhsya allohu min ‘ibadihil ulama’ Innalloha ‘azizun gofur

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama (QS. Fathir: 28).

Ayat ini menyatakan bahwa yang disebut ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kealaman, dan dari pengetahuan yang ia memiliki tersebut mampu menjadikan dirinya untuk lebih dekat, patuh dan ta’at kepada Allah.

Kedua, dalam konteks pembicaraan Al Qur’an yang kebenaran kandungannya telah diakui oleh ulama bani Israil (QS. Al- Syura:197).

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197)

Awalam yakul lahum ayatun ayyaklamahu ulama'u bany Isroil.

Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa, para Ulama Bany Israil mengetahuinya, (QS;26,197)

Dalam bahasa Arab, kata ulama علماء adalah bentuk jama' dari kata *alim* عليم yang berarti yang memiliki pengetahuan (Louis Ma'luf, 1952: 551). Selain bentuk jama' dari kata *alim*, عليم ia juga diambil dari kata *al alim* العالميم yang berarti mengetahui secara jelas (M. Quraish Shihab, 2002: 11, 467).

Dengan demikian makna kata *al ulama* العلماء dan *al alimun* العالمون berbeda karena yang pertama adalah jamak taksir dari kata *al alim*, العالميم sedangkan yang kedua adalah jamak muzakar salim dari kata *al alim* العالميم. Kata *al ulama* العلماء disebutkan dalam al Qur'an sebanyak dua kali, sedangkan kata *al alim* sebanyak 13 kali (Muhammad Fuad Abd al Baqi: 603-604).

Penggunaan kata ulama dalam al-Qur'an selalu diawali dengan ajakan untuk merenungi keadaan alam, sedangkan kata *al alimun* merenungi peristiwa yang sudah terjadi sebagai bahan evaluasi. Adapun penggunaan kata *al alim* dalam bentuk tunggal semuanya mengacu hanya kepada Allah, dan selalu diiringi dengan penciptaan bumi dan langit serta hal-hal yang gaib maupun nyata.

Dengan demikian ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir tentang alam sehingga hasil pemikirannya dapat membuahkan teori-teori baru. Teori-teori inilah yang nantinya dapat membangun peradaban yang tinggi sehingga tugas kekhilafahan dapat dijalankan dengan sempurna. Inilah alasan yang dapat dikemukakan ketika Rasulullah menyatakan bahwa *pewaris nabi adalah ulama* dan bukan *al alimun*. Dalam sebuah Hadits Nabi bersabda:

العلماء ورثة الأنبياء

Al Ulama' Warostatul anbiya'

Ulama adalah merupakan ahli waris perjuangan para Nabi

Kelompok yang mengartikan ulama dari segi sikap menyatakan bahwa ulama adalah orang-orang yang takut terhadap kekuasaan Allah (Al Imam Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad Al Anshari al Qurthubi, tt: XIV, 219). Pengertian ulama melalui sikap ini terkesan mempersempit pengertian terhadap ulama, sehingga keulamaan seseorang ditentukan oleh sikap yang dimilikinya, padahal dalam pengetahuan justru nihil. Demikian juga jika ulama diartikan dari segi pengetahuan semata-mata, maka akan terkesan bahwa orang-orang yang berilmu banyak adalah ulama. Padahal ilmu yang dimilikinya tidak menjamin secara mutlak terhadap kebaikan perilaku. Bahkan sangat mungkin dan berpeluang dari ilmu yang dimilikinya dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam pelbagai bentuk. Sudah cukup banyak bukti betapa banyak mereka yang memiliki ilmu banyak ternyata justru digunakan untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji. Bahkan banyaknya ilmu agama sekalipun juga tidak menjamin terhadap hal ini.

Oleh karena itu, pengertian ulama yang paling ideal adalah dengan merujuk kepada penegasan al-Qur'an, yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan dan selalu memperhatikan (membaca) alam dan dampak daripada bacaannya tersebut menimbulkan sikap takut kepada Allah. Oleh karena itu ulama adalah perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral. Artinya, seorang ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus perilaku yang baik.

Karakteristik lain yang esensial yang seharusnya melekat pada diri seorang ulama, sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an adalah adanya rasa takut kepada Allah. Rasa takut

ini muncul karena mereka memahami sifat-sifat Tuhan dan sekaligus memperhatikan bukti-bukti tentang Tuhan. Melalui bukti-bukti ini para ulama mengetahui hakekat yang sebenarnya. Rasa takut ini muncul diawali dari pengetahuan yang mendalam sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menginternalisasi kesempurnaan Tuhan dan sifat-sifat kemuliaan-Nya (Nizham ad Din al Hasan, 1996: V, 515).

Prinsip yang mendasar dari kedua pandangan ini tetap saja mengacu kepada teks-teks al Qur'an, namun perbedaan-perbedaan pandangan ini dikompromikan supaya bisa saling melengkapi. Menurut Quraish Shihab, karakteristik ulama yang dimaksudkan dalam teks al Qur'an ini adalah mereka yang memperhatikan dan memahami kitab Tuhan yang terhampar di alam raya ini. Mereka mengenal-Nya melalui hasil ciptaan-Nya, menjangkau-Nya melalui dampak kuasa-Nya, serta merasakan hakikat kebesaran-Nya dengan melihat aneka kebijaksanaan-Nya. Dari sini maka mereka kemudian takut dan kagum kepada-Nya serta bertakwa dengan sebenar-benarnya (M. Quraish Shihab, 2005: x). Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, karakteristik ulama yang sesungguhnya sama dengan karakteristik para nabi; pada satu sisi bertugas sebagai pembawa *risalah*, sedangkan pada sisi lain bertugas sebagai *ri'asah*. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu alam dan rahasia-rahasia-Nya, dan juga orang yang mengetahui tentang kehidupan (Al Zuhaili, Wahbah, 1998: XXII, 261).

Ulasan tentang pengertian ulama dari Hamka juga menarik untuk dicermati. Menurut Ketua MUI pertama ini, ulama adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum agama secara terbatas, dan bukan pula orang-orang yang hanya mengkaji kitab fikih, dan bukan pula ditentukan oleh jubah dan serban yang besar. Malahan dalam perjalanan sejarah telah kerap sekali agama terancam bahaya karena serban besar (Hamka, 2002: XXII, 246).

Muhammad Baqir al Majlisi mengutip pernyataan Ali ibn Abi Thalib yang membagi ulama kedalam tiga golongan. *Pertama*, kaum terpelajar yang sering memamerkan diri dan suka berdebat. Kelompok ini sering menunjukkan kehebatannya dan setiap mengeluarkan pendapatnya akan menyinggung perasaan orang lain. Di hadapan orang banyak, mereka berpura-pura *khusuk* dan membuat dirinya seperti orang yang *wara'*.

Kedua, kaum terpelajar yang hanya ingin mencari kekayaan dan bahkan mereka juga tidak segan-segan menipu. Mereka ini memiliki sikap yang merendah terhadap orang-orang kaya. Perilaku ini muncul karena mereka sangat berharap terhadap hadiah, namun sebenarnya kelompok ini tidak memiliki kepedulian terhadap pemahaman keagamaan orang-orang kaya yang salah. *Ketiga*, kaum terpelajar yang mendalami keilmuan dan logika. Kelompok ini dikenal memiliki kreatifitas dan idealitas yang sangat tinggi, namun kehidupan mereka terkesan susah dan berat (Syeikh Muhammad Baqir al Majlisi, tt: 46-47).

Dalam konteks ini Quraish Shihab menguraikan tentang peran, fungsi dan kedudukan ulama mempunyai empat tugas utama, keempat itu adalah: *Pertama*, menyampaikan ajaran-ajaran-Nya sesuai perintah Alloh dalam Al Qur'an surat Al Maidah 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

Ya Ayyuhar Rosul Balligh ma Unzila ilaika mir Robbika

Ya Rasul, sampaikanlah yang diturunkan padamu dari Tuhanmu (al Maidah: 67).

Kedua, menjelaskan ajaran-ajaran-Nya, pengertian ini didasarkan pada ayat Al Qur'an Surat An Nahel ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

Wa anzalna ilaika Dzikro litubayyina lin Nasi

Dan Kami turunkan al Qur'an kepadamu untuk kamu jelaskan kepada manusia (QS. An Nakhli: 44).

Ketiga, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, pengertian ini didasarkan pada al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 213;

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ :

Wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan naasi fima ikhtalafu.

Dan Allah turunkan bersama mereka al Kitab dengan benar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia (QS. Al Baqarah: 213).

Keempat, memberikan contoh pengalaman, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menyatakan bahwa akhlak atau perilaku nabi adalah al Qur'an (M. Quraish Shihab, 2007: 56).

Dengan demikian seseorang bisa disebut kiai atau ulama, paling tidak harus memiliki dua hal: *Pertama*, memiliki pengetahuan agama dan menyebarkanluarkannya. Pengetahuan diperoleh dari lembaga pendidikan agama, kemudian menyebarkanluaskan pengetahuan kepada santri dan masyarakat. Kiai umumnya memiliki pesantren sebagai wadah untuk mengamalkan ilmunya dan masyarakat menjadi pengikutnya.

Kedua, memiliki integritas moral. Respek masyarakat atas ajaran kiai mensyaratkan adanya integritas moral, integritas moral dimaksudkan di sini adalah perwujudan tata nilai yang dipraktekkan oleh seorang kiai dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Antropolog Jepang, Hiroko Horikoshi yang melakukan penelitian tentang Kiai dan perubahan sosial di Jawa Barat, membedakan secara hirarkhis antara kiai dan ulama. berbeda dari perspektif pengaruh kharismanya. Kharisma yang dimiliki kiai lebih tinggi dan lebih unggul dari ulama, baik dari dimensi moral maupun kemampuan yang dimilikinya. Seorang kiai adalah seorang alim, atau mendalam ilmunya dalam satu bidang ilmu,

misalnya alim dalam fikih, alim dalam hadis, alim dalam ilmu kalam, alim dalam ilmu tafsir dan sebagainya (Hirokho Horikhosi, 1987: 21).

Selain faktor kealiman, perbedaan antara kiai dan ulama terletak pada dimensi pengaruh. Berbeda dengan ulama, pengaruh kiai merasuk dalam sistem dan struktur masyarakat desa yang khas, lokal serta otonom. Dan gelar ulama bukanlah diperoleh karena kredibilitas pribadinya tetapi didukung oleh pola pengkaderan ulama. Sedangkan kiai pengaruhnya diperhitungkan oleh pejabat-pejabat mulai dari tingkat daerah hingga nasional maupun masyarakat umum, dan ini nilainya lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh ulama dimata masyarakat.

Horikhosi memberikan pemahaman bahwa antara ulama dan kiai merupakan tahapan hirarkhis, dimana posisi ulama lebih rendah dibandingkan kiai. Perbedaan pengertian yang dilakukan oleh Horikhosi nampaknya harus dikritisi sebab, terdapat bias dan inkonsistensi dengan realitas yang terbangun di dalam kultur masyarakat Islam Indonesia, khususnya Jawa.

Paling tidak ada tiga hal yang layak untuk dicermati. *Pertama*, antara ulama dan kiai bukanlah dua entitas atau figur yang dapat dibedakan secara tegas. Bahkan sangat mungkin, kedua gelar tersebut melekat pada satu orang di mana umat Islam umumnya mengasumsikan bahwa setiap kiai adalah ulama dan ulama itu juga melekat pada diri seorang kiai, dua istilah ini (ulama dan kiai) memang memiliki akar yang berbeda. Kiai berasal dari kultur Indonesia, sedangkan ulama dari al Qur'an. Kiai dari bahasa Jawa (Ziemek, Manfred, 1986: 130) yang berarti "agung," "keramat" dan "dituahkan." Untuk benda yang dikeramatkan dan dituahkan seperti keris, tombak dan benda lain yang keramatkan. Selain untuk benda, gelar kiai juga diberikan kepada laki-laki lanjut usia, arif dan dihormati. Namun kata ini dipahami secara luas untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, muslim terpelajar yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Allah serta menyebarkan

dan memperdalam ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan (Geertz, 1981 ; Horikoshi, 1987).

Dengan demikian, predikat kiai menurut Imron Arifin berhubungan dengan gelar kerohanian yang dikeramatkan, yang menekankan kemuliaan dan pengakuan, yang diberikan secara sukarela kepada ulama Islam pimpinan masyarakat setempat. Karena itu, kiai merupakan suatu tanda kehormatan bagi suatu kedudukan dan bukan gelar akademis yang diperoleh melalui pendidikan formal (Arifin, Imron, 1993:14).

Kedua, dalam konteks sosiologis masyarakat Islam Indonesia walaupun sekali lagi tidak ada pembedaan hirarkhis secara tegas, namun jika yang dimaksudkan dengan ulama justru berbeda secara diametral dengan penjelasan Horikhosi, yakni ulama memiliki pengaruh yang lebih luas dan tidak kekal dibandingkan dengan kiai, ulama menjadi karakteristik pada orang yang menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, walaupun oleh masyarakat tidak selalu disebut sebagai kiai. Sementara sebutan kiai tidak selalu bisa disebut dengan sebutan ulama. Sebab, sebutan kiai bisa melekat pada beragam karakteristik. Seiring dengan dinamika dan perubahan zaman, gelar kiai tidak hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki pondok pesantren. Hasil penelitian Endang Turmuzdi terhadap kiai di Jombang menemukan adanya beberapa tipologi kiai, yaitu kiai; kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung (Turmuzdi, Endang, 2004: 32). Keempat tipologi ini bukanlah sesuatu yang mandiri secara tegas antara satu dengan yang lainnya. Jika seorang kiai disebut sebagai kiai panggung, bukan berarti sebutan kiai yang lainnya tidak bisa melekat. Akan tetapi sangat mungkin pada diri seorang kiai melekat lebih dari satu tipologi. Misalnya seorang kiai pesantren juga juga sekaligus merupakan kiai tarekat, bahkan tidak tertutup kemungkinan keempat tipologi tersebut melekat pada satu orang kiai. Hal ini dimungkinkan karena besarnya kapasitas dan luasnya akses seseorang kiai tertentu untuk mengambil berbagai peran yang bisa diperankan dalam masyarakat luas sekaligus.

Walaupun definisi kiai telah berkembang dan mengalami perubahan tolok ukur, namun KH. Abdurahman Wahid tetap mensyaratkan bahwa gelar kiai hanya tepat diberikan kepada seorang ahli ilmu agama Islam yang memiliki pesantren dan santri. (Abdurrahman Wahid, 1984: 10). Dengan demikian orang bisa disebut kiai jika menguasai ilmu agama, memiliki pesantren dan juga santri.

Ketiga, istilah ulama telah mengalami transfigurasi makna. Dalam bahasa Indonesia ulama berarti orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990:985). Beberapa peneliti lain, di antaranya Clifford Geertz, Zamakhsari Dhofier, Karel Steenbrink, Leonard Binder dan juga Deliar Noer memberikan petunjuk bahwa antara ulama dan kiai merupakan satu kelompok masyarakat yang ahli dalam masalah hukum agama, serta memiliki kemampuan yang cermat dalam membaca pemikiran masyarakat di sekitarnya. Di samping itu karena berbagai kelebihan yang mereka miliki, mereka juga berfungsi sangat dominan dan efektif dalam mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat. Usaha membangun persatuan di dalam masyarakat ini dapat terlaksana secara efektif atas dasar kemampuannya tersebut. Mereka dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin lokal yang kharismatik yang diantut oleh masyarakat sekitarnya.

Memang antara ulama dan kiai tidak mudah untuk dibedakan. Peneliti sekaliber Clifford Geertz pun mengakui bahwa antara konsep ulama dan kiai memang cukup membingungkan dan tidak mudah untuk dibedakan (Clifford Geertz, 1960:134). Hal yang sama juga diakui oleh ahli politik Islam, Deliar Noer, konsep kiai di satu sisi mencitrakan sebagai seorang ahli agama yang shalih dan di sisi yang lain merupakan sebutan bagi orang yang memiliki ilmu mistik. Bahkan, bagi masyarakat Jawa benda-benda keramatpun diberi sebutan kiai di depan namanya (Deliar Noer,

1980:19). Hal ini menunjukkan betapa gelar kiai dalam konstruksi sosial kemasyarakatan Jawa memiliki posisi cukup istimewa.

Namun demikian dengan melandaskan diri kepada tiga pertimbangan di atas, sosok kiai dan ulama bukan sebutan yang bersifat hirakhis sebagaimana dinyatakan oleh Horikhosi sebab dalam penelitiannya, ulama merupakan satu tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kiai, padahal antara kiai dan ulama bisa jadi melekat dalam satu entitas atau individu tertentu, pun sebutan keduanya memiliki relativitas makna tergantung kepada konteks sosial, politik dan budaya masyarakat.

Di Kediri, variasi seperti itu tidak muncul secara tegas. Semua ulama bisa disebut kiai. Dengan kata lain istilah kiai tidak mesti merujuk pada mereka yang ahli dalam bidang agama dan memiliki pesantren. Akan tetapi istilah tersebut juga diberikan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki pengetahuan agama yang lebih dibanding masyarakat sekitarnya. Lebih dari itu semua, yang penting adalah pengakuan sosial masyarakat sendiri kepada mereka yang dianggap kiai (Moesa, Ali Maschan, 2007:60).

Di samping pengakuan masyarakat adalah faktor penting bagi kekiaian seseorang, unsur lain yang juga menentukan adalah pesantren, karena dengan pesantren seseorang bisa mengajarkan dan sekaligus mengamalkan ilmu syari'at agama Islam yang telah dikuasai, (Greg Fealy, 2003:23). Terdapat perdebatan sengit kapan pondok pesantren dibangun, dan siapa penggagasnya. Namun menurut sebagian ahli, pesantren pertama kali didirikan oleh Walisongo, yaitu Syeikh Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Syeikh Maghribi (Kafrawi, 1978:17). Selanjutnya orang yang berhasil mengembangkan pondok pesantren adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia pertama kali mendirikan pesantren di Kembang Kuning. Pesantren ini awalnya hanya mengasuh tiga santri; Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan Kiai Bangkuning. Kemudian Raden Rahmat pindah ke Ampel Denta Surabaya dan mengembangkan

pesantren di tempat baru ini, akhirnya ia dikenal dengan Sunan Ampel. Setelah itu muncul beberapa pesantren yang didirikan oleh santri dan putranya, seperti Pesantren Giri, oleh Sunan Giri, Pesantren Tuban oleh Sunan Bonag dan Pesantren Demak oleh Raden Fatah (Muhtarom H.M, 2005: 106).

Menurut Nurcholis Madjid dari sisi historis, pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*) (Nurcholis Madjid, 1997:3). Sebab lembaga sejenis sudah ada sejak zaman Hindu Budha sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga-lembaga tersebut. Pesantren adalah lembaga pendidikan alternatif yang biasanya memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sekitarnya. Pola patronase antara kiai dan masyarakat bahkan bisa lintas kota dan provinsi. Hal ini terjadi antara lain karena: 1) santri yang belajar di sebuah pesantren tidak hanya datang dari satu kota, tetapi lintas kota, bahkan lintas provinsi dan lintas Negara, 2) santri yang telah lulus kemudian mendirikan pesantren. Jaringan antara kiai dan santri —yang kemudian mendirikan pesantren semakin meluas— itulah asset yang dimiliki institusi kiai.

Pengaruh kepemimpinan dan jaringan kiai semakin luas memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar. Posisi kiai yang demikian dekat dengan pejabat pemerintah memudahkannya untuk berperan sebagai “agen” untuk menyampaikan pesan-pesan tentang pembangunan, dan dalam beberapa kasus tertentu masyarakat lebih mudah menerima program pembangunan dan program pemerintah bila dalam sosialisasi program tersebut disampaikan oleh dan dengan kemasan bahasa seorang kiai.

KIAI DAN NAHDHATUL ULAMA'

Sebelum mengorganisir dirinya dalam wadah Nahdhatul Ulama, para kiai sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah komunitas

atau jamaah yang memiliki tradisi sosial keagamaan dengan karakter unik, dalam bentuk penghargaan yang tinggi terhadap tradisi. Karakter unik ini menjadikannya berbeda dengan apa yang dimiliki oleh organisasi keagamaan lain seperti Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya (A. Ghaffar Karim, 1995:47).

Didirikannya NU adalah untuk menjaga dan mengembangkan ortodoksi yang ada, atau dalam bahasa lain menjaga “jamaah tradisional” ketika harus berhadapan dengan arus gerakan puritanisme Islam atau Wahabi. Gerakan Wahabi mengajak kembali kepada al-Qur’an dan Hadis, yang dalam tataran operasional menyerang tradisi para kiai, dalam bentuk pola beragama bermazhab (*taqlid*) terhadap para ulama terdahulu yang diyakini lebih memiliki otoritas dalam hal kemampuan dan pengalaman.

Kaum muslim puritan berlawanan dengan praktik keagamaan kaum tradisional yang kental dengan budaya lokal. Kaum puritan yang lebih ketat di antara mereka mengerahkan segala daya dan upaya untuk memberantas praktik ibadah yang (menurutnya) dicampur dengan kebudayaan lokal, atau yang lebih dikenal dengan praktik ibadah yang bid’ah. Kaum reformis mempertanyakan relevansinya bertaklid kepada kitab-kitab fiqh klasik salah satu mazhab.

Dengan demikian, menurut pandangan para reformis tersebut lahirnya NU tak lebih daripada penegasan formal dari mekanisme informal para kiai sebagai pemegang teguh tradisi fikih yang sudah terbentuk jauh sebelum NU dilahirkan. Inilah yang kemudian menjadikan kiai dalam NU menduduki posisi sentral, baik sebagai pendiri, pemimpin, pengendali organisasi maupun panutan warga NU (Moesa, Ali Maschan, 2007:106).

Di samping itu, lahirnya NU juga sebagai respon terhadap kolonialisme Belanda yang telah menjajah Indonesia selama ratusan tahun. Semangat anti kolonialisme telah mendorong kiai pesantren membidani lahirnya organisasi para ulama yang

kemudian disebut dengan Nahdhatul Ulama (NU). Berdirinya NU bisa dikatakan sebagai ujung dari perkembangan gagasan-gagasan para kiai yang muncul pada seperempat abad XX. Lahirnya NU diawali dengan berdirinya kelompok kebangkitan para pedagang (Nahdhatut Tujjar) pada tahun 1918, yang muncul sebagai simbol “gerakan ekonomi pedesaan”; dilanjutkan dengan lahirnya “kelompok diskusi” (*Tashwirul Afkar*) pada tahun 1922, sebagai “gerakan keilmuan dan kebudayaan”; dan diikuti dengan munculnya perkumpulan “kebangkitan semangat kebangsaan” (*Nadhatul Wathan*) yang merupakan gerakan politik lewat pendidikan. Oleh karena itu bangunan NU tidak bisa dilepaskan dari tiga aspek pokok, yaitu wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan, sosial budaya dan wawasan kebangsaan. Dengan demikian NU adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan dari kiai dan tradisi pesantren (Bruinessen, Martin, 1994: 17).

NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H., bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1926. Organisasi ini dirintis oleh para kiai yang berpaham *Ahlussunnah wal Jama’ah*, sebagai wadah untuk mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam rangka memelihara, melestarikan, memperjuangkan dan mengamalkan ajaran Islam menurut salah satu mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) serta berkhidmat kepada kepentingan bangsa, Negara dan umat Islam (PBNU, 1996:153).

Nama Nahdhatul Ulama —dan tidak nama lainnya— sengaja dipilih untuk membuktikan pentingnya posisi kiai dalam organisasi ini. Menurut Moesa, (2007:106-109), paling tidak ada dua alasan kenapa kiai memperoleh posisi kunci dalam organisasi ini. *Pertama*, sebagai organisasi keagamaan, NU sadar bahwa kekuatan sentralnya harus berada pada tokoh-tokoh yang bisa dipertanggungjawabkan secara personal, baik sisi moral maupun ilmu agamanya. *Kedua*, seorang kiai sekalipun dalam level yang paling bawah, selalu memiliki kewibawaan dan pengaruh atas

para santri dan komunitas pengikutnya. Para kiai juga memiliki jalur kewibawaan langsung dengan masyarakat di sekelilingnya dan bahkan menembus batas-batas kelompok, wilayah, bahkan lebih luas lagi (Moesa, Ali Maschan, 2007: 108-109).

Pengaruh kiai yang sudah membudaya itu oleh NU dikongkritkan dalam kepengurusan “Syuriyah” (legislatif). “Syuriyah” dalam NU memiliki posisi vital, karena memiliki kewenangan untuk membina, membimbing, mengarahkan dan mengawasi seluruh aktifitas organisasi.

Di bawah “Syuriyah” terdapat lembaga pelaksana (*tanfidziyah*), yang berperan melayani dan melaksanakan petunjuk serta kebijakan-kebijakan “Syuriyah”. Tanfidziyah tidak memiliki hak untuk menolak keputusan Syuriyah. Pola kerja demikian kelihatannya akibat dari tradisi pesantren yang sangat menekankan sikap tunduk dan mengabdikan kepada kiai.

Untuk menyokong uraian di atas, pasal 46 Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan:

Pengurus Syuriyah selaku pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai Pembina, pengendali, pengawas, dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas:

1. Menentukan arah kebijakan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tindakan untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama;
2. Memberikan petunjuk, bimbingan, dan pembinaan memahami, mengamalkan, dan mengembangkan ajaran Islam menurut paham Ahli Sunnah wal-Jamaah, baik di bidang akidah, syariah maupun akhlak/tasawuf;
3. Mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat organisasi berjalan di atas ketentuan jam’iyah.
4. Membimbing dan mengawasi Badan otonom, lembaga, dan Lajnah yang langsung berada di bawah Syuriyah;

5. Jika keputusan suatu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dinilai bertentangan dengan ajaran Islam menurut paham Ahli Sunnah wal-Jamaah, maka pengurus syuriah yang berdasarkan keputusan rapat dapat membatalkan keputusan atau langkah perangkat tersebut.

Sedangkan pasal Pasal 47 menyebutkan kewajiban dan tugas lembaga tanfidziyah sebagai berikut:

1. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana tugas sehari-hari mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pengurus syuriah;
2. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana harian mempunyai tugas:
 - a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Pengurus Syuriah;
 - b. Melaksanakan program jam'iyah Nahdlatul Ulama;
 - c. Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyah yang berada di bawahnya;
 - d. Menyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Syuriah tentang pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam menggerakkan dan mengelola program, Pengurus Besar Tanfidziyah berwenang membentuk tim kerja tetap atau sementara sesuai kebutuhan;
4. Ketua Umum Pengurus Besar, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Ketua Pengurus Ranting karena jabatannya dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Syuriah sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
5. Pembagian tugas di antara anggota Pengurus Tanfidziyah diatur dalam Peraturan Tata Tertib (PBNU, 1996:121-122).

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa ada tiga pilar kekuatan organisasi NU yang menjadikannya mampu eksis ditengah tatanan

sosial masyarakat Indonesia pada umumnya dapat ditilik dari beberapa sisi berikut ini: *Pertama*, basis ulama yang tergabung dalam Syuriah dan tanfidziyah, yang digambarkan memiliki konsistensi gerakan karena berfungsinya dua struktur yang saling melengkapi; struktur formal diatur secara organisatoris dan struktur informal tumbuh dari interaksi antara ulama dengan politisi.

Kedua, basis massa (struktur klasifikasi) yang bertumpu pada massa pondok pesantren yang umumnya terdapat di daerah pedesaan, dimana ke duanya merupakan satu kesatuan yang tampak utuh. *Ketiga*, tradisi yang dimanifestasikan dalam pola hubungan ulama politisi massa menjadi tradisi-tradisi yang dianut secara teguh (Machrus Irsyam, 1981:37-19).

Posisi dan penghargaan terhadap kiai di dalam NU yang demikian besar itu merupakan fakta empiris bahwa kiai telah cukup lama dan intens mendedikasikan dirinya dalam berbagai peran di tengah-tengah masyarakat.

BENTUK-BENTUK PERAN KIAI

Berikut ini adalah gambaran tentang peran-peran kiai di tengah-tengah masyarakat yang dapat penulis ungkapkan dari pengamatan dan kajian-kajian dari berbagai sumber:

- **Sebagai Tokoh Agama**

Kiai sebagai tokoh agama diposisikan sebagai sosok yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tindakan seseorang atau masyarakat sah menurut agama atau tidak. Karena kemampuannya melakukan *istinbath* dalam bidang agama, asumsi ini membawa kebiasaan pada seseorang atau masyarakat sering mendatangi kiai untuk meminta petunjuk dalam bidang ritual keagamaan. Posisi kiai sebagai "*panotogomo*" atau penata agama menjadikannya sangat dihormati, disegani, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat sekitarnya.

Abdurahman Mas'ud menjelaskan hubungan antara masyarakat-kiai akibat dari pendekatan dan kebijakan Walisongo yang melembaga dalam esensi budaya pesantren (Mas'ud, 2002:8). Budaya pesantren adalah representasi hubungan bapak-anak, kiai sebagai pengayom santri dan pengayom masyarakat sekitar pesantren.

Peran keagamaan kiai semakin menonjol dengan beberapa posisi yang dimiliki lembaga kekhilafan dan otoritas dalam bidang keagamaan, banyak lembaga masyarakat disatu sisi yang menjadikan seseorang menonjol kekhilafannya karena eksisnya lembaga tersebut, di antaranya:

a. Pemimpin Pesantren

Sejarah mencatat bahwa pesantren untuk pertama kali didirikan oleh Walisongo. Di Jawa Syekh Maghribi atau Raden Malik Ibrahim adalah orang pertama yang membangun pesantren (Haidar P. Daulay, 2001:7-34). Melalui pendekatan kebudayaan, Walisongo berhasil mengislamkan tanah Jawa. Upaya Walisongo untuk menyatukan antara Islam dan budaya Jawa sangat ampuh menarik masyarakat memeluk agama Islam. Strategi dakwah demikian mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena masyarakat merasa tidak meninggalkan budaya asalnya sembari memeluk agama baru itu (Islam). Pendekatan dakwah tersebut melembaga dalam dunia pesantren di Jawa.

Sekalipun kini ada sejumlah pesantren yang dikelola dengan manajemen modern, namun jumlahnya tidak besar, sehingga sebagian pesantren masih merupakan pewaris dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh Walisongo atau paling tidak menggabungkan antara pola pesantren dengan pendidikan modern. Inilah yang tetap menjadikan kiai sebagai tokoh utama dalam pesantren dan masyarakat sekitarnya.

b. Imam Masjid

Masjid merupakan bagian tata lembaga keagamaan masyarakat muslim pada umumnya, dalam prakteknya masjid

dikelola ketakmiran yang mengusahakan kebersinambungan kegiatan didalamnya. Ada kegiatan pokok dan ada kegiatan tambahan. Kegiatan pokok biasanya terdiri dari penyelenggaraan ibadah bersama di Masjid mulai dari yang wajib hingga yang sunnah, yang rutin hingga yang berkala.

Terhadap kegiatan ibadah yang rutin biasa di tunjuk dan di pilih seorang atau beberapa orang untuk menjadi pemimpin atau Imam dalam melaksanakan ibadah tersebut. Penunjukan seorang atau beberapa orang untuk menjadi Imam biasanya didasarkan atas beberapa kriteria tertentu yang tidak tertulis, akan tetapi hampir ada keseragaman dipilih diantara anggota jama'ah masjid yang dinilai dan dianggap paling menonjol dalam bidang pengetahuan agamanya dalam kapasitas dan strandar yang berbeda-beda.

Posisi seseorang yang telah tertujuk untuk menjadi Imam suatu masjid sekaligus menjadikan dirinya untuk memimpin beberapa kegiatan sosial keagamaan yang berada di lingkup masyarakat sekitar Masjid. Berawal dari masjid dalam tatanan sosial masyarakat pada umumnya akan menjadikan seorang Imam masjid mempunyai otoritas tertentu dimasyarakat sekitar masjid. Dan pada gilirannya menjadikannya mempunyai peran dimasyarakat lingkungan Masjid.

c. Mursyid Tarekat

Tarekat mulai berkembang dan memiliki pengaruh besar di Indonesia pada abad ke-6 dan ke-7. M Oleh karena itu, Mukti Ali menyatakan keberhasilan pengembangan Islam di Indonesia yang paling menonjol adalah dakwah yang ditempuh melalui jalur tarekat dan tasawuf.

Sejak masuknya, bangsa Indonesia telah mengenal ahli fikih, ahli teologi dan sebagainya. Namun yang terkenal adalah syeikh tarekat seperti Hamzah Fansuri (Abd Hadi WM,1994: 48), Syamsuddin Sumatrani (Abdul Aziz Hasan, 1992: 98), Nuruddin Ar

Raniri (Mastuki HS., 1997: 51) dan Abdul Rauf Singkel (Abdullah, Haswab, tt: 35-177) dan disusul oleh tokoh-tokoh lain seperti syeikh Muhammad Yusuf Tajul Khalwati, dan lain sebagainya.

Sedangkan di Jawa, kita mengenal tokoh-tokoh Walisongo. Bahkan nama-nama tersebut masih dikenal hingga sekarang, ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia melalui tarekat dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Peran kiai sebagai mursyid pada mulanya berawal ketika pada abad ke-18, pelajar Indonesia yang belajar di Arab mulai tertarik untuk memperdalam tarekat di bawah bimbingan sufi kharismatik, Muhammad Abd al Karim al-Saman (1718-1775) di Madinah. Salah satu tokoh Indonesia yang menjadi murid al Saman dan yang paling terkenal adalah Abd al Shamad al Palinbani. Tarekat ini kemudian dikenal dengan Samaniah, merujuk kepada nama pendirinya as Saman. Perkembangan tarekat ini tidak hanya terbatas di Sumatera, tetapi telah merambah ke Sulawesi, Kalimantan bahkan Jawa.

Sedangkan tarekat Syatariyah, di perkenalkan di Jawa oleh murid Abd ar Rauf Sinkel, yang bernama Abdul Muhyi di Jawa Barat. Dari provinsi ini kemudian merambah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara tarekat Qadiriyyah dibawa ke Jawa oleh Abdul Karim al Bantani, yang merupakan murid Syeikh Khatib Sambas, yang kemudian di kembangkan di Cirebon oleh KH. Tholhah, dan di Madura oleh KH. Hasbullah.

Pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan juga merupakan pusat pengembangan tarekat. Beberapa pesantren bahkan menjadi kantong-kantong tarekat, di antaranya Mranggen Demak, Popongan Klaten, Magelang, Tasikmalaya, Cirebon, Bogor, Jombang dan Kediri (Jamil, M. Muhsin, 2005: 79).

- **Legitimotor Kekuasaan**

1. Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah

Keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan oleh Pemerintahan Soeharto, pada masa yang

lampau tidak bisa dilepaskan dari peran para kiai. Peran kiai dalam menyosialisasikan KB kepada masyarakat dalam bahasa Horikhosi dikenal dengan “mediator”, artinya kiai berperan sebagai orang-orang atau kelompok yang menempati posisi penghubung dan perantara antara masyarakat dan sistem nasional yang bercorak perkotaan (Hiroko Horikhosi, 1987: 5). Melalui kiai, pejabat pemerintah mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah dan masyarakat terjadi saling pengertian, begitu juga sebaliknya, melalui kiai, elit penguasa bisa memahami aspirasi dan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Lahirnya kerjasama antara pemimpin agama dan pemerintah merupakan fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan umat beragama. Di Eropa pada abad pertengahan, perseketuan bahkan kemandirian antara gereja dan elit penguasa adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan, hal demikian juga terjadi di agama lain, termasuk Islam. Perseketuan tersebut masih tetap berlangsung sampai sekarang.

Dari sudut formal keagamaan, kerjasama antara dua elit tersebut tidak apa-apa. Sebab kerjasama tersebut tidak dipandang buruk oleh agama. Agama bagaimanapun adalah rahmat bagi seluruh manusia, tidak pandang miskin, kaya, penguasa atau rakyat. Sehingga sebenarnya yang terpenting adalah untuk kepentingan siapa kerjasama itu dibangun (Mas’udi, Masdar Farid, 1991: 202-205). Landasan kiai untuk menjalin kerjasama tersebut adalah untuk membela atau menegakkan keadilan sosial, membela mereka yang terpinggirkan.

Ketulusan kiai untuk mendukung program-program pemerintah, kadang dinilai oleh sebagian pihak sebagai sesuatu yang negatif sehingga muncul statemen “kiai pro pemerintah”, “kiai pragmatis” dan lain-lain. Padahal di sisi lain masyarakat — terutama pedesaan— memosisikan kiai sejajar dengan pemimpin formal, layaknya pemerintah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh

kultur pedesaan yang agraris. Kultur agraris berpengaruh terhadap pola relasi dan juga peradaban yang dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari (Mubin, Nurul, 2006: 72).

2. Dukungan terhadap calon kepada daerah tertentu

Sistem pemilihan langsung mendorong para calon kepala daerah (bupati/wali kota, gubernur dan lain-lain) berusaha untuk meraup suara sebesar-besarnya. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mendulang suara, di antaranya mendekati tokoh masyarakat atau tokoh agama.

Kiai sebagai orang yang dianggap bisa menyumbangkan suara yang cukup signifikan bagi calon kepala daerah menjadi rebutan para kandidat. Dalam Pemilu di Kota Kediri yang baru saja usai dilakukan tampak sekali terjadi tarik menarik dukungan dari para pemangku pesantren, hal yang sama juga terjadi pada Pemilihan Gubernur.

Hampir setiap kandidat memiliki atau menjadikan kiai tertentu sebagai bamber, bahkan beberapa kiai pemangku pesantren besar, telah dieksploitasi sedemikian rupa melalui iklan media cetak maupun elektronik, hanya sekedar untuk membuktikan bahwa calon x telah didukung kiai y.

Dalam masyarakat yang masih menjadikan kiai sebagai patron, pengaruh kepemimpinan kiai bahkan lebih besar daripada pemimpin formal, sehingga pendapat kiai lebih didengar daripada lurah, camat, bupati, gubernur bahkan presiden. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan informal kiai sangat besar pengaruhnya terhadap dinamika masyarakat. Faktor inilah yang mendorong para calon atau kandidat wali kota/bupati, gubernur bahkan presiden untuk saling berebut untuk menjadikan kiai sebagai pendukung utamanya.

• **Mediator Penyelesaian Konflik**

Peran kiai di tengah-tengah masyarakat menjadi penting ketika ia mampu memainkan peran tersebut sesuai dengan norma yang dipegang oleh masyarakat, sebaliknya jika peran itu

tidak dijalankan sesuai dengan norma tersebut maka nilai penting kiai di tengah masyarakat juga akan semakin terkikis.

Diantara posisi yang biasa diperankan oleh kiai dalam menjaga kondusifitas masyarakat adalah kemampuannya menunjukkan sikap teduh, pengayom dan tuntunan yang selalu memberikan tauladan bagi masyarakat, sehingga saat terjadi konflik di masyarakat, peran mediator bisa diambil dengan mudah oleh kiai, hal ini terjadi karena ada beberapa posisi dan kondisi psikologis yang khas yang hanya dimiliki oleh kiai, diantara kekhasan yang dimiliki kiai itu adalah;

a. Kiai sebagai *hakam*

Menurut Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas'ud, Kiai dalam dunia pesantren memiliki posisi strategis, posisi demikian tidak bisa dipisahkan dari konstruksi sosial yang ada dalam lingkungan pesantren. Posisi demikian menjadikan kiai sebagai elit tradisional. Hal mana yang paling berbakat akan menempati posisi yang tinggi dalam klasifikasi sosial. (Mochtar Mas'ud & Colin MacAndrews, 1982: 56).

Pesantren umumnya memiliki pengaruh sampai keluar, sehingga posisi kiai sebagai elit tidak terpengaruh lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam beberapa kasus pesantren adalah "kerajaan kecil" sehingga kiai adalah penguasa tunggal dan mutlak dalam ritme kehidupan pesantren. Hal demikian sebenarnya bukan barang baru, karena dalam kitab *ta'limul muta'alim*, salah satu buku tentang etika belajar-mengajar yang masih menjadi rujukan di kebanyakan pesantren mengajarkan bahwa guru (baca: kiai) adalah tokoh sentral dalam proses pembelajaran dan tidak boleh dikritisi, murid (santri) tidak boleh mengkritisi atau menggugat pendapat kiai (Zamakhshari Dhofier, 1982: 56). Doktrin pembelajaran tersebut mengantarkan kiai dalam posisi strategis dan seakan mutlak.

Pada Pemilu 1999 di Desa Kalibeber Wonosobo terjadi perselisihan antara dua ormas Islam terbesar di Indonesia—NU dan

Muhammadiyah—yang dipicu oleh konflik pada kampanye antara PAN dan PKB. Pertikaian kedua partai politik ini mengakibatkan beberapa rumah warga rusak akibat amukan massa, sementara beberapa pendukung partai mengalami luka-luka, dalam konflik ini pemerintah tidak mampu berbuat banyak, akhirnya KH Muntaha—tokoh agama setempat—menjadi mediator perselisihan tersebut untuk mencapai kesepakatan damai, dan konflik bisa diselesaikan secara kekeluargaan (Haramain, Malik, MF Nur Huda, 1999).

b. Kiai sebagai pemberi fatwa

Kontribusi kiai dalam penyelesaian konflik selain sebagai *hakam* juga sebagai pemberi fatwa. Syarat seseorang bisa sebagai pemberi fatwa adalah 1) harus orang yang bisa diterima oleh kedua pihak, 2) harus sebagai orang yang bisa dipercaya dan cakap (*capable*). Pengambilan keputusan akhir sama seperti posisi mediator. Fatwa bisa keluar dari tim mediasi atau dari kiai yang lebih disegani. Bila format penyelesaian sudah difatwakan, maka tim mediasi dan pihak yang berkonflik akan mematuhi keputusan tersebut.

Karena kiai sebagai panutan, yang menjadi keputusannya akan diikuti. Pemberi fatwa dalam konteks resolusi konflik ini berbeda dengan *mufti* dalam institusi keagamaan Islam formal, sebagaimana mufti Mesir, mufti Arab Saudi, dan juga berbeda dengan pemberi fatwa dalam praktek peradilan atau fatwa Mahkamah Agung.

Pemberi fatwa dalam konteks ini tak lebih dari pemberi *tausiyah*, namun tetap memiliki bobot untuk ditaati. Dalam konteks pencalonan Gus Dur pada pemilu tahun 2008 tak bisa dilepaskan dari peran *tausiyah* ini.

ORIENTASI SOSIAL POLITIK KIAI

Di Indonesia, kiai memperoleh penghargaan dan posisi yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini terjadi

antara lain karena faktor sejarah penyebaran Islam di Indonesia terjadi ketika supremasi institusi *khilafah* sangat lemah. Memang ada lembaga politik Islam yang bernama sultan (kesultanan dari Aceh sampai di ujung timur Nusa Tenggara) pada awal-awal Islam di Indonesia, tetapi lembaga ini tidak mempunyai legitimasi yang kokoh di dalam masyarakat Islam. Hanya sedikit corak Islam keraton yang berkembang pada periode berikutnya, dan ulama tetap menjadi dermaga yang paling kokoh melindungi masyarakat, ketika perubahan-perubahan politik terjadi dengan cepat pada masa kolonialisasi.

Oleh karena itu ketika kesultanan terserap dalam sistem politik dan ekonomi kolonial, ulama membangun basis sosialnya semakin kokoh dengan munculnya pesantren-pesantren yang tersebar luas (Fealy, 2003:xv).

Oleh karena itu, ulama tidak lagi semata-mata berurusan dengan perumusan aspek-aspek doktrinal dari Islam, tetapi ia harus merumuskan pula bentuk ideologis dari Islam, sebagai akibat dari dialog yang intens dengan lingkungan sosial politik dan budaya masyarakat.

Dari sinilah kemudian Endang Turmudzi membagi kiai ke dalam beberapa tipologi, bahkan seorang kiai bisa dimasukkan kedalam lebih dari satu tipologi, sebagai akibat dari peran yang dimilikinya di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun peran yang dimilikinya bermacam-macam—di samping peran utama dalam bidang keagamaan-- kiai mendasarkan seluruh perannya dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*" (Patoni, Ahmad, 2007, 158).

Inilah orientasi kiai dalam menjalin hubungan dengan penguasa. Konsep ini diletakkan dalam perspektif yang sangat luas. Konsep ini memiliki fungsi yang urgen, karena tatanan dan perilaku sosial yang diperankan oleh penguasa banyak yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Dengan terjalinnya relasi antara kiai dan pejabat, kiai mencita-citakan terkontrolnya perilaku pejabat sehingga tidak menyimpang dari kesewenang-wenangan

dan lebih jauh tidak menyimpang dari ajaran dan nilai agama. Perspektif inilah yang menjadi landasan para kiai.

Penerjemahan *amar ma'ruf nahi munkar*'' itulah yang melahirkan pelbagai peran yang dimiliki oleh seorang kiai. Menurut Achmad Siddiq, dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, kiai yang tergabung dalam organisasi NU harus aktif dalam semua aspek dan bidang kegiatan (legislatif, eksekutif, dan lain-lain), termasuk menggunakan hak-haknya di lembaga legislatif untuk menyampaikan pendapat, usulan dan perbaikan (Siddiq, Achmad, 1969: 23).

Penerjemahan yang demikian melahirkan kiai-pengusaha, kiai- politisi dan bentuk-bentuk peran lain. Kata *ma'ruf* diletakkan dalam konteks yang sangat luas, baik dalam bidang politik, maupun ekonomi. Dalam al Qur'an disebutkan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ (110)

Kuntum Khoiro ummatin Ukhrijat lin naasi takmuruuna bil makrufi wa tanhauna 'anil munkari wa tukminuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khoiron lahum minhumul mukminuna wa aksaruhumul fasikun.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (ma'ruf) dan mencegah kemunkaran; mereka adalah orang-orang yang beruntung (QS. 3:104; 3:110; 3:114; 7:157; 9:71; 22:41 dan 31: 17).

Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim, sekalipun demikian para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam penerapannya. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa semua kegiatan bahkan memaksa dan melakukan kekerasan boleh dilakukan dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa cara-cara damai seperti berdiskusi, berdebat dan memberikan contoh

pribadi sudah cukup (Aboebakar, 1968: 62-63). Pendekatan yang terakhir inilah yang menjadi pijakan kiai dalam perilaku sosial dan politiknya.

TIGA JENIS POLITIK KIAI

- **Politik Kebangsaan**

Politik kebangsaan adalah menjaga keutuhan NKRI. Dalam pengertian ini di Indonesia, sejak berdiri institusi kiai NU sudah berpolitik, dalam pengertian membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (KNRI). Perhatian para kiai dalam menjaga keutuhan KNRI yang merupakan tujuan politik jenis ini dapat dilihat dari sikap dan kiprah mereka sejak Pimpinan Puncak organisasi para kiai ini, KH. Hasyim Asy'ari mencanangkan fatwa jihad melawan penjajahan pada bulan Oktober 1945, menetapkan *waliyyul amri adh-dharuri bisy-syaukah* tahun 1952.

Setelah ditelisik lebih dalam lagi ternyata keputusan ini tidak sekedar untuk melegitimasi kekuasaan Soekarno dan tanpa pertimbangan dasar berpikir yang transenden, akan tetapi lahirnya keputusan tersebut telah melewati sebuah proses kajian fikih yang cukup panjang dan serius lagi pula semangat yang di usung pun sangat terkait dengan kemaslahatan umat.

Rujukan putusan ini dari sisi kaidah fiqh itu penting sekali, terutama untuk menangkal logika hukum yang memandang bahwa kekuasaan presiden tidaklah sah, karena tidak dipilih secara benar. Apabila anggapan itu dibenarkan, (dalam logika hukum) maka semua keputusan pemerintah juga tidak syah, yang pada gilirannya berimplikasi pada ketidakabsahan Menteri Agama bertindak sebagai *hakam*, dan pada gilirannya ketidakabsahan penghulu-penghulu yang mengawinkan orang, bila logika hukum ini diruntut terus maka penghulu yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai "naib" untuk melakukan prosesi akat nikah dalam upacara perkawinan ditengah masyarakat juga tidak

syah. Dan bila perkawinan masyarakat tidak syah, implikasinya sangat banyak anak-anak zina di negeri ini.

Pada masa Orde baru, keputusan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal tahun 1984 juga melalui kajian fiqh serius dan bukan melegitimasi Orba, begitu juga *taushiyah* reformasi tahun 1998. Perhatian organisasi para kiai ini dalam menjaga keutuhan NKRI itu sering dipahami secara salah sehingga organisasi ini sering dicap sebagai “oportunis”.

- **Politik Kerakyatan**

Politik kerakyatan, adalah implementasi dari *amar makruf nahi munkar* yang ditunjukkan oleh pejabat untuk membela rakyat. Sehingga dalam setiap program pemerintah harusnya mengandaikan pada upaya nyata menyejahterakan rakyat.

Namun karena porsi pemerintah dalam wilayah ini tidak serta merta langsung membawa hasil, peran ini kemudian sering diambil alih oleh generasi muda melalui pembentukan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pusat-pusat Studi, dan umumnya mereka ini dari kalangan muda yang punya dedikasi, apa lagi setelah mereka melihat NU secara struktural pun masih dianggap kurang peduli terhadap masalah ini.

Namun belakangan perkembangan politik kerakyatan ini sangat membanggakan, sejumlah pesantren telah menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Pesantren dan kiai tidak hanya berkutat dengan “kitab kuning” tetapi sudah merintis aktifitas ekonomi, melalui koperasi pondok pesantren (Kopontren) maupun *Bait al mal wa al tanwil* BMT.

- **Politik Kekuasaan (Praktis)**

Politik kekuasaan atau lazim disebut politik praktis adalah keterlibatan para kiai dan organisasi NU dalam politik praktis, misalnya menjadi pengurus partai atau bahkan menjadikan NU

sebagai partai politik. Bentuk politik ketiga ini akhir-akhir ini nampaknya lebih menarik para kiai daripada dua bentuk politik sebelumnya. Ini terjadi karena sejarah NU yang pernah jadi pemenang ketiga pada Pemilu 1950-an. Sejak itu syahwat politik terus membara bahkan merebak di sekujur tubuh NU. Inilah yang menjadikan NU seolah menjadi incaran, tidak hanya oleh intern warga NU tetapi juga orang-orang partai yang mendorong agar agar para kiai menjadi pengurus partainya dengan harapan agar suara partai politik yang bersangkutan bisa menggelembung. Dampaknya pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak kalah mulia yang seharusnya menjadi prioritas perjuangan para kiai seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan dakwah, acapkali terbengkalai.

PEJABAT, BIROKRASI, DAN KARAKTERISTIKNYA

Kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak atas pihak lain (Samsul Wahidin, 2007:1). Istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power*, *macht* (bahasa Belanda) dan *pouvoir* atau *puissance* (bahasa Perancis). secara umum dimaknai sebagai kekuatan atau kemampuan untuk memaksakan suatu tindakan tertentu.

Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah kekuasaan (*power*) berarti: "The right, ability, authority, or faculty of doing something. . . . A power is an ability on the part of a person to produce a change in a given legal relation by doing or not doing a given act" (Black, Henry Campbell, 1990).

Istilah kekuasaan berbeda maknanya dengan kewenangan. Dalam literatur Bahasa Inggris istilah kewenangan atau wewenang disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Marbun, 1997). Berdasarkan definisi tersebut di atas, kekuasaan secara

sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedangkan, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan dengan hukum positif baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pekerjaan pemerintahan tertentu.

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menganut sistem negara hukum, kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dalam suatu bidang tertentu. Hal ini berarti kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi.

Di samping wewenang resmi (formal authority) kekuatan fisik juga merupakan sumber kekuasaan. Namun dua hal itu bukan satu-satunya sumber kekuasaan. Memang dalam kenyataan, orang yang memiliki pengaruh politik atau keagamaan dapat lebih berkuasa dari pada orang yang berwenang atau memiliki kekuatan fisik. Kekayaan (uang) atau kekuatan ekonomi lainnya juga merupakan sumber-sumber kekuasaan yang penting, sedangkan dalam keadaan-keadaan tertentu kejujuran, moral yang tinggi dan pengetahuan pun tak dapat diabaikan sebagai sumber-sumber kekuasaan.

Jadi, kekuasaan adalah fenomena yang beraneka ragam bentuknya dan banyak macam sumbernya. Hanya, pada hakekatnya kekuasaan itu tetap sama, yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.

Menurut amatan sejarah, kekuasaan itu mempunyai suatu sifat yang khas, yakni ia cenderung untuk merangsang bagi yang memilikinya untuk lebih berkuasa lagi. Kekuasaan haus akan lebih banyak lagi kekuasaan (Kusumaatmadja, Mochtar tt). Dalam kaitannya dengan kekuasaan (power), Lord Acton telah memperingatkan bahwa: "Power tends to corrupt; and absolute

power tends to corrupt absolutly” semakin besar kekuasaan, akan semakin besar pula kecenderungan untuk disalahgunakan (Budiardjo, Miriam, 1993). Karena itu, dalam konsep negara hukum, sumber untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan serta batas-batasnya harus secara jelas diatur dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan. Inilah esensi kekuasaan menurut konsep negara hukum (rule of law). Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologis, ide rule of law mengandung makna bahwa otoritas harus diberi bentuk hukum dan bahwa kekuasaan harus dilaksanakan dengan cara-cara hukum.

Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena bagi pemegang kekuasaan diperlukan syarat antara lain kejujuran dan rasa pengabdian yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002). Ia merupakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib, bahkan bagi setiap organisasi yang teratur seperti negara (Soekanto, 1 Soerjono, 977).

“Penguasa” dalam konteks penelitian ini adalah birokrasi. Blau & Meyer, (1971) dalam Setiawan menyatakan bahwa birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor; dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Jadi pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktifitas-aktifitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Birokrasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu pembagian kerja dan spesialisasi kerja, prinsip hirarkhi, peraturan-peraturan,

impersonality, kualifikasi teknis, dokumen-dokumen tertulis, dan kelangsungan kerja dalam organisasi (Setiawan, Akhmad, 1998:4-10).

Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”.

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparaturnya pemerintah (Miftah Thoha, 1991).

Birokrasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Para anggota staf secara pribadi bebas hanya menjalankan tugas-tugas jabatan mereka.
- b. Adanya hierarki jabatan yang jelas.
- c. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas.
- d. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.
- e. Mereka dipilih berdasarkan kualitas profesional, idealnya didasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian.
- f. Mereka memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki.
- g. Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya.
- h. Terdapat suatu struktur karir, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbangan keunggulan (superior).
- i. Pejabat mungkin tidak sesuai baik dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut.
- j. Ia tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam (Miftah Thoha, 1991).

Dalam konteks penelitian ini ungkapan birokrasi digunakan untuk merujuk pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kediri, mulai Tingkat Camat atau jabatan dalam struktur bidang pemerintahan lainnya yang sejajar dengannya, seperti Kapolsek, Danramil, sampai Wali Kota atau Jabatan dalam struktur bidang pemerintahan lainnya yang setara dengannya, seperti Kapolres, Komandan Kodim dan lain sebagainya.

PASANG SURUT RELASI KIAI DAN PEJABAT

Interaksi sosial adalah hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu (Narwoko, J. Dwi, Bagong Suyanto, 2006:20).

Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya hubungan sosial, sedangkan komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan (J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, 2006:20). Menurut Herbert Blumer interaksi sosial terjadi pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah, perubahan terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga dengan *interpretative process* (Poloma, Margaret, 1994:264-266).

Relasi kiai dan pejabat mengalami pasang surut sepanjang sejarah panjang bangsa Indonesia. Mulai zaman kerajaan kiai telah menjalin interaksi dengan pejabat. Menurut Z.A. Noeh sebagaimana dikutip A. Ahmad bahwa pada Masa kerajaan Mataram (1613-1645) terdapat tiga serangkai jabatan dalam

pengelolaan negara: raja atau bupati, patih, dan penghulu (A. Ahmad bahwa, 1996:70). Pengelolaan Agama ditugaskan kepada para penghulu dan pegawainya. Mereka disebut “kaum”. Para kaum biasanya tinggal di belakang masjid (kampung kauman), tugas mereka adalah memberikan pelayanan keagamaan termasuk di dalamnya hukum keluarga atau perkawinan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pada zaman Belanda ada istilah Kiai “penghulu” yang tugas utamanya sebagai pelaksana bidang kehakiman (*at tasyri’ wa al qadla’*) yang menyangkut syariat Islam. Kiai ini juga dikenal dengan kiai pejabat, karena mereka diangkat oleh pemerintah Belanda (Ismail, Qoyim, 1997:63-64).

Dalam mempertahankan kemerdekaan para kiai membentuk barisan perang *hisbullah* (tentara Allah) dan *Sabilillah* (Jalan Allah), bahkan di antara mereka juga banyak yang terlibat dalam PETA (Pembela Tanah Air), bahkan dari enam puluh batalyon tentara PETA, hampir separo komandannya adalah para kiai (PWNU Jatim, 1995:181). Hal ini menunjukkan bahwa peran kiai dalam masa perjuangan nasional sangat besar dalam mengantarkan negeri ini menuju gerbang kemerdekaan.

Menjelang detik-detik kemerdekaan para kiai bersama-sama unsur lain juga terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di antara mereka adalah KH. A. Wahid Hasyim, KH. Mohamad Hasan (Ahmad Syafi’i Ma’arif, 1985:109) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Haidar, M. Ali, 1994:293) yang di antara tugasnya adalah menyusun Piagam Jakarta dan UUD 1945.

Melacak fakta sejarah di atas terlihat hubungan yang erat antara kiai dan perumusan dasar-dasar berbangsa dan bernegara di satu sisi, dan dengan pemerintah di sisi lain, sekalipun di sana sini seringkali muncul sejumlah ketegangan. Ketegangan yang sempat muncul adalah ketika rumusan awal sila pertama Pancasila berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, namun setelah melalui diskusi panjang akhirnya sila pertama menjadi: “Ketuhanan Yang Mahasa Esa” (Ma’arif, Ahmad Syafi’i, 1985:109).

Pada masa Pemerintahan Soekarno organisasi para kiai (Nadhatul Ulama) bahkan pernah mengambil keputusan yang sangat menentukan yaitu keabsahan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dengan julukan *waliy al amr adh dharuri bisy syaukah* (presiden yang sah dalam keadaan darurat yang secara *de facto* memiliki kekuasaan). Keputusan ini diambil karena Soekarno menjadi Presiden tidak melalui pemilihan umum, dan sebagian umat Islam belum memberikan pengakuan formal (*bai’at*) kepadanya (M Amin. Masyhur, 1996: 103).

Pada masa Pemerintahan Soeharto interaksi kiai dan pejabat diawali dengan ketegangan-ketegangan. Pemerintah sering melakukan tekanan apabila kiai tidak akomodatif terhadap pemerintah. Bahkan berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk menandingi “kekuasaan kiai”. Pemerintah di tingkat kecamatan di berbagai Kabupaten di Jawa Timur sering tidak memberikan izin terhadap kegiatan Dakwah. Karena menurut pemerintah acara pengajian telah dijadikan ajang untuk mengkritik pemerintah oleh kiai anti pemerintah. Di samping itu pada saat-saat menjelang Pemilu (1971, 1977) Pemerintah sering menekan kiai agar memberikan suaranya kepada Golkar (Turmuzi, Endang, 2004:268).

Puncak dari ketegangan itu adalah diberlakukannya asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik. Bagi kiai khususnya dan umat Islam umumnya penghapusan asas “Islam” dari sebuah organisasi memunculkan kekhawatiran akan dijadikannya Pancasila sebagai agama baru. Organisasi besar semisal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengalami goncangan besar menghadapi perubahan ini, dan akhirnya HMI terbelah menjadi dua, HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) yang tetap memakai asas Islam dan HMI

Diponegoro (sering disingkat dengan HMI DIPO, karena kantor pusatnya terletak di Jalan Diponegoro) yang dasarnya berubah dari Islam menjadi Pancasila.

Dalam perkembangannya, justru para kiai yang terhimpun dalam organisasi NU yang pertama kali menuntaskan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Bahkan KH. As'ad Samsul Arifin—salah seorang tokoh penting dalam NU waktu itu—menyatakan bahwa wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia menerima Pancasila (Maksoem Machfoedz, tt:40). Dalam hal ini Bruinessen menegaskan bahwa yang paling berperan dalam merumuskan penerimaan Asas Tunggal ini adalah KH. Ahmad Siddiq. Bahkan dengan amat meyakinkan kiai ini mampu membujuk para kiai untuk menerima Pancasila dengan rumusan yang sesuai dengan paham Aswaja yang dianut oleh mereka (Bruinessen, Martin Van, 1994: 136).

Situasi sosial politik pada saat itu kurang mendukung kiai berhubungan dengan pemerintah. Umat Islam umumnya memandang negatif terhadap para kiai terlibat menjadi “mesin pemerintah.” Ketika seorang kiai mendukung pemerintah dan bergabung dengan Golkar, ia akan ditinggalkan oleh pengikutnya dan rekan sesama kiai. Kiai Musta'in, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang adalah salah satu contohnya (Turmuzdi, Endang, 2004:265-267).

Pemerintah sangat sadar bahwa posisi kiai dalam masyarakat sangat dihormati dan telah lama terlembagakan dalam pola patron-klien, sehingga untuk mempengaruhi tindakan sosial politik masyarakat serta dalam mengarahkan mereka untuk menerima langkah-langkah itu, pemerintah melalui lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah berupaya untuk melibatkan kiai dalam mesinnya. Dalam masalah KB (Keluarga Berencana) misalnya kiai-kiai di MUI-lah yang pertama menyampaikan bahwa pembatasan keturunan tersebut secara prinsip tidak ada larangan dan bahkan diperbolehkan menurut syari'at agama Islam.

Tahap berikutnya hubungan kiai dan pemerintah tampak mulai harmonis. Pada tahun 1990-an banyak kiai yang menunjukkan simpati kepada pemerintah dan menjalin relasi. Ada dua alasan kenapa terjadi perubahan sikap ini, *Pertama*, pemerintah adalah pemimpin sebagaimana para kiai, dan legitimasi kekuasaan yang pertama perlu didukung selama ia tidak korup;

Kedua, pemerintah telah berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat. Pergeseran perilaku kiai ini, diimbangi oleh sikap-sikap pemerintah yang semakin simpati kepada umat Islam. Dalam hal pengajian atau kegiatan dakwah, tidak ada lagi pemantauan secara ketat, dan izin yang diajukan oleh penyelenggara tidak memakan waktu yang lama, apalagi jika pihak penyelenggara memiliki kartu anggota partai pemerintah (Turmudzi, 200 Endang, 4: 270).

Pasca Orde Baru relasi Kiai dan pejabat semakin membaik, jika pada sebelumnya relasi keduanya diwarnai dengan ketegangan-ketegangan, hal demikian tidak terjadi pada zaman Reformasi. Pada masa ini banyak kiai yang terlibat di dalam kekuasaan, mereka masuk dalam struktur partai politik, bahkan salah seorang kiai sempat menjadi Presiden ke-4. Setelah melalui Perdebatan Panjang dalam sidang di Senayan akhirnya KH. Abdurahman Wahid sempat menjadi Presiden ke-4 di Indonesia. Sedangkan KH. Robbah Maksum, salah seorang Kiai di Gresik menjadi Bupati selama dua periode, begitu juga dengan jabatan-jabatan lainnya, mulai Gubernur, Bupati sampai camat dan lain sebagainya. Kelihatannya inilah era perubahan terbesar pada dunia kiai di Indonesia.

PERSPEKTIF RELASI KIAI-PEJABAT DAN TEORI TERKAIT

Pendekatan penelitian ini akan menggunakan teori utama konstruksi sosial. Mengingat posisi kiai dan pejabat pemerintahan adalah posisi penting dalam sebuah komunitas di tengah masyarakat Indonesia, dan untuk melengkapai pemahaman

tentang relasi kiai dan pejabat pemerintahan dengan segala proses interaksi yang terjadi di dalamnya didekati melalui teori elit (Varma, 2001:197-242). Penggunaan teori ini dimaksudkan untuk melengkapi penjelasan tentang dan pemahaman terhadap hubungan antara kiai dan pejabat pemerintah, dan melihat bangunan sosial yang ada pendekatan penelitian ini dilengkapi pula dengan teori interaksi simbolik.

- **Teori Konstruksi Sosial**

Konstruksi sosial menyatakan bahwa kemanusiaan manusia yang spesifik dan sosialitasnya memiliki jalinan yang kokoh sehingga tak melepaskan satu sama lain. Manusia adalah *homo sapiens* sekaligus *homo socius* (Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 1990:73).

Dalam usahamemahami konstruksi sosial Berger dan Luckman diperlukan beberapa langkah berikut: *pertama*, mendefinisikan “realitas sosial” dan “pengetahuan”. Realitas sosial adalah apa yang tersirat dalam pergaulan sosial, yang diungkapkan melalui komunikasi lewat bahasa, menciptakan kerjasama dalam bentuk organisasi sosial, atau dengan cara-cara lain. Realitas sosial ini ditemukan dalam pengalaman intersubyektif. Sedangkan pengetahuan tentang realitas sosial terkait dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya yang mencakup: kognisi, psikomotoris, emosi dan intuisi. Dalam konteks ini Berger menyarankan akan pentingnya pemikiran yang tidak memisahkan antara perilaku sosial (dunia sosial obyektif) dari inti kepribadian manusia, yaitu kesadaran dan kebebasannya (dunia obyektif) (Poloma, Margareth M., 1992:397).

Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubyektif tersebut, Berger menggunakan paradigma Durkheim tentang obyektifitas dan paradigma Weber tentang subyektifitas. Jika Durkheim melihat keterpisahan antara subyektifitas dan obyektifitas dengan menempatkan subyektifitas di atas obyektifitas, maka Weber

melakukan langkah sebaliknya, menempatkan obyektifitas di atas subyektifitas. Dengan kata lain, individu di atas masyarakat (Weber), dan masyarakat di atas individu (Durkheim). Akan tetapi dalam hal ini Berger melihat keduanya sebagai sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ia melihat subyektifitas dan obyektifitas selalu ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat (Berger & Luckman, 1990: 26-65).

Berdasarkan uraian di atas, upaya untuk memahami pertimbangan kiai menjalin relasi dengan penguasaan pada dasarnya adalah usaha untuk menafsirkan konstruksi kiai dalam fokus itu. Pertimbangan-pertimbangan kiai dalam menjalin hubungan dengan pejabat adalah sebuah fenomena yang lahir dari kesadaran kiai melalui proses intensional subyek melalui intersubyektivitas.

Jika pada suatu saat seorang manusia bisa bertindak sama seperti banyak orang lain maka ia juga menyadari kemungkinan untuk bisa bertindak yang tidak sama. Bertindak sama atau tidak sama diputuskan setelah ia berinteraksi, bergaul dan dipengaruhi oleh masyarakatnya; dan itulah yang disebut realitas yang terbentuk secara sosial (Johson, Doyle Paul, 1994: 66).

Dengan demikian menurut teori ini individu (kiai) merupakan produk dan sekaligus pencipta pranata sosial dilingkungannya. Ajaran agama sebagai pranata sosial diciptakan untuk manusia dan ajaran agama juga mengembangkan realitas obyektif melalui konstruksi klasifikasi. Secara empirik, pranata-pranata itu selalu berubah sejalan dengan perubahan kepentingan individu (Peter L. Berger, 1991:45). Dalam konteks ini, konstruksi realitas secara sosial, ajaran agama bisa dikatakan melayani dua tujuan penting; menyediakan makna dari realitas dan sekaligus meligitimasi realitas tersebut (Poloma, 1992:312).

- **Teori Interaksi Simbolik**

Interaksi simbolik memotret masyarakat tidak dengan menggunakan konsep-konsep seperti sistem, struktur sosial,

peranan sosial, struktur institusional, pola budaya, norma-norma dan nilai-nilai sosial, melainkan dengan istilah “aksi” (Veeger, 1990: 228). Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini interaksi simbolik akan menjelaskan hakikat dari dinamika relasi kiai dan pejabat, yang terdiri dari sejumlah aksi dan reaksi yang sangat banyak.

Alferd Schutz menyatakan hakekat manusia adalah bagaimana ia mengambil sikap terhadap kehidupan sehari-hari. Dan manusia berusaha untuk melakukan tindakannya secara sadar, dan semua tindakan bermakna adalah tindakan yang dilakukannya secara sadar, yaitu terarah menuju suatu penyelesaian dan tindakan yang diproyeksikan si pelaku dalam pikirannya sendiri (Tom Campbell, 1994: 263).

Individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Di sisi lain, masyarakat, negara, dan berbagai institusi sosial lain adalah hanya sebagai kumpulan konsep (Soeprato, 2002:68). Terminologi interaksi simbolik menurut Blumer (1986: 1) adalah *it has come into use as a label for a relatively distinctive approach to the study of human group life and human conduct*. Menurut Blumer sebagaimana dikutip oleh Poloma (2003:258) merumuskan dalam teorinya tentang interaksi simbolik yang bertumpu pada tiga premis:

1. Manusia melakukan sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu.
2. Makna sesuatu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan ketika proses interaksi sosial berlangsung.

Untuk memahami tindakan dalam masyarakat, kita juga pantas untuk mempertimbangkan pendapat Mc. Call dan Simon. Kedua tokoh ini menyatakan bahwa dalam melakukan rangkaian

kegiatan, pelaku memperhatikan sesuatu dalam situasi, ketika situasi itu tampak di hadapannya. Rangkaian tindakan bisa membawa kepada arah dan perspektif baru, dalam pengertian apa yang dinyatakan oleh individu dalam dirinya sendiri dalam situasi itu. Obyek-obyek yang diperhitungkan individu kembali kepada serangkaian tindakan yang sedang dilakukan. Serangkaian tindakan yang dikehendaki individu adalah penting dalam menentukan jenis obyek yang dipilihnya dari obyek-obyek yang menghadangnya (Charon, Joel M. , 1989:120).

Dengan demikian tampak bahwa interaksi simbolik ingin melihat motif. Motif merupakan faktor yang penting dalam memahami sebuah fenomena tindakan. Dengan pengertian ini maka apa yang kita lakukan merupakan alasan bagi tindakan orang lain yang berbeda-beda dengan apa yang kita lakukan. Motif-motif merupakan usaha-usaha seseorang untuk meringkas dan membuat makna dari tindakan yang kompleks. Motif merupakan bentuk label dari pernyataan ringkas terhadap alasan tindakan yang terjadi (Charon, Joel M., 1989:120).

Dengan demikian teori interaksionis simbolik akan sangat berguna untuk menjelaskan fenomena relasi kiai dan pejabat, atas beragam masalah yang melingkupi pada pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bahkan tarik ulur antara tujuan pejabat mendekati kiai di satu sisi dan kepentingan agama dan kolektif perspektif kiai, bahkan hasrat individu dari kiai lahir dari sebuah pemaknaan terhadap realitas politik yang ada.

- **Teori Elit**

Teori elit sepenuhnya mengikuti karya Vilfredo Pareto dan Mosca. Pareto memulai dengan definisi yang sangat umum.

Marilah kita mengasumsikan bahwa dalam setiap cabang kegiatan manusia, setiap individu diberikan suatu indeks yang berfungsi sebagai penanda kapasitasnya, yang sangat mirip dengan cara diberikannya nilai dalam berbagai mata ujian di

sekolah. Tipe bagian *sales* yang sangat sukses dalam sebuah perusahaan, misalnya, akan diberi nilai 10, sementara bagian *sales* yang tidak mendapatkan pelanggan akan diberikan nilai 1. Kepada orang yang mampu menghasilkan ribuan kita berikan nilai 6, sementara orang yang hanya mampu menghindarkan diri dari tinggal di rumah diberikan nilai 1. Sedangkan nilai 0 diberikan kepada orang berpangku tangan di rumah. Begitulah seterusnya dalam setiap cabang kegiatan manusia. Kelas manusia yang memiliki indeks-indeks tertinggi disebut *elit*.

Pareto tidak lagi menggunakan konsep elit sebagaimana di atas. Konsep di atas semata-mata dibuat untuk menunjukkan bahwa selalu ada ketidaksetaraan dalam setiap lingkup kehidupan sosial. Pareto lebih jauh membagi elit kedalam dua kelas: 1) *governing elite*, yaitu individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memiliki peranan yang besar dalam pemerintahan, dan 2) *non-governing elite*, yaitu elit yang tidak memerintah (Varma, SP. 2001:200).

Klasifikasi masyarakat kedalam dua kelas tersebut kalau kita runut lebih jauh bisa ditemukan dalam tawaran gagasannya dalam bentuk kurva normal distribusi kekayaan dalam suatu masyarakat. Dalam karyanya *Les systemses socialistes*, Pareto melanjutkan argumennya, pertama, jika individu-individu disusun menurut kriteria yang lain, misalnya kemampuan matematis, bakat olahraga, karakter moral, sangat mungkin akan menghasilkan kurva distribusi yang serupa dengan kurva distribusi kekayaan; kedua, bahwa jika individu disusun menurut tingkat sosial dan politik mereka, akan ditemukan dalam sebagian masyarakat bahwa individu-individu yang sama menempati tingkat yang sama dalam hirakhi ini seperti halnya dalam hirakhi kekayaan tersebut.

Dalam konteks kajian ini, elit bisa dibagi dalam dua kategori: 1) elit politik lokal adalah orang atau sekelompok orang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan

legislatif di tingkat lokal, mereka yang masuk dalam kelompok ini adalah: gubernur, bupati, wali kota, Kapolres, Kapolsek, Ketua DPRD, pemimpin partai politik, Camat, dll. 2) elit-non politik lokal adalah seseorang atau sekelompok orang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkungan masyarakat. Yang termasuk kelompok ini adalah: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

Sementara menurut Etzioni, elit merupakan aktor yang memiliki kekuasaan, sehingga dikatakan sebagai orang atau kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam masyarakat (Susanne Keller, 1995:5). Tesis peran dan posisi elit kiai dalam tradisi NU bukanlah sesuatu yang aneh, proses seleksi ketokohan NU bukanlah sesuatu yang ganjil. Proses seleksi ketokohan kiai berlangsung secara alamiah melalui tradisi NU, sehingga kiai yang lolos menjadi pemimpin umat merupakan elit yang terpilih dan sudah teruji kredibilitasnya pada tingkat lokal.

Sebagai elit ditengah lingkungannya, kiai menempati posisi strategis dalam masyarakat dan memiliki otoritas, bahkan keberadaannya tidak hanya diakui sebagai elit sosial politik dalam komunitas NU dan pesantren, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas. Pengakuan demikian bahkan sering menjadikan kiai diperlakukan melebihi pejabat formal.

Pada saat tertentu kiai sangat kooperatif dengan pejabat (pemerintah), namun di waktu lain kiai bersikap bersikap keras terhadap pemerintah (kebijakan). Dua sisi sikap ini bagi orang yang tidak terbiasa dengan jagad kiai akan berpendapat bahwa kiai adalah sosok oportunist, sosok yang tidak memiliki pendirian.

Di tengah gempuran modernisasi kiai masih memiliki magnet yang cukup besar bagi masyarakat (rakyat dan penguasa). Menurut Pareto—salah seorang tokoh penggagas teori elit—setiap cabang kegiatan manusia, setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Mereka yang memiliki “cabang

tertinggi” dalam cabang kegiatan masing-masing, maka itulah elit. Jadi setiap cabang manusia, terdapat para elitnya (T.B. Bootormore, 2006). Sekalipun berbeda-beda cabang kegiatan, tapi hakikatnya seorang elit adalah orang yang mampu berdiri di pucuk piramida cabang kegiatannya itu.

Eksistensi para elite itu ditentukan, antara lain oleh sejauhmana mereka mampu mempertahankan posisi dan pengaruhnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang terus berubah. Daya tahan elit tidak hanya sebatas bagaimana mereka mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah itu, tetapi juga oleh sejauhmana mereka mampu mempertahankan, bahkan mengembangkan pengaruh yang makin meningkat, sebagaimana diungkapkan oleh sejarawan Arnold Toynbee, bahwa “dalam seluruh tindakan kreasi sosial, para pencipta adalah individu-individu yang kreatif” (Bootormore, TB. 2006).

Dalam konteks pengaruh kekuasaan elit penentu kebijakan dan struktur sosial masyarakat, kita akan menemukan keseimbangan sosial, yang amat terkait dengan upaya tercapainya kondisi keseimbangan politik. Dalam konteks relasi kiai dan pejabat, keseimbangan demikian disebut dengan stabilitas masyarakat.

Salah satu gejala serta masalah khusus bagi masyarakat Indonesia yang kini sedang mengalami transisi itu, menurut Sartono Kartodirdjo, dua puluh lima tahun yang lalu, dalam pengantar buku berjudul *Elit dalam Perspektif Sejarah* adalah terjadinya pergolakan dan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut pula perubahan kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah dari gerak perubahan tersebut. Di situ golongan sosial terkemuka (elit) menempati dan memainkan peran penting (Sartono Kartodirdjo, 1981:vii).

PERUBAHAN SOSIAL PERSPEKTIF DINAMIKA RELASI KIAI-PEJABAT

Setiap masyarakat selama hidupnya, pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelaahnya. Dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik atau tidak cocok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang sangat lambat sekali, akan tetapi ada pula yang berjalan cepat sekali.

Dengan demikian perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini, dan kehidupan seperti di atas memerlukan pemahaman tentang perubahan sosial. Berangkat dari urgensi demikian akhir-akhir ini ada kecenderungan yang terus meningkat untuk menggunakan sosiologi sebagai alat perubahan sosial lewat gerakan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Kecenderungan ini semakin menguat setelah menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selama ini makin jauh dari harapan kemanusiaan. Semakin modern kehidupan sekarang, makin banyak yang terpinggirkan dan dirugikan. Dengan demikian, sosiologi memperluas tanggung jawab, bukan hanya sebatas menjelaskan fenomena sosial, akan tetapi sekaligus terlibat langsung dalam melakukan perubahan sosial secara praksis.

Untuk tujuan di atas agar tidak terjebak dalam pertentangan tentang perubahan sosial, sekalipun tidak menjelaskan secara definitif, Wilbert More sebagaimana dikutip oleh Robert H. Lauer, mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial yang mencakup ekspresi mengenai struktur, nilai dan fenomena kultural (Robert H. Lauer, 1993: 4). Definisi demikian serba mencakup, dan definisi yang lain juga mencakup bidang yang sangat luas, perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku. Dengan demikian perubahan sosial adalah

segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ibnu Khaldun —ahli sejarah dan sosiolog berkebangsaan Tunisia, seorang teoritikus sekaligus aktifis— menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi apa yang disebutnya dengan lingkaran perubahan, yang dimulai dengan dibangunnya sebuah kekuasaan tak berdaya-hancur akibat generasi yang lebih kuat, demikian seterusnya. Menurutnya, sejarah adalah sebuah lingkaran tanpa ujung dari pertumbuhan dan kehancuran. Lingkaran tanpa ujung dari penaklukan dan keruntuhan. Ia mengidentifikasi faktor-faktor perubahan sosial meliputi: 1) pengaruh lingkungan fisik terhadap manusia, 2) bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern, 3) hubungan antar kelompok, 4) berbagai fenomena kultural (Lauer, Robert H., 1993:47).

Senada dengan Ibnu Khaldun, Soeprapto menyatakan bahwa setiap masyarakat manusia yang hidup di dunia ini pasti mengalami dinamika perubahan-perubahan tertentu dalam dirinya yang disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Perubahan tersebut bisa terjadi pada nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kelembagaan, lapisan-lapisan dalam masyarakat (stratifikasi sosial) dan lain sebagainya (Soeprapto, R. Riyadi, 2002:25).

Apabila kita memperhatikan sejarah perjalanan hidup tokoh-tokoh sosiologi, seperti Marx, Weber, Gramsci, Bourdieu, Giddens dan lainnya, mereka memang bukan sekedar teoritikus, mereka juga orang-orang yang terlibat langsung dalam dinamika konflik untuk memajukan kehidupan manusia ke arah yang mereka idealkan. Hal ini sangat jelas dalam landasan filosofi perjuangan Marx dimana dia ingin mengubah kehidupan dunia ke tatanan yang lebih adil. Sosiolog seperti Weber, Bourdieu dan Giddens, meskipun mereka memiliki posisi professorial di perguruan

tinggi, mereka juga secara langsung terlibat mengadvokasi masyarakatnya ke arah yang mereka idealkan dalam pandangan mereka masing-masing.

Dengan demikian, para sosiolog tidak bisa hanya berhenti pada tugas menjelaskan dan menyusun teori, akan tetapi harus melangkah pada tahap praksis dimana teori mereka diuji kehandalan dan kemanfaatannya untuk kehidupan umat manusia. Tugas mulia seperti ini tentu bukan hanya kewajiban para sosiolog, melainkan kewajiban semua ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat manusia. Para ilmuwan idealnya menjadi 'nabi-nabi' pembawa pencerahan bagi umat dan masyarakatnya, bukan justru menjadi beban dan penyebab kesengsaraan bagi mereka.

Perubahan sosial sebagai cetak biru pemikiran, akan memiliki manfaat untuk memahami kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kehidupan manusia adalah satuan sosial terkecil, dalam pola belajarnya ditengah masyarakat, masing-masing individu akan berhadapan dengan tiga sistem aktifitas belajar yang disebut dengan *Schools That Learn*. Menurut Peter Senge dalam *Schools That Learn*, (Salim, 2002:3) akan mewujudkan bentuknya dalam kehidupan pembelajaran ditengah masyarakat dalam 3 tingkatan; ketiga tingkatan itu meliputi;

- 1) *the learning classroom*; manusia akan belajar dalam lingkungan kelas sehingga melibatkan unsur guru, orang tua dan murid,
- 2) *the learning school*; manusia akan belajar dalam lingkungan sekolah sehingga melibatkan kepala sekolah, kelompok pengajar, murid di kelas lain, dan pegawai administrasi,
- 3) *the learning community*; manusia akan belajar dari lingkungannya yang mencakup peran masyarakat, kelompok-kelompok belajar sepanjang hayat, birokrasi yang mendukung, sumber informasi yang luas.

Dengan demikian secara empirik kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peran ketiga lingkungan belajar tersebut. Manusia akan mulai belajar dan mencermati dirinya, terbentuknya kesadaran, pengalaman dan keberanian untuk menggunakan potensi yang dimilikinya.

Dari kerangka pola pikir demikian ini, apabila hakikat kiai adalah sebuah institusi, dan setiap institusi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena sosial kemasyarakatan dan sosial politik di luarnya, maka sangat relevan bila Duverger menyatakan bahwa institusi adalah model hubungan sesama manusia dimana dalam hubungan-hubungan itu setiap individu dapat mengambil polanya. Dan dengan pola itu, akan tumbuh stabilitas sosial, kelangsungan dan kohesifitas (Maurice Duverger, 1993: 106-108).

HASIL PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

- **Hasil Penelitian Yang Telah dilakukan**

Untuk konteks studi keislaman di Indonesia yang pernah ada, model penelitian yang berkembang umumnya dilakukan pada wilayah kajian tentang perilaku sosial -keagamaan secara umum, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan perspektif sosial-politik-budaya. Penelitian “klasik” model ini pernah dilakukan oleh Clifford Geertz (1989) yang direkam menjadi sebuah buku *Religion of Java*. Geertz membuat tiga varian bentuk masyarakat Jawa menjadi priyayi, santri, dan abangan. Geertz jelas tidak mengamati pemikiran hukum, tetapi watak kepercayaan dan keagamaan masyarakat Jawa kuno, dan itupun dengan menggunakan pendekatan antropologi.

Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan model ini antara lain, terlihat dalam karya Deliar Noer (1980), Fahry Ali dan Bahtiar Effendy (1992), Muslim Abdurrahman (1995), dan M. Syafi'i Anwar (1995). Dalam presepsi peneliti hasil-hasil

observasi dan penelitian tersebut nampak jelas dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial-politik, secara umum dalam aplikasinya penelitian tersebut berusaha sekuat tenaga untuk menemukan stratifikasi pemikiran sosial politik yang pernah berlangsung di Indonesia.

Penelitian yang cukup rinci mengungkap kiai dan pesantren adalah penelitian yang dilakukan oleh Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*.(1994) Karya ini berhasil memetakan elemen-elemen pesantren: 1) masjid, 2) pondok (asrama), 3) santri dan pengajaran kitab kuning.

Di samping itu Dhofier telah berhasil mengungkap jaringan yang sengaja diciptakan oleh kiai sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi pesantren. Jaringan dimaksud berupa: a) transmisi ilmu, b) hubungan saling memasok santri di antara pesantren tertentu, c) jaringan kekerabatan kiai yang lahir akibat perkawinan. Sekalipun penelitian ini menjadi rujukan penelitian-penelitian berikutnya, namun perhatian Dhofier yang terpusat pada pesantren telah mengabaikan peran kiai dan pesantren dengan dunia luar sebagai sistem yang lebih luas (Dhofier, Zamakhsyari, 1994).

Penelitian tentang peran kiai sebagai mediator tampak dalam penelitian Hirokho Horikashi (1987), antropolog Jepang yang melakukan penelitiannya di Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kiai berperan sebagai mediator dalam perubahan sosial. Kiai yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi adalah kiai yang memiliki kharisma. Kharisma seorang kiai adalah faktor yang menentukan dalam proses tersebut.

Menurut Horikhosi, kiai berperan kreatif dalam perubahan sosial, tidak untuk meredam perubahan tersebut melainkan untuk memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Pandangan Horikhosi ini menjadi referensi karena kiai tidak melakukan filterisasi informasi melainkan menawarkan agenda perubahan nyata masyarakat yang dipimpinnnya. Penelitian

tersebut tidak menghasilkan analisis terhadap klasifikasi kiai (Horikoshi, 1987:211-236).

Tipologi kiai dilakukan oleh Endang Turmudzi dalam penelitiannya di Jombang yang berjudul *Kiai dan Perselingkuhan Kekuasaan* (2004). Dalam penelitian ini, Turmudzi membidik relasi kiai dengan situasi sosial politik yang lebih luas. Ia membuat tipologi dan kategorisasi kiai kedalam empat tipologi: *kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politisi dan kiai panggung*. Dalam satu orang kiai mungkin bisa tercakup dalam lebih dari satu tipologi (Turmudi, Endang, 2004).

Dalam penelitian tersebut, Turmudzi menyatakan bahwa relasi kiai dan pemerintah diawali dengan ketegangan-ketegangan, karena adanya saling kecurigaan antara kedua belah pihak. Namun hubungan itu mulai mencair pada tahun 1990-an, banyak kiai yang menunjukkan simpati kepada pemerintah. Ada dua alasan kenapa terjadi perubahan sikap ini, *pertama*, pemerintah adalah pemimpin sebagaimana para kiai, dan legitimasi kekuasaan yang pertama perlu didukung selama ia tidak korup, *kedua*, pemerintah telah berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat.

Pergeseran perilaku kiai ini, diimbangi oleh sikap-sikap pemerintah yang semakin simpati kepada umat Islam. Dalam hal pengajian atau kegiatan dakwah, tidak ada lagi pemantauan secara ketat, dan izin yang diajukan oleh penyelenggara tidak memakan waktu yang lama, apalagi jika pihak penyelenggara memiliki kartu anggota partai pemerintah (Turmudi, Endang, 2004:270).

Penelitian lain yang mengungkap pola hubungan kiai pesantren dan masyarakat sekitar dilakukan oleh Pradjarta Dirdjasanyata dalam *Memelihara Umat, Kiai Pesantren, Kiai Langgar di Jawa* (1999). Penelitian yang dilakukan di Pati Jawa Tengah ini mengungkap respon kiai terhadap perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Kiai merespon

perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan latar belakang mereka dan sesuai dengan usahanya untuk mempertahankan posisi penting mereka dalam komunitas lokal dan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa kiai langgar lebih menonjol daripada kiai pesantren, karena kendati kiai langgar tunduk pada kiai pesantren namun kiai langgar memiliki hubungan langsung dengan umat. Jika dicermati lebih lanjut penelitian ini menonjolkan masalah kepemimpinan sosial politik kiai di sejumlah pesantren dan kiai Langgar. Sekalipun dalam beberapa hal penelitian ini telah mengungkap pasang surut relasi kiai dan pemerintah, namun belum sampai membuat klasifikasi kiai.

Peran ganda kiai sebagai pendidik (guru pesantren) dan inspirator politik mampu dibaca oleh Achmad Patoni. Dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik* (2007) ia menemukan setidaknya dua sudut pandang baru, yaitu kiai yang berperan di bidang agama dan bidang politik.

Peran kiai dalam bidang agama adalah membimbing dan menjadi panutan santri. Sehingga santri dapat mandiri dan mengamalkan ilmunya ketika ia pulang nanti. Sedangkan peran kiai di dalam kancah politik adalah memperjuangkan kepentingan dan sebagai kemaslahatan umat melalui kekuasaan atau sebagai *agent of social change* menuju tegakkanya *amar ma'ruf nahi munkar*. Penelitian ini juga membagi keterlibatan kiai dalam kancah politik menjadi tiga bagian:

1. Sebagai aktor, kiai menjadi anggota tim sukses sekaligus juru kampanye calon tertentu
2. Sebagai pendukung, kiai mendukung terhadap calon tertentu, namun tidak berada pada garis depan dalam memperjuangkan keberhasilan calon yang didukungnya
3. Sebagai partisipan, kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses.

Dengan demikian, di era reformasi, tesis Clifford Geertz yang menyatakan bahwa kiai adalah pialang budaya (*cultural broker*) tampaknya perlu direvisi. Kiai yang dahulu secara massif adalah pialang bagi transformasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan keislaman dari Mekkah ke Indonesia, kini mengalami transformasi peran yang juga tidak kalah massif, yakni banyaknya kiai yang terjun ke dunia politik melalui partai. Pandangan kiai, politik merupakan bagian tak terpisahkan dari basis ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* dan tentu saja merupakan bagian ibadah kepada Allah.

Sampai disini, dapat dilihat bahwa kiai memegang dua peranan kunci, agama di satu sisi, dan politik di sisi lainnya. Sebagaimana dalam banyak kasus, perselingkuhan politik dan agama menghasilkan sesuatu yang heboh. Contohnya adalah legitimasi teks agama dalam mengegolkan pencalonan presiden perempuan, dan penggalangan basis massa melalui massa yang dimiliki para kiai. Dalam kondisi seperti inilah kemudian kiai juga berperan sebagai *political broker* (pialang politik). Penelitian ini menunjukkan bahwa motif kiai terjun dalam dunia politik adalah untuk memperjuangkan Islam melalui jalur struktural sekaligus didasari atas moralitas politik yang wajib diperjuangkan. Keterlibatan tersebut berimplikasi terhadap diri kiai dan pesantren. Bagi diri kiai, keterlibatannya dalam partai politik berimplikasi terhadap luasnya akses dan peran-peran politik dalam kehidupan sosial yang lebih luas, sementara bagi pesantren akan semakin mudah dalam mencari sumber donasi untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkannya. Implikasi kekuasaan yang diperoleh sangat bergantung pada kedudukan aktor dalam struktur masyarakat (Patoni, Achmad, 2007).

Penelitian lain yang mendeskripsikan relasi dan kiai dan politik adalah penelitian Imam Suprayogo (2007), *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*. Penelitian ini mencoba

untuk mengungkap respon kiai di Kecamatan Tebon Malang terhadap konstelasi politik. Menghadapi masalah tersebut ada dua *mainstream*. Pertama, kiai mestinya hanya berperan sebagai pengayom umat, terutama dalam kehidupan beragama, kedua, bagi kiai tidak ada alasan untuk meninggalkan politik, karena politik adalah bagian dari agama.

Menurut Suprayogo, ada tiga alasan mengapa kiai terjun dalam dunia politik. *Pertama*, ajaran agama sendiri, yang tidak memisahkan antara agama dan Politik, sehingga terkenal jargon *Islam adalah agama dan Negara*.

Kedua, fakta sejarah bahwa kiai selalu mengambil peran dalam bidang politik, mulai zaman penjajahan —ikut serta berjuang melawan penjajah—, zaman kemerdekaan, dan era reformasi ini. Sejumlah nama besar, dicatat dalam tinta emas sejarah Indonesia, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Agus Salim, KH. Maskyur, KH. Wahid Hasyim, mereka semua adalah kiai yang terlibat dalam perjalanan bangsa ini.

Ketiga, kiai sebagai elit agama. Sebagai elit, kiai selalu memiliki pengikut di tengah masyarakat, kiai terlibat dalam pengambilan keputusan bersama, penyelesaian masalah-masalah sosial, pengembangan pendidikan dan kemasyarakatan, dan bahkan para pengikut itu bisa diarahkan untuk memberikan dukungan politik. Lebih jauh, kiai membutuhkan pejabat untuk mengembangkan misi dakwahnya.

Sikap dan perilaku kiai dalam merespon konstelasi politik yang terus berubah menurut Suprayogo (2007) menghasilkan empat tipologi:

- 1) Kiai Spiritual,
- 2) Kiai Advokatif,
- 3) Kiai Politik Adaptif,
- 4) Kiai Politik Mitra Kritis.

Penelitian ini belum mengarahkan analisisnya pada relasi kiai dan Pejabat di Pemerintahan. Penelitian Suprayogo lebih menitikberatkan pada respon kiai terhadap perubahan konstelasi politik lokal terhadap dunia kiai.

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu belum satu pun penelitian yang mengungkap klasifikasi kiai dalam membangun jalinan relasi dengan pejabat pemerintah. Sehingga dapat peneliti katakan bahwa keunikan dalam penelitian yang peneliti lakukan terletak pada temuan munculkan klasifikasi kiai dalam membangun jalinan relasi dengan pejabat pemerintah. Maka penelitian ini akan menjadi penyempurna terhadap penelitian yang terdahulu.

- **Review Terhadap Hasil Penelitian Yang Telah dilakukan**

Sebagai penyambung dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, sebagaimana yang dikemukakan dalam sub bab terdahulu, maka peneliti melakukan review secara sederhana atas hasil pokok dari penelitian-penelitian tersebut.

Ini dimaksudkan untuk mencari persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan. Sehingga akan dengan lebih mudah menemukan benang merahnya, baik dalam perbedaan, persamaan ataupun titik singgung masalah yang diteliti.

Review itu secara sederhana dapat kemukakan sebagai berikut:

No.	Penelitian yang telah dilakukan	Penelitian Yang akan dilakukan
1	<p>Zamakhsyari Dhofier (1994) Penelitian ini telah berhasil memetakan pesantren dan elemen-elemennya: masjid, kiai, pondok, santri, dan pengajaran kitab kuning. Di samping itu penelitian telah mendeskripsikan pandangan keagamaan kiai. Hasil akhir dari analisis Dhofier adalah karakteristik pesantren yang khas, yang berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Penelitian ini tidak menyentuh masalah peran kiai dan dunia luar, apalagi pejabat di Pemerintahan.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan diri pada dinamika relasi kiai dan pejabat, motif kiai mendekati pejabat, yang akhirnya memunculkan stratifikasi kiai oleh pejabat. Penelitian Dhofier diperhatikan selama ada keterkaitan dengan dinamika interaksi kiai dan pejabat.</p>
2	<p>Hirokho Horikhosi, (1987) Penelitian ini berusaha mendeskripsikan peran kiai dalam perubahan sosial. Menurutnya kiai tidak lagi berperan sebagai <i>cultural broker</i> sebagaimana Geertz, tetapi malah aktif dalam proses perubahan itu sendiri, karena kiai sadar bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak mungkin dihindari. Penelitian sama sekali tidak menghasilkan analisis stratifikasi kiai atau relasi kiai dan pejabat.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan diri pada latar belakang kiai menjalin interaksi dengan pejabat dan dampaknya. Penelitian Horikhosi diperhatikan selama ada keterkaitan dengan dinamika interaksi kiai dan pejabat.</p>

No.	Penelitian yang telah dilakukan	Penelitian Yang akan dilakukan
3	<p>Endang Turmuzdi (2004), Penelitian ini menyoroti peran-peran kiai dalam perubahan sosial politik di Jombang, dan menghasilkan tipologi kiai: 1) Kiai pesantren, 2) kiai tarekat, 3) kiai politisi, dan 4) kiai panggung. Penelitian telah menyinggung relasi kiai dan pejabat, namun analisisnya tidak menyentuh stratifikasi oleh pejabat.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan diri pada aksi-interaksi kiai dan pejabat, serta dampaknya. Penelitian Turmuzdi yang mendeskripsikan relasi kiai dan pejabat akan diperhatikan sepanjang ada keterkaitan dengan stratifikasi kiai.</p>
4	<p>Pradjarta Dirdjosanjoto (1999), Fokus penelitian ini respon kiai terhadap perubahan yang sangat cepat dalam berbagai bidang kehidupan. Kiai merespon perubahan-perubahan tersebut sesuai dengan latar belakang mereka dan dengan usahanya untuk mempertahankan posisi penting mereka dalam komunitas lokal dan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa kiai langgar lebih menonjol daripada kiai pesantren, karena kendati kiai langgar, karena kiai langgar memiliki hubungan langsung dengan umat. Sekalipun dalam beberapa hal penelitian ini telah mengungkap pasang surut relasi kiai dan pemerintah, namun belum sampai membuat klasifikasi kiai perspektif pejabat.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan diri pada aksi-interaksi kiai dan pejabat, serta stratifikasi kiai perspektif pejabat. Penelitian Dirjosanjoto yang mendeskripsikan respon kiai dan perubahan sosial politik akan diperhatikan sepanjang ada keterkaitan aksi-interaksi kiai dan pejabat.</p>

No.	Penelitian yang telah dilakukan	Penelitian Yang akan dilakukan
5	<p>Achmad Patoni (2007), Partisipasi kiai pesantren dalam jagad politik di Kediri menunjukkan bahwa motif kiai terjun dalam dunia politik adalah untuk memperjuangkan Islam melalui jalur struktural sekaligus didasari atas moralitas politik yang wajib diperjuangkan. Keterlibatan tersebut berimplikasi terhadap diri kiai dan pesantren. Bagi diri Kiai, keterlibatannya dalam partai politik berimplikasi terhadap luasnya akses dan peran- peran politik dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas, sementara bagi pesantren akan semakin mudah dalam mencari sumber donasi untuk perbaikan sarana dan prasarana. Penelitian ini berhasil membuat tipologi kiai: 1) kiai aktor, 2) kiai pendukung, 3) kiai partisipan. Penelitian ini belum mengarahkan analisisnya pada relasi kiai dan pejabat di Pemerintahan, sehingga menimbulkan stratifikasi kiai perspektif pejabat.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan diri pada relasi kiai dan pejabat di pemerintahan, dan sosial yang dibuat oleh tokoh yang disebut kedua. Penelitian Patoni akan diperhatikan sepanjang ada keterkaitan dalam pasang surut interaksi kiai dan Pejabat di pemerintahan.</p>

No.	Penelitian yang telah dilakukan	Penelitian Yang akan dilakukan
6	<p>Imam Suprayogo (2007), Penelitian ini memfokuskan pada relasi antara kiai dan politik yang terjadi di Kecamatan Tebon Malang. Sikap dan perilaku kiai terhadap politik menghasilkan 4 tipologi: 1) Kiai Spiritual, 2) Kiai Advokatif, 3) Kiai Politik Adaptif, 4) Kiai Politik Mitra Kritis. Penelitian ini belum mengarahkan analisisnya pada relasi kiai dan Pemerintahan. Penelitian Prayogo menitikberatkan respon kiai terhadap perubahan konstelasi politik terhadap dunia kiai.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan diri pada relasi kiai dan pejabat di pemerintahan, dan kiai yang dibuat oleh pejabat. Penelitian Suprayogo akan diperhatikan sepanjang ada keterkaitan dalam aksi-interaksi kiai dan politik kekuasaan.</p>

RELASI KIAI DAN PEJABAT DI KOTA KEDIRI

Bab ini mendeskripsikan uraian singkat demografi kota Kediri, Relasi kiai dan Pejabat Pemerintah kota Kediri, bagaimana relasi antara kiai dan pejabat pemerintah itu dibangun, bentuk-bentuk peran sosial politik kiai, kemudian diikuti dengan deskripsi tentang persepsi pejabat tentang relasi tersebut. Dengan kata lain bab ini akan memaparkan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan selama ini.

DEMOGRAFI LOKASI PENELITIAN

Menurut Data statistik sampai tahun 2002, penduduk Kota Kediri sejumlah 240.163 jiwa, yang terdiri laki-laki 117.916 jiwa dan perempuan 122.247 jiwa. Mata pencaharian menurut sektor ekonomi dan lapangan usaha bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Lapangan Usaha

No.	Lapangan usaha	Jumlah Jiwa	%
1	Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	4,260	4,15

No.	Lapangan usaha	Jumlah Jiwa	%
2	Pertambangan dan penggalian	309	0,28
3	Industri pengolahan	30,488	27,39
4	Listrik, gas, dan air minum	308	0,28
5	Bangunan konstruksi	4,540	4,02
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	26,960	24,22
7	Angkutan dan komunikasi	7,944	7,14
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perumahan	1,408	1,26
9	Jasa lain	34,727	31,20

(Syachrial Bahri, 2006: 11)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sembilan sektor lapangan usaha, tenaga kerja sektor industri pengolahan cukup dominan, yakni mencapai 30.400 (27,39%) di samping sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 26.960 jiwa (24,22%). Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan PT. Gudang Garam Tbk. beserta anak-anak perusahaannya yang menguasai hampir 82 % perekonomian kota Kediri.

Gambaran demografi dan pembagian wilayah Administrasi kota Kediri bisa dideskripsikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Demografi Kota Kediri

Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT	Penduduk
Kota	Manisrenggo	1.764	6	21	3.064
	Rejomulyo	1.670	4	21	3.599
	Ngronggo	2.585	9	94	11.250
	Kaliombo	0.958	5	28	6.271
	Kampungdalem	0.332	4	18	3.363
	Setonopande	0383	4	28	5.197
	Ringinanom	0.050	2	8	1.349
	Pakelan	0214	3	15	3.333

Kecamatan	Kelurahan	Luas (km2)	Jumlah RW	Jumlah RT	Penduduk
Kota	Setonogedong	0.059	2	5	1.310
	Kemasan	0.228	2	2	2.176
	Jagalan	0.043	2	2	2.301
	Banjaran	1.209	12	12	8.633
	Ngadirejo	1.470	12	12	11.309
	Dandangan	1.100	12	12	6.626
	Balowerti	0.830	8	8	7.011
	Pocanan	0.214	2	2	2.023
	Semampir	1.791	6	8	7.113
	JUMLAH	14.900	95	497	85.928
Pesantren	Blabak	3.254	10	30	4.965
	Bawang	3.449	8	31	4.832
	Betet	1.891	8	21	3.618
	Tosaren	1.361	14	39	5.044
	Banaran	0.974	8	22	3.675
	Ngletih	1.237	3	14	1.956
	Tampuhrejo	1.864	6	21	3.709
	Ketami	1.894	5	29	3.688
	Pesantren	1.356	5	28	4.195
	Bangsals	1.029	5	34	6.109
	Burengan	1.283	11	33	4.650
	Tinalan	0.926	10	33	4.945
	Pakunden	1.024	6	35	4.938
	Singonegaran	0.990	5	40	7.139
Jamsaren	1.471	7	34	5.442	
	JUMLAH	23.903	111	444	68.905
Mojooroto	Pojok	3.212	5	25	7.281
	Campurejo	1.504	6	29	6.192
	Tamanan	1.079	3	14	3.371
	Banjarmelati	1.133	7	22	3.962
	Bandar Kidul	1.736	4	24	7.428
	Lirboyo	1.113	8	23	7.286
	Bandar Lor	1.386	7	38	8.612

Kecamatan	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT	Penduduk
Mojooroto	Mojooroto	2.429	11	41	10.711
	Sukorame	3.675	10	34	7.090
	Bujel	1.826	5	32	6.190
	Ngampel	1.952	4	26	4.498
	Gayam	1.319	8	31	3.322
	Mrican	1.418	7	32	6.384
	Dermo	0.819	2	17	3.008
	JUMLAH	24.601	87	388	85.330

(Syachrial Bahri, 2006: 13)

Tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Mojooroto, yaitu 24.601 km², namun jumlah penduduk terbesar terletak di kecamatan Kota, 85.928 jiwa dengan luas wilayah 14.900 km². Kecamatan Kota adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, 5.767 jiwa/km² hal ini terjadi karena adanya urbanisasi masyarakat dari desa ke kota.

Dari sisi kehidupan sosial, komposisi masyarakat kota Kediri sebagian besar terdiri dari suku Jawa, kemudian sebagian kecil Cina, Arab, Sunda dan Batak. Sebagian besar penduduk memeluk agama Islam.

Lembaga Pendidikan Islam menyebar di seluruh wilayah Kota Kediri. Pusat pendidikan Islam terbesar adalah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo yang terletak di Kecamatan Mojooroto.

Secara umum ciri-ciri masyarakat Kota Kediri dapat dipresepsikan sebagai masyarakat yang mempunyai sifat:

- a. Religius, kehidupan beragama cukup marak di kota ini, acara-acara keagamaan di gelar di sana-sini, cukup banyak tempat-tempat (religius) yang sering dikunjungi oleh orang luar Kediri, seperti Makam Mbah Wasil, penyebar Islam di Kediri, makam Sunan Geseng, salah seorang murid Sunan

Ampel. Demikian halnya dalam mengorganisir komunitas umat beragama, Kediri menjadi bagian penting dari adanya organisasi-organisasi itu. Di kota ini, organisasi Islam berkembang pesat, mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, bahkan organisasi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), nama baru untuk Islam Jamaah), dan organisasi Penyebar Shalawat Wahidiyah Kedunglo, Kepengurusan Pusat administrasi organisasi ini secara Nasional pengendaliannya berada di kota ini.

- b. Bersifat paternalistik, secara umum masyarakat kota Kediri bisa dikatakan *Mituhu*, artinya masyarakat dalam urusan sosialnya masih banyak bergantung kepada pemimpin yang dijadikan panutannya dalam memutuskan problematika dan masalah kehidupan sehari-hari. Pemimpin formal dan informal seperti ulama, kiai, ustad dan lain sebagainya, sama-sama merupakan bagian penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan warga Kediri yang masih paternalistik.
- c. Memiliki rasa kebersamaan, semangat gotong royong, toleransi atas perbedaan pandangan dan keyakinan masih sangat tinggi. Karena sifat yang demikian inilah, —paling tidak pada masa akhir-akhir ini— menjadikan Kediri sebagai kota yang paling minim konflik antar umat beragama, etnis ataupun konflik sosial lainnya. (Syachrial Bahri, 2006:11)¹

KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA

Dari komposisi penduduk, masyarakat Kota Kediri pada umumnya terdiri dari suku Jawa yang bercirikhas Mataraman, dan sebagian

¹Awal Reformasi ketika daerah-daerah lain ada gerakan anti Cina, yang menyebabkan penjarahan dan pengrusakan terhadap fasilitas dan properti Cina, di Kediri tidak terjadi kegiatan serupa. Begitu juga ketika terjadi penyerangan terhadap aliran Ahmadiyah di sejumlah daerah seperti Bogor, Garut, Kuningan, Surabaya, di Kediri Ahmadiyah bisa hidup berdampingan dengan organisasi Islam lainnya.

besar pemeluk agama Islam. Selain Islam terdapat pula agama Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, serta ada juga pengikut dan penghayat aliran kepercayaan. Secara umum, meski terdiri dari banyak faham keagamaan yang muncul di kota ini, namun tatanan sosial kehidupan masyarakat kota ini diwarnai toleransi dan kebersamaan, toleransi serta keselarasan dalam berkehidupan sosial kesehariannya.

Bahkan dalam tata kehidupan masyarakatnya, Kota Kediri bisa dibilang masyarakat yang serba religius, ini paling tidak ditandai dengan banyaknya lembaga agama dan rumah ibadah yang tersebar di sudut-sudut kota ini. Ini terjadi karena masifnya kehidupan masyarakat yang toleran, kerena keberadaan tempat-tempat ibadah, baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha, rata-rata sekaligus berfungsi sebagai lembaga pendidikan non formal masyarakat yang biasa dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan keagamaan mereka masing-masing.

Tabel 3. Jumlah Pemeluk Agama per Kecamatan Tahun 2004

Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Jumlah
Mojooroto	81.989	2.773	1.216	152	98	87.674
Kota	68.351	10.723	4.283	531	1.597	86.602
Pesantren	64.762	2.601	1.903	134	57	66.894

Sumber: Departemen Agama Kota Kediri, 2004.

Tabel 4. Jumlah Tempat Ibadah per Kecamatan Tahun 2004

Kecamatan	Masjid	Langgar	Musholla	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Sanggar (Pure/Wihara)
Mojooroto	66	137	18	13	1	1
Kota	51	96	65	18	1	2
Pesantren	55	115	15	5	0	0

Komposisi penduduk yang terdiri dari pelbagai pemeluk agama itu, tidak menjadikan kota ini diwarnai dengan “konflik

agama,” dan digelayuti dengan aneka syak wasangka antara satu agama atau kepercayaan kepada agama atau kepercayaan yang lain, sehingga kondisi ini menjadi modal bagi masyarakat kota ini untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Konflik-konflik yang dilatrbelakangi persoalan paham agama sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain, belum pernah merembet ke kota ini, atau konflik nasional tidak banyak berpengaruh terhadap harmonisasi hubungan antar agama, dan hubungan antar organisasi sosial yang telah dibangun selama ini.

Harmonisasi hubungan antar umat agama selalu dicoba untuk terus dibangun dan dikembangkan, sehingga bila ada benih ketegangan dan konflik sesegera mungkin bisa diminimalisir dengan dialog dan komunikasi antar tokoh-tokohnya. Karena kalau hanya hendak mencari “perbedaan-perbedaan” setiap agama, setiap organisasi sosial kemasyarakatan ataupun organisasi sosial keagamaan, selalu memiliki nilai-nilai khas yang berlainan, bahkan bertolak belakang satu dengan lain agama, kepercayaan atau organisasi sosial yang lain. Nilai-nilai ini sering diistilahkan dengan nilai partikular, sekalipun demikian agama juga memiliki nilai-nilai umum yang dipercaya oleh semua agama. Inilah yang disebut dengan nilai universal.

Wacana multikulturalisme tidak hanya berpretensi menghilangkan nilai partikular agama, karena upaya tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin. Wacana ini hanya berupaya agar nilai partikular ini tetap berada dalam *exclusive locus*. Sekedar dalam komunitas yang mempercayai nilai partikular itu saja. Sedangkan bagi masyarakat luar yang tidak meyakini nilai partikular tersebut, maka yang diberlakukan adalah nilai universal.

Dalam menghadapi pemeluk agama atau budaya yang berbeda yang harus dipegang adalah nilai universal berupa keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, baik pada sesama, jujur dan lain-lainnya, menggali kembali nilai universal inilah disebut

dengan *tahshilul ushul*, bukan sekedar *ushul fikih*.

Untuk menciptakan *mutual understanding* antar pemeluk agama pada tahun 1998 dibentuk Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKUB) Kediri, sebagai wadah bagi tokoh-tokoh agama-agama dan aliran kepercayaan yang ada untuk berdialog, berdiskusi dan berkomunikasi membahas persoalan-persoalan ummat.

Dan dalam wadah ini pulalah tokoh-tokoh dari seluruh agama dan aliran kepercayaan yang berbeda mengadakan pertemuan secara berkala dengan pejabat pemerintah kota Kediri dengan mengambil tempat bergantian mulai dari Balai kota, Masjid, Pondok Pesantren, Gereja, Pure, Kampus dan tempat-tempat lain yang menjadi symbol agama ataupun pemerintahan.

RELASI KIAI DAN PEJABAT PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan, masyarakat Kota Kediri dikenal sebagai masyarakat religius. Mereka memegang nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tampak dalam maraknya syiar agama di kota ini, di samping itu tersebarinya pondok pesantren di beberapa bagian wilayah Kota Kediri juga ikut memberikan andil dalam membentuk religiusitas masyarakat.

Sedangkan ihwal relasi kyai dan birokrat di kota Kediri telah terjalin sedemikian rupa, satu sama lain saling memberikan support dalam kapasitas dan fungsinya dalam tata kehidupan bermasyarakat yang guyup. Bentuk nyata dari kegupan ini dapat dilihat pada pelibatan tokoh masyarakat dan kiai dalam kegiaatn-kegiatan seremonial di hampir semua tingkat Pemerintahan. Peneliti melakukan pengamatan, wawancara dan bahkan sering terlibat dengan kegiatan sejumlah kiai yang menjalin relasi dengan birokrat pemerintah kota Kediri.

Berikut hasil wawancara dengan para kiai yang pernah dan atau masih menjabat sebagai Pengurus NU di tingkat kecamatan

dan tingkat kota Kediri. Dan dari kalangan Pejabat adalah Camat atau mantan, Bapeko, Walikota dan Komandan Kodim.

- **KH. Anwar Iskandar (Mustasyar NU Kota Kediri 2005-2010)**

Latar Belakang

KH. Anwar Iskandar lahir di Desa Berasan, Muncar Banyuwangi 24 April 1950. Ayahnya adalah KH. Iskandar, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Berasan, Muncar Banyuwangi. Kiai Iskandar adalah putra kiai Abda' bin Abdullah Sa'id bin Wardoyo. Kiai Wardoyo adalah menantu Kiai Zainal Abidin, yang nasabnya memiliki hubungan dengan para kiai pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Sejak kecil, kehidupan Kiai Anwar Iskandar dihabiskan di Pesantren yang diasuh oleh ayahnya sendiri di samping sekolah di Sekolah Umum sampai Tingkat Madrasah Aliyah (setingkat SMA). Setelah tamat, ia melanjutkan pengembaraannya ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri di bawah asuhan KH. Mahrus Ali sambil kuliah di Institut Agama Islam Tri Bhakti (IAIT). Selain Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren yang pernah di singgahinya antara lain Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Sarang Rembang, Mranggen Demak, dan belajar ilmu falak di Jember. Setelah menyelesaikan Sarjana Muda di IAIT pada tahun 1969, ia melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperoleh gelar kesarjanaannya pada Jurusan Sastra Arab, Fakultas Adab. Namun sangat disayangkan karena tuntutan keluarga KH. Anwar Iskandar belum sempat merampungkan penulisan skripsinya, sehingga gelar kesarjanaan yang mestinya tinggal selangkah tak sempat diambinya.

Karir akademisnya kemudian dilanjutkan di Kediri, dan pada tahun 1975, KH. Mahrus Ali menjodohkannya dengan Qani'atuz Zahro', putri KH. Said, pengasuh Pondok Pesantren Jamsaren Kediri. Pada tahun 1990 KH. Anwar Iskandar menikah kali kedua dengan Hj. Yayan Handayani dari Bogor, yang sekarang menjadi

pengasuh Pondok Pesantren al-Amien, Rejomulyo, Kediri (Taufiqur Rohmat, 2008: 38-41).

Aktifitas Sosial dan Politik

Pada tahun 1982 KH. Anwar Iskandar mendirikan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam As-Sa'diyah, yang mengasuh pendidikan mulai tingkat TK sampai SMA, dan pondok pesantren. Pada tahun 1985 KH. Anwar Iskandar dipercaya untuk menjadi Ketua Yayasan Universitas Islam Kadiri (UNISKA), sebuah perguruan tinggi swasta yang terus berkembang di wilayah Kediri, dan pada tahun 1995 mendirikan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien yang mengasuh pondok pesantren dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Aktifitasnya di bidang Sosial kemasyarakatan dimulai sejak ia berusia 15 tahun, pada waktu itu ia tunjuk menjadi salah satu pengurus IPNU Cabang Banyuwangi. Dan setelah hijrah ke Kediri pada tahun 1975 ia dipercaya menjadi Ketua Ansor Cabang Kediri selama dua periode. Pada tahun 1982, warga NU Kediri mempercayainya untuk memimpin organisasi tersebut selama dua periode dengan jabatan Ketua Tanfidziyah, dan pada tahun 1992, ia menempati posisi Rois Syuriah NU Cabang Kota Kediri.

Tahun 1997 posisinya di NU semakin diperhitungkan, sehingga pada tahun 1997, ia terpilih sebagai wakil Rois Syuriah NU Jawa Timur, dari sini kiprah KH. Anwar Iskandar mulai meluas, dan beliau dapat menunjukkan diri sebagai tokoh yang cakap dalam mensikapi problematika kehidupan sosial masyarakat. Maka pada tahun 1998, seiring dengan perkembangan tatanan politik Nasional yang memungkinkan pendirian Partai untuk ikut pemilu, PWNU Jawa Timur membentuk Tim 9 untuk menggodok dan melahirkan Partai sendiri yang bisa mewadahi aspirasi politik ummat Nahdhiyyin, KH. Anwar Iskandar diangkat untuk mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wilayah Jawa Timur, dan setelah

pemilu berlangsung PKB partai yang beliau pimpin keluar sebagai pemenang di wilayah Jawa Timur, dan beliau duduk sebagai Anggota MPR utusan Daerah Jawa Timur.

Bakatnya di bidang politik kemudian mengantarkannya untuk tampil sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKNU, partai baru yang didirikan oleh para kiai NU yang merasa tidak diakomodir di PKB.

Keberhasilan Kiai Anwar Iskandar dalam membangun relasi sosial dengan berbagai pihak, baik melalui pondok pesantren, NU maupun partai politik, telah mengantarkannya menjadi kiai yang cukup terkenal di wilayah Kediri dan sekitarnya, bahkan di wilayah Jawa Timur dan Indonesia.

Dalam berbagai even yang menonjol tingkat provinsi maupun Kota, nama KH. Anwar Iskandar hampir tidak pernah absen, baik sebagai penceramah, undangan istimewa. Bahkan sering pejabat baik tingkat Kota, provinsi bahkan menteri datang ke Pesantren (Al-Amien) dan As Sa'idiyah yang diasuh oleh KH. Anwar Iskandar.

Dalam memaknai perjuangan dan dakwah untuk masyarakat umum, KH. Anwar Iskandar dalam suatu ceramah pernah menegaskan:

“Kiai harus bisa menjadi pengayom semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat. Namun yang perlu diingat kiai tidak boleh menjadi budak pemerintah, tetapi jadilah orang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah.” Karena dengan begitu perjuangan untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar dapat dilaksanakan dengan mudah ditengah-tengah masyarakat. Ini menjadi penting karena Islam menuntun kita bahwa hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan yang paling mulia adalah berjuang untuk membela agama Allah dalam segala bentuk dan warna kehidupan. (wawancara 19 September 2008)

Pernyataan di atas menjadi landasan dan dasar pijakan aktifitas sosial kemasyarakatan dan sekaligus aktifitas sosial politik KH. Anwar Iskandar. Pandangan inilah yang menghantarkan KH Anwar Iskandar bisa berdiri di atas semua kelompok masyarakat, tidak hanya rakyat, pemerintah pun menjadi mitra kiai.

Relasi KH. Anwar Iskandar dan Pejabat Pemerintah

Latar belakang keluarga kiai, telah menjadikan KH. Anwar Iskandar memiliki komitmen yang tinggi terhadap dakwah dan pengembangan Islam. Hal ini tampak dalam pernyataannya saat penulis melakukan wawancara, beliau menyatakan secara tegas:

“Sejak kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk berjuang di jalan Allah lewat tatanan sosial kemasyarakatan yang memungkinkan untuk dimasuki, khususnya dalam bidang pendidikan agama islam ahlu sunnah wal jama’ah, dan tidak ada keluarga saya yang tidak berjuang.” Perjuangan adalah merupakan ruh kehidupan, maka bila kehidupan ini ingin bermakna harus diberi ruh yang namanya perjuangan, dan menurut saya perjuangan yang tidak boleh ditinggalkan adalah melakukan ikhtiyar dalam melayani masyarakat agar dapat mengenal dan memahami syari’at Islam yang telah diberikan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW. Pada awalnya Nabi Muhammad berat dalam memperjuangkan perintah ini, maka pada saat sekarang dan sampai kapanpun perintah untuk melakukan perjuangan di jalan ini tetap berlangsung, dan untuk masalah ini yang paling tepat bila perjuangan itu dilakukan dalam bidang pendidikan, dan pesantren merupakan bagian dari pendidikan itu, maka saya akan selalu menggeluti dalam bidang ini, meski bidang lain pun tidak boleh ditinggalkan. (Wawancara 19 September 2008)

Keluarga KH. Anwar Iskandar (kakak dan adik-adiknya) hampir semuanya memiliki dan mengasuh pondok pesantren, ini menunjukkan bahwa komitmen berjuang untuk pengembangan pengajaran Islam menjadi spirit keluarga tersebut.

Lebih lanjut beliau menyatakan:

“Berjuang menurut saya banyak jalannya, karena makna berjuang itu adalah mengerahkan kemampuan yang dimiliki dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, seperti berjuang dalam dunia pendidikan ada yang bersifat formal Madrasah, sekolah, juga pondok pesantren dan masih banyak lagi, bidang politik bisa mengerahkan pengaruh yang dimiliki agar pusat kekuasaan bisa menjadi bagian untuk alat menentukan jalan (Kebijakan) yang mengarah pada pencapaian ketentraman bersama, termasuk didalam terjun dalam politik praktis, mendirikan partai umpamanya, jadi anggota DPR, pejabat politik dll. juga dalam bidang sosial kemasyarakatan, secara langsung

menuntun dan mengajak masyarakat mencari jalan agar bisa dengan tertib beribadah kepada Allah dengan baik, misalnya lewat dakwah dan pengajian, membangun suasana tatanan kemasyarakatan yang relegius dengan mengembangkan syi'ar agama dan lain sebagainya, singkatnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mengemban berjuang asalkan bermanfaat bagi semua pihak" dan dilakukan atas dasar keinginan mencari ridho Allah swt, maka bila sebenarnya, yang bisa memberi makna tindakan itu sebagai perjuangan ya dari orientasi dalam dirinya, untuk apa sebenarnya seseorang melakukan sesuatu, baru tindakannya yang dinilai, itulah berjuang menurut saya. (Wawancara 19 September 2008)

Komitmen terhadap perjuangan telah menjadi orientasi KH. Anwar Iskandar, dan menurutnya perjuangan itu memiliki banyak cara, baik melalui politik maupun bentuk-bentuk lainnya. Darah aktifis telah mengalir pada dirinya sejak umur 15 tahun, KH. Anwar Iskandar telah menjadi seorang aktifis sebagai salah satu pengurus IPNU cabang Banyuwangi. Sedangkan maksud dari perjuangannya semata-mata beorientasi akherat, hal ini tampak dalam pernyataannya:

"Saya ingin mengabdikan kepada masa depan agama dan bangsa, karena dengan pengabdian seperti itu ajaran Islam akan bisa menjadi pembimbing manusia hidup di dunia ini dengan damai. Maka dari itu yang paling pas yang berada pada wilayah pendidikan pesantren dan pemerintahan, dengan mengembangkan pendidikan akan sama menyiapkan generasi penerus, dan dengan pemerintahan akan menjaga stabilitas kekuasaan, sehingga dengan begitu kalau saya mati nanti, ada amal jariyah yang terus mengalir dan lestari, dan menjadi ladang amal bagi saya, anak-anak saya dan orang-orang yang peduli terhadap pesantren". (Wawancara 19 September 2008)

Sedangkan landasan berpikir tentang ihwal relasinya dengan birokrat pemerintah, beliau menjadikan rujukan dari kitab-kitab klasik yang biasa dikaji di pesantren dengan sebutan *kitab kuning*, banyak kitab beliau sodorkan, akan tetapi ada sebuah penggalan dalil yang beliau kemukakan dari Sahabat Shofyan Al Stauri, beliau menyatakan menyatakan:

“Saya menjalin hubungan baik dengan pejabat pemerintah atas dasar kaidah yang saya kutip dari ada kaedah yang saya kutip dari kitabnya Ali Ibn Nayif yang berbunyi;

صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدنا فسد الناس ألا وهما
العلماء والأمرء.

Shinfani min ummati idza sholaha Sholuhan naas, wa idza fasadaa fasadan
nas, ala wa huma al ulama' wal umaro'

Ketahuiilah bahwa ada 2 (dua) golongan dari ummatku, bila kedua golongan ini baik, maka akan menjadi baiklah kehidupan manusia akan tetapi bila 2 (dua) Golongan ini jahad, maka akan jahad pula kehidupan manusia pada umumnya, ketahuilah kedua golongan itu adalah Ulmak dan Umarok. (Wawancara 19 September 2008)

Kaidah ini bisa ditemukan dalam kitab yang menjadi pegangan para kyai salaf, yakni kitab yang di karang oleh Ali ibn Nayif al Syuhud, *Maushu'ah al Rad ala al Mazhabib al Fikriyah al Mu'ashirah*, Bab *Ishlah al Syu'ub al Adillah al 'Aqliyyah*, (57:301). Dalam tradisi pondok pesantren kitab yang ditulis oleh ulama pada kurun pertengahan dan menggunakan bahasa Arab mempunyai mempunyai nilai lebih dalam pandangan kiai.

KH. Anwar Iskandar mempunyai pandangan yang sangat positif kaitannya masalah gubungan dengan pejabat pemerintah, pandangan-pandangan beliau didasarkan dari sumber teks-teks klasik yang beliau kaji secara teliti. Satu diantara penggalan pandangan beliau pernah disampaikan dalam suatu ceramah di hadapan para pengurus cabang NU kota Kediri dalam memberikan motifasi kepada pengurus cabang NU kota Kediri sebagai berikut;

Selain itu ada juga kaidah yang saya pedomani yang saya petik dari khikmah yang saya kaji dari kitab-kitab para ulama terdahulu yang berbunyi;

الناس على دين ملڪهم

An Naasu 'ala dinu mulukihim.

“manusia itu mengikuti agama (kebiasaan dan kesukaan) pemimpinnya.” Kalau agama para pemimpin negeri ini baik, maka rakyat akan mengikutinya, sebaliknya jikalau agama para pemimpin itu buruk, maka rakyat juga demikian.” Jadi kiai mendekati pemimpin atau pejabat pemerintah itu harus dalam rangka mengarahkan mereka agar berjalan sesuai dengan agama, atau dalam bahasa agama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Anda bisa bayangkan bagaimana jika pemerintah itu berjalan sendiri tanpa bimbingan kiai, pastilah nilai-nilai ke-Islaman yang selama ini dikembangkan kiai tidak akan menjadi pijakan pemerintah dalam mengambil keputusan.” (Ditranskrip dari Pidato KH. Anwar Iskandar Dalam Pengantar Konferensi PCNU Kota Kediri, 16 September 2005)

Jika dilihat dari substansinya kaidah tersebut sesuai dengan realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat, artinya masyarakat akan selalu mengikuti pemimpinnya, termasuk dalam hal agama, dan jelas sekali alasan kiai menjalin hubungan dengan penguasa adalah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*.

Namun jikalau ditelaah lebih lanjut kaidah di atas tidak jelas pengambilannya, karena kaidah di atas bukan sebuah hadis (Sumber Hukum Islam yang kedua) tetapi hal itu tetap menjadi pegangan KH. Anwar Iskandar dalam menjalin relasi sosial dengan birokrat, bahkan kalaupun disebutkan dalam salah satu “kitab kuning”,² kaidah di atas tidak termasuk sumber hukum, akan tetapi kitab hasil karya ulama terdahulu.

Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa hal kiai tidak lagi mempedulikan rujukan kaidah tersebut, sekalipun dalam tata aturan perumusan hukum Islam itu harus mengacu kepada, 1) al Qur'an, 2) hadis, 3) Ijma' dan 4) Qiyas (Sulaiman Abdullah, 2007:

²Kitab Kuning adalah buku yang selalu dikaji, dan diajarkan oleh para kiai di pesantren, dan selalu menjadi pegangan kiai dalam berpendapat. Materi kitab kuning ada yang khusus mengkaji hukum (Islam), teologi, tasawuf, etika, dan lain sebagainya, bahkan kadang juga memuat kumpulan subyek-subyek tersebut.

9-83), namun sering hal itu tidak diindahkan, yang penting bagi kiai ada rujukannya dalam *kitab kuning*.

Dalam hal *amar ma'ruf nahi munkar* seperti ini, KH. Anwar Iskandar menyatakan:

"Sebenarnya jalinan hubungan antara kiai dan penguasa yang demikian bukan yang pertama dilakukan, Para wali (wali songo) dulu juga melakukan hal yang demikian itu pada zamannya. Saya sadar bahwa pengaruh saya tidak mampu untuk serta merta mendorong masyarakat mengikuti apa yang sudah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian, makanya kita merangkul penguasa, agar masyarakat di wilayah tersebut dengan mudah menerima apa yang sudah saya sampaikan. Ibarat pergi ke pasar, kita tidak membeli satu-satu atau eceran, tetapi membeli secara borongan. Dengan merangkul penguasa, berarti kita melakukan dakwah model membeli borongan, karena efeknya akan lebih besar". (Wawancara 25 September 2009)

Jadi apa yang dilakukan oleh KH. Anwar dalam menjalin relasi dengan birokrat itu dalam kerangka pilihan metode dakwah saja. Jika ditelisik lebih lanjut orientasi kegiatan dakwah Wali Songo juga diarahkan pada pusat-pusat kekuasaan politik yang sedang berjaya, sesuai dengan kaidah *an nas 'ala dini mulukihim* (masyarakat sangat bergantung pada agama penguasanya). Bahkan dakwah Walisongo lebih detil lagi dengan membagi cara kerjanya: 5:3:1, lima wali di Jawa Timur, tiga di Jawa Tengah, 1 Jawa Barat. Pertimbangannya itu sesuai dengan peta dan tingkat kesulitan wilayah. (Asep Muhyiddin, Agus Ahmad, 2002, hlm. 124-125).

Relasi KH. Anwar Iskandar dengan pejabat pemerintah kota Kediri berawal saat ia dipilih menjadi pengurus Cabang NU Kota Kediri, pada awal tahun 1990 an. Berbagai even di tingkat Kota tidak pernah luput dari peran kiai ini, mulai peringatan 17 Agustus, pelantikan pejabat, menjadi pembicara dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di dinas-dinas Pemerintahan kota Kediri. Jalinan komunikasi itu terus berlangsung bahkan walikota, Bupati, Gubernur bahkan Menteri pun sering bertandang ke rumahnya,

dalam acara yang dikemas dalam bentuk buka bersama, *imtihan akhir* (wisuda santri), dan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren al-Amien, Ngasinan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri, dan biasanya dalam kunjungan seperti itu dibicarakan berbagai masalah sosial kemasyarakatan baik yang langsung bersentuhan dengan pesantren ataupun yang bersifat umum, akan tetapi sesekali dalam kunjungan seperti ini bisa juga dibicarakan terhadap masalah yang spesifik sebagai konsen kiai, yaitu pengembangan pendidikan agama pada umumnya dan pesantren pada khususnya.

Satu diantara sekian kunjungan Walikota Kediri, H.A. Maschut pada tanggal 5 Januari 2005 adalah contohnya. Dalam kunjungan tersebut selain membicarakan masalah yang bersifat umum, juga memberikan makna bagi pengembangan pendidikan di Pesantren Al Amin Rejomulyo asuhan KH. Anwar Iskandar, pada suatu saat KH Anwar Iskandar menceritakan tentang ikhwal kunjungan tersebut sebagai berikut:

"Pada tanggal 5 Januari tahun 2005 yang lalu Walikota beserta rombongan bersilaturahmi ke rumah saya di kompleks pondok pesantren Al Amien Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri ini. Bersama dalam rombongan tersebut kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dan beberapa pejabat yang lain, setelah berbicara banyak tentang banyak hal, maka saya pun ikut menyampaikan beberapa usul, maka pada waktu itu saya sampaikan begini. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren saya ingin mengembangkan dan menambah program pendidikan yang ada di pesantren ini berupa sekolah kejuruan, (SMK Informatika).

Yang dibutuhkan dari walikota dalam program ini adalah support dan rekomendasi untuk izin operasional, maka saat itu juga setelah berbicara teknis akhirnya walikota memerintahkan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk membantu kelancaran proses tersebut. Pada tahun berikutnya di Pesantren Al Amien, telah bisa dibuka SMK Kecil sebagai kelas jauh dari SMK Negeri yang ada di Kota Kediri. Dan dalam Nota Kerjasama antara Pesantren Al Amien, Kepala SMK Negeri 1 Kediri dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri sepakat mencangkokkan SMK Al Amien dengan SMK Negeri, dan hasilnya setelah tiga tahun berjalan,

SMK Al Amien telah mendapat izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri.”³ (Ditranskrip dari pembicaraan silaturahmi Walikota HA. Maschut beserta rombongan dikediaman KH Anwar Iskandar 5 Januari 2005).

Jalinan komunikasi yang terjadi sebagaimana yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi simbiosis mutualis antara Pejabat pemerintah Kota Kediri dengan kiai yang ada di kota ini.

- **KH. Abu Bakar Abdul Jalil**

Latar Belakang

Lahir di Kediri 18 April 1971, ia adalah putra dari Kiai Abdul Jalil, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Bandar Kidul Kediri. Pendidikan dasarnya adalah SD Islam Bandar Kidul, kemudian ke MTSN I kota Kediri dan Madrasah Aliyah al-Manar Prambon Nganjuk. Sedangkan dalam hal agama, ia belajar di Pondok yang diasuh oleh ayahnya sendiri, Pondok Pesantren Salafiyah sampai tahun 1988 kemudian melanjutkan ke Pesantren Lirboyo sampai tahun 1994 di bawah asuhan KH. Idris Marzuki.

Di bidang organisasi KH Abu Bakar memulai kariernya dengan mengemban amanat menjabat sebagai *Katib* (sekretaris) Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojoroto, kemudian jabatannya di NU naik menjadi Wakil Ketua Pengurus Cabang NU Kota Kediri. Di samping itu ia juga menjabat sebagai ketua MUI kecamatan Mojoroto, ketua Dewan Syuro PKB Anak Cabang Kecamatan Mojoroto dan terakhir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKNU Kota Kediri. Kiai yang masih tampak muda ini, sehari-hari menjadi pengasuh pondok pesantren Salafiah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kediri.

³Peneliti ikut mendampingi KH. Anwar Iskandar dalam pertemuan itu.

Relasi KH. Abu Bakar Abdul Jalil dan Birokrat

Asal mula menjalin relasi dengan birokrat pemerintah adalah saat KH. Abu Bakar Abdul Jalil menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojojoto, dalam hal ini ia menyatakan:

Saat menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojojoto, mulai camat sering mengundang saya dalam acara-acara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus, Acara Syukuran dan acara-acara keagamaan pada umumnya, selanjutnya hubungan itu berlanjut dalam acara-acara pelantikan pengurus NU tingkat kecamatan, kita (NU) mengundang MUSPIKA untuk mengenalkan pada basis masyarakat NU, selanjutnya hubungan dan komunikasi berjalan sedemikian rupa sampai saling memberikan pertimbangan dalam banyak hal yang menyangkut masyarakat banyak. akhirnya menjadilah kebiasaan saling silaturahmi dan komunikasi yang membahas hampir apa saja yang menyangkut tatanan kehidupan sosial masyarakat banyak.” (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Jalinan hubungan itu terus berlanjut dan meningkat lagi saat KH. Abu Bakar menjabat pengurus Cabang NU Kota Kediri, dan dalam menceritakan bagaimana gambaran relasi yang beliau bangun dengan Pejabat yang berada pada Pemerintah Kota, beliau menuturkan:

“Saat menjadi Pengurus Cabang NU Kota Kediri, sering wali kota atau pejabat yang setingkat dengannya, seperti Polresta, Kodim, mengundang saya dalam acara pelantikan dan serah terima pejabat di tingkat kota, Peringatan Hari Besar Nasional/PHBN Peringatan seperti peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus, Peringatan Hari Besar Islam di instansi pemerintah sampai dengan acara-acara yang sifatnya terbatas, sehingga memungkinkan untuk membicarakan hal-hal yang lebih rinci, maka pada saat begitulah sering saya menyampaikan pendapat yang biasanya saya saring dari suara masyarakat kelas bawah, nampaknya para pejabat itu senang dengan beberapa informasi dan usulan saya itu, hingga jalinan silaturahmi itu menjadi semakin kental. Cuman yang membedakan adalah kalau dulu yang sering komunikasi itu pak Camat, sekarang Walikota atau beberapa kepala dinas tertentu, sehingga materi yang dibicarakan pun sedikit berbeda”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Relasi Kiai dan Pejabat di Kota Kediri

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam hal klasifikasi kiai, ada saatnya kiai itu naik kelas dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, dalam konteks KH. Abu Bakar, kenaikan itu disebabkan karena jabatannya dalam organisasi NU naik dari Pengurus Majelis Wakil Cabang menjadi Pengurus Cabang.

Komunikasi antara kiai Abu Bakar dan pejabat pemerintah kota Kediri terus berlanjut tidak hanya dalam forum resmi, akan tetapi relasi itu jauh lebih intensif secara informal para birokrat juga sering berkunjung ke rumah kiai untuk membicarakan hal-hal yang ada. Sedangkan ikhwal pandangan relasinya dengan pejabat pemerintah kota Kediri kiai Abu Bakar menyatakan:

“Hubungan kiai dan birokrat pemerintah harus terus dibangun demi kepentingan bersama dan masyarakat yang lebih luas, sehingga setiap kegiatan keagamaan akan selalu didukung oleh birokrat pemerintah setempat, begitu juga dengan pejabat, ketika ia merasa semakin dekat kiai itu akan memudahkan dirinya dalam menyerap aspirasi masyarakat, ini terjadi karena secara umum (mayoritas masyarakat di Kediri memiliki ikatan batin dengan kiai), sehingga ketika dalam tugas sehari-hari keduanya bisa berjalan seiring program kiai yang berkepentingan mengembangkan dakwah dan program pemerintah yang akan menata kesejahteraan masyarakat bisa diayun secara bersama, dengan demikian akan menjadi semakin ringan...

Maka dari itu kiai juga harus pinter noto niat, dalam hal ini niat yang saya maksudkan adalah Amar makruf Nahi mungkar bisa dijalankan lebih efektif, karena dengan seorang pejabat teras dekat dengan kiai, memungkinkan kiai bisa ikut urun rembug bila ada kemaksiyatan yang ada ditengah masyarakat, bila kiai menggunakan cara ini maka akan semakin mudah hasilnya dan semakin ringan mengerjakannya. Karena kalau amar makruf itu biasanya mudah dilakukan, akan tetapi kalau sudah menyangkut nahi mungkar (mencegah kejahatan) apa lagi kejahatan itu ditengah masyarakat, belum tentu kiai bisa mencegahnya secara langsung, disinilah menurut saya kerangka niat awal harus dibenahi oleh kiai yang ingin mempunyai kedekatan dengan pejabat. Toh perintah amar makruf nahi mungkar ini juga secara jelas diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur'an untuk diemban oleh para pemuka dan pendakwah agama”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan adanya simbiosis mutualis, hubungan yang saling menguntungkan, dengan menggandeng birokrat pemerintah, kiai merasa dakwahnya akan mendapat dukungan dari pemerintah, sementara pemerintah merasa kebijakan-kebijakannya mendapat legitimasi dari kiai, tidak hanya menyangkut kebijakan dalam hal sosial agama, tetapi juga dalam pembangunan fisik. Dalam pembangunan fisik, saat peresmian Gedung Olahraga (GOR) Kota Kediri yang terletak di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto, acara itu juga dihadiri oleh para kiai, termasuk KH. Abu Bakar. Hadirnya para kiai dalam acara tersebut, dan acara-acara serupa oleh birokrat dimaknai sebagai bentuk legitimasi atau restu atas pembangunan tersebut, sehingga birokrat tidak perlu mengkampanyekan “pentingnya” pembangunan-pembangunan tersebut.

Begitulah awal mulanya hubungan dan relasi itu dibangun untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama, di pihak kiai mendasarkan pola pikirnya dengan alasan dakwah atau *amar ma'ruf nahi munkar*, di pihak pejabat pemerintah relasi dibangun untuk tujuan memudahkan komunikasi dengan rakyat, artinya dengan menggandeng kiai problem sosialisasi kebijakan bisa selesai dengan mudah sampai pada rakyat, karena telah tersampaikan dengan bahasa kiai yang lebih dekat dengan ummat.

Namun dalam perjalanannya dan seiring berlalunya waktu dan silih bergantinya pejabat pemerintah karena mutasi ataupun pensiun, relasi kiai dan pejabat pemerintah mengalami kerawanan, pada suatu ketika kiai merasakan bahwa birokrat menggandeng dan membangun relasi dengan kiai ternyata ada yang hanya sebatas untuk kepentingan jabatannya atau demi tugasnya dapat diselesaikan dengan baik, dan relasi ini tidak dibangun dalam rangka kepentingan yang lebih besar dalam jangka yang lebih panjang demi kepentingan yang lebih besar, dugaan ini mengemuka karena dalam pandangan KH. Abu Bakar, setelah pejabat itu mutasi atau pensiun dari jabatan tertentu, atau ketika

pejabat itu telah pindah posisi di tempat lain, beliau merasakan jalinan relasi itu mulai mengendor, bahkan tidak tersambung sama sekali. Maka muncul perasaan dalam diri kiai, bahwa dalam membangun relasi ini kiai, sering hanya sekedar “dimanfaatkan” hanya untuk kepentingan karier pejabat tersebut, lebih dari itu pejabat tersebut tidak lagi mempertahankan bangunan relasi tersebut dalam ranah sosial kemasayarakatan sehari-hari.

Hal ini tampak dalam pernyataan KH. Abu Bakar:

“Kita maunya hubungan itu tidak sebatas tugas-tugas birokrat tok, sehingga di kemudian hari jalinan relasi itu bisa terus berlanjut sekalipun pejabat tersebut sudah pindah (teritorial atau mutasi ke jabatan yang tidak memiliki teritorial), sehingga persahabatan itu mempunyai makna silaturahmi yang lebih dalam, dan tidak mengecewakan seperti ini, meskipun begitu mereka sudah saya maafkan, tetapi saya sebenarnya tetap tidak suka dengan orang-orang yang memanfaatkan kiai hanya demi jabatannya, sehingga kalau dia memberi rokok cuma satu bungkus, ya gak usah diterima, kalau cuma satu bungkus beli sendiri juga bisa, kalau satu bal, baru saya terima”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Dari ungkapan ini dapat digambarkan tantang bangunan relasi yang terjalin antara beliau dengan pejabat di pemerintahan, sebenarnya dimaksudkan disamping mempunyai dimensi dakwah juga memungkinkan dibentuk dalam bangunan relasi yang bisa memberikan manfaat terhadap sesuatu aktifitas yang bernilai sosial ekonomi baik yang berskala kecil ataupun yang mungkin besar, sehingga dalam jalinan relasi ini satu sisi memberikan manfaat untuk ummat dan pada sisi yang lain bisa saling memberi manfaat antar keduanya yakni pejabat dan kiai itu sendiri.

Dalam pernyataan tersebut *rokok* adalah gambaran dari sebuah pemberian yang bersifat ekonomi. Rokok dijadikan simbol, karena pada umumnya santri dan kiai sangat dekat dengan kebiasaan merokok.

Pernyataan di atas memang sedikit menunjukkan rasa kekecewaan atas beberapa peristiwa putusnya jalinan relasi dengan pejabat setelah ia mutasi atau pensiun, namun makna lain

yang bisa dipahami setelah melalui berbagai macam analisis yang mendalam dapat menuntun dan menunjukkan pada sebuah pola pikir yang mulai ada “pergeseran” orientasi kiai dalam menjalin hubungan dengan Pejabat pemerintah. Seiring dengan seringnya birokrat hanya memanfaatkan kiai dalam sebuah bangunan relasi dan putus begitu saja setelah pejabat tersebut mengalami mutasi atau pensiun, maka tokoh yang disebut terakhir telah mulai mencoba melakukan kalkulasi-kalkulasi sosial, sehingga besarnya pengaruh seorang kiai bisa saja jadi alat bargaining untuk tujuan tertentu, meski tujuan itu tidak selalu bersifat materi, namun dalam pernyataan di atas secara kebetulan kalkulasinya bersifat materi yang dikemas dengan bahasa “rokok”, sehingga bisa saja kalkulasi-kalkulasi itu dikembangkan dalam menentukan sebuah posisi tertentu bagi seseorang yang berada dalam wilayah kekuasaan sang pejabat, ataupun kalkulasi dalam proyek ataupun penempatan seseorang yang disepakati.

- **KH. Kafabihi Mahrus**

Latar Belakang

KH. Abdullah Kafabihi Mahrus terlahir dari keluarga keluarga kiai dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren Lirboyo. Tempat lahir di Kediri, 2 September 1960, menamatkan pendidikan dasar dan menengah di Kediri, sedangkan pendidikan tingkat atas diselesaikan di SMAN I Kota Kediri pada tahun 1978.

Pendidikan agama diperoleh dari Pondok Pesantren Lirboyo selama 9 tahun, kemudian melanjutkan ke Pesantren Kaliwungu Kendal Semarang di bawah asuhan KH. Dimiyati selama 6 tahun. Dalam organisasi kiai yang sehari-hari berprofesi sebagai wiraswasta ini pernah duduk dalam jajaran pengurus Syuriah NU pada tahun 2001-2005, kemudian pada tahun 2005-sekarang dipercaya sebagai Rois Syuriah PCNU Kota Kediri. Di samping itu ia juga sebagai Ketua MUI Kota Kediri periode 2009-2012, setelah sebelumnya menjadi wakil ketua MUI

Relasi KH. Kafabihi Mahrus dan Pejabat

Pondok pesantren Lirboyo adalah pondok pesantren terbesar di wilayah Kediri, dengan jumlah santri mencapai 7.000 (tujuh ribu) lebih. Pesantren ini telah meluluskan ribuan alumni yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dan di antara alumninya banyak pula yang mendirikan pesantren. Inilah yang kemudian menjadikan Pesantren Lirboyo sebagai tempat kunjungan para pejabat pemerintah mulai wali Kota, Gubernur, Menteri, bahkan para politisi nasional sering berkunjung ke pesantren ini.

Dalam hal ihwal membangun relasi dengan pejabat pemerintah, pengamatan peneliti melihat bahwa kiai Kafabihi termasuk kelompok kiai yang nampak sekali membatasi diri untuk berhubungan dengan pejabat pemerintah secara personal. Beliau sangat selektif dalam menerima kunjungan pejabat pemerintah dikediaman beliau.

Sikap ini muncul atas dasar persepsi beliau tentang pejabat pemerintah itu merupakan entitas yang berbeda dengan komunitas ulama, dalam sebuah ceramah beliau menuturkan sebagai berikut:

“Kiai dan pejabat pemerintah itu memiliki perbedaan-perbedaan yang nyata, kiai perhatiannya pada masalah agama: ngaji, ibadah, ngopeni jamaah (merawat jamaah), sedangkan pemerintah perhatiannya pada masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan sosial kehidupan dunia, sekalipun demikian kiai dan birokrat bisa ketemu pada saat yang tepat. Artinya ketemu melalui lembaga, seperti NU, MUI, dan tidak bersifat personal, serta masalah yang dibahas dalam pertemuan itu pun juga harus jelas yang berkait dengan masyarakat, sehingga posisi kyai benar-benar dalam rangka amar makruf nahi munkar”. (Ditranskrip dari Pengarahan KH Kafabihi Mahrus di Hadapan Pengurus MUI Kota Kediri 28 September 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa KH Kafabihi berbeda dengan kiai lainnya yang terbuka dengan siapa saja yang hendak bertemu dengannya, KH. Kafa membatasi diri dalam pertemuan-pertemuan secara personal dengan para birokrat, karena

menurutnya kedua belah pihak (kiai dan birokrat) memiliki perbedaan tugas, agama (akherat) vs dunia.

Ihwal keputusannya tersebut ia beralasan adanya tuntunan dari kitab yang biasa menjadi pedoman santri dan kyai pada umumnya, yakni pedoman yang dituliskan oleh Imam Gazali, yang terdapat dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*, berbunyi;

خير الامراً الذنب يأتون العلماء وشر العلماء الذنب يأتون الامراً

Khoirul umaro' alladzina yaktunal ulama' wa syarrul ulama alladzina yaktunan Umaro'

"Sebaik-baik umara adalah orang yang mau mendatangi ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah orang yang mendatangi penguasa"
(Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jil.2: 140)

Kaidah ini menjadi dasar bagi KH. Abdullah Kafa untuk melakukan relasi dengan *umara'* (pejabat pemerintah), karena berpegang pada dalil tersebut di atas menjadikan beliau sangat berhati-hati bahkan jarang jarang beliau menjalin komunikasi secara personal dengan pejabat pemerintah, karena menurutnya adalah menjadi aib jika seorang ulama harus datang kepada *umara'* untuk urusan yang sifatnya personal, beliau menjalin relasi dengan pejabat bila dalam kapasitas sebagai pengurus organisasi ummat saja. Bahkan pengalaman peneliti sangat sulit memberikan "salam tempel" kepada beliau.

Sekalipun demikian jika ada seorang birokrat berkunjung ke rumah beliau, beliau tetap dapat menerima dengan sepenuh hati, hal ini sebagaimana terjadi pada tahun 2008 yang lalu, ketika Walikota beserta rombongan mengunjungi KH Abdullah Kafabihi Mahrus.

Dalam perbincangan yang berkembang dibahas kesehatan lingkungan di Pondok Pesantren. Dan sebagaimana pesantren yang lain, Pesantren Lirboyo yang menampung lebih dari 7.000 (tujuh ribu) santri dalam hal kesehatan lingkungan tidak menjadi prioritas, hal ini bisa dilihat bagaimana saluran air pembuangan MCK kurang terurus sesuai standar kesehatan pada umumnya.

Sekalipun tidak bisa dipastikan adanya hubungan kausalitas antara pengambilan keputusan pemerintah kota dalam merencanakan proyek yang ada dengan gambaran silaturahmi KH Abdullah Kafabihi Mahrus dengan wali kota di atas, akan tetapi pada tahun 2009 ini di lingkungan pesantren Lirboyo di programkan pembangunan saluran (got) air yang mengelilingi pesantren ini, sehingga dengan telah dilaksanakannya pekerjaan proyek ini standart pemeliharaan kesehatan di lingkungan pondok pesantren yang berupa kelancaran pembuangan air limbah MCK dan keindahan saluran air dapat terjaga dengan baik.

Dari relasi antara KH. Kafabihi Mahrus dengan pejabat pemerintah kota Kediri tersebut bisa diduga ada hubungan yang saling menguntungkan, walikota seolah mendapatkan dukungan dari kiai, sementara kiai seolah memperoleh bantuan fisik dari pejabat tersebut, meskipun sebenarnya pembangunan tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum yang layak, dalam hal ini pembangunan saluran pembuangan air keliling pesantren untuk menjaga dan menciptakan lingkungan sehat.

Tentang ihkwal kenapa kiai membatasi diri untuk melakukan relasi dengan pejabat beliau mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

"Ada kekhawatiran dalam diri saya bila sering melakukan hubungan dengan pemerintah atas munculnya keinginan pribadi yang bersifat material dan bukan untuk kepentingan bersama, maka kalaupun toh jalinan itu dilakukan sebisa mungkin jangan yang bersifat pribadi, akan tetapi karena adanya tuntutan kelembagaan yang kita ada didalamnya, seperti karena keberadaan kiai sebagai pengurus NU yang juga mempunyai tanggung jawab pengembangan ummat umpamanya, mungkin juga karena jadi pengurus MUI dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian seorang kiai bisa menjaga muru'ahnya dihadapan pemerintah, menurut saya kiai akan lebih dihargai fatwa dan dakwahnya dimata pemerintah bila seorang kiai dapat menahan dirinya untuk mencari manfaat yang bersifat ekonomi dari hubungannya dengan pemerintah, sehingga dengan demikian amar makruf yang diemban oleh kiai dimata pemerintah dapat

dilaksanakan dengan semaksimal dan se efektif mungkin. Memang ini berat, maka dari itu agar tidak terlalu besar godaanya lebih baik kita membatasi diri daripada terlalu sering sambat pada pemerintah, akan tetapi komunikasi dengan pemerintah tetap perlu dilakukan karena dengan begitu kita bisa menjadikannya sebagai alat untuk nahi munkar". (Wawancara 16 September 2009 di Kantor PCNU Kota Kediri)

Dalam hal manfa'at yang bisa diperoleh dari membangun jalinan relasi dengan pejabat pemerintah, kiai Kafabihi Mahrus memang tidak menampiknya, namun beliau tetap menggaris bawahi hanya untuk kepentingan ummat, dalam wawancara beliau lebih jauh menuturkan:

"Banyak manfa'at yang bisa diperoleh dari menjalin hubungan dengan pemerintah, karena pemerintah itu merupakan kelompok panutan masyarakat yang mempunyai kekuasaan bisa memaksa atas suatu tindakan bersama yang diatas namakan kepentingan pemerintah. Agar presepsi pemerintah itu sejalan dengan syari'at agama dan tata nilai kebaikan masyarakat, maka kiai harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah. ada kaidah dalam kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu menyebutkan; فسادالناس بفساد الملك Fasadun Nas Fifasadil Muluk, Rusaknya aklaq masyarakat itu sebagian besar disebabkan karena rusaknya Akhlaq pejabatnya. Maka untuk mengawal akhlaq masyarakat ini kiai dipandang perlu untuk bisa mengambil peran membantu baiknya pejabat pemerintah". (Wawancara tanggal 16 Oktober 2009).

Dari uraian di atas dapat dideskripsikan bahwa kiai Kafabihi berpandangan bahwa menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah juga merupakan bagian yang harus ditata sedemikian rupa untuk kepentingan dakwah yang lebih luas. Bahkan jalinan itu sedapat mungkin dilakukan secara kelembagaan dan bukan bersifat personal ataupun individual.

Dalam penuturan diatas, kiai Kafabihi lebih memilih cara melakukan relasi dengan pejabat pemerintah atas dasar kapasitasnya sebagai pimpinan suatu organisasi, dan bukan atas dasar individu, hal demikian dimaksudkan untuk menjaga tercampur aduknya kepentingan pribadi beliau dan kepentingan ummat.

Dengan demikian dapat difahami bahwa kiai Kafabihi memahami menjalin relasi dengan pejabat pemerintah bisa bermanfaat, namun harus dilakukan dengan cara yang benar, karena menurut beliau, bila tidak akan mengarah pada tindakan yang tidak terpuji, kiai harus menjaga *murū'ah* (harga diri) dalam kapasitas sebagai tokoh agama dan panutan ummat.

- **KH. Wildan Mukhalladun**

Latar Belakang

KH. Wildan Mukhalladun lahir tanggal 25 September 1950 di Kediri. Kiai yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta ini adalah alumni Pesantren Lirboyo pada tahun 1974. Setelah lulus SR (Sekolah Dasar) tahun 1965, ia melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Lirboyo, pengembaraannya untuk menambah ilmu agama dilakukannya dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain semata untuk mencari barokah kiai pengasuh pesantren yang beliau tuju, maka selepas dari Pesantren Lirboyo beliau melanjutkan studi ke pesantren Futuhiyah Mranggen Demak Jawa Tengah sampai tahun 1975, kemudian pindah lagi ke Pesantren Hidayatul Mubtadiin Ngunut Tulungagung.

Kiprah dan aktifitas organisasinya dimulai th 1967 sebagai pengurus Ranting IPNU di desanya, kemudian semasa remaja beliau menjadi wakil sekretaris GP Anshor tahun 1981, setelah menikah maka beliau melepas aktifitas organisinya dari Ansor, kemudian beliau didapuk menjadi Ketua Ranting NU tahun 1977, Dari sini karier organisasinya di NU terus berlanjut menjadi Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang NU kecamatan Kota tahun 1982, dan mulai tahun 1984 naik menjadi wakil bendahara PCNU Kota Kediri. Kemudian sejak tahun 2005 terpilih dalam konferensi Cabang untuk menerima amanah jabatan sebagai Ketua PCNU kota Kediri pereode 2005-2010.

Kiai yang pernah mondok diberbagai pesantren mulai dari Lirboyo hingga beberapa pesantren di Jawa tengah ini juga pernah

menjadi Pengurus MUI (Majlis Ulama Indonesia) Kota Kediri pada tahun 2005 sebagai pengurus bidang Kerukunan Umat Beragama dan Badan Amil Zakat.

Relasi KH. Wildan Mukhalladun dan Pejabat

Relasi KH. Wildan dan pejabat pemerintah mulai terjadi saat beliau menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Kota, diawali dari silaturahmi Camat Kota Kediri, kemudian sering dilibatkan untuk mengkaji dan membahas problematika sosial yang berkembang di wilayah kecamatan sampai beliau diminta untuk memberikan ceramah dalam acara Peringatan Hari Besar Islam di kantor kecamatan. Dalam hal ini ia menceritakan:

“Saat menjadi Pengurus MWC NU Kecamatan Kota, saya sering diundang camat dalam acara PHBN, seperti peringatan HUT Kemerdekaan, PHBI, juga dalam hal pertimbangan tertentu tentang masyarakat, Kemudian hubungan itu berlanjut sampai saya menjadi pengurus NU tingkat cabang, yang membedakan dulu waktu masih di pengurus MWC yang mengundang saya adalah camat, sementara sekarang wali kota atau pejabat lain yang berada disekitar pak Wali”. (Wawancara 10 Agustus 2009)

Jadi relasi KH. Wildan dengan pejabat pemerintah itu bermula saat KH. Wildan menjadi pengurus organisasi NU, ditingkat kecamatan sampai berlanjut ketika menjadi pengurus organisasi NU ditingkat Cabang (kabupaten/Kota). dan relasi itu terbangun mulai dengan Camat sama Walikota dan pejabat lain yang berada disekitar walikota, jadi relasi ini dibangun dalam posisi seiring dan seimbang.

Dari perjalanan relasi yang dibangun oleh KH Wildan ini, setelah dianalisis secara dalam dapat ditemukan munculnya stratifikasi yang begitu jelas dalam jalinan relasi tersebut, ada saatnya KH. Wildan membangun relasi dengan Camat dan pada saat yang lain beliau menerima jalinan relasi dengan Pejabat Pemerintah di Tingkat Kota.

Setelah ditelusuri secara teliti dan menghubungkan peristiwa jalinan relasi tersebut dengan situasi yang mengitari karier KH.

Wildan dalam kepengurusan pada organisasi NU, maka secara jelas dapat ditemukan yang menyebabkan terjadinya perputaran relasi dengan pejabat pemerintah, Artinya Surat Keputusan (SK) menjadi pengurus NU pada level tertentu (ranting/Desa, MWC/Camat, Cabang/Kota) bisa menjadikan seorang kiai mempunyai kesempatan untuk membangun relasi dengan pejabat pemerintah yang setara dengan level amanat jabatan di kepengurusan NU itu diberikan. Maka pada saat jabatan KH Wildan dalam kepengurusan organisasi NU telah pindah ke level yang lebih tinggi, (Pengurus Cabang NU kota Kediri), Pejabat yang membangun relasi dengannya tidak lagi camat, tetapi walikota dan pejabat lain dilingkungan walikota. Di sinilah kemudian istilah kiai naik dari satu kelas ke kelas stratifikasi yang lebih tinggi itu muncul dengan jelas.

Sekalipun demikian relasi antara kiai dan pejabat pemerintah itu tidak selalu berjalan mulus, contoh konkrit hubungan sosial yang terjadi antara KH Wildan dan pejabat pemerintahan pada menjelang Pemilu sempat pernah terjadi ketegangan. Waktu itu tahun 1987 hubungan antara KH. Wildan dan pejabat pemerintah sempat terjadi ketegangan, sebagaimana penuturannya berikut ini:

“Waktu itu PPP menang di hampir seluruh wilayah yang menjadi kantong-kantong NU, padahal pemerintah adalah pemerintahnya Golkar, Dalam realitasnya pemerintah pilih kasih, daerah-daerah yang menjadi basis PPP atau PDI hampir tidak tersentuh oleh pembangunan, termasuk di sini, Manisrenggo (KH. Wildan tinggal di kelurahan Manisrenggo) aspal dan listrik belum ada, padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya mendengungkan program Listrik Masuk Desa. Saat itulah saya sebagai orang yang katanya dianggap tokoh masyarakat (kiai) dan mempunyai akses bisa komunikasi dengan pejabat merasa serba tidak enak, karena adanya keinginan yang berbeda, Pejabat sangat berkepentingan memenangkan suara Golkar dalam Pemilu, sementara masyarakat Manisrenggo termasuk yang kekeh dengan PPP, (sebuah partai yang masih dianggap kental Islamnya) birokrat menekan kiai, sementara masyarakat tetap tidak mau memilih Golkar, padahal kalau Golkar tidak

menang, aspal dan listrik tidak akan masuk Manisrenggo. Kemauan pemerintah dan masyarakat tidak sama, Disinilah tidak enaknyanya saya waktu itu, namun syukur waktu itu tidak sempat bergejolak". (Wawancara 23 Mei 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hubungan antara kiai dengan pejabat pemerintah kota Kediri sempat pernah memantik ketegangan, karena terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah, Pejabat pemerintah ingin memenangkan suara Golkar dalam pemilu di wilayah tertentu, sementara masyarakat masih kental dengan politik alirannya ke PPP. Namun ketegangan itu tidak berlangsung lama, setelah KH Wildan mencoba berpikir untung rugi bagi masyarakat luas atas dampak yang mungkin timbul dari perbedaan pilihan ini, maka KH Wildan mencoba membuat rancangan keputusan dan disosialisasikan pada beberapa tokoh yang berada yang ada disekitarnya.

Setelah melalui beberapa kegiatan yang ditempuh oleh KH. Wildan, beliau menggambarkan situasi waktu itu dengan singkat beliau katakan:

"Pada pemilu tahun 1988 karena Golkar di Manisrenggo menang, akhirnya beberapa jalan gang menuju masuk kampung di Manisrenggo dan beberapa jalan akses menuju Masjid dan Madrasah diaspal dan listrik nyala sebagaimana yang dijanjikan pak Camat waktu itu, dan yang menikmati adalah seluruh masyarakat Manisrenggo, kecurigaan Pejabat kepada saya berkurang dan masyarakat mulai bisa memahami langkah saya seiring fasilitas umum yang secara bersama dapat dinikmati dalam kehidupan sehari-hari". (Wawancara 23 Mei 2009).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KH. Wildan mampu mengkomunikasikan kepentingan warga dan kemauan pejabat pemerintah, awalnya masyarakat enggan memilih Golkar, namun dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh KH. Wildan warga tidak lagi keberatan untuk memilih Golkar, dan dampaknya kepentingan kedua belah pihak bisa dipertemukan dengan kompensasi kebijakan yang diambil oleh pejabat

pemerintah mengena pada masyarakat banyak, sehingga dalam kondisi seperti ini kiai lebih bertindak sebagai mediator atas dua kepentingan yang berbeda.

Alasan Kiai menjalin relasi dengan Pejabat Pemerintah

Pada umumnya seorang Kiai dalam menentukan pilihan ataupun putusan tertentu yang menyangkut pelibatan umat, selalu memiliki landasan atau sering disebut dengan *dalil*. Dalam menjalin relasi dengan birokrat KH Wildan menyatakan:

Ada kaidah agama yang umumnya dipedomani oleh kyai pesantren yang bersumber dari *kitab kuning* menyatakan;

فساد الناس بفساد الملك .

fasad al nas bi fasad al muluk,

Sebab musabab awal dari rusaknya masyarakat itu kebanyakan diakibatkan dari rusaknya pemerintah (atau pemimpin) mereka.,

*biila pemerintah berjalan sendiri tidak ada kendali dari kiai, masyarakat juga ikut-ikutan rusak, di sinilah pentingnya kiai berhubungan dengan penguasa. Kalau tidak dengan kiai jangan-jangan mereka akan menggandeng brandal (orang yang suka berlaku onar). Karena pada dasarnya masyarakat itu umumnya akan mengikuti arahan dan program yang dibangun oleh penguasanya, sehingga biila penguasa itu baik maka dimungkinkan akan berbuat baik kepada rakyatnya: dalam terminologi santri dikenal dengan kaidah *الناس على دين ملڪهم* An Naasu 'ala dinu mulukihim, Masyarakat itu akan mengikuti arah pemerintahnya. Makanya kita perbaiki saja Pejabat Pemerintahnya rakyat akan mengikuti kebaikan pejabat pemerintah itu, ini juga bagian dari strategi, sehingga meringankan tugas.(Wawancara 23 Mei 2009)*

Alasan di atas menunjukkan bahwa landasan KH. Wildan dalam menjalin relasi dengan pejabat pemerintah itu adalah dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*. Jadi relasi itu didasarkan pada perintah agama untuk menegakkan kebenaran dan mencegah perbuatan munkar.

- **KH. Fuad Taqiyudin Nawawi Yunus**

Latar Belakang

Kiai yang dikenal sebagai ahli falak ini lahir di Kediri tanggal 4 Agustus 1961. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Sekolah Dasar Islam al-Huda Kota Kediri, kemudian ke Pesantren Lirboyo sampai kelas 2 MA. Semangatnya untuk mencari ilmu mengantarkannya untuk belajar *tahfidzul qur'an* (hapalan al-Qur'an) di Pondok Pesantren Roudlatul Tahfidzil Qur'an Surabaya, kemudian PP Tahfidzul Qur'an Semarang dan Pasuruan, dan PP. Al-Muayyad Solo. Pesantren terakhir yang disinggahinya adalah Pondok Pesantren Cukir Jombang.

Sehari-hari KH. Fuad bekerja sebagai petani yang secara langsung mengelola tanah pertanian yang beliau miliki. Dan sepanjang tahun biasanya beliau menanam tebu, dimana komoditi ini menjadi komoditi andalan masyarakat Kediri pada umumnya. Dan dengan mata pencaharian ini pada umumnya masyarakat bisa secara independen mengatur sumber ekonominya sendiri, karena pada umumnya mereka tidak perlu bergantung pada banyak institusi selain pabrik tebu. di Kediri terdapat 3 pabrik gula yang secara umum menjadi kolega dan hubungan yang mutualis dengan masyarakat petani Tebu.

Dalam kepengurusan organisasi NU, ia meniti karir mulai Pengurus Ranting, kemudian masuk dalam Lajnah Falakiyah PCNU Kota Kediri dan sekarang menjabat sebagai Rois Syuriyah Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Pesantren (2002-2006, 2006-2011).

Relasi KH. Fuad Taqiyudin Nawawi Yunus dan Birokrat

Dalam pandangan dasar KH. Fuad Taqoyyudin Yunus, kiai perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, karena keduanya adalah tokoh yang memiliki kepentingan yang sama, menciptakan stabilitas. Dengan stabilitas kehidupan keagamaan akan kondusif sehingga dakwah Islam akan mudah dilaksanakan, di sisi lain bagi birokrat stabilitas sosial yang menjadikan

program-program pemerintah di tingkat kecamatan akan mudah dilaksanakan.

Dengan demikian bisa difahami bahwa kedua tokoh ini saling membutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Camat merasa membutuhkan kiai untuk mendukung program-programnya, kiai merasa membutuhkan Camat untuk mendukung kegiatan keagamaan sebagai bagian dari realisasi program dakwah yang telah menjadi pilihannya, dalam sebuah wawancara secara jelas Kiai Fuad menuturkan:

“Hubungan kiai dan pejabat pemerintah harus terus menerus dibangun demi kepentingan umat, sehingga setiap kegiatan keagamaan akan selalu didukung oleh pemerintah setempat, begitu juga dengan pejabat ia akan dinilai semakin memperdulikan NU (mayoritas masyarakat di Kediri memiliki ikatan batin dengan organisasi ini), karena berhubungan dengan baik pada kiai, sehingga ketika dalam tugas sehari-hari keduanya bisa berjalan seiring maka tugas yang diemban oleh masing-masing pihak meski mempunyai sumber yang berbeda, dan dalam bentuk yang berbeda dapat selesai dengan baik, karena antara keduanya hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yakni demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dalam naungan Ridho Allah”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Ihwal hubungan dengan birokrat, kiai Fuad pertama kali menjalinnya dengan camat Pesantren, dimana hubungan itu terjalin setelah beliau diangkat menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Pesantren, saat masih menjadi pengurus ranting camat belum membangun relasi dengannya, dalam masalah ini beliau secara jelas menuturkan:

“Saya pertama kali menjalin hubungan dengan camat setelah dilantik menjadi pengurus majelis wakil cabang NU Kecamatan Pesantren tahun 2002, sebelumnya saya tidak pernah berhubungan dengan camat, baik secara pribadi maupun secara organisasi (NU) waktu itu saya diminta untuk memberikan pengajian dikantor kecamatan yang diadakan oleh pak camat dalam rangka memperingati hari Isro’ mi’roj Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya setelah itu sampai sekarang selalu diajak pak camat untuk sesekali bersilaturahmi secara bersama dengan pengurus MWC NU

yang lain, dan sesekali pak camat dan kapolsek atau sendirian kadang kala datang ke rumah hanya sekedar silaturahmi biasa". (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jabatan dalam kepengurusan organisasi NU di tingkat kecamatan memiliki nilai strategis di mata penguasa (pemerintah) ditingkat kecamatan Pesantren Kota Kediri, artinya birokrat pemerintah di tingkat Kecamatan (yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Dan Ramil) akan menjalin kerjasama dengan orang (kiai) memiliki jabatan setara dengannya, Majelis Wakil Cabang adalah kepengurusan NU di tingkat kecamatan.

Saat Kiai Fuad Nawawi mengemban amanah dalam kepengurusan NU pada tingkat Majelis Wakil Cabang. Camat Pesantren waktu itu adalah Drs. Rachmat, M.AP. (1999-2003), kemudian dilanjutkan oleh Drs. Didik 2004-2009. Dalam pengakuan Kiai Fuad, di wilayah kecamatan Pesantren ini, Hubungan antara kiai dan birokrat kecamatan semakin intens ketika terjadi Pemilihan Legislatif 2009 lalu, ini paling tidak terlihat ketika muncul banyaknya calon legeslatif dari wilayah ini antara kyai dan Camat mempunyai inisiatif bersama untuk membuat susana kondusif yang meminimalisir gesekan antar pendukung kandidat calon anggota legeslatif.

Untuk memperlihatkan hubungan relasi kiai dan dan pejabat pemerintah ditingkat kecamatan dalam level ini terjalin dengan baik, dan untuk meminimalisir gesekan dimasyarakat karena beda pilihan dalam politik maka Kiai Fuad mempunyai gagasan untuk mengundang seluruh Caleg (Calon Legeslatif) yang datang dari wilayah ini, ini dilakukan karena banyaknya jumlah caleg di wilayah ini, Dan dalam merealisasikan gagasan ini Kiai Fud dengan Majelis wakil Cabang NU pesantren mengusulkan kepada camat untuk mengundang seluruh caleg yang berasal dari wilayah Pesantren ini ditambah beberapa perwakilan dan tokoh dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan doa bersama. Kemudian dalam

pertemuan tersebut Pejabat memberikan arahan dan Kiai memberikan tausiyah, demi terjaganya persaudaraan yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Pada saat itu KH. Fuad bercerita bahwa beliau mempunyai keinginan agar adanya perbedaan pilihan dalam pemilu jangan sampai merusak persaudaraan, dalam tausiyah beliau memberikan wejangan yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Semua caleg adalah baik, mari kita doakan, semoga caleg yang jadi bisa mengemban amanah dan bisa tetap dekat rakyat, sementara yang tidak jadi diberi kekuatan dan ketabahan oleh Allah. Mereka adalah saudara-saudara kita, mari kita ciptakan suasana aman demi kebaikan bersama masalah pemilu datang 5 tahun sekali, akan tetapi hubungan kita terjadi setiap hari, maka jangan sampai karena sesuatu yang hanya 5 tahun sekali ini merusak tatanan yang setiap hari kita jalani”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Usulan tersebut menunjukkan bahwa kiai merasa berkepentingan dengan kondusifitas keamanan di wilayah, dan kiai melaksanakan kegiatan tersebut sesuai porsi dan posisi kiai sebagai tokoh agama, sementara camat bekerja dalam koridor wilayahnya untuk tetap memberikan fasilitas pertemuan antara masyarakat yang berbeda aspirasi politiknya.

Landasan KH. Fuad Nawawi menjalin relasi dengan birokrat pemerintah adalah ungkapan yang diambil dari kitab kuning yang beliau pegangi sejak menjadi santri, yaitu tausiyah Imam Gozali yang berbunyi:

خير الامراً من يأتي العلماء و شر العلماء من يأتي الامراً

Khoirul Umaro' Man yaktil Ulama', wa Syarrul ulama man yaktil umaro'

“Sebaik-baik umara adalah orang yang mau mendatangi ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah orang yang mendatangi penguasa” (Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid.2: 140)

Sekalipun demikian menurut KH. Fuad, ungkapan di atas tidak harus dimaknai secara *leterlidge*, lebih lanjut Kiai Fuad memberikan penjelasan:

“Pada zaman nabi berbeda dengan zaman sekarang, zaman sahabat juga telah berbeda pada zaman sekarang. Relasi dengan penguasa bahkan sekarang menjadi keniscayaan, artinya bagaimana kiai bisa menebarkan amar ma’ruf nahi munkar di lingkungan pejabat pemerintah. Jika kiai tidak berrelasi dengan mereka, maka pejabat akan melakukan relasi dengan tokoh lain, Bila tokoh lain itu tidak mempunyai landasan agama yang baik, maka saran yang dimasukkan pada pejabat juga saran yang bukan bernilai pada ajaran agama, maka dari sudut pandang ini kyai membangun relasi dengan Pejabat justru malah harus.

Sehingga dengan demikian pemaknaan terhadap bangunan relasi antara pejabat dan kiai mempunyai visi dakwah dan amar makruf nahi mungkar, Jadi relasi itu semata-mata demi menegakkan perintah agama, dan bukan karena tujuan yang lain”. (Wawancara 9 Oktober 2009).

Dari ungkapan yang spesifik ini kiai fuad nampaknya mempunyai pandangan bahwa harus terjadi pemaknaan ulang atas suatu teks atau nas tertentu yang datang dari Nabi sekalipun untuk dicarikan makna yang lebih sesuai dengan perkembangan tatanan sosial kemasyarakatan yang tengah berlangsung.

Akan tetapi satu hal yang tidak bisa hilang dari rumusan pemaknaan atas teks yang melandasi jalinan hubungan ulama dan umarok adalah tata nilai yang bersifat transendental, yakni hubungan antara ulama dan umarok adalah merupakan hubungan dari entitas yang berbeda fungsi dalam tata nilai syari’at, akan tetapi entitas yang berbeda itu tetap harus ditata sedemikian rupa untuk menuju tujuan bersama yakni kebaikan ummat.

- **KH. Cholil Asyari**

Latar Belakang

Lahir di Kediri tahun 1943, pendidikannya dimulai di Sekolah Rakyat, Madrasah Tsanawiyah dan PGA, semuanya di Kediri. Kemudian melanjutkan pendidikannya di PP. Hidayatul Mubtadiin Lirboyo pada tahun 1960-1968. Tamat dari Lirboyo kemudian memulai dakwahnya di desa Bujel, tak lama kemudian ia diberi amanat oleh kakeknya untuk mengelola Masjid al Muttaqin,

Kelurahan Betik Mojoroto. Tahun 1986 ia bersama salah seorang pengurus Masjid berusaha untuk mengembangkan masjid, sehingga sekarang masjid itu mampu menampung 600 Jamaah.

Aktifitasnya dalam kepengurusan NU dimulai pada tahun 1997 ketika dipercaya sebagai Rois Syuriah Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Mojoroto, keberhasilannya membawa NU membuatnya menduduki posisi tersebut selama tiga periode (1997-2009).

Kiprahnya di partai Politik, KH. Cholil Asy'ari pernah aktif di PPP. pada tahun 1980 an, kemudian masuk PKB pada akhir tahun 1990 an sebagai mustasyar Ranting Bujel, dan pada tahun 2006 ia juga dipercaya sebagai mustasyar PKNU Kecamatan Mojoroto.

Sehari-hari ia dikenal sebagai kiai yang sederhana, apa adanya dan merupakan salah satu kiai yang *nguri-nguri* wisata religi ke sejumlah wali di pulau Jawa, atau sering di dikenal dengan "ziarah Wali Songo." Ia tidak pernah absen dari kegiatan ziarah, jamaahnya di sekitar di Kediri selalu mendaulatnya menjadi imam untuk kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga kegiatan itu menjadi salah satu sumber ekonominya. Ia juga mempopulerkan ziarah wali Jawa Timur (Wali 7), dan kemudian Wali Bali (tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan Islam di Pulau Bali).

Relasi KH. Cholil Asyari dan Birokrat

Ia mulai berkenalan dengan birokrat pemerintah Kota Kediri sejak diangkat menjadi Pengurus Syuriah Majelis Wakil Cabang Mojoroto. Relasinya berawal ketika pada pengajian-pengajian di Ranting NU (kepengurusan Tingkat Kelurahan/Desa). Intensitas relasi itu menjadikan hubungan antara Kiai dan Pejabat menjadi akrab, dan dalam setiap pengajian, Camat yang bersangkutan tidak jarang titip pesan kepada para jamaah supaya mendorong program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia menuturkan:

"Pada saat musim penghujan, camat sering titip pesan kepada saya, tolong sampaikan kepada warga, agar menjaga kebersihan lingkungan,

tidak membuang sampah sembarangan, agar penyakit demam berdarah tidak menyebar, dan segera laporkan kepada aparat setempat bila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti Demam Berdarah yang berkembang cepat, dan lain sebagainya.” (Wawancara tanggal 17 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kiai berperan sebagai makelar budaya (*cultural broker*), yang cukup efektif, ini terjadi karena kiai dapat mengkomunikasikan pesan-pesan program pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa masyarakat itu sendiri, di sisi lain kiai juga bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah setempat.

Contoh kongkrit dalam masalah ini adalah saat pembangunan Kantor MWC NU Kecamatan Mojojoto, warga NU berharap birokrat turut berpartisipasi. Keinginan warga ini bisa disampaikan oleh KH. Cholil, dan tak lama kemudian pembangunan tersebut berjalan lancar.

Kondisi ini dapat terjadi karena secara personal pribadi dan sosok KH Kholil Asy'ari mempunyai relasi dan hubungannya dengan pejabat yang tidak hanya berhenti sampai camat saja, walikota bahkan sering bertandang ke rumahnya, baik saat H. Achmad Maschut maupun walikota periode sekarang, dr. Syamsul Azhar (2009-2014), dalam hal ini beliau menuturkan:

“Selama menjadi Walikota Pak. Achmad Maschut pernah datang ke rumah untuk sekedar silaturahmi biasa, begitu juga dengan Walikota yang baru ini, dr. Syamsul Azhar, 5 hari yang lalu datang ke sini. Ia meminta supaya saya mendukung program-program yang beliau canangkan. Keakraban saya dengan walikota lebih diorientasikan pada kesinambungan suatu program di masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah, karena masa jabatan Walikota lebih lama (5 tahun), sementara camat sering ganti maka saya sebenarnya lebih memprioritaskan berhubungan dengan walikota, katimbang dengan camat, namun bukan berarti dengan camat saya tidak mengenal, akan tetapi mengawal program jangka panjang itu lebih aman bila berhubungan dengan walikota katimbang dengan camat. Camat mesti manut walikota, tapi belum tentu walikota mengikuti permintaan camat”. (Wawancara tanggal 17 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sekalipun KH. Cholil hanya memiliki posisi sebagai pengurus NU tingkat kecamatan, namun yang berkunjung kepadanya adalah walikota. Posisinya sebagai Pengurus NU tingkat kecamatan tidak membuat kelasnya menjadi hanya menjadi *kiaine camat*, namun telah naik ke level atasnya yakni pada level Walikota.

Akan tetapi di sisi lain pengaruhnya yang demikian ini ternyata tidak serta merta menjadikannya diangkat dan dipercaya untuk menjadi Pengurus Organisasi NU pada tingkat Cabang, dalam mengomentari kondisi demikian ini beliau secara lugas menyatakan:

"Tujuan saya masuk dan mau ikut cawe-cawe dalam pengurus NU ini, saya hanya ingin "khidmah" (mengabdikan) kepada NU kiai dan para guru-guru saya, aku ora pateken karo jabatan di NU" (saya tidak peduli dengan jabatan saya, ini (saya jadi pengurus NU) disamping ikut-ikutan berjuang juga karena memenuhi pesen dan permintaan KH. Kafabihi Mahrus, (beliau adalah anaknya kiai dan guru saya) saya harus hormat dan tunduk pada beliau, waktu itu beliau dawuh pada saya "Pak Kholil aku suwun sampeyan ngonconiku aku ngopeni NU, lek ora sampeyan sopo maneh" (Pak Kholil, saya minta bapak membantu saya di NU, kalau tidak bapak siapa lagi).

Saya ini sebenarnya gak pantas disebut dengan kiai, ada yang lebih pantas untuk tingkat kecamatan Mojoroto, Gus Ab⁴. Ia banyak berkiperah di tengah-tengah masyarakat, ia bisa berkomunikasi dengan Camat, dengan Kapolsek, dengan Dandim dengan Pak Walikota dan dengan masyarakat". (Wawancara tanggal 17 Oktober 2009).

Bangunan relasi dan situasi hubungan yang terjadi pada kiai Kholil ini memang unik, meski beliau masih berada di level

⁴Nama lengkapnya Abu Bakar Abdul Jalil, pengasuk pondok pesantren Salafiah Bandar Kidul Kecamatan Kota Kediri, ia adalah mantan Pengurus Tanfidiyah PCNU Kota Kediri periode sebelumnya. Sekarang aktif di PKNU sebagai Ketua Cabang Kota Kediri. Gus Ab tidak hanya dikenal dekat pejabat pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Dalam sehari ia biasa melayani tamu mulai jam 08.00 sampai jam 10.00, mulai birokrat pemerintah, masyarakat biasa, pengusaha dan lainnya.

kecamatan dalam struktur kepengurusan di NU, akan tetapi relasi yang terbangun telah sampai pada level Walikota. Dugaan peneliti berkerjanya Walikota ke rumah KH. Kholil, dilatarbelakangi adanya masalah lain yang secara khusus dimiliki oleh KH. Kholil, yaitu KH Kholil mempunyai hubungan emosional yang sangat erat dengan kiai Pesantren Lirboyo utamanya KH Idris Marzuki.

Dalam kasus ini, setelah peneliti wawancara dan amati lebih jauh, pejabat pemerintah kota yang berkunjung pada kiai Kholil ternyata lebih banyak memanfaatkan kedekatan kiai Kholil dengan jaringan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, seperti KH. Idris Marzuki, KH Anwar Mansur dll, untuk sesekali menjadi perantara penyambung relasi dan hubungan yang spesifik antara pejabat pemerintah kota dengan jaringan kiai Lirboyo. Perlu dicatat bahwa, kiai Pesantren Lirboyo adalah representasi *mainstream* kiai di Kediri yang mempunyai jaringan luas yang telah merambah pada level Jawa Timur dan nasional.

Sedikit petunjuk kiai Kholil yang mengarah pada penjelasan masalah ini adalah penuturan beliau tentang pertanyaan peneliti apa saja yang pernah beliau berikan kepada walikota, saat itu beliau katakan:

“Ya saya tidak bisa memberi apa-apa kepada Bapak walikota selain ngaji dan ketemu dengan para jama’ah yang ada di Masjid dan Tahli, tapi juga saya pernah memenuhi permintaan beliau untuk menyampaikan suatu amanat kepada mbah Idris (KH. Idris Marzuki) dan pada waktu yang lain barulah pak wali (walikota) datang sendiri sowan pada Mbah Idris”. (Wawancara tanggal 17 Oktober 2009).

Sehingga dengan demikian dapat dimengerti posisi KH Kholil berkesempatan membangun relasi dengan walikota karena keberadaan beliau disamping sebagai tokoh lokal kecamatan Mojoroto, beliau juga secara pribadi mempunyai kedekatan dengan KH. Idris Marzuki, tokoh sentral Lirboyo, sehingga posisi ini bisa menjadikan KH Kholil As’ari membantu menjadi perantara hubungan antara pejabat tertentu untuk bertemu

dengan jaringan kiai Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo yang dianggap telah mempunyai level relasi dengan pejabat yang bersifat regional dan bahkan nasional. Sehingga posisi KH Kholil sebagai pengurus MWC NU kecamatan Mojoroto tidak menjadi faktor dalam membangun relasi dengan pejabat pemerintah pada level kota Kediri. Dan posisi seperti ini tidak dalam kapasitas fokus masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Perlu diketahui bahwa kiai Idris Marzuki adalah tokoh yang amat disegani dalam lingkaran para kiai di Kediri, karena dilingkungan pengasuh pesantren lirboyo beliau adalah yang *dituakan* dan yang memegang kendali diantara sejumlah kiai pengasuh yang ada dilingkungan Pesantren Lirboyo, selain itu juga disebabkan hampir semua kiai di Kediri adalah alumni Lirboyo, sehingga ada hubungan psikologis dengan almamater pesantren, demikian juga kiai KH. Kholil Asy'ari.

RELASI BIROKRAT PEMERINTAH KOTA KEDIRI DAN KIAI

- **Drs. Rachmat Basuki, M.AP (Camat Pesantren 1999-2003)**

Latar Belakang

Rachmat lahir di Kediri, 1 Juni 1966, pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di Kediri, kemudian melanjutkan ke APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) Malang tahun 1993, kemudian Magisternya ia peroleh dari Universitas Merdeka Malang tahun 2002 dengan konsentrasi Administrasi Publik.

Lulus dari IPDN ia diangkat menjadi PNS dengan jabatan sebagai Sekretaris Camat Pesantren. Jabatan ini ia pegang mulai 1996-1999, kemudian 1999-2003 diangkat menjadi Camat Pesantren. Beberapa prestasi telah diukir dengan diterimanya beberapa penghargaan, maka karirnya di bidang pemerintahan terus melejit, dari jabatan tertentu mutasi ke jabatan lain ia lalui dan laksanakan dengan baik, maka pada tahun 2003-2006 ia diangkat menjadi Sekretaris KPU, dimana pada waktu itu jabatan

tersebut merupakan jabatan yang sangat strategis karena mempunyai kedekatan dengan pimpinan partai politik di tingkat Kota, Dan jabatan ini dikatakan strategis karena baru kali itu KPU secara mandiri dijabat oleh unsur yang bukan PNS. Sementara sekretariatnya merupakan PNS dari pemerintah kota, kemudian 2006-2007 dipercaya memegang jabatan Kepala Bagian TU Dinas Sosial dan KB, tahun 2007-2008 sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, dan sekarang ia menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (2008- sekarang).

Relasi Drs. Rachmat Basuki, M.AP dan Kiai

Relasinya dengan kiai dimulai saat ia menjabat Camat Pesantren (1999-2003). Menurutnya kiai adalah pemimpin informal yang memiliki peran cukup besar dalam mendukung program-program pemerintah. Awalnya ia memetakan kiai berdasarkan pengaruhnya di masyarakat. Secara sederhana ia menyatakan:

“Telah terjadi klasifikasi dan tingkatan kelas kiai di tengah-tengah masyarakat, kelas itu berdasarkan pengaruh dan kharisma yang dimiliki oleh seorang kiai di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada kiai kelas dusun karena pengaruhnya hanya meliputi teritorial dusun, ada kiai kelas kelurahan karena pengaruhnya pada wilayah kelurahan, ada kiai kelas kecamatan, karena pengaruhnya meliputi wilayah kecamatan, dan ada pula kiai kelas Kota/Kabupaten” karena pengaruh yang dimilikinya telah dapat menyentuh pada kepentingan pejabat ditingkat Kota/Kabupaten, dan seterusnya dalam kelas-kelas yang lainnya”. (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Didik Catur, Camat Pesantren sebelum Rachmat kurang lebih juga menyatakan hal yang sama:

“Saat saya menjadi Camat Pesantren yang sering saya berkunjung dan silaturahmi ke rumah rumah beliau adalah Bapak H. Muhammad Salim, dan KH. Fuad yang saat itu menjadi pengurus NU kecamatan Pesantren, dan saya selalu mengundang beliau pada acara-acara keagamaan ataupun sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan yang melibatkan masyarakat umum, karena sebenarnya beliau-beliau inilah

yang bisa dengan mudah memberikan arahan dan tausiyah kepada masyarakat yang ada di desa-desa itu lewat pengajian rutin ataupun menggunakan media Tahllilan, yasinan dan lain sebagainya”.

Pernyataan dua Pejabat di atas menunjukkan bahwa saat menjadi camat keduanya membangun relasi dengan kiai yang memiliki pengaruh di tingkat kecamatan. Saat Didik Catur menjadi Camat Pesantren, waktu itu Pengurus NU tingkat kecamatan Pesantren adalah H. Salim, sedangkan saat Rachmat menjadi Camat Pesantren, yang menjadi pengurus NU tingkat kecamatan adalah KH. Fuad Nawawi Taqoiyudin Yunus, maka relasi yang mereka bangun pada masa yang berbeda itu pun terjadi berbeda karena adanya keperbedaan tokoh yang mengemban amanah kepengurusan NU di tingkat kecamatan Pesantren.

Dengan demikian klasifikasi kiai berdasarkan pengaruh masyarakat dalam teritorial tertentu itu adalah fakta dalam masyarakat. Sedangkan seorang pejabat baru dalam wilayah tertentu dapat menemukan level klasifikasi kekiaian seseorang pada wilayah tertentu itu dapat ditemukan melalui, tiga hal;

- 1) penokohan dari masyarakat, artinya dalam acara-acara setingkat kecamatan maka kiai X yang diundang, sedangkan dalam acara-acara tingkat kelurahan kiai Y yang diundang, dan itu sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama;
- 2) melalui pengamatan dan penyelidikan, artinya birokrat mengamati dan memetakan siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di tingkat kelurahan, kecamatan, kota atau bahkan provinsi, termasuk di dalamnya kiai;
- 3) referensi dari staf.

Menjalin relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk kiai memiliki makna penting bagi keberhasilan program-program pemerintah. Dalam sistem masyarakat yang masih menganut paternalistik seperti Kediri, birokrat menjalin relasi dengan kiai adalah sebuah keniscayaan. Dalam hal ini Didik Catur menuturkan:

“Kiai adalah orang yang sangat paham dengan masyarakatnya, karena kiai memiliki umat, ia adalah tempat mengadu bagi masyarakat sekitarnya, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga dalam segala hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, mulai dari masalah jodoh, memberi nama anak, memulai usaha, meminta obat karena anaknya sakit yang berkepanjangan dan lain sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini, kiai mempunyai tempat yang khusus di hati masyarakat”. (Wawancara 10 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Didik sebagai birokrat memahami peran kiai di tengah-tengah masyarakat, dan ia sadar bahwa seorang birokrat itu demi suksesnya program-programnya perlu menggandeng kiai. Berikutnya ia menyatakan:

“Sebagai pejabat pemerintah kami bahkan wajib menghormati kiai, karena secara spiritual kiai itu dekat dengan Yang Maha Kuasa, kiai paham akherat, sementara kami tidak banyak paham dalam hal-hal tersebut, makanya kita harus hormati, agar kita juga mendapat barokah dari kiai lewat jalan yang belum tentu kita memahaminya. hanya bagaimana cara menghormati itu yang mungkin bisa berbeda-beda”. (Wawancara 10 Oktober 2009).

Pejabat pemerintah dan kiai bisa menjalin kerjasama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada tahun 2002 pada awal-awal saya menjabat camat adalah masa yang rawan, karena masyarakat sedang mudah meluapkan ketidaksenangannya dalam bentuk demonstrasi. Pada saat itu pemerintahan belum kondusif, terjadi demonstrasi di mana-mana, euforia itu juga melanda daerah-daerah termasuk kecamatan Pesantren. Pada tahun ini terjadi demonstrasi di Desa Betet —salah satu desa di Kecamatan Pesantren-- yang materi utamanya adalah menolak terjadinya perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Rachmat Basuki, Camat Pesantren pada saat itu, kemudian memetakan peserta demonstrasi. Peserta yang memiliki ikatan emosional dengan kiai tertentu di daerah itu, maka Camat beserta MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan, terdiri dari Kapolsek dan Komandan Militer ditingkat Kecamatan) mendatangi

kiai, yang intinya agar memberikan nasehat kepada para santri-santrinya agar menghentikan aksi tersebut. Karena demonstrasi tidaklah menyelesaikan masalah. Tak lama kemudian kiai turun gunung dengan caranya sendiri.

Cara ini sangat efektif meredam aksi-aksi demonstrasi yang marak terjadi di kecamatan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa kiai di daerah ini masih memiliki pengaruh di masyarakat sekitarnya. Peran kiai yang demikian menunjukkan bahwa ia telah menjadi stabilisator, ia mampu meredam konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Jabatan Non Teritorial dan Relasi Kiai

Relasi dan hubungan seorang Pejabat dengan kiai juga dipengaruhi oleh jabatan seseorang dalam struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan yang tidak ada kaitan langsung dengan teritorial tertentu, menjadikan intensitas relasi dengan kiai tidak intens. Sekalipun secara pribadi para birokrat tetap berrelasi dengan kiai, namun kepindahan birokrat tersebut ke jabatan lain yang tidak memiliki teritorial mengakibatkan relasi yang selama ini telah dibangun tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya. Secara rinci Rachmat menyatakan:

“Mengenahi silaturahmi dengan kiai, kami tetap menjaga sampai sekarang, namun intensitas dan kualitas silaturahmi kami dengan kiai yang dulu pernah akrab ketika kami jadi Camat ya memang berbeda, Setelah saya tidak lagi menjadi camat, hubungan saya dengan kiai tidak lagi seperti dulu ketika masih mengemban amanat sebagai kepala wilayah, berkomunikasi dan silaturahmi ya berkurang jauh, karena masalah yang mengharuskan kami berkomunikasi itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan pekerjaan saya, maka ya secara perlahan kami mulai berkonsentrasi pada tugas pokok saya yang sekarang lagi kami hadapi.

Akan tetapi dalam even-even tertentu, atau suatu ketika tidak disengaja kami masih tetap bisa berkomunikasi dengan baik, dan minimal setiap Lebaran Idul Fitri kami mencoba menyempatkan untuk berkunjung sambil berlebaran”. (Wawancara tanggal 10 Oktober 2009).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa relasi antara pejabat pemerintahan dan kiai dibatasi oleh jabatan-jabatan yang memiliki teritorial tertentu, ini terbukti ketika Rahmat Basuki menduduki jabatan lebih tinggi dipemerintahan Kota Kediri, sebagai kepala Kantor, karena tidak memiliki teretorial yang mengharus seorang Kepala Kantor bersinggungan langsung dengan masyarakat dalam sebuah wilayah, maka Rahmat Basuki pun tidak lagi intens dalam membangun jaringungan relasi dengan kyai-kyai yang dulu pernah di jalin ketika yang bersangkutan menjabat Camat. Meskipun kedudukan Camat dalam hirarkhi kepangkatan lebih rendah dibanding Kepala kantor dalam Pemerintahan Kota.

- **Drs. Yasin, M.AP, Camat Mojoroto 2001-2003**

Latar Belakang

Drs. M. Yasin. M. AP. Lahir di Kediri, 7 November 1958, pendidikan dasar dan menengahnya di Kediri, kemudian melanjutkan ke Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) di Malang, dan mengambil Magister (S2) di Universitas Merdeka (UNMER) Malang Jurusan Administrasi Publik. Karirnya diawali sebagai staf di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri pada tahun 1979, kemudian tahun 1981 diangkat menjadi Ajudan dan Kasub Bag. Perpustakaan. Kemudian diangkat menjadi Kabag Humas dan Organisasi Pemkot Kediri, Camat Mojoroto (2000-2002) dan Camat Kota (2002-2005), sekarang menduduki jabatan Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Relasi Drs. Yasin, M.AP. dan Kiai

Relasinya dengan kiai dimulai saat ia dipercaya memegang jabatan Lurah Bujel Kecamatan Mojoroto. Saat itu ia mendapatkan tantangan yang cukup keras dari warga perihal pelunasan pajak, ia kemudian meminta bantuan Kiai Asror, salah seorang kiai yang cukup disegani di kelurahan itu, dan keengganan warga untuk membayar pajak berbalik dengan melunasi pajak yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini ia menyatakan:

“Menurut saya kiai harus dilibatkan dalam program-program pemerintah. Karena bagi masyarakat Kediri secara umum, kiai masih memiliki magnet yang cukup besar. Apa yang disampaikan oleh kiai akan dipatuhi oleh warga. Saat saya menjabat Lurah di Kelurahan Bujel, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak, kemudian saya meminta bantuan kepada salah seorang kiai setempat (Kiai Asror) untuk memberikan nasehat kepada warga masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Nasehat kiai disampaikan setelah shalat Jum’at. Cara tersebut sangat manjur untuk mengubah pandangan warga yang awalnya menolak melunasi pajak”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Dengan demikian menurutnya ulama harus dilibatkan dalam mendukung program-program pemerintah, menjadikan kiai sebagai mitra birokrat pemerintah akan menjadikan program-program pemerintah bisa dipahami oleh warga masyarakat sesuai dengan bahasa mereka. Berelasi dengan kiai menjadikan urusan murah dan lancar.

Relasinya dengan kiai terus berlanjut saat ia diangkat menjadi Camat Mojoroto. Hubungannya dengan kiai semakin intens, bahkan kemudian ia mampu memetakan klas kiai, mana kiai tingkat Kelurahan dan mana kiai tingkat kecamatan. Menurutnya klasifikasi itu terjadi karena: 1) Level kegiatan yang diikuti oleh kiai, 2) Menjadi Pengurus NU, artinya jika kiai X menjadi Pengurus Ranting NU, maka kiai yang demikian adalah Kiai Kelas Kelurahan, sedangkan jika Y adalah Pengurus Majelis Wakil Cabang NU, maka kiai tersebut adalah Kiai kelas kecamatan.

Jadi klasifikasi atau pengelompokan Kiai memang ada dalam masyarakat kota Kediri, semakin tinggi pengaruh, kharisma dan kegiatan seorang kiai akan menjadikan semakin tinggi pula apresiasi masyarakat dalam memberikan amanat jabatan dalam tubuh NU, dan dengan sendirinya kelas seorang kiai akan semakin tinggi. Secara lugas dalam mengurai masalah ini beliau menuturkan:

“Saat saya menjabat camat Mojoroto sebenarnya Gus Ab (KH. Abu Bakar Abdul Jalil) lah yang pantas disebut sebagai kiai tingkat kecamatan, karena

saat itu beliau adalah Pengurus Majelis Wakil Cabang NU Mojojoto, dan dia sering berkonsolidasi dengan saya dan pihak Muspika lainnya untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam beberapa kali pertemuan. Kiai Asror yang tidak memiliki jabatan di NU adalah seorang kiai Ndesa yang juga dekat dengan saya, sedangkan KH. Idris Marzuki (salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo), saya tidak pernah berkomunikasi karena beliau levelnya jauh lebih tinggi, sudah pada tingkat provinsi bahkan nasional. Karena level kegiatan-kegiatan Kyai Idris itu adalah tingkat provinsi dan nasional, maka pejabat yang berkunjung kepada beliau pun adalah setingkat Gubernur, Menteri bahkan wakil Presiden.” (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa seorang kiai memiliki teritorial atau wilayah pengaruh, bisa kelurahan, kecamatan, Kota bahkan provinsi dan Nasional. Tingkatan pengaruh itu bisa dalam bentuk kegiatan yang diikutinya, lokal atau nasional, dan juga bisa melalui aktifitasnya dalam organisasi NU, pengurus Ranting, Majelis Wakil Cabang (Kecamatan), Pengurus Cabang, atau Pengurus Wilayah, atau juga bisa karena pesantrennya. Dalam hal ini KH. Idris Marzuki adalah contohnya, ia tidak menjadi pengurus NU, namun ia memiliki pesantren dan kegiatan-kegiatan yang diikutinya adalah level provinsi dan nasional.

Dengan demikian kiai bagi masyarakat Kediri masih menjadi figur yang dibutuhkan, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh masyarakat. Ketika dalam suatu teritorial tidak ada tokoh yang disebut dengan “kiai”, maka biasanya diangkatlah “kiai” versi pejabat pemerintah dalam rangka mendukung program-program pemerintah, yang diasumsikan bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Hal ini sebagaimana pernyataan Yasin sebagai berikut:

“Ketika saya menjadi camat Kota 2003-2005, di sana tidak ada yang pantas dianggap sebagai kiai tingkat kecamatan untuk mendukung program-program pemerintah tingkat Kecamatan. Ada memang beberapa kiai di daerah itu tapi menurut saya tidak pantas ditokohnya pada level kecamatan, ada KH. Dalhar Dailami, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husna, namun karena konfrontasinya dengan LDII, saya

sebagai Camat merasa kurang sreg, ada Kiai Anwar Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren As Sa'idiyah dan al-Amien, namun karena level kiai ini sudah tingkat nasional kurang pantas dianggap kiai tingkat kecamatan. Akhirnya saya dan MUSPIKA menetapkan H. Sulaiman (tokoh masyarakat setempat) dan H. Zein Fanani—Ketua Banser (salah satu Badan otonom kepemudaan dalam organisasi NU) pada saat itu—untuk dianggap sebagai kiai di Kecamatan Kota.” sehingga dua orang inilah yang sering saya mintai pertimbangan untuk mengambil keputusan tertentu yang menyangkut masalah keagamaan ketika saya jadi camat kota waktu itu. Lagi pula masyarakat kota memang mempunyai karakter tersendiri bila dibanding dengan masyarakat kecamatan Mojojoto, Masyarakat kota lebih terbuka, kalau di Mojojoto sangat Relegius, maka stylenya berbeda. dan saya kira cara menyikapi pun agak berbeda dalam masalah ini, namun tetap melibatkan tokoh agama, Khususnya kiai NU dalam banyak hal yang menyangkut pemerintahan saya waktu itu”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Pernyataan ini bila dianalisis secara lebih dalam dengan mengkaitkan bahasan relasi pejabat dan kiai dapat memberikan penjelasan secara eksplisit akan pentingnya peran kiai bagi keberhasilan seorang pejabat yang bertanggung jawab pada wilayah teritorial dalam mengakses masyarakat secara langsung, dan sekaligus mengindikasikan bahwa kiai masih sangat dibutuhkan oleh birokrat dalam jabatan pemerintah untuk mendukung atau meligitimasi program-programnya. Sehingga jika tidak ada kiai atau tokoh yang pantas ditokohkan di daerah tertentu diangkatlah seseorang sebagai kiai untuk meligitimasi program-program pemerintah.

Jabatan Non-Teritorial dan Relasi Kiai

Relasi dan hubungan seorang Pejabat dengan kiai dipengaruhi oleh jabatan seseorang dalam struktur pemerintahan yang mempunyai wilayah dan bidang. Jabatan yang tidak ada kaitan langsung dengan teritorial dan wilayah dan bidang tertentu, menjadikan intensitas relasi seorang pejabat dengan kiai tidak intens lagi. Sekalipun secara pribadi para birokrat tetap berelasi

dengan kiai, namun perpindahan birokrat tersebut ke jabatan lain yang tidak memiliki teritorial mengakibatkan relasi yang selama ini telah dibangun tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya.

Terhadap masalah ini Yasin setelah tidak lagi menjadi camat beliau menuturkan:

"Jujur harus saya katakan bahwa ada perbedaan psikologis yang saya alami tentang hubungan ini, karena setelah saya tidak lagi menjadi camat, hubungan saya dengan kiai tidak lagi seintim seperti dulu, sekalipun secara pribadi kami tetap berkomunikasi, karena apa yang kami lakukan selama ini dalam kapasitas saya sebagai pejabat pemerintah, namun toh begitu komunikasi dan jalinan silaturahmi antar pribadi itu berkurang jauh bila dibanding ketika saya jadi camat, Kalaupun toh sekarang ini kami melakukan komunikasi itu kami lakukan dalam rangka menyelesaikan sesuatu masalah tertentu yang bersifat pribadi, bukan lagi kedinasan, sehingga reasoning yang melatar belakangi juga tidak sebanyak ketika menjadi kepala wilayah makanya yang kualitas maupun kuantitasnya jelas menurun jauh, apa lagi sekarang yang diayahi juga berbeda". (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa relasi antara pejabat pemerintah dan kiai dibatasi oleh jabatan-jabatan yang memiliki wilayah teritorial dan bidang dinas tertentu yang langsung menyentuh pada masyarakat luas.

Konflik Antara Kiai dan Birokrat

Jalinan bangunan Relasi dan hubungan antara kiai dan Pejabat pemerintah di Kota Kediri ternyata tidak selalu berjalan mulus, meskipun memiliki tujuan bersama yang hendak diwujudkan: kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Perjalanan hubungan kedua belah pihak mengalami pasang surut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Camat Mojoroto, Yasin:

"Pada saat penentuan Hari Raya Idul Fitri tahun 1997, Kiai berpendapat bahwa hari Raya jatuh lebih awal daripada ketentuan Pemerintah, sementara Camat sebagai bagian dari aparaturnya Negara harus mengikuti ketentuan Pemerintah, yang menetapkan bahwa hari Raya mundur satu hari dari keputusan kiai. Konflik ini berkepanjangan sampai-sampai memutuskan hubungan antara kiai dan birokrat pemerintah. Kejadian

itu kemudian menjadikan kiai ditinggalkan oleh Camat, sehingga camat harus merangkul kelompok lain untuk mendukung program-programnya. Kiai sadar, dengan munculnya efek negatif dari putusnya hubungan itu, program-program kecamatan tidak lagi menguntungkan “umat Islam”, sehingga kiai kembali merajut silaturahmi dengan camat”. (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa jalinan kiai dan penguasa itu selalu didasarkan atas dasar “manfaat” atau kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga sekalipun secara pribadi mengawali untuk merajut kembali jalinan silaturahmi yang sudah putus akan mengorbankan harga diri, kewibawaan tetapi demi manfaat yang lebih besar, maka hal itu dilakukan oleh kiai.

Relevan dengan pernyataan di atas, apa yang disampaikan oleh KH. Sholeh Abdul Jalil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri beliau mengeluhkan beberapa hal ketidak enak-an yang pernah dialaminya sebagai berikut:

“Yang tidak enak itu ketika menjelang datangnya bulan puasa ataupun hari raya Idhul Fitri, karena pada umumnya banyak masyarakat dan beberapa kyai di Kediri menjadikan saya jujukan dalam urusan hitung menghitung tanggal datangnya bulan tersebut, atau yang banyak dikenal orang dengan Khisab, Pada umumnya mereka bertanya kapan awal Romadhon dimulai dan kapan hari raya Idul Fitri tiba. Menurut saya ni adalah pertanyaan yang sulit dijawab, karena menurut hitungan saya hari raya itu selalu jatuh lebih dahulu dari ketetapan pemerintah. Ifta’ saya tentang hari raya pernah mengundang konflik, baik dengan NU maupun pemerintah. Menurut hitungan saya hari raya idhul Fitri jatuh satu hari lebih dulu dari keputusan NU dan pemerintah.

Untuk menghindari konflik dan hal-hal yang tidak diinginkan, adalah menjalankan apa yang telah saya yakini, karena dalam salah satu kitab disebutkan bahwa “seorang hasib wajib melaksanakan hisabnya”, kemudian pada hari-hari tersebut saya pergi entah kemana untuk menjauhi atmosfer kekiaian. Yang repot lagi kalau yang tanya kepada saya itu seorang kiai yang katakanlah ilmunya (di bidang lain) lebih tinggi dari saya, dan memiliki pengikut, misalnya KH. Thoha Mu’id (Pengasuh Pondok

Pesantren al-Ishlah Bandar Kidul), "Leh (panggilan saya) kapan riyoyone".⁵ (Wawancara 20 Oktober 2009).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hubungan kiai dan pejabat pemerintahan tidak selamanya mulus, tanpa masalah, akan tetapi sekali waktu terjadi ketegangan bahkan konflik pun juga pernah terjadi. Perbedaan yang sifatnya tidak prinsip dan lebih bersifat personal mungkin bisa dieliminir, akan tetapi bila perbedaan itu telah menyangkut perbedaan yang bisa mengancam stabilitas sosial, akidah, dan hal prinsip lainnya, kiai sering *bengkerengan* (marah) dengan pejabat pemerintah sebagaimana dalam kasus ketetapan hari raya Idul Fitri di atas.

- **Suko Wahyono Widodo (Camat Kota, 2005-2008)**

Latar Belakang

Lahir di Kediri, 7 September 1953. Alumni Sekolah Tinggi Keuangan Negara Malang (D. II) dan Strata Satu dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Pwayatan Dhaha Kediri ini mengawali karir sebagai staf Pembangunan Desa Kecamatan Mojojoto pada tahun 1980 setelah lulus sarjana muda, karirnya mengalir dari satu kantor pemerintah ke kantor lainnya, dan pada tahun 2005-2008 dipercaya sebagai Camat Kota Kediri.

Relasi Suko Wahyono Widodo dan Kiai

Awal mula mengenal kiai adalah saat Suko menjabat Camat Kota. Sebagai pejabat yang memiliki teritorial, ia selalu berkoordinasi dengan MUSPIKA untuk memecahkan masalah yang muncul dalam teritorialnya. Ia selalu menggelar pertemuan rutin dengan unsur MUSPIKA lainnya.

Sedangkan dalam hal penyampaian kebijakan ia memiliki dua metode, 1) secara dinas ia menyampaikannya lewat lurah

⁵Wawancara dengan KH. Sholeh Abdul Jalil, salah seorang Ahli Falak dari Kota Kediri dan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiah Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, tanggal 21 September 2009

dalam rapat koordinasi dan dalam pertemuan-pertemuan informal, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak wajib dilakukan, 2) setiap waktu ia selalu menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan yang melibatkan remaja, tokoh masyarakat dan organisasi wanita, misalnya PKK, jamaah Yasinan ibu-ibu dan dan lain sebagainya, pengajian umum, dan lain sebagainya.

Dalam berbagai pertemuan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat banyak, ia selalu menyatakan himbuan sebagai berikut:

*"Saya sebagai camat tidak dapat berbuat banyak tanpa dukungan staf dan masyarakat secara luas, tidak hanya terbatas pada satu agama atau paham, tetapi pada semua level masyarakat. Di sinilah kita ini penting menjalin kerjasama atau bergotong royong dengan siapa saja, termasuk kepada para kiai dan tokoh masyarakat"*⁶ (Wawancara tanggal 16 Oktober 2009).

Namun harus diakui bahwa di Kecamatan Kota, sulit menemukan figur yang tepat untuk disebut sebagai seorang kiai di tingkat kecamatan. Ada memang sejumlah tokoh di Kecamatan Kota yang pantas disebut kiai, namun level mereka sudah tidak lagi kiai kecamatan. KH. Anwar Iskandar misalnya adalah seorang kiai yang cukup disegani di wilayah Kecamatan Kota, namun karena level kegiatannya sudah provinsi, bahkan nasional, maka sebutan kiai kelas kecamatan tidak pantas diberikan kepadanya.

Ini adalah keunikan kecamatan kota, dibanding dengan dua kecamatan lainnya. Dalam hal hubungan dengan kiai, Suko termasuk birokrat yang berhasil dalam mengegolkan anggaran MUI Kecamatan Kota dalam APBD Kota Kediri, dalam hal ini ia menyatakan:

"Pada pertemuan di Masjid al-Muhajirin Perumnas Ngronggo, yang dihadiri oleh H. Abdul Basit, salah seorang tokoh masyarakat setempat, sekaligus

⁶Wawancara dengan Suko Wahyono Widodo, mantan camat Kecamatan Kota, tanggal 16 Oktober 2009

anggota MUI kecamatan, dan beberapa tokoh agama yang terpandang diwilayah ini, dibicarakan tentang minimnya dukungan anggaran dari pejabat pemerintah terhadap kegiatan keagamaan yang digagas MUI, padahal keberadaan MUI merupakan wadah ulama yang sengaja diciptakan oleh pemerintah, maka waktu itu pembicaraan mengarah kepada saya untuk memperjuangkan bagaimana MUI Kecamatan kota mendapatkan alokasi anggaran dari Camat untuk menyusun program dakwah, akhirnya setelah melalui beberapa usaha formal dapat diputuskan bahwa anggaran MUI kecamatan kota ada alokasi anggaran yang diambilkan dari pos APBD.” (Wawancara tanggal 16 Oktober 2009).

Keputusan itu sekaligus mengamanatkan camat untuk mengawal kebijakan itu, dan mulai saat itulah kemudian MUI kecamatan Kota memiliki anggaran, sehingga setiap kali ada kegiatan MUI tidak perlu buat proposal permohonan dana kepada camat.

Di Kecamatan kota sulit menemukan kiai kelas kecamatan, untuk menjembatani berbagai kepentingan teritorial akhirnya camat bekerjasama dengan KUA Kota Kediri membentuk kelompok pengajian, yang pelaksanaannya berpindah dari satu kelurahan ke Kelurahan lainnya. Pengajian-pengajian itu sering menghadirkan kiai untuk berceramah, di antaranya KH. Wildan Mukhalladun, KH. Shadaqoh. Di sinilah kemudian pesan-pesan pemerintah disampaikan, KH. Wildan Mukhalladun sebagai salah satu penceramah menyatakan:

“Kita semua ummat Islam harus meningkatkan hubungan antara umat beragama, karena dengan semakin eratnya hubungan antara pimpinan dan ummat beragama yang berbeda keyakinan akan dapat meminimalisir perbedaan dan salah persepsi dari keyakinan yang berbeda, padahal bila salah persepsi itu timbul dari infidu dengan individu yang lain secara kebetulan berbeda keyakinan dan agama, sangat mungkin akan terbawa pada situasi yang tidak menguntungkan bagi kerukunan dalam bermasyarakat, hal yang demikian telah banyak terjadi di berbagai daerah di lain di Indonesia, muncul ketegangan antar umat beragama, hanya lantaran permasalahan yang sepele dari ummat yang berbeda agama, alhamdulillah kita di Kediri belum sampai sejauh itu, maka mari

suasana kondusif ini terus kita pelihara, di sisi lain pemerintah juga harus memperhatikan umat Islam.” (Wawancara tanggal 16 Oktober 2009).

Di sinilah kemudian pesan pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pengajian, dan masyarakat bisa menerima kebijakan itu. Kiai sebagai tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh bagi masyarakat sekitarnya. Ini tentu berbeda jika kebijakan atau program pemerintah disampaikan melalui birokrat atau aparat pemerintah. Belum tentu kebijakan itu akan diterima begitu saja oleh masyarakat.

Dalam hal penciptaan kondusifitas situasi di tengah masyarakat luas, PKUB mempunyai peran yang sangat besar. Pertentangan antar satu agama dengan agama lainnya tidak pernah terjadi, ini paling tidak disebabkan karena para tokohnya sering bertemu, sehingga masalah yang muncul akan segera bisa dikomunikasikan untuk mendapat solusi penyelesaiannya. Menurut Suko, sekalipun kegiatan PKUB itu hanya silaturahmi dari satu instansi ke instansi lain, dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah lain, yang diikuti oleh anggota PKUB dan dihadiri oleh pihak MUSPIDA dan tokoh-tokoh masyarakat, tapi hasilnya ternyata bisa kita rasakan, lebih jauh camat Suko Wiyono menyatakan:

“Peran PKUB (Paguyuban Kerukunan Antara Ummat Beragama) dalam menciptakan kondusifitas hubungan antar umat beragama di Kediri sangat positif, sekalipun kita bertemu ngumpul-ngumpul, ngobrol, makan, mendengarkan ceramah Wali Kota, ceramah dari tokoh-tokoh agama, namun hasilnya menurut saya sangat baik..., kesan klaim kebenaran agama itu tidak muncul, atau paling tidak bisa diminimalisir, akan tetapi yang muncul adalah kebersamaan, dan tanggungjawab untuk menjaga hubungan yang harmonis karena biasanya dengan berkumpul sebulan sekali bila ada permasalahan yang menyangkut ummat yang berbeda agama dan mempunyai potensi sebagai sumber konflik di tengah masyarakat, bisa sesegera mungkin dikomunikasikan dalam forum tersebut sehingga pokok permasalahannya bisa dicarikan solusi, bahkan kalau pun toh ada yang harus ditindak lanjuti satu sama lain antar tokoh agama yang ada bisa memberikan masukan dan wawasan. Dan dengan demikian masing-masing tokoh agama bisa saling mengendalikan ummat

yang berada dibawah asuhan dan bimbingannya untuk bisa sama-sama memahami pokok masalah dan selanjutnya mengendalikan diri.

Manfa'at lain yang bisa dipetik dari rutinnnya pertemuan ini adalah tersambungny rasa memahami satu sama lain, secara psychologis orang yang sudah akrab itu bisa menumbuhkan rasa pakewuh, hingga bisa mengendalikan diri". (Wawancara tanggal 16 Oktober 2009).

Pandangan Suko Wijono nampaknya sangat benar adanya, dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan beragama bagi masyarakat Kediri, sejalan dengan rutinitas pertemuan PKUB yang mempertemukan seluruh tokoh agama di Kota ini dengan pejabat pemerintah, mampu menekan potensi konflik yang berlatar belakang faham keagamaan di kota Kediri. Perlu diketahui bahwa di kota Kediri terdapat tidak hanya perbedaan agama saja, akan tetapi perbedaan faham aliran dalam satu agama juga berpusat di Kediri, Karena di kota ini terdapat dua pusat organisasi Nasional aliran faham keagamaan dalam Islam, yakni LDII dan Wahidiyah, dua organisasi ini merupakan bagian faham pemikiran agama dalam Islam, dimana secara nasional pusat organisasi kedua aliran tersebut berada di kota Kediri, dari sudut tertentu ini merupakan potensi konflik yang sangat besar dalam sebuah masyarakat yang beragam faham keyakinan agamanya.

Jabatan Non Teritorial dan Relasi Kiai

Relasi dengan kiai juga dipengaruhi oleh jabatan seseorang dalam struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan yang tidak ada kaitan langsung dengan teritorial tertentu, menjadikan intensitas relasi dengan kiai tidak intens. Sekalipun secara pribadi mereka tetap berrelasi dengan kiai, namun alih tugas birokrat ke jabatan lain yang tidak memiliki teritorial mengakibatkan relasi yang selama ini telah dibangun tidak lagi berjalan sebagaimana sebelumnya. Secara rinci Suko menyatakan:

"Setelah saya tidak lagi menjadi camat, hubungan saya dengan kiai tidak lagi seperti dulu, karena sekarang kami tidak lagi mempunyai pekerjaan

yang mengharuskan berkomunikasi dengan para kiai itu. sekalipun secara pribadi kami tetap berkomunikasi namun intensitasnya tetap berbeda, jujur harus saya katakan bahwa keperbedaan itu dipengaruhi oleh status yang meekat pada diri saya, sekarang saya tidak lagi sebagai orang yang mengambil kebijakan, dan lain sebagainya, namun toh begitu saya sebagai individu tetap menjalin hubungan sebagai warga dengan para kiai itu, hanya intensitasnya yang berbeda". (Wawancara tanggal 16 Oktober 2009).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangunan relasi antara pejabat dan kiai, dari sisi pejabatnya ada mengesankan didasarkan dan sekaligus dibatasi oleh jabatan-jabatan yang memiliki wilayah teritorial, kalaupun toh jabatan itu tidak menyangkut teritorial maka jabatan itu harus mengandung pekerjaan atau bidang yang secara spesifik manfa'at atau madhorotnya langsung dihadapi oleh masyarakat.

- **Totok Imam, (Dandim Kota Kediri 2008-Sekarang)**

Lahir di Madiun, 30 Mei 1968. Pendidikan dasar dan menengahnya di Madiun, di AKABRI, lulus 1989. Lulus AKABRI karirnya terus menanjak, mulai dari Yon Armed Dua Medan, Waka Danyon di Bandung, Danyon di Jakarta, Sekretaris KASAD di Jakarta dan Komandan Kodim di Kediri.

Hubungan Birokrat dan Kiai

TNI lahir dari rakyat, termasuk di dalamnya pemuda, tokoh masyarakat, ulama atau kiai, sehingga hubungan dengan kiai harus terus dilestarikan, menurut Imam Totok:

"Dalam perspektif demografi, ulama dan tokoh masyarakat adalah aset dan potensi yang sangat potensial dalam membangun dan menjaga keutuhan NKRI. Ulama dan ABRI memiliki kesamaan dalam hal pembinaan Negara ini sejak semula. Jika Komandan bilang A, maka seluruh prajurit akan mengikutinya, begitu juga dengan kiai. Jika kiai bilang B, maka semua santri akan mematuhinya. Dari sini dapat saya katakan" dalam situasi yang berbeda antara kiai dan TNI mempunyai budaya dan kebiasaan yang sama dalam hal kepatuhan pada pimpinan, pimpinan TNI namanya

Komandan dan pimpinan Santri namanya kiai". (Wawancara 19 Oktober 2009).

Peran ulama memperjuangkan kemerdekaan tak bisa dikesampingkan, kita mengenal sederetan kiai, seperti Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, KH. Hasyim Asya'ri, KH. Mahrus Ali, Lirboyo berada dalam garis depan dalam merebut tanah air Indonesia dari tangan penjajah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kiai memiliki andil besar pada masa penjajah.

Menurut penuturan Totok, di Kediri, pengaruh kiai terhadap masyarakat cukup besar, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh Kodim mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik dengan seluruh kiai, tanpa membedakan kyai dari sisi latar belakang dan pandangan hidupnya, tidak hanya yang pro pemerintah tetapi juga kiai atau pesantren-pesantren yang tidak pro pemerintah, sekalipun, komunikasi harus tetap dibangun. Karena kepentingan ABRI adalah menjaga keutuhan NKRI maka tidak ada lagi klasifikasi kiai di Kediri, secara terperinci Totok menuturkan:

"Bagi saya selaku Komandan KODIM tidak ada lagi klasifikasi kiai, saya tidak membedakan mana kiai yang pro pemerintah dan mana tidak pro pemerintah, semuanya kita rangkul, ini adalah pendekatan yang baru saja kita lakukan. Komandan Kodim sebelum saya hanya merangkul kiai-kiai yang pro pemerintah. Dalam setiap Jum'at saya selalu menyempatkan shalat Jum'at dari satu pesantren ke pesantren lain, termasuk pada acara wisuda santri di akhir tahun (hafiah) dan acara-acara seaman al-Qur'an". (Wawancara tanggal 19 Oktober 2009).

Sebagai Komandan Kodim, Totok sadar bahwa siapa saja harus dirangkul demi kepentingan tugas-tugasnya sebagai Kodim, ia bahkan secara rutin mengundang para kiai pada acara buka bersama, termasuk kiai dari pondok pesantren Darul Manar Puncu Pare Kediri. Pondok ini termasuk yang dicurigai sebagai salah satu anggota jaringan teroris.

Jalinan antara ABRI dan kiai di Kediri menguntungkan kedua belah pihak, program-program ABRI seperti menjaga NKRI, menjaga kerukunan, persaudaraan dan Pancasila bisa disosialisasikan oleh kiai kepada masyarakat, sebaliknya kiai sering meminta bantuan untuk memberikan pelatihan kedisiplinan, misalnya baris berbaris, outbound dan lain sebagainya.

Jalinan komunikasi ditempuh melalui berbagai cara, yaitu:

- 1) undangan, baik dari TNI maupun dari pihak kiai, atau bertemu dalam suatu pertemuan tertentu, misalnya pelantikan pejabat, Upacara HUT Kemerdekaan;
- 2) Acara-acara pesantren, seperti wisuda santri, pengajian umum, dan lain sebagainya;
- 3) olahraga, seperti beladiri, tenis, dan lain sebagainya.

Jalinan itu sampai berhasil memasukkan kegiatan pendidikan umum di pesantren, dan diawali di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, dengan menyelenggarakan LKS tingkat provinsi di pondok tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan karena kepedulian TNI akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat, termasuk pondok pesantren.

Dalam menjalin komunikasi dengan para kiai, terdapat beberapa hambatan, di antara perbedaan kultur, sebagaimana pernyataannya:

"Antara kita dan kiai memiliki kesamaan, tetapi juga perbedaan-perbedaan, misalnya dalam hal waktu. Kiai jam 08.00 pagi masih tidur, sedangkan kita sudah masuk kerja, sehingga ketika ada undangan untuk kiai pada jam tersebut, bisa dipastikan kiai akan datang terlambat. Begitu juga pada saat malam hari, kalau kita membuat janji dengan kiai pada jam 20.00, maka kiai akan datang pada jam. 22.00, karena pada jam 20.00 kiai masih ngaji dengan santrinya." (Wawancara tanggal 19 Oktober 2009).

Sekalipun demikian perbedaan kultur itu tidak sampai mengganggu hubungan yang selama ini kita jalani, kita secara masing-masing tetap dapat menempatkan diri pada porsi masing-masing. Bahkan lebih lanjut Totok mengakui adanya persamaan

kultur antara Dunia Kiai/santri dengan militer pada penerapan yang berbeda.

Menurut Totok kesamaan Santri dan militer adalah ketundukan pada atasan, santri sangat tunduk pada kyai sedemikian rupa, demikian halnya militer sangat tunduk pada komandannya sedemikian rupa. Inilah yang disebut mempunyai budaya yang sama dalam penerapan yang berbeda.

Untuk menjaga kerukunan antara umat beragama, Totok menyatakan:

“FKUB memiliki peran yang sangat positif untuk memelihara kerukunan kehidupan sosial kemasyarakatan antar umat beragama di wilayah Kota Kediri, bahkan dalam salah satu pertemuannya saya pernah menyampaikan pemaparan dengan tema “Kemajemukan agama dalam mendukung stabilitas Nasional”, dalam paparan itu intinya saya sampaikan kita (sebagai ummat beragama) dalam kehidupan bermasyarakat jangan melihat agama kita yang paling benar, kita lihat kenyataan kehidupan beragama di Kediri ini, dalam hal agama Islam saja memiliki banyak kelompok, seperti: NU, Muhamadiyah, LDII, Wahidiyah, Ahmadiyah, dll. dalam kenyataan kehidupan paham keagamaan seperti ini, kalau kita mengklaim kelompok kita saja yang paling benar, apa lagi bila ditambah yang lain salah, maka benih-benih perpecahan sudah tersemai dalam kerangka berpikir yang demikian itu, maka dalam satu agama sekalipun bila cara berpikir yang seperti itu yang dikembangkan, maka perpecahan dalam kehidupan bermasyarakatlah yang akan terjadi, selanjutnya cara berpikir ini pula yang akan membawa klaim kebenaran tersebut dibanding dengan agama yang lain, maka akibatnya pastinya bisa membahayakan hubungan yang disharmoni antar ummat beragama”. (Wawancara tanggal 19 Oktober 2009).

Nampaknya Totok dalam hal ini mencoba melihat kehidupan bersama dalam wadah tatanan sosial kemasyarakatan menjadi fokus perhatian dan utama, sehingga Totok pada kesempatan lain juga tidak segan menyampaikan kritik terhadap kegiatan-kegiatan FKUB yang selama ini dilaksnakan tokoh antar ummat beragama ini terkesan monoton, dengan lugas beliau sampaikan kritik itu dalam wawancara pada peneliti sebagai berikut:

“Selama ini FKUB sudah berjalan dengan baik, namun kegiatannya harus lebih diperjelas lagi, tidak hanya ceramah, kumpul, makan saja, akan tetapi bagaimana umat beragama menyikapi isu-isu yang sedang berkembang, seperti bagaimana merespon video mesum siswa salah satu SMUN Kediri, bagaimana merespon penambang pasir mekanik. dll, yang kesemuanya itu merupakan problem sosial nyata bagi masyarakat Kediri, meski tidak mempunyai kaitan langsung dengan seorang pemuka agama. Akan tetapi seorang pemuka agama mempunyai kesempatan memberikan masukan kepada pejabat terkait yang setiap saat bisa ketemu dengan tokoh agama”. (Wawancara tanggal 19 Oktober 2009).

Menurut amatan peneliti kritikan ini sangat wajar disampaikan Totok karena dilatar belakangi 2 (dua) hal:

- 1) pada saat peneliti melakukan wawancara di Kediri sedang berkembang tertangkapnya sepasang pelajar SMA yang tengah melakukan adegan mesum dan terekam oleh kamera kawannya dan beredar di masyarakat;
- 2) kenyataan setiap pertemuan PKUB dengan beberapa pejabat pemerintah Kota Kediri problematika yang diangkat hanya menyangkut masalah kehidupan masyarakat yang bersifat makro, sehingga kurang menyentuh pada kondisi riil yang ada;

- **H. Achmad Maschut, Mantan Wali Kota Kediri (1999-2009)**

Latar Belakang

Wali Kota yang dikenal sangat dekat dengan rakyat ini lahir di Malang 15 Februari 1940. Pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tingginya diselesaikan di Malang. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang ini meniti karir di birokrasi mulai dari Pegawai Harian Lepas Pemkot Malang pada tahun 1971, baru pada tahun 1973 ia diangkat menjadi PNS, dan menjabat Kasi Tata Usaha Perusahaan Daerah Malang. Karirnya terus menanjak, mulai dari Kabag Ekonomi (1976), Direksi PDAM (1980), Kepala Dinas Pendapatan (1985), Asisten Sekkota,

Sekkota, Wakil Wali Kota Malang. Pengalamannya di bidang birokrasi mengantarkannya sebagai Walikota Kediri (1999--2009) (Imam Subawi, 2005: 6). Jabatan lain yang pernah diembannya adalah Rektor Universitas Gajayana Malang (1980-1985), Wakil Ketua Yayasan Institut Teknologi Palapa (ITP) Malang.

Di mata masyarakat, Maschut dikenal sebagai *low profile*, bahkan kegiatan tingkat RT, RW pun akan ia hadiri, ia juga tidak canggung untuk selalu menampilkan joke-joke dalam setiap kegiatan. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan sifat seorang pejabat pemerintah yang selalu serius, kaku dan menjaga citra. Bahkan ia tak segan untuk sekedar jalan-jalan di kerumunan massa di Jalan Dhoho dan Jalan Sekartaji. Ini semua dilakukan untuk mendekatkan pemimpin dengan masyarakat luas, dan agar ia sendiri tahu kondisi riil masyarakat (Imam Subawi, 2005:2-6).

Latar belakang keluarga yang pas-pasan, pengalaman hidupnya malang melintang mulai dari jualan kain, menjadi kenek angkutan kota, sampai menjadi makelar karcis bioskop telah membuat Maschut sangat akrab dan dekat dengan kehidupan masyarakat miskin, ia bahkan menyatakan:

“Saya sudah merasakan bagaimana susahnya tidak punya uang, karena dulu saya juga pernah mengalami pada situasi yang sangat sulit. saat itu saya berpikir betapa enak kalau mudah mencari uang, Makanya kalau ada orang susah jangan disio-sio. Orang yang tidak punya uang itu kadang-kadang mudah tersinggung, apa lagi bila secara sosial berada pada tataran yang sama. Di sio-sio itu bisa menjadikan hatinya menangis dan mendorongnya berbuat nekat. Terhadap orang yang kurang beruntung ini sebaiknya kita bisa menjadi teman yang baik, dan bisa mengerti dan memahami kesulitan mereka, Kalau bisa membantu, bantulah sebisanya, dan bila belum bisa membantu hiburlah mereka, sungguh ini merupakan langkah dan bekal bergaul yang sangat berharga.” (Wawancara 22 Maret 2006).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa HA. Maschut telah merasakan betul bagaimana susahnya hidup tanpa materi yang cukup, dan ini yang mewarnai pola pandangan Maschut

dalam memandang orang lain, maka setelah jabatan wali kota diperolehnya, ia pun masih tetap konsisten dengan ucapannya. Sebagai walikota, perhatiannya, kedekatannya dengan rakyat, dan semua golongan menunjukkan kebenaran itu semua.

Relasi HA. Maschut dan Kiai

Langkah pertama yang dilakukan oleh H.A. Maschut setelah dilantik adalah *sowan* kepada sejumlah kiai. Hal ini dilakukan karena menurutnya kiai di Kediri adalah figur yang sangat dihormati oleh masyarakat, bahkan apa yang dikatakan oleh kiai ditaati oleh masyarakat. Ia menuturkan:

“Saya sangat menghormati para kiai, bukan hanya karena masyarakat di Kota Kediri sangat menghormatinya, dan masyarakat Kediri masih menganut paham paternalistik, sehingga apa yang di-dawuhkan kiai akan serta merta dilaksanakan oleh masyarakat, akan tetapi penghormatan saya kepada kiai lebih saya dasarkan pada penghormatan atas peran dan fungsi perjuangan kiai ditengah masyarakat, kiai itu lebih dekat dengan masyarakat pada umumnya, dan kiai juga yang mempunyai media bisa bertemu dengan masyarakat paling bawah sekalipun tanpa adanya birokrasi yang menghalanginya, sehingga kiai lebih bisa melihat kenyataan apa adanya yang terjadi dimasyarakat yang paling primitip sekalipun, maka jika masyarakat di Kediri demikian, maka birokrat mestinya juga harus dekat dengan kiai, sehingga program-program akan berjalan dengan baik dengan dukungan para kiai”. (Wawancara di rumah KH Idris Marzuki 5 Oktober 2005).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Maschut berusaha menjaga hubungan dengan para kiai di Kediri, dan hal itu semata-mata dilakukan demi keberhasilan program-program pemerintah.

Sekalipun demikian bukan berarti hubungan antara birokrat atau Walikota dengan kiai berjalan mulus, pada saat Pemerintah Kota merancang Peraturan Daerah Tentang Pariwisata, yang didalamnya mengatur pasal-pasal yang menyangkut hiburan malam, panti pijat dan permainan ketangkasan, bersama DPRD Kota Kediri, terjadi hubungan kiai dan birokrat sempat memanas.

Bagian pasal Perda yang mengatur hiburan malam, panti pijat inilah yang oleh komunitas kiai di Kediri dimaknai sebagai upaya sistematis terhadap kegiatan maksiyat (dosa), sehingga perda itu dikenal dengan “Perda Maksiat. Namun H. Achmad Maschut, walikota pada masa itu, kemudian mengumpulkan jajaran birokrat terkait untuk membahas masalah yang sedang berkembang. Akhirnya diputuskan bahwa Raperda itu ditunda dan ditarik kembali. Dan Maschut beserta jajarannya berkunjung ke Pesantren Lirboyo, hubungan yang semula tegang kemudian kembali mencair dan intensitas komunikasi antara Maschut dan kiai semakin tinggi.

Dalam perjalanan relasi pejabat pemerintah dan kiai di Kota Kediri, ternyata banyak kiai yang titip pesan khusus pada pejabat, bisa program untuk pesantren, madrasah atau pembangunan masjidnya, menanggapi hal ini Maschut menyatakan:

“Atur saja hal itu dengan baik, permintaan program kiai biasanya berkaitan dengan eksistensi fisik dan infra struktur. Kiai juga manusia, eksistensinya akan tetap survive jika ia dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk berjuang, pesantren, sekolah, masjid, adalah hal yang sangat lumrah diperjuangkan kiai karena itulah dunia kiai, toh kemanfa’atannya juga untuk rakyat banyak, akan tetapi ada juga permintaan kiai yang menyangkut perbaikan sarana umum seperti jalan, jembatan ataupun saluran air. Permintaan kiai kepada saya, ya sekitar masalah itu. Ada juga permintaan kiai yang non fisik, di antaranya mengharapkan kehadiran saya pada saat ada acara di pesantrennya. Hal itu untuk menunjukkan bahwa kiai X bisa menghadirkan wali kota. Sehingga wilayah pengaruhnya menjadi naik, maka terhadap hal yang demikian, bagi saya tidak ada masalah, karena pada hakekatnya apa yang ingin dicapai kiai dengan beberapa permintaannya itu juga menjadi tujuan pembangunan yang diemban oleh pejabat pemerintah”. (Wawancara 10 Agustus 2005).

Ihwal permintaan yang kedua itu, kehadiran seorang wali kota merupakan legitimasi bagi keiaian seseorang. Di sisi lain seorang birokrat atau Walikota juga sering meminta pendapat kepada kiai dalam mengambil keputusan yang menyangkut

masyarakat luas. Banyak alasan yang bisa dipedomani untuk urusan ini, mulai dari yang bersifat sosiologis sampai menyangkut keyakinan yang bernuansa teologis, di antara sekian alasan yang mengemuka menjadikan kyai dimintai pendapat adalah sifat ikhlas dan *waskito ing sak duruning winah*; hal ini umumnya ada pada diri kiai, juga alasan lain yang bisa dikemukakan diantaranya:

"Karena kiai adalah orang yang dekat kepada Yang Alloh, Tuhan Maha Kuasa, dan lebih banyak ibadahnya kepada Alloh, saya berkeyakinan Do'a mereka itu mudah dikabulkan oleh Alloh, oleh karenanya sering saya meminta kepada kiai untuk mendukung program-program yang saya canangkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan barang tentu saya juga menyelipkan permintaan yang bersifat pribadi kepada kiai untuk mendoakan saya, sehingga apa yang saya rancang dengan dorongan do'a kiai maka saya punya kemantapan batin, bila yang saya rancang salah, maka akan segera ada yang mengingatkan, tapi bila rancangan itu bermanfaat maka akan didukung secara rame-rame". (Wawancara 5 Oktober 2005).

Dari beberapa penuturan diatas, setelah dilakukan analisis yang mendalam dengan mencoba menghubungkan pada kenyataan sosial yang ada di Kota Kediri sampai hari ini yang secara jelas masih terjadi hubungan simbiosis mutualis dalam relasi tyang mereka bangun, sisi manfaat yang bisa dipetik oleh kiai adalah dapat meminta bantuan kepada birokrat baik dalam bentuk fisik atau non fisik, begitu juga dengan birokrat meminta bantuan kiai untuk membangun suasana dalam rangka penciptaan stabilitas tatanan sosial kemasyarakatan tyang tengah berlangsung pada masa kepemimpinan yang tengah ia emban, dan juga program-program yang tengah direncanakan bisa didukung oleh kiai, dan juga minta didoakan agar seorang pejabat bisa sukses dalam memimpin teritorialnya.

- **Ir. H. Bambang Basuki Hanugerah, MM. (Kepala Bapeko)**

Untuk melakukan kroscek berapa informasi dalam wawancara dengan beberapa pejabat pemerintah kota Kediri,

peneliti menguji data yang didapat dengan melakukan kros cek pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri, Ir. Bambang Basuki Hanugrah, MM.

Ir. Bambang Basuki Hanugrah, MM lahir di Jember 08 Agustus 1958, menjabat sebagai Kepala BAPPEKO sejak tahun 2005 setelah sebelumnya menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala BAPPEKO beliau mengungkapkan tentang tugas pokok yang ia emban sebagai berikut:

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah;

- a. Perumus kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;*
- b. Pengkoordinasian penyusun rencana pembangunan Badan /Dinas /Kantor/Bagian yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah; Penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;*
- c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Badan /Dinas/Kantor/Bagian yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah; Penyusunan pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;*
- d. Pembinaan dan koordinator penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
- e. Dan lain-lain”. (Wawancara tanggal 22 Desember 2009).*

Dalam kondisi demikian Bappeko berkewajiban merencanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan dan di tingkat kota Kediri, ia harus tahu dan mengerti apa yang

akan dilakukan oleh camat dan walikota. termasuk didalamnya ketika camat atau walikota melakukan relasi dengan kiai ketika menyangkut rencana pembangunan yang akan dikerjakan.

Maka untuk mengkonfirmasi beberapa kegiatan walikota yang mungkin belum masuk dalam rencana Bapeko, dan kaitannya dengan program pejabat yang melakukan relasi dengan kiai, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bambang Basuki di jawab sebagai berikut:

“Bisa saja ditengah tahun anggaran sedang berjalan Kepala Daerah (walikota) dan pimpinandibawahnya mengusulkan program tertentu karena ada masukan atau ide yang muncul kemudian, terhadap hal ini Bappeko mempunyai jalan Revisi program yang berupa PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) dan untuk melakukan PAK ini bisa dilakukan maksimal setahun dua kali. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya program baru yang belum terakomodir dalam rencana pembangunan, sementara program tersebut dinilai mendesak”. (Wawancara 22 Desember 2009).

Terkait dengan relasi kiai dan pejabat pemerintah ini yang kadang kala membuat program baru, Bambang sebagai kepala Bappeko menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan boleh-boleh saja. Bahkan beliau berargumen bahwa kiai juga masyarakat, bahkan kiai menjadi panutan masyarakat, terhadap hal ini Bambang mengungkapkan:

“Program yang dirancang Bappeko tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan rakyat, kiai kan juga rakyat, bahkan kiai menjadi panutan ummat, maka bila perencanaan Bappeko belum sepenuhnya menyentuh rakyat dan ada rakyat yang mengusulkan dan diterima oleh pimpinan daerah, maka Bappeko berkewajiban mengakomodir dengan sistem yang akuntabel juga, bahkan seorang anggota DPRD bisa saja menyampaikan aspirasinya kepada eksekutif baik secara formal ataupun non formal atas suatu rencana tertentu, bila standartnya memenuhi syarat sebuah perencanaan dalam pembangunan, sekali lagi Bappeko akan memberikan jalan untuk itu. ini seperti yang diajukan pak Maschut diakhir masa jabatannya tentang bangunan sasintasi bagi pesantren Lirboyo beberapa waktu yang lalu”. (Wawancara 22-12-09).

Berkait dengan relasi walikota dengan kiai tertentu Bambang juga mengakui pernah diajak oleh Walikota HA. Maschut untuk berkunjung ke beberapa kiai, ada yang sekedar silaturahmi dan ada yang membicarakan suatu program tertentu dan ada yang bersifat sosialisasi. Bambang mengakui cara demikian kadangkala lebih efektif, karena bisa mendengar langsung dari tokoh yang setiap harinya bergaul dengan masyarakat akar rumput.

Akan tetapi sebenarnya Bappeko telah membuat mekanisme perumusan perencanaan anggaran sedemikian rupa untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk disusun sebagai sebuah program kerja pemerintah pada tahun berikutnya. Terhadap sistem dan mekanisme ini Bambang memberikan gambaran sebagai berikut:

"Untuk menyusun perencanaan, Bappeko mempunyai mekanisme apa yang disebut dengan MUSRENBANG, (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), Musrenbang ini dilakukan dalam tiga tingkat, yakni 1. tingkat kelurahan, 2 tingkat kecamatan dan 3 tingkat Kota. Musrenbang tingkat kelurahan, diikuti oleh perangkat kelurahan, Badan perwakilan kelurahan yang terdiri dari tokoh ditingkat kelurahan, kemudian ditingkat kecamatan Musrenbang mencoba memadukan kegiatan di wilayah kecamatan, Musrenbang di tingkat Kota, disamping diikuti oleh seluruh Unit/Lembaga/badan/kantor dan dinas yang ada dipemerintahan juga diundang beberapa stake holder, perguruan tinggi dan tenaga ahli yang diundang untuk itu.

Musrenbang ini dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kota agar program yang diharapkan oleh masyarakat dapat tertuang dalam perencanaan pemerintah Kota, hasil dari seluruh musrenbang di tiga tingkatan tadi setelah dirumuskan oleh Bappeko diajukan kepada walikota untuk dibahas oleh DPRD kemudian di syahkan sebagai RAPBD untuk tahun berikutnya. Namun biasanya pengesahan itu selalu dilakukan pada bulan Januari tahun berjalan".(Wawancara 22 Desember 2009).

Dari beberapa informasi dan data yang dapat peneliti gali dan kroscek kepada Bappeko, dan setelah dilakukan analisis terhadap pola perencanaan pembangunan, menunjukkan betapa

seorang Walikota, Camat ataupun Kepala Dinas tertentu, dalam merencanakan beberapa kegiatan program pembangunan mempunyai keleluasaan untuk membuat rencana, sehingga dapat ditentukan skala prioritas, skala utama dan yang bersifat penunjang. Sehingga dengan demikian perencanaan bisa dirupakan dalam program baik jangka pendek menengah ataupun jangka panjang, bahkan terhadap suatu program yang ditemukan idenya ditengah tahun anggaran yang sedang berjalan sekalipun, tetap dapat dicarikan jalan keluar sebagaimana yang telah dituturkan oleh kepala Bappeko tersebut.

Penuturan Bappeko tersebut, bagi peneliti sekaligus dapat bermakna sebagai konfirmabilitas atas beberapa informasi yang penulis temukan dari walikota, Camat dan sumber lain yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan unit dalam struktur organisasi pemerintah kota Kediri, bahkan beberapa kebijakan walikota pun dapat secara mudah dicarikan jalan setelah mengambil keputusan bersama sorang kiai misalnya dalam menghadapi sesuatu masalah yang berkembang ditengah masyarakat.

BENTUK-BENTUK PERAN SOSIAL POLITIK DAN RELASI KIAI DI KEDIRI

- **Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah**

Peran kiai di kota Kediri, dihadapan pejabat, terutama kiai yang ada di dalam struktur NU banyak yang berfungsi sebagai pendukung kebijakan pemerintah sebagai alat sosialisasi dan penyampaian program kepada masyarakat di akar rumput.

Dukungan itu tidak hanya menyangkut masalah agama, tetapi juga dalam hal kesehatan, persatuan dan kesatuan. Dalam masalah kesehatan Pak Camat Mojoroto M. Yasin sering menyampaikan pesan kepada Kiai Kholil Asyari (Majelis Syuriyah Wakil Cabang Mojoroto), sebagaimana dalam pernyataan berikut:

"Pada saat musim penghujan, camat sering titip pesan kepada saya, tolong sampaikan kepada warga, agar menjaga kebersihan lingkungan,

tidak membuang sampah sembarangan, agar penyakit demam berdarah tidak menyebar, dan segera laporkan kepada aparat setempat bila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti Demam Berdarah yang berkembang cepat, dan lain sebagainya. Pesan-pesan teknis yang seperti ini kadangkala sulit dilakukan oleh seorang pejabat kepada rakyatnya, akan tetapi kalau kiai kan tiap hari tiap malam bisa bertemu dengan orang banyak baik di Masjid di Forum Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya, sehingga pesan-pesan kecil dan sepele seperti itu sangat mudah dilakukan, makanya kegiatan yang seperti ini bagi camat mempunyai nilai yang murah tapi lumrah dan cepat sampai pada masyarakat yang paling bawah.” (Wawancara tanggal 9 Oktober 2009).

Contoh dari salah satu program pemerintah dalam bidang kesehatan yang berusaha untuk menciptakan kesehatan melalui partisipasi warga masyarakat, kiai sebagai tokoh yang memiliki umat bisa dengan mudah menyampaikan program tersebut dengan bahasa masyarakat lewat media yang telah lama dimiliki oleh kiai yang berupa pengajian rutin ataupun yang bersifat berkala.

Dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak terbatas pada masalah kesehatan, dalam masalah yang lebih besar seperti menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga NKRI juga menjadi salah satu program yang selalu dititipkan kepada kiai. Dalam pengajian-pengajian, kiai selalu menyelipkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga keutuhan NKRI.

- **Mediator Konflik**

Pada tahun 2000, para kiai di daerah ini berhasil bertindak atas nama pemerintah untuk menjadi mediator antara pihak manajemen Gudang Garam dan para pekerjanya dalam aksi mogok massal, yang membuat ekonomi Kediri lumpuh (*Kompas*, 12 April 2000).

KH. Anwar Iskandar mewakili para kiai dan bertindak atas nama pemerintah Kota pada saat itu berhasil membujuk karyawan Gudang Garam untuk menghentikan demonstrasi.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu kiai masih memiliki pengaruh yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat.

Contoh lain adalah saat terjadi demonstrasi penolakan warga desa Betet Kecamatan Pesantren terhadap perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Saat itu Camat Pesantren dijabat oleh Rachmat Basuki. Rachmat memetakan peserta demonstrasi. Peserta yang memiliki ikatan emosional dengan kiai tertentu di daerah itu, maka Camat beserta MUSPIKA mendatangi kiai, yang intinya agar memberikan nasehat kepada para santri-santrinya agar menghentikan aksi tersebut. Karena menurutnya demonstrasi tidaklah menyelesaikan masalah. Tak lama kemudian kiai turun gunung dengan caranya sendiri.

Cara ini sangat efektif untuk meredam aksi-aksi demonstrasi yang marak dan terjadi di kecamatan pesantren kala itu. Hal ini menunjukkan bahwa kiai di daerah ini masih memiliki pengaruh di masyarakat sekitarnya. Peran kiai yang demikian menunjukkan bahwa ia telah menjadi stabilisator, ia mampu meredam konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Posisi dan peran yang memungkinkan kiai bisa meminimalisir meluasnya konflik yang terjadi di masyarakat inilah yang sering dibaca oleh pejabat keamanan yang rajin untuk membangun relasi dengan kyai untuk meringankan tugas pejabat dalam bidang ini.

- **Pendukung Partai Politik**

PKB adalah partai yang lahir dari rahim NU yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU terkemuka, yaitu K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Muchith Muzadi, K.H. Munasir Ali, K.H. Abdurrahman Wahid dan K.H. Mustofa Bisri. PKB menjadi partai yang cukup disegani karena berhasil meraup suara 12,60 %. Jumlah itu tak lepas dari peran para kiai, banyak kiai pesantren yang menjadi pengurus

PKB, tak terkecuali di Kota Kediri. KH. Anwar Iskandar pernah tercatat sebagai Ketua Majelis Syuro PKB Wilayah Jawa Timur.

Saat PKB dilanda konflik berkepanjangan, akhirnya para kiai yang tergabung dalam Poros Langitan mendirikan PKNU. Puncaknya, 31 Maret 2007, PKNU resmi dideklarasikan di di Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan, Widang, Tuban. Karena didirikan oleh para kiai, Pengurus PKNU di Kediri juga diisi oleh para kiai, tercatat KH. Abu Bakar Abdul Jalil sebagai Ketua Cabang, KH. Kholil tercatat sebagai Pengurus anak Cabang Mojotoro, kemudian KH. Anwar Iskandar sebagai Ketua DPP PKNU.

- **Menjadi Tim Sukses Calon Wali Kota dan Calon Gubernur**

Selama ini magnet kiai masih menguat artinya kiai tidak hanya sebagai pendukung kebijakan pemerintah, mediator konflik, pengurus partai tetapi juga menjadi mesin pendulang suara yang sangat handal. Maka ketika musim (awal 2009) menjelang pemilihan gubernur Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu, para calon gubernur telah melakukan pendekatan dengan beberapa kiai dan tokoh pesantren dengan variasi bentuk dalih pertemuan antara calon gubernur dengan kiai pesantren, yang dikemas dalam bentuk silaturahmi, pemberian bantuan, mendatangi acara keagamaan, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ketokohan kiai dan tokoh-tokoh pesantren masih menjadi modal sosial-politik untuk membangun dukungan politik dari komunitas *santri*, apalagi Jawa Timur adalah barometer bagi jagad perpolitikan kiai dan NU.

Pertarungan para calon Gubernur itu menjadi semakin menarik, karena kedua calon yang lolos dalam putaran kedua sama-sama mewakili NU (Saifulah Yusuf dan Khafifah Indar Parawansa) dengan dukungan kiai masing-masing, sehingga kita bisa menyebut Kiai Karsa (Kiai pendukung pasangan Karsa) dan Kiai Kaji (Kiai pendukung pasangan Kaji).

Kiai di Kediri juga terlibat dalam aksi dukung mendukung

terhadap proses pencalonan pimpinan Daerah baik daerah Tingkat II Kabupaten Kota, Provinsi bahkan saat terjadi pemilihan Presiden secara langsung beberapa waktu yang lalu, bahkan tiga tahun terakhir di Kediri dapat dikatakan sebagai masa pemilihan, dimana pada akhir tahun 2008 yang lalu pemilihan Walikota dilangsungkan sementara tahun 2009 ada pemilu Gubernur dan Presiden.

KH. Anwar Iskandar tercatat sebagai juru kampanye Karsa di wilayah Kediri dan sekitarnya. Terbelahnya kiai di Jatim ini sebenarnya hal biasa dan sah-sah saja. Tiap kiai tentu punya cita rasa tersendiri dalam menentukan pilihan dan memandang sebuah persoalan. Yang menjadi tidak biasa dan agak disesalkan adalah mulai terjebaknya mereka dalam suatu tindakan yang mungkin sebenarnya kurang elegan.

Tidak hanya pertarungan pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi (Gubernur), akan tetapi pertarungan pemilihan kepala daerah di tingkat yang lebih rendah sekalipun, seperti Pemilihan Walikota atau Bupati, kiai juga terlibat dalam aksi dukung mendukung, yang kadangkala mempunyai akibat dan dampak yang kurang menguntungkan bagi dunia kekhiaian.

Pada pemilihan Walikota Kediri yang baru saja berlangsung pada tahun 2008 yang lalu, fenomena yang sama juga terjadi di kota Kediri ini, bahkan secara formal PCNU Kota Kediri secara terus terang memberi dukungan kepada salah satu calon kandidat yang tengah bertarung, meskipun akhirnya diketahui calon yang didukung oleh kiai-kiai yang tergabung dalam kepengurusan PCNU tersebut kalah.

Bahkan untuk kepentingan publikasi, beberapa kiai tertentu dieksploitasi sedemikian rupa dan di ekspos besar-besaran di media massa untuk kepentingan kampanye, sehingga mengesankan seolah-olah calon tertentu telah mendapatkan restu dan dukungan dari kiai yang dieksploitasi tersebut.⁷ Padahal

⁷Foto seorang kiai yang cukup dikenal di Kediri terus dimuat dalam iklan *Radar Kediri-Jawa Pos* tanggal 10-22 Oktober 2008 bersama calon yang berbeda-beda.

kenyataannya belum tentu demikian, karena ada juga foto-foto itu sebenarnya telah diambil jauh hari sebelum waktu kampanya direncanakan, bahkan foto-foto itu diambil dalam kegiatan yang sama sekali berbeda dengan nuansa kampanye.

Di sinilah mestinya kiai menyadari posisinya dan memikirkan ulang untuk terlibat secara langsung dalam aksi politik praktis, bangunan relasi kiai dan pejabat pemerintah yang didasarkan pada tata nilai *Amar Makruf Nahi Munkar* lebih pas bila diterapkan dalam proses sosial politik ditengah masyarakat luas yang bisa menjangkau banyak elemen masyarakat dan tidak hanya satu warna politik tertentu saja.

Dengan keberadaan kiai masuk pada areal politik praktis tertentu, maka dengan mudah bisa terkesampingkan untuk melakukan hubungan tertentu dengan pejabat pemerintah. maka dari sisi ini berpolitik praktis bagi kiai kurang menguntungkan untuk membengun relasi dengan pejabat.

Untuk melihat peran kiai dalam ranah politik praktis yang selama ini berlangsung di kota Kediri, berikut ini ditampilkan tabel yang mencoba melihat secara makro dari pelaksanaan peran tersebut.

Tabel 5. Peran Sosial Politik dan Sosial kemasyarakatan Kiai di kota Kediri

No	Nama Kiai	Pendukung Kebijakan Pemerintah	Mediator Konflik	Pendukung Partai Politik	Pendukung Calon Gubernur/ Walikota
1	KH. Anwar Iskadar	√	√	√	√
2	KH. Kafabihi Mahrus	√			√
3	Kh. Wildan Mukhalladun	√	√	√	√
4	KH. Fuad Nawawi	√	√		√
5	KH. Abu Bakar Abdul Jalil	√	√	√	√
6	KH. Kholil Asyari	√	√		√

Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa sangat sedikit kiai yang melakukan relasi dengan pejabat pemerintah, yang bisa diasumsikan masuk dalam ranah politik yang tidak terlibat dalam aksi politik praktis.

RINGKASAN TEMUAN HASIL PENELITIAN

Untuk mempermudah dalam mencerna paparan hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini, peneliti berusaha untuk merangkum dari paparan tersebut secara ringkas sebagai bentuk upaya meluruskan kerangka berpikir logis yang konstruktif dalam hal pemaparan hasil penelitian ringkas dalam bentuk narasi paragraf berikut ini.

- **Proses terbentuknya Relasi Kiai dan Pejabat Pemerintah Kota Kediri**

Relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri telah terjalin sedemikian rupa, meski mempunyai peran, fungsi dan kapasitas yang berbeda kiai dan pejabat pemerintah mempunyai tujuan yang sama untuk mengabdikan pada masyarakat luas. Sehingga dalam membangun relasi baik kiai ataupun pejabat mempunyai kesadaran penuh akan tindakan yang dilakukan itu memberikan makna bagi pencapaian tujuan masing-masing. Lebih dari itu satu sisi relasi juga dimaksudkan sebagai bentuk aktualisasi diri dalam kapasitas masing-masing.

Awalnya proses relasi diawali dengan kunjungan silaturahmi pejabat yang biasanya dilanjutkan dalam bentuk koordinasi pengembangan program yang diperuntukkan pada masyarakat umum. Bentuk riil yang mudah untuk membangun relasi dengan kiai oleh pejabat adalah memberikan kesempatan kepada kiai untuk bertindak sebagai penceramah dalam peringatan hari-hari besar.

Sebagai tindak lanjut dari koordinasi terhadap program tertentu, relasi juga berkembang pada saling menerima dan memberi manfa'at terhadap realisasi program di masyarakat, kiai sebagai bagian dari elit masyarakat dapat mengakses beberapa program pemerintah demikian halnya pemerintah bisa menjadikan kiai sebagai bagian dari proses sosialisasi terhadap canangan program yang tengah direncanakan dengan menggunakan bahasa dan kebiasaan kiai yang mudah dicerna umat.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa bangunan relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri yang dijalin selama ini mempunyai mempunyai nilai yang bersifat simbiosis mutualism, antara kiai dan pejabat bisa memetik manfa'at dari sisi masing-masing atas jalinan relasi tersebut, maka dapat dimengerti bila jalinan ini begitu stratrategis dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan di kota Kediri, bahkan kondusifitas kota Kediri pernah mendapatkan penghargaan sebagai daerah teraman di Jawa Timur dalam pembangunan daerah, yang diberikan oleh Jawa Pos Grup.

- **Motif Membangun Relasi**

Beberapa kiai yang menjadi responden penelitian ini hampir secara seragama mengemukakan pandangan yang relatif sama, yakni alasan perintah agama untuk pengembangan *dakwah* dan *syi'ar Islam*. Dimana al Qur'an menjadi dasar utama memerintahkan untuk *amar makruf nahi munkar* walaupun terjadi perbedaan terletak pada rujukan kitab fikih yang dikuasai oleh masing-masing kiai, perbedaan ini dapat dimengerti karena kemampuan kiai dalam hal kitab fikih tentunya beragam, maka kualitas invidu seorang kiai terhadap penguasaan materi masalah ini menjadikan berbeda dalam menggunakan dasar berfikir *fiqhi* sebagai alasan menjalin relasi dengan pejabat.

Motif dan alasan kiai menjalin relasi dengan pejabat pemerintah kota Kediri juga mengalami pergeseran disebabkan adanya kekecewaan yang muncul dikemudian hari setelah relasi itu dijalin dengan pejabat, dan pejabat yang bersangkutan mengalami mutasi pada jabatan lain, dan bersamaan dengan itu jalinan relasi harus dimulai lagi dengan pejabat yang baru.

Sementara dari pihak pejabat pemerintah ditemukan data bahwa alasan dan motif membangun relasi dengan kiai didasarkan atas fakta bahwa kiai merupakan bagian entitas dalam masyarakat Kediri yang masih menempatkan kiai sebagai patron masyarakat. Dalam teori sosiologi posisi seperti ini kiai disebut sebagai kelompok elit dalam masyarakat.

Dengan menjalin relasi dengan kiai, pejabat pemerintah juga bermaksud mempermudah hubungan dengan masyarakat di akar rumput, sehingga dengan begitu pejabat pemerintah dapat dengan mudah menciptakan tatanan sosial masyarakat yang kondusif, sekaligus dengan menjalin relasi dengan kiai pejabat bisa mengendalikan gejolak situasi sosial politik masyarakat.

Alasan lain yang bisa ditemukan dalam penelitian ini sebagai motif pejabat dalam membangun relasi dengan kiai adalah penempatan kiai sebagai legitimasi non formal dari sisi sosial kemasyarakatan bagi pejabat tertentu, sehingga dari sisi ini bila terjadi konflik sosial kiai sering dilibatkan sebagai bagian dari mediator penyelesaian masalah dalam masyarakat yang tengah berkonflik, sehingga posisi kiai dalam problem yang demikian berdiri ditengah masyarakat sebagai penyeimbang, dan kiai pun menjadikan posisi ini sebagai alat bargaing posisi untuk kepentingan tertentu.

- **Munculnya Klasifikasi Kiai**

Secara umum relasi dibangun atas dasar kesetaraan fungsi dan peran masing-masing pihak yang membangun relasi. Kiai mempunyai pengaruh dan kharisma di mata masyarakat

disebabkan adanya kewibawaan yang dimilikinya. Dalam penelitian terdahulu disebutkan, ada beberapa sumber kewibawaan yang bisa dimiliki oleh seorang kiai, diantara sumber kewibawaan itu adalah, keturunan kiai, kualitas individu, aktifitas sosial dan politik, posisi dalam struktur kepengurusan NU, pengasuh pesantren dan lain sebagainya.

Sementara pejabat pemerintah mempunyai kewibawaan secara formal didasarkan atas Undang-undang untuk jabatan tertentu, sehingga dapat dengan mudah mensikapi kewibawaan dalam sutruktur pemerintah ini, seorang camat akan berbeda kewibawaannya dengan Kepala dinas, demikian seterusnya dengan walikota ataupun gubernur.

Ketika relasi kiai dan pejabat terbangun, maka tata nilai kesetaraan itu pun berlaku, maka dalam penelitian ditemukan seorang Camat akan melakukan relasi dengan kiai yang setara dengannya, demikian halnya seorang kepala dinas atau walikota, melakukan relasi dengan kiai juga menggunakan ukuran kesetaraan yang ada.

Penentuan nilai kesetaraan inilah yang dalam penelitian ini ditemukan terdapat klasifikasi kiai ketika menjalin bangunan relasi dengan pejabat pemerintah kota Kediri.

Sorang camat menemukan kiai tertentu membangun relasi, demikian halnya walikota, akan melakukan relasi dengan kiai yang dalam pandangan walikota dianggap sejajar dengannya. Proses penentuan tata nilai kesetaraan inilah yang secara unik ditemukan dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi keunikan dalam temuan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Interaksi antara kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri, dibangun dalam kondisi saling menguntungkan, sekalipun demikian bukan berarti relasi tersebut berjalan linier, ada saatnya relasi itu mengalami fluktuatif, pasang surut, bahkan kadangkala dibumbui dengan munculnya konflik, namun fluktuasi itu bisa diatasi oleh kedua belah pihak, sehingga yang terjadi kemudian adalah relasi yang dinamis.

Dinamika interaksi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri dapat dipotret dari teori interaksi simbolik, dimana interaksi antara kiai dan pejabat dilakukan secara sadar dari kedua belah pihak, bahkan dalam beberapa wawancara ditemukan masing-masing mempunyai tujuan yang ingin dicapai, cara-cara yang khusus, strategi dan motif dalam membangun relasi ini, dan inilah yang disebut dengan tindakan bermakna, yaitu tindakan yang dilakukannya secara sadar, terarah menuju suatu penyelesaian suatu aktifitas yang dirancang, dan tindakan tersebut diproyeksikan oleh pelaku dalam pikirannya sendiri, (Tom Campbell, 1994:263), atau dalam bahasa lain interaksi antara kedua belah pihak dilakukan berdasarkan motif.

Motif merupakan faktor yang penting dalam memahami sebuah fenomena tindakan. Motif-motif ini merupakan usaha-usaha seseorang dalam meringkas dan membuat makna dari tindakan yang kompleks. Motif juga merupakan label pernyataan ringkas dari alasan tindakan yang telah terjadi (Charon, Joel M, 1989:120).

Berikut adalah gambaran dan deskripsi dari beberapa aktifitas relasi kiai dengan pejabat pemerintah kota Kediri, motif yang di eskripsikan dalam melandasi beberapa tindakannya membangun relasi yang peneliti susun dari pengawatan peneliti yang kemudian dipaduan dengan hasil wawancara serta dianalisis untuk mendapatkan deskripsi.

PROSES INTER-RELASI KIAI DAN PEJABAT PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Realitas di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok orang yang memiliki kualitas tertentu, dalam konstruk sosiologis mereka ini sering disebut dengan elit. Konsepsi tentang elit ini pada saatnya melahirkan situasi sosial baru yang mencerminkan adanya dinamika masyarakat, karena dalam struktur masyarakat akan ada yang memerintah dan yang diperintah (Ummatin, Khoiru: 2002: 23). Hubungan kiai dan masyarakat telah lama terlembagakan dalam bentuk norma patron-klien. Masyarakat Kota Kediri juga menganut pola yang sama, dalam tatanan sosial ini, kiai sebagai patron, sedangkan masyarakat sebagai klien.

Patron akan selalu memperoleh posisi khusus di tengah-tengah masyarakat. Bahkan pola patronase antara kiai dan masyarakat ini tidak terbatas oleh wilayah teretorial, bahkan bisa lintas kota dan provinsi.

Pengaruh kepemimpinan dan jaringan kiai yang semakin luas memudahkan mereka untuk menjalin komunikasi dengan pihak-

pihak luar, baik pemerintah maupun partikelir. Keberadaan dan posisi kiai yang demikian ini memudahkannya untuk berperan sebagai “agen” penyampai pesan-pesan “pemerintah” tentang pembangunan misalnya, dan dalam beberapa kasus masyarakat lebih mudah menerima program pembangunan dan program pemerintah bila disampaikan oleh seorang kiai. Hal ini menunjukkan betapa “kiai” dalam konstruksi klasifikasi masyarakat Jawa memiliki posisi cukup istimewa.

Pejabat Pemerintah Kota Kediri menyadari posisi kiai dapat menentukan dan mempengaruhi tindakan masyarakat serta membimbing mereka untuk menerima atau menolak langkah-langkah tertentu, atau kebijakan tertentu dari pemerintah. Kesadaran atas kondisi inilah yang mendasari bangunan relasi pejabat pemerintah kota Kediri dengan kiai.

Proses terbangunnya relasi diawali dengan mengadakan komunikasi baik langsung ataupun tidak dari kedua belah pihak, namun biasanya muncul dari inisiatif pejabat, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan silaturahmi biasa ataupun yang dikemas dalam bentuk kehadiran pada suatu upacara tertentu.

Ada beberapa upacara yang bisa dijadikan media untuk membangun relasi itu, baik upacara yang diselenggarakan oleh pejabat pemerintah ataupun yang diselenggarakan dilingkungan kiai. Kehadiran masing-masing pihak pada upacara tersebut menandai awal dibangunnya relasi antara kiai dan pejabat. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang menciptakan interrelasi tersebut:

1. Upacara-upacara HUT Kemerdekaan, HUT Kota Kediri, Upacara PHBI, pelantikan pejabat di tingkat Kota Kediri dan upacara-upacara lain, dalam kegiatan-kegiatan tersebut kiai selalu diundang dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat. Dalam acara-acara tersebut kiai tidak hanya membaca doa tetapi juga menyampaikan ceramah (*mau'idhah hasanah*).

2. Peringatan yang diselenggarakan oleh kelompok kiai yang biasanya berupa pengajian umum yang melibatkan masyarakat, komunitas kiai, baik yang bersifat insidental ataupun yang bersifat rutin.
3. Acara-acara pengajian, pelepasan santri, khataman al-Qur'an dan acara-acara keagamaan lain yang diselenggarakan oleh kiai dan komunitasnya (pesantren, jamaah pengajian).
4. Dalam upacara-upacara itu, awalnya kiai dan pejabat saling mengundang kemudian dilanjutkan dengan komunikasi intensif dalam forum-forum informal, sehingga tradisi saling mengundang berubah menjadi tradisi saling mengunjungi.
5. Dalam pertemuan-pertemuan informal itulah dibahas berbagai persoalan, termasuk program pemerintah, program pengembangan dakwah atau masalah-masalah yang menjadi *concern* kedua belah pihak.

Pertemuan formal merupakan langkah awal bangunan realsi kiai dan pejabat pemerintah Kota Kediri, sifatnya yang formal inilah baik kiai ataupun pejabat saling memberikan kesempatan untuk melakukan ekspresi pribadi masing-masing yang biasanya dikemas dalam bentuk sambutan pada upacara yang sedang dilangsungkan. Bila upacara yang menggagas adalah pejabat, maka kiai biasanya diberi kesempatan untuk memberikan tausiyah atau petuah agama untuk para staf pejabat yang sengaja dihadirkan untuk kemas acara tersebut. Sementara bila upacara yang menggagas adalah kiai, maka pejabat diberi kesempatan untuk memberikan pengantar pada penyelenggaraan upacara dimaksud.

Dalam momentum kesempatan yang sengaja diberikan untuk masing-masing kiai atau pejabat tersebut, biasanya digunakan untuk saling menjajaki cara pandang dari masing-masing pihak. Kiai memberikan kesempatan kepada pejabat untuk menyampaikan gagasan yang sedang dipikirkan untuk dikaji oleh kiai dalam merancang bangunan relasi berikutnya,

demikian halnya pejabat, memberikan kesempatan kepada kiai menyampaikan tausiyah sekaligus untuk mengukur dan menjajaki sejauh mana pandangan kiai terhadap masalah yang sedang di sodorkan.

Dari proses saling menjajaki inilah kemudian diinternalisasi oleh masing-masing pejabat dan kiai untuk menentukan posisi masing-masing dalam rancangan relasi yang tengah dibangun. Maka dari terjadi dua (2) kemungkinan; *Pertama*, karena dirasa ada saling kecocokan baik dalam pribadi, cara pikir ataupun bentuk sikap yang lahir dari persepsi masing-masing, maka relasi terus berjalan dalam bentuk pertemuan yang sifatnya lebih khusus dan terbatas, sehingga dari sini terjadi proses saling menerima dan memberi atas suatu konsep dan gagasan pada sebuah obyek yang disepakati, ada yang harus dilakukan oleh kiai dan direspon oleh pejabat, demikian juga sebaliknya, ada yang harus dilakukan oleh pejabat setelah mendapat respon dari kiai.

Kedua, bila proses internalisasi persepsi dari masing-masing pihak kiai ataupun pejabat dirasa ada sesuatu yang mengganjal, bahkan mungkin muncul ketidakcocokan atas pemahaman terhadap problematika yang tengah disodorka, maka bisa saja relasi itu berhenti sampai disitu saja, sehingga bangunan relasi yang baru dicoba untuk mencari bentuk, tidak menemukan formulanya, dan tidak bisa berlanjut sebagai mana mestinya.

Dari proses yang demikian itu, maka dapat difahami bahwa antara kiai dan pejabat dalam membangun relasi ada proses dimana satu sama lain terjadi saling menawar untuk sebuah bargaining yang dapat dipahami dan diterima oleh masing-masing pihak.

Dalam perjalanannya, relasi dan pertemuan-pertemuan tersebut melahirkan berbagai keputusan penting yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah telah berhasil menggandeng kiai sebagai mitra kerjanya, di sisi lain aktifitas dan program kiai mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Pembahasan yang menyangkut bagaimana terbentuknya pola relasi antara kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri setelah melalui analisis yang mendalam pada bahasan ini dapat dikerucutkan pada pembentukan proposisi sebagaimana yang dirumuskan dalam rancangan penenilaian ini.

Proposisi itu secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pola hubungan dan relasi yang terbangun antara kiai dan pejabat pemerintah bersifat simbiosis mutualistik, prosesnya diawali dengan komunikasi pada sebuah kegiatan yang memungkinkan satu sama lain menyodorkan gagasan dan pikiran masing-masing kiai dan pejabat untuk menunjukkan posisi masing-masing.

MOTIF KIAI MENJALIN RELASI DENGAN PEMERINTAH

Dari pengamatan peneliti dan dilengkapi hasil wawancara terdahulu tentang motif-motif yang mengedepan dalam relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri, berikut adalah deskripsi peneliti setelah melakukan analisis terhadap dinamika interaksi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri dalam perspektif teori interaksi simbolik.

Bahwa interaksi antara kiai dan pejabat pemerintah dilakukan secara sadar, terarah dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan inilah yang disebut dengan tindakan bermakna. (Tom Campbell, 1994:263), atau dalam bahasa lain interaksi antara kedua belah pihak dilakukan berdasarkan motif. Motif merupakan faktor yang penting dalam memahami sebuah fenomena tindakan. Motif juga mendorong seseorang untuk meringkas dan membuat makna dari tindakan yang kompleks. Motif merupakan label pernyataan ringkas dari alasan tindakan yang terjadi (Charon, Joel M. 1989:120).

Berikut adalah motif kiai menjalin relasi dengan pejabat pemerintah yang dapat peneliti deskripsikan dari temuan yang

telah peneliti olah dalam pembahasan, motif-motif itu adalah sebagai berikut ini.

- **Amar Ma'ruf Nahi Munkar**

Dari informasi yang dihimpun lewat wawancara dengan sejumlah kiai dan dilakukan pendalaman yang dilengkapi dengan pelibatan diri pada kehidupan kiai, dan disertai analisis yang mendalam, dapat disampaikan bahwa, secara umum kiai di Kediri dalam membangun relasi dengan pejabat pemerintah mempunyai tujuan yang spesifik.

Spesifikasi tujuan ini unik, pandangan kiai yang melandasi berpikir membangun relasi itu berdimensi theologis dan bersifat transendental, dalam bahasa kiai tujuan ini dimaknai sebagai manifestasi dari sebuah nilai yang disebut dengan "perjuangan".

Satu hal yang pokok dan menjadi landasan kiai dalam membangun relasi sosial dengan Pejabat pemerintah kota Kediri adalah melaksanakan perintah agama yang berupa *Amar Makruf Nahi Munkar*, menyeru kepada yang baik dan mencegah kejahatan. Secara umum kiai berpandangan bahwa membangun relasi dengan pejabat merupakan bagian dari strategi yang bisa dibangun untuk melaksanakan perintah ini.

Interaksi sosial kiai dengan pejabat pemerintah kota Kediri secara umum dalam wawancara terungkap bertujuan untuk melaksanakan perintah agama, atau dalam bahasa al-Qur'an *amar ma'ruf nahi munkar*. tersebut.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim, sekalipun demikian, para ahli fikih (hukum Islam) berbeda pendapat dalam penerapannya. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa semua kegiatan bahkan memaksa dan melakukan kekerasan boleh dilakukan dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa cara-cara damai seperti berdiskusi, berdebat dan memberikan contoh pribadi sudah cukup (Aboe Bakar, 1968:62-63). Pendekatan yang

terakhir inilah yang menjadi pijakan kiai di Kota Kediri dalam perilaku sosial dan politiknya, termasuk dalam menjalin relasi dengan pejabat pemerintah.

Teks Al-Qur'an yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada ummat Islam tertuang dalam banyak surat dalam variasi yang berbeda, satu diantaranya adalah yang tertuang dalam Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 110. yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ

Kuntum Khoiro ummatin ukhrijat lin naasi takmuruna bil makrufi wa tanhauna 'anil mungkar wa tukminuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khoirol lahum, Minhumul mukminuna wa akstaru humul fasikum.

Hendaklah kalian menjadi ummat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dengan menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, dan sekiranya ahli Kitab itu juga mau beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imrom: 110)

Ayat ini dapat diartikan bahwa; *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan, secara eksplisit menjelaskan model interaksi sosial dalam Islam. Umat Islam akan menjadi umat yang terbaik apabila mereka mampu melaksanakan tugas menyatakan dan menyerukan kebaikan (*yad'una ila al-khair*), melaksanakan dan menganjurkan kebaikan (*ta'muruna bi al-ma'ruf*) dan mencegah dan menjauhi yang munkar (*tanhauna 'an al-munkar*), atau dalam arti mikro dakwah adalah *social recontruction*.

Proses rekonstruksi sosial menurut Amin Rais sama dengan dakwah. Sosial di sini bisa dalam arti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik dan sebagainya singkat kata dakwah masuk dalam seluruh relung kehidupan masyarakat dengan segala strata yang ada di dalamnya. (Amin Rais, 1991: 109-112). Termasuk

dalam bentuk kegiatan amar ma'ruf adalah me-manage konflik, agar menjadi spirit sosial yang membangun kehidupan bersama, menciptakan stabilitas, sehingga terjadi saling pengertian antara satu pihak dengan pihak lain.

Itulah landasan dan latar belakang teologis para kiai di Kota Kediri dalam berinteraksi dengan pejabat. Konsep ini memiliki fungsi yang urgen, karena dalam pandangan kiai, tatanan dan perilaku sosial yang diperankan oleh banyak penguasa dalam berbagai macam konstelasinya sering tidak sejalan dengan nilai-nilai agama.

Terjalinnnya relasi antara kiai dan pejabat pemerintah, kiai mencita-citakan terkontrolnya perilaku pemimpin formal (pejabat pemerintah) sehingga tidak menyimpang dari kepentingan menyejahterakan ummat, dan tidak berlaku sewenang-wenang bahkan tidak menyimpang dari ajaran dan nilai agama. Perspektif inilah yang menjadi landasan para kiai dalam menjalin dan membangun relasi dengan pejabat pemerintah di Kota Kediri.

Penerjemahan *amar ma'ruf nahi munkar* sendiri telah melahirkan pelbagai peran yang dimiliki oleh seorang kiai. KH Achmad Siddiq, menyatakan, dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, kiai yang tergabung dalam organisasi NU harus aktif dalam semua aspek dan bidang kegiatan sosial kemasyarakatan (legislatif, eksekutif, dan lain-lain), termasuk menggunakan hak-haknya di lembaga tersebut untuk menyampaikan pendapat, usulan dan lain sebagainya demi perbaikan kehidupan ummat. (Siddiq. Achmad, 1969: 23).

Demikian halnya kalau kita melacak sejarah dakwah dan perjuangan walisongo di tanah Jawa, orientasi kegiatan dakwah mereka diarahkan pada pusat-pusat kekuasaan politik yang sedang berjaya.

Kaidah *الناس على دين ملڪهم an nas 'ala dini mulukihim* (masyarakat sangat bergantung pada agama penguasanya). sangat relevan untuk dijadikan dasar dalam dakwah model ini.

Dakwah Walisongo membagi cara kerjanya dengan 5:3:1, lima di Jawa Timur, tiga di Jawa Tengah, 1 Jawa Barat. Pertimbangan itu sesuai dengan peta dan tingkat kesulitan wilayah. (Asep Muhyiddin, Agus Ahmad Safei, 2002:124-125) Jawa Timur mendapatkan porsi yang banyak dari wali yang ada karena pada masa itu Jawa Timur merupakan pusat kekuasaan politik yang ada di Nusantara, yaitu adanya 2 kerajaan besar yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Majapahit, di samping itu Jawa Timur juga sebagai kota perdagangan dan pelabuhan.

Adapun Jawa Tengah memperoleh jatah tiga wali, yaitu di Demak, Kudus, Muria. Ini terjadi karena kekuasaan politik dan ekonomi mulai beralih ke Jawa Tengah, terutama setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Di samping pemilihan tiga wilayah tersebut juga memiliki arti geo-strategis. Kondisi masyarakat tiga daerah itu masih banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha.

Di Jawa Timur, satu diantara walisongo tersebut, bahkan wali yang tertua adalah Sunan Ampel, pusat dakwah dan pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Cara yang ditempuh Sunan Ampel dalam membangun relasi dengan pusat kekuasaan adalah menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Dari pernikahan itu Sunan Bonang melahirkan sunan-sunan yang lain, Sunan Bonang dan Sunan Kudus adalah anak-anaknya, sedangkan Sunan Drajat adalah cucunya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya.

Pada masa sekarang, khususnya di Kota Kediri, bentuk implementasi dari strategi perjuangan dakwah kiai yang membangun relasi dengan pejabat pemerintahan, nampaknya tidak bisa dipisahkan dari semangat dan kerangka berpikir dakwah yang pernah ditempuh oleh walisongo tersebut.

Perbedaan yang nampak dalam relasi antara yang pernah dibangun walisongo dengan relasi kiai yang ada di kota Kediri terletak pada bentuk riil aktifitas dan kegiatan yang dilakukan (*reality action*) Pada masa kini bangunan relasi kiai dengan pejabat pemerintah kota Kediri lebih bermakna pengaruh dan syi'ar. Pengaruh dimaksudkan untuk memberikan *balance* atau kontrol sosial terhadap pejabat, dan syi'ar diwujudkan dalam bentuk pelibatan kiai pada prosesi-prosesi dan resepsi-resepsi acara yang bersifat massal yang digelar oleh pejabat ataupun atas nama pejabat. Sehingga bentuk nyata aplikasi relasi ini diwujudkan dalam bentuk keterlibatan kiai pada acara-acara semacam PHBN dan PHBI, acara pelantikan dan serah terima pejabat, syukuran dan lain sebagainya. Biasanya acara-acara seperti itu para kiai sering diundang untuk memberikan nasehat (*tausiyah*) selain untuk membacakan do'a pada akhir rangkaian upacara resmi.

Karena adanya jalinan yang mutualis, maka usai acara resmi bisa dilanjutkan dalam pertemuan informal pada waktu-waktu berikutnya dan dalam ruang susana yang lebih khusus, dan di sanalah kemudian kiai bisa menyampaikan lebih jauh tentang problema dan kepentingan-kepentingan umat. Amar ma'ruf model demikian berhasil menempatkan kiai Kediri sebagai mitra pejabat, dan melahirkan simbiosis mutualis. Masyarakat kota Kediri masih menganut pola paternalistik, maka peran elit masih sangat menentukan, kiai sebagai elit masyarakat, maka apa yang dikatakan oleh kiai akan mudah diterima oleh masyarakat. Posisi inilah yang mendorong pejabat menjalin relasi dengan kiai dan memanfaatkannya untuk menyampaikan strategi, rancangan dan programnya kepada masyarakat.

Bantuan lain kiai yang langsung secara nyata bisa dirasakan oleh pejabat pemerintah adalah, dakwah kiai sekaligus bisa bernilai sosialisasi kebijakan pemerintah, seperti upaya menciptakan stabilitas keamanan, menjaga persatuan, masalah pajak,, program kesehatan, dan lain sebagainya.

Media praktis kiai untuk berkomunikasi dengan masyarakat adalah “pengajian”. Dalam pengajian kiai bisa berdialog kepada ummat dengan bahasanya sendiri. sehingga kiai bisa mengarahkan, sekaligus menyerap apa yang dimauai ummat. Praktiknya “pengajian” bisa dikemas dalam berbagai bentuk, sifat, kualitas dan kuantitasnya, mulai dari yang sangat sederhana sampai yang mewah, dari yang sangat terbatas hingga yang umum, dari yang rutin mingguan, bulanan, tahunan sampai yang bersifat eksidental.

Beragamnya pola dan jenis pengajian inilah menjadikan pengajian itu luwes disegala event, Sedang pesta bisa dengan pengajian, sedang berduka, ada pengajian untuk karena kematian, singkat kata seluruh bentuk kehidupan bisa dimasuki model pengajian, sehingga kiai tidak kehilangan model untuk mencari bentuk dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Nilai lebih dari komunikasi lewat media pengajian ini disamping fleksibel dari sisi even yang ada di masyarakat, juga mempunyai rasa yang bersifat transendental yang secara ruhani dibalut dengan sebuah keyakinan yang mempunyai nilai akherat, adanya keyakinan inilah yang menjadikan posisi kiai masuk pada wilayah supra natural.

Dan untuk menggambarkan interaksi ini dapat disederhanakan dalam bentuk diagram berikut;



Diagram 3. Relasi Kiai dan Pejabat Pemerintah Kota Kediri

Diagram di atas menunjukkan bahwa motif kiai menjalin relasi dengan pejabat adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan perintah agama, alasan pejabat adalah dalam rangka mendukung program-program pemerintah.

Dengan demikian posisi kiai dalam menjalin relasi dengan pejabat tidak hanya sebagai mitra (mendukung, mensosialisaikan program pemerintah) tetapi juga pengendali kekuasaan. Artinya kiai dalam peran yang kedua ini bisa aktif mengendalikan eksekutif agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat sesuai dengan tuntutan agama. Contoh kongkrit kasus Raperda pariwisata yang pernah disusun oleh pemerintah Kota Kediri yang di antaranya mengatur diskotik, karaoke, rumah biliard, serta permainan ketangkasan yang pernah ditolak kiai, sampai saat ini Perda itu tidak jelas nasibnya, dan belum pernah diumumkan pemberlakuannya.

Peran kiai yang mampu mengendalikan penguasa ini sekaligus menolak temuan Geertz bahwa kiai sebagai *cultural broker* (pialang budaya) tidak mampu mengendalikan perubahan (Geertz, 1960). Temuan penelitian ini juga sekaligus memperkuat pendapat Horikhosi yang menyatakan bahwa kiai mampu mengendalikan perubahan sosial politik (Horikhosi, 1984). Dengan kemampuan yang dimilikinya kiai mengendalikan perubahan sosial politik di kota Kediri, dalam kasus di atas paling tidak meminimalisir perubahan tatanan sosial kemasyarakatan yang bisa dihasilkan dari dampak maraknya hiburan malam yang akan diatur pelegalannya oleh pemerintah kota ataupun akibat permainan ketangkasan yang mendekati perjudian.

Kasus ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata oleh kiai adalah salah satu contoh dan bukti tentang manfaat relasi kiai dapat mengendalikan pejabat pemerintahan dalam merancang program.

Ikhwal penolakan kiai atas Raperda ini didasarkan pada penilaian kiai terhadap Raperda yang akan mengatur ijin bidang

usaha pariwisata ini dianggap dapat memicu maraknya perbuatan maksiat, karena dalam Raperda tersebut menyangkut, Panti Pijat, Diskotik, Hiburan malam, permainan ketangkasan dll, yang selama ini semua itu tidak ada (atau belum ada) di Kota Kediri.

Peneliti menangkap suasana kebatinan para kiai waktu itu, karena selain sebagai bagian dari peserta silaturahmi, peneliti ditunjuk sebagai juru bicara dalam pertemuan itu dan sekaligus mengkomunikasikan hasil pertemuan tertutup antar kiai tersebut. Keputusan kiai itu secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Bahwa, setelah melakukan pembahasan secara mendalam atas dasar maslahat dan madhorot, kiai sepakat mengusulkan adanya revisi atas Raperda Pariwisata yang sedang di gagas oleh Pemerintah Kota Kediri, khususnya peraturan yang akan mengatur Panti Pijat, Diskotek, Permaianan Ketangkasan dan lain sebagainya.

Sebenarnya penolakan ini telah diamanatkan kepada fraksi FKB di DPRD Kota Kediri, tapi nampaknya rancangan itu akan tetap berjalan., Maka bila itu yang terjadi Komunitas kiai di Kota Kediri akan menggunakan jalan terakhir dengan menggelar aksi ekstra parlemeute, untuk mengajak masyarakat Kota Kediri menolak diberlakukannya Raperda tersebut.

“Kalau amar ma’ruf itu juga penting, tetapi yang lebih wajib lagi adalah bagaimana menegakkan nahi munkar di kota yang kami anggap penduduknya sangat berjiwa religius ini”.

Bila dikaji lebih dalam, peristiwa ini, dapat dipahami bahwa kritik kiai dan tokoh NU itu menunjukkan bahwa kiai berupaya mengendalikan kekuasaan pejabat agar rancangan keputusan yang akan ditempuh sesuai dengan tolok ukur ajaran agama dalam frame pandangan kiai.

Satu diantara sekian alasan kiai melakukan tindakan ini adalah dengan memedomani kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih,

*menolak kerusakan itu lebih didahulukan
daripada keinginan mendatangkan manfaat.*

Menurut pandangan kiai, dengan adanya Perda tersebut jelas tempat-tempat hiburan akan mendapatkan legalisasi, namun di sisi lain akan mendatangkan dampak bagi masyarakat, yaitu menciptakan arena maksiat. Alasan yang kedua inilah yang menjadi pertimbangan ulama dan kiai di Kediri menolak Raperda tersebut.

- **Dakwah Secara Grosir**

Kiai merasa bahwa selama ini ia tidak bisa berbuat banyak dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar pada masyarakat luas tanpa bantuan kalangan diluar kiai, karena dakwah yang biasa dilakukan kiai selama ini hanya mengandalkan jama'ah dan ceramah, hasil yang diperoleh pun tidak bisa keluar dari lingkup jama'ah dalam komunitas kiai, karena umumnya kiai mempunyai komunitas yang khas, serta mengajarkan materi ilmu keagamaan dengan cara, metode dan sistem yang dibuat sendiri-, bahkan kadang antara satu kiai dengan kiai yang lainnya mempunyai cara dan kurikulum yang berbeda pada level yang sama sekalipun.

Penerapan amar ma'ruh nahi munkar dengan menggandeng pejabat dapat dimaknai sebagai pilihan bentuk dakwah secara *grosir*, karena dengan cara ini, kiai bisa masuk pada wilayah dan komunitas di luar jama'ah kiai, yang selama ini tidak menjadi komunitas kiai. Apa lagi pejabat secara formal merupakan pimpinan dan panutan masyarakat yang lebih luas, dan dilengkapi dengan perangkat sosial yang berupa kekuasaan, sehingga dibenarkan untuk membuat keputusan formal. Kesadaran ini pernah diungkapkan KH. Anwar Iskandar. Kiai sadar bahwa kekuatannya untuk mempengaruhi masyarakat tidaklah besar bila dibanding dengan seluruh masyarakat dalam suatu wilayah, kiai memiliki keterbatasan-keterbatasan, menjalin relasi dengan pejabat kiai sudah memegang kepalanya, kalau kepalanya sudah bisa dipegang maka ekornya akan mengikuti.

Dapat dimengerti bahwa kekuasaan pemerintah dalam bermasyarakat memiliki posisi strategis. Karena dengan kekuasaan banyak yang bisa dilakukan. Apabila kekuasaan berada di tangan pejabat yang adil, maka kebaikan akan mudah ditegakkan, baik secara halus maupun paksa. Jika kekuasaan ada di tangan penguasa yang zalim, maka rakyat akan dipaksa untuk mengikuti penyelewengan-penyelewengan atau kezhaliman para penguasa, jika menolak, maka penguasa bisa memaksanya.

Ada korelasi yang positif yang dapat peneliti amati dari perjalanan relasi kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri, implikasi nyata dari relasi ini bisa dilihat bagaimana suasana dan lingkungan agamis tampak dalam birokrasi dipemerintahan Kota Kediri. Contohnya yang langsung bisa dilihat secara fisik adalah, dalam deretan bangunan kantor pemerintah kota dibangun *Masjid al-Bina'i*, dimana setiap waktu sholat Dluhur selalu dipenuhi dengan jamaah dari pegawai Pemkot, yang biasanya sehabis sholat jama'ah dilanjutkan dengan kuliah tujuh menit, dan sesekali kiai diundang untuk memberikan ceramah di masjid itu. Suasana demikian bisa terbangun disebabkan kiai memiliki hubungan baik dengan pejabat pemerintah.

- **Pergeseran Tata Nilai Amar Ma'ruf Nahi Munkar**

Titik tolak dan dasar pijakan relasi kiai dan pejabat adalah *amar ma'ruf nahi munkar* namun dalam perjalanannya seiring dengan fluktuasinya relasi tersebut, juga mengalami pasang surut bahkan sedikit berbelok. Karena ada kiai yang merasa hanya dimanfaatkan oleh pejabat demi suksesnya tugas dan jabatan mereka saja, bila masa jabatan itu berakhir relasi itu sering terputus, maka di sinilah kemudian mulai ada pikiran-pikiran kecil yang kadang mencoba menyeruak memunculkan perubahan orientasi dari beberapa kiai tertentu dalam menjalin relasi dengan pejabat, perasaan hanya dimanfaatkan untuk mensukseskan pelaksanaan program inilah secara nyata pernah dikemukakan oleh KH. Abu Bakar Abdul Jalil.

Pandangan di atas bila dianalisis secara dalam sama halnya dengan pandangan, KH Wildan Mukholladun, Ketua PCNU kota Kediri juga pernah mnguraikan perihal latar belakang para kiai NU yang mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum walikota Kediri, dan setelah walikota terpilih bukan dukungan PCNU melaksanakan tugasnya ada kegamangan dalam membangun relasi dengan pejabat walikota yang baru ini, namun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, dalam hal ini KH. Wildan bertutur sebagai berikut; Waktu pilihan walikota, kiai dan pengurus NU cabang kota Kediri tidak mendukung calon terpilih yang sekarang ini (dr. Syamsul Azhar), kiai dan Pengurus NU memiliki calonnya sendiri, ketika kemudian calon NU tidak terpilih, hubungan antara jajaran kiai pengurus NU dan Walikota terpilih sempat mengalami kevakuman, waktu itu kiai dan jajaran pengurus NU berpikir kenapa kita harus memulai? (menjalin komunikasi dengan walikota) Wong dulu kita tidak memilih calon itu, kalau calon terpilih tidak bisa memberikan **keuntungan kepada NU, kenapa harus kita jalin komunikasi?** Kira-kira waktu itu perlu waktu 4 bulan untuk memutuskan langkah apa yang harus kita ambil dalam situasi seperti ini.

Pernyataan di atas bila dianalisis secara dalam menunjukkan bahwa dalam menjalin relasi dengan penguasa KH. Wildan Mukhalladun sebagai Ketua Tanfidiyah NU kota Kediri, melakukan kalkulasi, hitung-hitungan apa untung dan apa ruginya. Ini menunjukkan telah terjadi pergeseran tata nilai amar ma'ruf nahi munkar dalam masalah relasi dengan pejabat pemerintah.

Kiai memahami betul bahwa relasi yang dijalin bersama pejabat tidak semuanya berhasil seperti yang diharapkan, ada pejabat yang membangun relasi hanya sebatas untuk menyelesaikan tugas dalam jabatannya, ini dapat dirasakan ketika pejabat tertentu mutasi, komunikasi yang dulu pernah terjadi dengan baik, putus begitu saja, sehingga dalam menghadapi kondisi seperti ini kadang kala muncul istilah "kiai dimanfaatkan",

karena mutasi pejabat kadangkala membawa serta jalinan relasi yang telah dibangun ikut hilang dan terputus begitu saja, sehingga bila pejabat pengganti tidak bisa melakukan hal yang sama, kiai tergoda dengan tata nilai yang pragmatis. Sehingga untuk memulai membangun relasi dengan pejabat yang baru kadang kala muncul pertimbangan dan kekhawatiran hal yang sama terjadi dikemudian hari, sehingga mendorong kiai berpikir lain.

Cara berpikir ini menghantarkan kiai membuat kalkulasi-tentu tertentu dalam membangun relasi dengan pejabat, artinya, motif kiai dalam membangun relasi mulai bergeser dari tujuan semula, tidak lagi dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar* ansich tetapi sudah mulai bergeser kepada munculnya kalkulasi kepentingan tertentu, bila kalkulasi ini sifatnya pragmatis dan bersifat material, maka jalinan relasi yang awalnya bermotif *amar makruf nahi munkar*, mulai bergeser pada tata nilai politik praktis.

Untuk memudahkan pembahasan motif masing-masing kiai membangun relasi dengan pejabat pemerintah dan alasan yang digunakan berikut disajikan dalam bentuk tabelnya;

Tabel 6. Potret klasifikasi kiai dan dasar berpikir dalam membangun relasi dengan pejabat pemerintah

No	Nama Kiai	Kelas Kiai	Motif Menjalin Relasi	Dalil yang dipedomani Kiai
1	KH. Anwar Iskadar	Kota, Provinsi, Nasional	Menegakkan kebenaran. Membimbing Ummat. Pendidikan Pesantren Kesejahteraan. Kontrol pejabat	<i>Fasad unNas bi fasadil Muluk Shinfani minan Nas idza fasadaa Fasadan Nas wa idza sholahaa soluhan Nas, ala Huma al Ulama wal Umara'</i>

No	Nama Kiai	Kelas Kiai	Motif Menjalin Relasi	Dalil yang dipedomani Kiai
2	KH. Kafabihi Mahrus	Kota	Amar ma'ruf Dakwah bil Hal Kontrol layanan ummat Silaturrahim	<i>Syarrul ulama alladzina ya'tuna al-umara' wa khairal umara' aladzina ya'tunal umara'</i>
3	KH. Fuad Nawawi Taqoyudin Yunus	Kecamatan Pesantren	Amar Makruf Nahi Mungkar Menata Ummat Pendidikan Agama	<i>Syarrul ulama alladzina ya'tuna al-umara' wa khairal umara' aladzina ya'tunal umara'</i>
4	KH. Wildan Muhalladun	Kecamatan Kota Kediri Kota	Menata Ummat Dakwah	<i>In nas 'ala dini mulukihim. Kuntum Khoiro Ummatin Ukhrijat Lin Nasi Takmuruna Bil Makruf Watauhauna 'anil Mungkari</i>
5	KH. Abu Bakar Abdul Jalil	Kecamatan-Kota	Amar Makruf Nahi Mungkar Silaturrahim	<i>Shinfani minan Nas idza fasadaa Fasadana Nas wa idza sholahaah soluhan Nas, ala Huma al Ulama wal Umara'</i>

No	Nama Kiai	Kelas Kiai	Motif Menjalin Relasi	Dalil yang dipedomani Kiai
6	KH. Kholil Asyari	Kecamatan Mojoroto	Dakwah Silaturahmi	<i>Shinfani minan Nas idza fasadaa Fasadan Nas wa idza sholahaa soluhan Nas, Kuntum Khoiro Ummatin Ukhrijat Lin Nasi Takmuruna Bil Makruf Watauhauna 'anil Munkari</i>

MOTIF PEJABAT MEMBANGUN RELASI DENGAN KIAI

Pada bab sebelumnya disebutkan bahwa Walikota HA. Maschut selalu mengawasi langkah pertama dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan melakukan *sowan* kepada sejumlah kiai. Hal ini dilakukan karena menurutnya kiai di Kediri adalah figur yang sangat dihormati oleh masyarakat, bahkan apa yang dikatakan oleh kiai ditaati oleh masyarakat. Ia menuturkan: Saya sangat menghormati para kiai, bukan hanya karena masyarakat di Kota Kediri sangat menghormatinya, dan masyarakat Kediri masih menganut paham paternalistik, sehingga apa yang di-dawuhkan kiai akan serta merta dilaksanakan oleh masyarakat, akan tetapi penghormatan saya kepada kiai lebih saya dasarkan pada penghormatan atas peran dan fungsi perjuangan kiai ditengah masyarakat, kiai itu lebih dekat dengan masyarakat pada umumnya, dan kiai juga yang mempunyai media bisa bertemu dengan masyarakat paling bawah sekalipun tanpa adanya birokrasi yang menghalanginya.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Maschut berusaha menjaga hubungan dengan para kiai di Kediri, dan hal itu semata-mata dilakukan demi keberhasilan program-program pemerintah.

Dalam perjalanan relasi pejabat pemerintah dan kiai di kota Kediri, ternyata banyak kiai yang titip pesan khusus pada pejabat, bisa program untuk pesantren, madrasah atau pembangunan masjidnya, menanggapi hal ini Maschut menyatakan:

“Atur saja itu dengan baik, permintaan program kiai biasanya berkaitan dengan eksistensi fisik dan infra struktur. Kiai juga manusia, eksistensinya akan tetap survive jika dilengkapi dengan sarana dan pra sarana untuk berjuang. Pesantren, sekolah, masjid, adalah hal yang sangat lumrah diperjuangkan kiai karena itulah dunia kiai, toh kemanfa’atannya juga untuk rakyat banyak”.

Sebagai walikota Maschut menyadari, bahwa kehadiran walikota merupakan legitimasi bagi kekiaian seseorang, di sisi lain walikota juga sering meminta pendapat kiai dalam mengambil keputusan. Banyak alasan yang bisa dibuat untuk urusan ini, mulai dari yang bersifat sosiologis sampai menyangkut keyakinan yang bernuansa teologis, diantara alasan yang menjadikan kyai dimintai pendapat adalah sifat ikhlas dan *waskito ing sak duruning winarah* : dalam hal ini Maschut mengatakan:

“Karena kiai orang yang dekat kepada Allah, dan lebih banyak ibadahnya, saya berkeyakinan Do’a mereka itu mudah dikabulkan oleh Allah, karenanya sering saya meminta kepada kiai untuk mendukung program-program yang saya canangkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan barang tentu saya juga menyelipkan permintaan yang bersifat pribadi kepada kiai untuk mendoakan saya, sehingga apa yang saya rancang dengan dorongan do’a kiai maka saya punya kemantapan batin, bila yang saya rancang salah, maka akan segera ada yang mengingatkan, tapi bila rancangan itu bermanfa’at maka akan didukung secara rame-rame”.

Dari penuturan diatas, setelah dilakukan analisis yang mendalam dengan menghubungkan pada kenyataan sosial yang ada di kota Kediri, sisi manfaat yang bisa dipetik oleh birokrat adalah bantuan kiai untuk membangun suasana dalam rangka penciptaan stabilitas tatanan sosial kemasyarakatan yang tengah berlangsung pada masa kepemimpinan yang tengah ia emban,

dan juga program-program yang tengah direncanakan bisa didukung oleh kiai, dan juga minta didoakan agar seorang pejabat bisa sukses dalam memimpin teritorialnya.

Demikian juga Suko Wahyono Widodo, Mantan Camat Kota, dalam wawancara dengan peneliti menggambarkan betapa pentingnya dukungan kiai bagi kesuksesan kerja yang beliau rancang, maka Suko Wahyono sering mengadakan pertemuan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat dibawah bimbingan kiai. Dan dari situ Suko pernah secara khusus mengalokasikan anggaran MUI kecamatan sebagai beban APBD.

Demikian halnya Camat Mojooroto M. Yasin, mengakui bahwa relasi dengan kiai dia bangun sebenarnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang ia emban. Relasinya dengan kiai dimulai saat ia dipercaya memegang jabatan Lurah Bujel Kecamatan Mojooroto. Saat itu ia mendapatkan tantangan yang cukup keras dari warga perihal pelunasan pajak, ia kemudian meminta bantuan Kiai Asror, salah seorang kiai yang cukup disegani di kelurahan itu, dan keengganan warga untuk membayar pajak berbalik dengan melunasi pajak yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini ia menyatakan:

“Menurut saya kiai harus dilibatkan dalam program pemerintah. Karena kiai masih memiliki magnet yang cukup besar. Apa yang disampaikan kiai akan dipatuhi warga. Saat saya menjabat Lurah di Bujel, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak, kemudian saya meminta bantuan kepada salah seorang kiai setempat (Kiai Asror) untuk memberikan nasehat kepada warga masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Nasehat kiai disampaikan setelah shalat Jum’at. Cara tersebut sangat manjur untuk mengubah pandangan warga yang awalnya menolak melunasi pajak”.

Dengan demikian menurutnya kiai harus dilibatkan dalam mendukung program pemerintah, menjadikan kiai sebagai mitra pemerintah akan menjadikan program-program pemerintah dipahami warga masyarakat sesuai dengan bahasa mereka. Berelasi dengan kiai menjadikan urusan murah dan lancar.

Atas dasar pembahsan ini maka setelah dianalisis secara mendalam dan bahas sesuai dengan tuntutan rumusan dan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan proposisi yang kedua. Proposisi itu dapat dideskripsikan sebagai berikut;

Alasan dan motif kiai menjalin relasi dengan pejabat pemerintah adalah untuk mengembangkan *syiar* agama, dan strategi dakwah secara grosir (luas jangkauannya). Dan alasan pejabat pemerintah menjalin relasi dengan kiai didasarkan pada penciptaan stabilitas sosial dan suksesnya program pemerintahan, karena kiai berposisi sebagai elit di masyarakat.

IMPLIKASI RELASI KIAI DAN PENGUASA

- **Implikasi Bagi Kiai**

Relasi kiai dan pejabat bila ditilik dari sisi manfaat ternyata membawa implikasi positif dalam pengembangan nilai dakwah kiai, pada dunia kekiaian bisa dilihat nyata antara lain dalam bentuk-bentuk tata nilai berikut:

Syiar Agama

Relasi yang telah terbangun antara kiai dan pejabat membawa dampak pada syiar Islam. Hal ini bisa terlihat dalam bentuk pelibatan kiai pada acara-acara PHBN dan PHBI dan acara-acara penting lainnya di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Kiai selalu terlibat dalam acara-acara itu tidak hanya sekedar membaca doa tetapi juga memberikan tausiyah dan penyampaian dakwah.

Kehadiran dan pertemuan kiai dalam acara-acara tersebut telah membuka akses untuk bisa terlibat lebih jauh dalam pengembangan syiar dan dakwah Islam di lingkungan pejabat pemerintah. Dampaknya kegiatan-kegiatan keagamaan telah menjadi tradisi dikalangan pejabat, dan kiai tidak lagi dicurigai oleh pemerintah, misalnya dalam pembacaan surat Yasin dan Tahlil setiap malam Jum'at, Istighasah, Pengajian umum, para pejabat berkenan hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut, bahkan untuk

beberapa kondisi ada pejabat yang menjadi penyandang dana untuk mencukupi kegiatan tersebut.

Relasi kiai dengan pejabat kemudian melahirkan kerjasama dalam bidang- kegiatan yang menjadi garapan kiai. Di antara kegiatan itu adalah:

1. Doa bersama pada awal dan akhir tahun di Masjid Agung Kota Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Cabang NU Kota Kediri dan di-*support* oleh Pemerintah Kota Kediri
2. Peringatan Tahun Baru Islam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PC NU Kota Kediri dan di-*support* Pemerintah Kota. Peringatan ini dimaksudkan untuk melestarikan budaya Islam sehingga kegiatan-kegiataannya berbentuk pagelaran seni dan budaya Islam, seperti Hadrah, Zaffin, jalan santai dan lain sebagainya.
3. Pengajian Rutin Ahad Kliwon di masjid Agung Kota Kediri Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengurus Cabang NU Kota Kediri dan di-*support* oleh Pemerintah Kota Kediri.
4. Membuka akses Lembaga Pendidikan Ma'arif, salah satu lembaga otonom di bawah NU bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri dalam penataan lembaga pendidikan formal yang ada dibawah yayasan yang berafiliasi pada NU.
5. Lakpesdam bekerjasama dengan Badan Perencanaan Kota (BAPEKO) dalam hal pemberdayaan SDM di wilayah Kota Kediri.
6. LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama) bekerjasama dengan Disnaker dalam penyaluran tenaga kerja, pihak LPNU tiap minggu memperoleh data *up date* lowongan tenaga kerja.
7. LPWNU (Lembaga Pertanahan dan Wakaf Nahdlatul Ulama) menyelesaikan pendataan tanah wakaf dan sertifikasi tanah wakaf milik NU.

Dukungan pemerintah kota Kediri terhadap kegiatan-kegiatan syiar Islam ataupun nilai dakwah yang terjadi selama ini, hakekatnya

merupakan implikasi langsung ataupun tidak dari adanya hubungan baik kiai dengan pemerintah. Bahkan, jika salah seorang pejabat lama tidak berkomunikasi dengan kiai, dicarikanlah kegiatan yang bisa menghadirkan kiai, misalnya tasyakuran atas suatu prestasi atau bahkan acara yang kelihatan tidak penting. Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjalin hubungan yang sedemikian rupa antara kiai dan pejabat pemerintah.

Ekonomi

Relasi yang terbangun antara kiai dan pejabat pemerintah dalam banyak sisi juga memiliki implikasi ekonomi atau material bagi kiai ataupun lingkungan kehidupan kiai bertempat tinggal. Implikasi ekonomi yang dimaksud di sini tidak selalu dalam pengertian kiai menerima uang *cash*, tetapi bantuan dalam bentuk alokasi anggaran pengembangan madrasah, pesantren, penambahan program pendidikan di pesantren, perhatian pada ustad pada madrasah in formal yang selama ini tidak pernah mendapatkan upah sebagaimana mestinya guru yang mendidik anak bangsa yang sedang tumbuh dan lain sebagainya, adalah sisi lain dari makna implikasi ekonomi dari bangunan relasi kiai dan pejabat dalam material dan ekonomi.

Untuk mempermudah bahasan dan melihat sebagian kecil implikasi ini bisa digambarkan sebagaimana tampak dalam tabel berikut.;

Tabel 7. Implikasi Relasi Kiai dan Pejabat Pemerintah

No	Nama Kiai	Jabatan di NU	Pejabat	Implikasi Agama	Program Fisik
1	KH. Anwar Iskadar	Mustasar Syuriah PCNU Kota Kediri	Wali Kota Kapolres Dandim Kajari Gubernur Menteri	Syiar Islam didukung pejabat Singkronkan Program pemerintah	Pengembangan Pesantren, izin operasional SMK al-Amien Program Guru Pondok

No	Nama Kiai	Jabatan di NU	Pejabat	Implikasi Agama	Program Fisik
2	KH. Kafabihi Mahrus	Syuriah Kota Kediri Ketua MUI	Wali Kota Gubernur Dandim Kapolres	Syiar Islam di dukung pejabat	Pengembangan Sanitasi, Perhatian Ustad dan Madrasah TPQ, Diniyah
3	KH. Wildan Mukhalladun	Syuriah kec. Kota Kediri, Tanfidiah PCNU Kota Kediri	Camat, Wali Kota Kapolres Dandim Kajari	Syiar Islam didukung pejabat Terlibat rencana program pemerintah	Pembangunan jalan desa menuju masjid Manisrenggo Listrik masuk desa Jalan Desa diaspal
4	KH. Fuad Nawawi	Syuriah Pesantren	Camat Pesantren Muspika	Syiar Islam didukung pejabat	Pembangunan Mushalla Guru diniyah
5	KH. Abu Bakar Abdul Jalil	Tanfidiah Kec., Tanfidiah NU Kota	Camat Mojoroto, Wali Kota, Kapolres Dandim	Syiar Islam didukung pejabat	Pembangunan Lokal 2 ruang Madrasah, P2SM
6	KH. Kholil Asyari	Syuriah Kec. Mojoroto	Camat Mojoroto, Wali Kota	Syiar Islam didukung pejabat	Pengemb Ekonomi Masyarat Penggemukan sapi batuan alat pertanian bagi komunitas masjid

Temuan di atas bukan yang pertama, hal yang sama juga ditemukan Ahmad Patoni dalam penelitiannya tentang Kiai pesantren di Kediri. Relasi membawa implikasi kepada kiai dan pesantren yang dimilikinya. Dengan relasi yang terbangun memungkinkan untuk melakukan komunikasi yang intensif, sehingga permohonan bantuan yang bersifat material pun

mudah mengalir ke pesantren sehingga terjadi perubahan fisik pesantren. Kondisi fisik pesantren yang demikian tentu tidak terjadi pada pesantren yang kiaiinya tidak menjalin relasi dengan pejabat. Pesantren yang kiaiinya tidak berafiliasi pada partai politik atau calon kepada daerah tertentu tidak mengalami perubahan fisik yang signifikan. (Achmad Patoni, 2007: 172-174).

- **Implikasi Bagi Pejabat pemerintah**

Sebagaimana pernah diungkap diawal bahwa Relasi kiai dengan pejabat pemerintah Kota Kediri bersifat mutualism, antar keduanya bisa saling memetik manfa'at pada sisi dan cara masing-masing. Disamping bagi kiai, bagi pejabat pemerintah juga membawa dampak yang positif. Manfa'at ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Stabilitas Sosial

Dalam masyarakat yang masih menganut pola paternalistik, kiai sangat berperan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kiai bisa mengkomunikasikan hal-hal rumit dengan bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Di sisi lain pemerintah menyadari posisi kiai yang begitu menentukan dalam mempengaruhi tindakan masyarakat serta dalam membimbing mereka untuk menerima langkah-langkah tertentu, atau kebijakan tertentu dari pemerintah, maka saat terjadi konflik dimasyarakat, pemerintah selalu melibatkan kiai untuk menengahi konflik tersebut.

Dalam hal penolakan atas Perda No. 11 tahun 2002 yang intinya berupa perubahan status desa menjadi kelurahan, oleh sebagian warga masyarakat di Kecamatan Pesantren kala itu (2002-2003), pejabat kecamatan MUSPIKA (Camat, Polsek, Danramil) meminta bantuan kiai untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut pada masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa menerima perubahan kebijakan tersebut.

Juga demonstrasi massal oleh buruh Pabrik Rokok Gudang Garam dengan jumlah karyawan yang tidak kurang dari 30.000 (tiga puluh ribu) karyawan pada tahun 2000, Kiai berhasil menjadi mediator konflik antara pihak manajemen pabrik rokok Gudang Garam dan para buruh dalam aksi mogok massal tersebut. Tindakan memediasi mogok karyawan ini penting karena akibat aksi ini membuat ekonomi rakyat kecil di kota Kediri hampir lumpuh (*Kompas*, 12 April 2000).

Keberhasilan kiai untuk menjadi penengah dalam penyelesaian masalah di atas menunjukkan bahwa kiai di kota Kediri masih memiliki “magnet” di tengah-tengah masyarakat dan mereka masih menganggap figur kiai sebagai pihak yang bisa dipercaya, dan ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi figur kiai dari karyawan yang lagi berontak.

Dukungan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Keberhasilan pembangunan suatu daerah atau suatu negara hanya bisa dicapai apabila masyarakat dalam kondisi damai dan bisa saling kerjasama antar beberapa kelompok masyarakat. Sehingga pejabat pemerintah sangat berkepentingan dengan penciptaan suasana seperti itu. Di sinilah kemudian pemerintah melibatkan para kiai untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah.

Kiai dalam berbagai pengajian, selalu menyelipkan pesan-pesan pemerintah untuk menyampaikan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mulai kebijakan yang kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan sampai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI, dan lain sebagainya.

Keberhasilan kiai menjadi pendukung program pemerintah juga menunjukkan betapa “kiai” dalam konstruksi klasifikasi masyarakat Kediri memiliki posisi cukup istimewa dalam level dan lingkup komunitas yang melingkupinya. Maka bila kondisi ini dilihat

secara teoritik dalam ranah sosiologi, sangat sejalan dengan apa yang pernah digambarkan Peter Senge dalam *Schools That Learn*, (Salim, 2002: 3) menyatakan bahwa manusia dalam menapaki pola dan tatanan kehidupan bersama ditengah masyarakat yang mempunyai keragaman kebiasaan (adat istiadat) yang dijunjung tinggi maka dalam perjalannya secara bersama akan menjumpai 3 (tiga) situasi yang merupakan tahapan psychologis.

Ketiga tahapan itu adalah;

- 1) *the learning classroom*; manusia akan belajar dalam lingkungan kelas sehingga melibatkan unsur guru, orang tua dan murid,
- 2) *the learning school*; manusia akan belajar dalam lingkungan sekolah sehingga melibatkan kepala sekolah, kelompok pengajar, murid di kelas lain, dan pegawai administrasi,
- 3) *the learning community*; manusia akan belajar dari lingkungan komunitasnya sehingga mencakup peran serta masyarakat, kelompok-kelompok belajar sepanjang hayat, birokrasi yang mendukung, sumber informasi yang luas.

Dengan demikian secara empirik kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak bisa lepas dari peran ketiga lingkungan belajar tersebut. Manusia akan mulai belajar dan mencermati dirinya, terbentuknya kesadaran, pengalaman dan keberanian untuk menggunakan potensi yang dimilikinya. Dari kerangka pola pikir demikian ini, apabila hakikat kiai adalah sebuah institusi, dan setiap institusi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena sosial kemasyarakatan dan sosial politik di luarnya, maka sangat relevan bila Duverger menyatakan bahwa institusi adalah model hubungan sesama manusia dimana dalam hubungan-hubungan itu setiap individu dapat mengambil polanya. Dan dengan pola itu, akan tumbuh stabilitas sosial, kelangsungan dan kohesifitas (Maurice Duverger, 1993: 106-108).

Kiai sadar atas potensinya untuk berkomunikasi, mempengaruhi dan membimbing masyarakat, sehingga bisa berperan sedemikian rupa tidak hanya dalam bidangnya, tetapi dalam bidang tatanan sosial kemasyarakatan yang lebih luas, kiai juga memiliki potensi untuk mengajak bagaimana membuat kehidupan bersama menjadi lebih baik.

- **Klasifikasi Kiai dalam Relasi dengan Pejabat Pemerintah Kota Kediri**

Pejabat pemerintah kota Kediri berpandangan, tinggi rendah, besar kecilnya pengaruh dan kharisma kiai bagi masyarakat ketika berinteraksi dengan pejabat pemerintah kota Kediri muncul “klasifikasi kekiaian”. Kelas kiai ini ternyata sejalan dengan besar kecil dan tinggi rendah posisi jabatan yang sedang diemban oleh pejabat. yang melakukan relasi. Klasifikasi ini muncul didasarkan atas kewibawaan atau kharisma dimiliki kiai.

Klasifikasi ini bila ditilik dari konstruk tatanan sosial masyarakat dapat dikatakan sejalan dengan teori Aristoteles yang menggambarkan bahwa di dunia ini ada tiga kelas utama yang menyusun kehidupan dan akan selalu tergambar dalam setiap masyarakatnya, pengkategorian kelas menurut Aristoteles ini berdasarkan atas status sosial yang mereka peroleh dari ukuran ekonomi yaitu seberapa besar kekayaan yang dipunyainya, dan ukuran pengaruh serta kharisma yang dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat tersebut.

Ketiga kelas tersebut adalah kelas atas (kelas kaya), kelas bawah (kelas miskin) dan kelas yang ketiga, yang berada diantara kelas kaya dan kelas miskin yakni kelas menengah. Kelas menengah merupakan kelas yang selama ini membuat kestabilan dalam tatanan masyarakat. Kelas menengah ini memiliki posisi penting dalam rangka menjaga kestabilan masyarakat.

Bila dihubungkan dengan konteks pembahasan ini, nampaknya bisa dijelaskan bahwa pendapat Aristoteles tersebut

mencoba membuat kategori masyarakat berdasarkan faktor ekonomi. Menurut Sanderson, sistem stratifikasi sosial berkenaan dengan adanya dua atau lebih kelompok dalam suatu masyarakat tertentu, yang anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang tidak sama bisa juga menimbulkan klasifikasi dalam tatanan relasi yang dibangun dalam konstelasi masyarakat yang demikian. (I Wayan Suyadnya, 2009).

Munculnya klasifikasi kiai di kota Kediri telah menunjukkan adanya pengelompokan kiai ke dalam satu status sosial tertentu, dan bisa mengalami pergeseran turun, kesamping ataupun naik setelah mengalami proses tertentu. Kondisi ini meneguhkan atas suatu teori konstruksi sosial masyarakat, dimana dalam teori itu menyebutkan bahwa posisi seseorang dalam hubungan sosial kemasyarakat atas kondisi tertentu bisa naik (mobilitas sosial vertikal naik) ataupun turun (mobilitas sosial vertikal turun) atau hanya bergeser (mobilitas sosial horizontal).

Di Kota Kediri seorang camat atau walikota yang baru saja dilantik akan segera mencari-cari siapa yang pantas disebut *kiaine camat*. Cara untuk menemukan itu tidak dengan bertanya kepada camat sebelumnya tetapi cukup kepada staf atau pejabat yang setingkat dengan camat, misalnya Kapolsek. Begitu juga dengan walikota. Apa yang dilakukan oleh camat ini kemudian melahirkan Klasifikasi kiai sebagai berikut:

1. *Kiaine Camat* adalah kiai yang dikunjungi, dirujuk oleh camat dan aparat yang setingkat dengannya, dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat pemerintah. Kiai kelas ini menjadi mitra camat, ia sering dimintai pendapat tentang persoalan masyarakat, ia sering diundang dalam acara tingkat kecamatan, misalnya PHBN, PHBI, Resepsi Kantor dan lain sebagainya.
2. *Kiaine Walikota* adalah kiai yang dikunjungi, dirujuk Walikota dan aparat yang setingkat dengannya, misalnya Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dll.

3. *Kiaine Gubenur* adalah kiai yang dikunjungi oleh Gubernur dan aparat yang setingkat dengannya, misalnya Kapolda, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. *Kiai Tingkat Nasional* kiai yang dikunjungi oleh Presiden dan aparat yang setingkat dengannya, misalnya Ketua DPR, Ketua MPR, Menteri, dan lain-lain.

Klasifikasi di atas tidak berlaku secara ketat, bisa saja seorang kiai menempati dua stratifikasi sekaligus, misalnya kiai tingkat Kota dan Provinsi. Hal ini terjadi karena proses sosial yang terus berjalan dalam bentuk kompetisi dalam wilayah pengaruh dan kharisma diantara kiai.

SUMBER KEWIBAWAAN KIAI

Klasifikasi kiai muncul karena adanya kewibawaan dalam diri kiai yang membedakan antara kiai dengan kelompok masyarakat lain atau bahkan dengan kiai lain. Kharisma itulah yang menjadikan kiai sebagai elit di tengah-tengah masyarakat. Dalam pandangan Etzioni, elit merupakan aktor yang memiliki kekuasaan, karena ia sebagai kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam masyarakat (Susanne Keller, 1995: 5).

Tesis peran dan posisi elit kiai dalam tradisi NU bukanlah sesuatu yang aneh, proses seleksi ketokohan dikalangan masyarakat NU bukanlah sesuatu yang ganjil. Proses seleksi ketokohan kiai berlangsung secara alamiah melalui tradisi suksesi dalam kepengurusan organisasi NU dalam berbagai tingkatannya, sehingga kiai yang lolos menjadi pemimpin umat merupakan elit yang terpilih dan sudah teruji kredibilitasnya pada tingkatan tertentu dalam kiprah kehidupan nyata dalam bermasyarakat, dan proses-proses itu sekaligus menjadi bagian tolok ukur dan standart tertentu yang bisa bermakna sebagai sumber “kewibawaan” dalam jagad kekiaian.

- **Sebagai Pengurus Organisasi NU**

Di kota Kediri, menjadi pengurus organisasi NU menjadi bagian dari salah satu alasan seseorang untuk diberi amanah sebagai tokoh sesuai dengan level atau tingkat dalam struktur keorganisian dalam suatu wilayah pengabdian. Pengurus NU tingkat kecamatan akan menjadi kiaiine camat, pengurus NU tingkat Kota akan menjadi kiaiine Walikota. Saat seorang menjadi pengurus NU tingkat kelurahan/desa, maka dia tidak menjadi kiaiine camat atau walikota. Hal ini sebagaimana dalam pernyataan KH. Fuad Nawawi, perlakuan yang diterima dari Camat Didik Catur berbeda dengan yang diterima oleh perlakuan Camat pada masa Rahmat Basuki.

Kenyataan demikian tidak hanya diamini oleh para kiai dalam menjadi informan dalam penelitian ini tetapi juga pejabat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh M. Yasin Camat (mantan camat Mojojoto):

“Saat saya menjabat camat Mojojoto sebenarnya Gus Ab (KH. Abu Bakar Abdul Jalil) yang pantas disebut sebagai kiai di kecamatan, karena saat itu ia adalah Pengurus MWC NU Mojojoto, sering berkonsolidasi dengan saya dan pihak Muspika, Kiai Asror yang tidak memiliki jabatan di NU adalah kiai kelurahan, sedangkan KH. Idris Marzuki, saya tidak pernah berkomunikasi karena beliau sudah tinggi, atau kiai tingkat provinsi bahkan nasional, karena kegiatan-kegiatan yang diikutinya adalah tingkat provinsi dan nasional, maka pejabat yang berkunjung kepada beliau adalah setingkat Gubernur, Menteri bahkan wakil Presiden”.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa posisi orang dalam jabatan NU, telah menjadikannya menjadi kiai di teritorial jabatan itu, di sinilah kemudian muncul istilah kiaiine camat, kiaiine Walikota. Bahkan ketika seorang kiai menjadi pengurus dalam level atas kekiaiannya juga ikut berubah. Artinya teritorialnya juga mengalami perubahan, sehingga ketika seorang kiai sebelumnya menjadi pengurus NU tingkat kecamatan menjadi kiaiine camat, maka setelah kiai tersebut menjadi Pengurus NU tingkat Kota/

Kabupaten, ia akan menjadi kiai di Walikota, di sinilah ternyata ada tangga kenaikan kelas dalam dunia kiai di Kota Kediri.

- **Kualitas Pribadi**

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seorang kiai, apakah ia hanya belajar di satu Pesantren saja atau beberapa pesantren diberbagai tempat, atau belajar secara formal mulai tingkat dasar sampai di Perguruan Tinggi atau tidaknya akan menjadi bagian yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya stratifikasi yang dimiliki oleh kiai. Demikian halnya kiai yang memiliki dan menjadi pengasuh pondok pesantren juga ikut mengangkat kelas seorang kiai. Termasuk kategori kualitas pribadi adalah adanya kemampuan menjalin komunikasi yang luas dengan pihak lain.

Secara akademik, KH. Anwar Iskandar adalah lulusan pesantren, yang juga pernah mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi, dan juga keturunan kiai, mengasuh pesantren, sehingga kelasnya terus merangkak dari kiai kota menuju kiai provinsi bahkan nasional. Lain lagi dengan KH. Kholil Asy'ari, ia adalah alumni pesantren Lirboyo, keturunan kiai, memangku masjid, tetapi tidak mengasuh pesantren dan bukan alumni PT, sehingga kelasnya sebatas kecamatan.

- **Aktifitas Sosial Politik**

Aktifitas sosial politik juga ikut mempengaruhi posisi kelas seorang kiai pada level mana seseorang kiai itu berada, seorang kiai yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan dan aktifitas politik pada tingkat provinsi dan nasional akan menjadikan diri seorang kiai tersebut pada level teritorial itu, misalnya kiai yang menjadi pengurus partai tingkat pusat atau provinsi, maka kelasnya akan berada pada level itu. Di Kediri kiai yang masuk dalam kategori ini adalah KH. Anwar Iskandar, beliau pernah menjadi Ketua Dewan

Syuro PKB Jawa Timur, kemudian Ketua DPP PKNU, dan Juga pernah menjadi Ketua Fraksi di MPR RI., juga KH. Idris Marzuki, beliau pernah masuk jajaran Pengurus pusat PKB dan pengurus PBNU.

Dari ketiga sumber kewibawaan tersebut, dalam kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua kiai memiliki semua sumber kewibawaan tersebut bisa dikuasanya. Akan tetapi, semakin lengkap sumber kewibawaan seorang kiai, akan semakin tinggi pula pengaruh kiai dan akan semakin tinggi pula apresiasi masyarakat yang diberikan kepada kiai tersebut.

Namun demikian sumber-sumber kewibawaan tersebut tidak begitu saja bisa diperoleh seseorang kiai, melainkan sumber tersebut didapat melalui proses sosial yang lazim dalam jagad kekiaan yang biasa disebut dengan *Riyadhoh*.

Riyadhoh adalah sebuah proses sosial dalam dunia kiai dan santri yang berupa kegiatan menguji diri atas kemampuan tertentu dengan mengurangi dan membatasi diri dari pemenuhan kebutuhan dasar kemanusiaan, seperti makan, minum dan lain sebagainya, juga keharusan mempertinggi latihan yang bersifat bathiniyah untuk mendekati diri pada yang Maha Kuasa.

Sebagai wujud dari suatu tatanan masyarakat yang berasal dari proses sosial, maka dalam dunia kiai juga dikenal adanya semacam kompetisi meskipun tidak secara nyata nampak dalam ruang publik, kiai bisa mencapai posisi puncak sumber kewibawaan setelah berhasil melalui beberapa perjuangan untuk meraih sumber-sumber kewibawaan tersebut. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan sebuah perjuangan dan kompetisi sesama kiai yang dibangun melalui legitimasi umat.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan kiai baik secara individu maupun kolektif, mempunyai kadar dan intensitas yang berbeda-beda, kualitas hasil kerja dalam memberikan pengaruh pada masyarakat, juga media, sarana modal sosial yang dapat digunakan untuk berbuat dan mengaplikasikan strategi ditengah

masyarakat, juga menjadi penyebab dalam menjadikan kiai berada pada tangga sosial yang berbeda pula.

- **Sebagai Putra Kiai**

Dalam dunia pesantren putra kiai biasa disebut dengan “Gus” bila laki-laki, dan “Ning” bila perempuan. Gus dan Ning dalam dunia pesantren memiliki posisi istimewa karena merupakan calon penerus sang “bapak”. Maka dari itu ia menempati posisi terhormat, bahkan ada pemahaman dikalangan pesantren, keharusan menghormati putra kiai sama halnya dengan keharusan menghormati kiai itu sendiri.

Dalam konteks ini, secara sosiologis keberadaan sebagai putra kiai merupakan modal tersendiri bagi seseorang untuk memiliki sumber kewibawaan yang diturunkan dari sang bapak, selanjutnya kewibawaan itu akan menjadi bertambah sempurna bila di kemudian hari setelah dewasa sang anak bisa melengkapi kewibawaan tersebut dengan sumber-sumber kewibawaan lainnya.

Di sinilah biasanya terjadi kompetisi antar kiai dalam memberikan aktualisasi diri di tengah masyarakat dari sumber kewibawaan yang dimiliki masing-masing kiai. Namun kompetisi ini jarang sekali sifatnya terbuka, kompetisi terjadi hanya dalam ruang-ruang sempit yang dimiliki oleh kiai sebagai bagian dari tokoh publik yang harus mempertimbangkan psikologi umat. Namun apapun bentuknya kompetisi itu, dalam konteks ini tetap sejalan dengan konsepsi Duverger yang menyatakan bahwa perjuangan politik untuk meraih posisi utama tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan “persaingan”. (Maurice Duverger, 1998, hlm. 198)

Untuk mempermudah bahasan sifat hubungan kiai dengan pejabat dari sisi latar belakang dan implikasi pada penempatan kiai pada level pejabat tertentu, berikut disajikan dalam bentuk tabel;

Tabel 8. Sifat Hubungan Kiai dan Pejabat Pemerintah

No.	Nama Kiai	Latar Belakang Pendidikan Kiai	Klasifikasi	Sifat Hubungan
1.	KH. Anwar Iskadar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Pontren, PTN 2. Keturunan Kiai Mustasyar NU Kediri 3. Aktifis Partai Politik 4. Aktifis PKUB 5. Pengasuh Pesantren 6. Luwes, Orator dan cerdas 	Provinsi, Nasional	Terbuka
2	KH. Kafabihi Mahrus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Pondok Pesantren 3. Sekolah Umum 4. Keturunan Kiai 5. Pengurus NU 6. Ketua MUI 7. Pengasuh Pesantren 	Kota	Semi Terbuka Sebatas lembaga dan persoalan umat
3	KH. Wildan Mukhalladun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alumni Pesantren 2. Keturunan kiai 3. Pengurus NU Cabang 4. Tokoh Masyarakat 5. Komunitor di masyarakat 	Kecamatan Kota Kediri	Terbuka
4.	KH. Fuad Nawawi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Pondok Pesantren 3. Aktifis NU 	Kecamatan	Terbuka

No.	Nama Kiai	Latar Belakang Pendidikan Kiai	Klasifikasi	Sifat Hubungan
5	KH. Abu Bakar Abdul Jalil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Pondok Pesantren 3. Sedang kuliah 4. Pengurus Cabang NU 5. Ketua PKNU Kota Kediri 6. Pengasuh Pesantren 7. Da'i di Masyarakat 	Kecamatan Kota	Terbuka
6	KH. Kholil Asyari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Pesantren 2. Pendidikan Umum MA 3. Pemimpin Umat 	Kecamatan	Terbuka

Dalam tabel di atas dapat dipahami latar belakang pendidikan seorang kiai, kecakapan melakukan komunikasi massa dan diplomasi dengan pejabat membawa bentuk dan warna peran yang beragam dari beberapa kiai yang selama ini membangun relasi dengan pejabat pemerintah, sekaligus dapat digambarkan peran sosial dan peran lainnya yang bisa di bangun dalam relasi tersebut.

Sebagai bagian akhir pembahasan masalah penelitian ini, berikut dideskripsikan proposisi yang dapat ditemukan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ketiga dalam penelitian ini.

Proposisi itu dapat dideskripsikan sebagai berikut;

Relasi kiai dan pejabat pemerintah melahirkan klasifikasi kiai sesuai dengan level jabatan pejabat pemerintah, dan tinggi rendahnya ukuran level tersebut didasarkan pada sumber kewibawaan yang dimiliki oleh seorang kiai.

Sumber kewibawaan kiai untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat, antara lain; Sebagai putra kiai, Kualitas pribadi, Aktifitas sosial dan politik, serta pemegang jabatan dalam strata kepengurusan organisas NU, mulai dari ranting hingga pengurus besar

REKONSTRUKSI MODEL TEORITIK

Untuk melengkapi pembahasan masalah penelitian ini, bagian akhir ini disajikan bahsan rumusan teoritik yang sifatnya lebih konkrit tentang relasi kiai dan pejabat pemerintah Kota Kediri dari sisi penggunaan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan penggunaan teori itu dapat dikemukakan sebagai berikut;

- **Teori Konstruksi Sosial**

Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa kemanusiaan manusia yang spesifik dan sosialitasnya memiliki jalinan yang kokoh, sehingga tidak mudah melepaskan satu sama lainnya. Manusia adalah *homo sapiens* sekaligus *homo socius* (Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 1990: 73). Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, antara individu dan sosial saling mempengaruhi.

Dalam konteks penelitian ini, upaya untuk memahami pertimbangan kiai menjalin relasi dengan pejabat pada dasarnya adalah usaha untuk menafsirkan konstruksi kiai dalam fokus tindakan membangun relasi dengan pejabat pemerintah. Tindakan dan Pertimbangan-pertimbangan kiai dalam menjalin hubungan dengan penguasa adalah sebuah fenomena yang lahir dari kesadaran kiai melalui proses intensional subyek melalui intersubyektivitas yang dipresepsikan oleh kiai.

Jika pada suatu saat seseorang bisa bertindak sama seperti banyak orang lain maka ia juga menyadari kemungkinan untuk bisa bertindak yang tidak sama. Bertindak sama atau tidak sama

diputuskan setelah ia berinteraksi, bergaul dan dipengaruhi oleh masyarakatnya; dan itulah yang disebut realitas yang terbentuk secara sosial (Doyle Paul Johson, 1994: 66).

Dengan demikian menurut teori ini, individu (kiai) merupakan produk dan sekaligus pencipta pranata sosial. Agama sebagai pranata sosial diciptakan untuk manusia dan agama juga mengembangkan realitas obyektif melalui konstruksi klasifikasi. Secara empirik, pranata-pranata itu selalu berubah sejalan dengan perubahan kepentingan individu (Peter L. Berger, 1991: 45). Dalam konteks ini, konstruksi realitas secara sosial, agama bisa dikatakan melayani dua tujuan penting: menyediakan makna dari realitas dan sekaligus meligitimasi realitas tersebut (Poloma, margaret 1992: 312).

Relasi kiai dengan pejabat dilakukan atas dasar pertimbangan yang bersifat sosial dan *ta'abbudi*, karenanya dasar pijakannya dengan legitimasi-legitimasi teks keagamaan, yang terungkap dalam wawancara disamping kitab salaf juga Al Qur'an, satu diantaranya perintah *amar ma'ruf nahi munkar* (QS. Ali Imran: 110, an-Nakhl: 125, at Taubah: 71). (Jorgens Meyer 1995: 79-91) menyatakan bahwa agama dan kekuasaan (negara) memiliki kemampuan untuk mengarahkan ketaatan masyarakat dan mengabsahkan kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan kenapa dakwah kiai itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan formal (pejabat), karena mereka memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, kalau pimpinannya sudah bisa menerima dakwah kiai, maka bawahannya termasuk masyarakat akan dengan mudah menerima.

Di sisi lain kasus partisipasi kiai dalam partai politik baik sebagai pengurus aktif maupun simpatisan (KH. Abu Bakar Abdul Jalil, KH. Cholil Asy'ari, KH. Anwar Iskandar), kemudian partisipasi untuk dukung mendukung dalam Pilkada, Pemilu legislatif atau pemilu presiden adalah salah satu bentuk partisipasi kalkulatif. Artinya partisipasi tersebut selalu dihitung atas dasar untung

rugi. partisipasi demikian memang memberikan dampak ekonomi bagi kiai, dalam hal ini pengembangan masjid, pondok pesantren atau lainnya. Namun di sisi lain keputusan kiai sangat beresiko, kiai dianggap tidak istiqomah dan kemudian akan ditinggalkan oleh ummat.

Ekspektasi masyarakat, termasuk pejabat pemerintah terhadap kiai sangat besar dalam penempatan kiai sebagai pembimbing dan penuntun ummat, artinya kiai masih dianggap sebagai panutan, sehingga partisipasi kiai dalam partai politik dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang kurang pantas, karena pemihakan kiai sudah tidak lagi kepada umat atau masyarakat tetapi kepada kelompok tertentu saja. Karena besarnya ekspektasi tersebut, bila suatu ketika ditemukan masalah dalam pemenuhan harapan ini, reaksi yang muncul dari masyarakat adalah bentuk reaksi yang sebaliknya, sehingga ekspektasi ini bisa saja justru menjadi sesuatu yang kontra produktif.

- **Teori Elit**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kediri, kiai masih menjadi elit bagi masyarakat. Ia dihormati dan menduduki posisi sebagai pemimpin umat, bahkan dalam beberapa kasus ia menjadi panutan melebihi pemimpin-pemimpin lainnya. Etzioni menyatakan bahwa elit merupakan aktor yang memiliki kekuasaan, sehingga dikatakan sebagai orang atau kelompok yang memegang posisi terkemuka dalam masyarakat (Susanne Keller, 1995: 5). Tesis peran dan posisi elit kiai dalam tradisi NU bukanlah sesuatu yang aneh, proses seleksi ketokohan NU bukanlah sesuatu yang ganjil. Proses seleksi ketokohan kiai berlangsung secara alamiah melalui tradisi NU, sehingga kiai yang lolos menjadi pemimpin umat merupakan elit yang terpilih dan sudah teruji kredibilitasnya pada tingkat lokal.

Sebagai elit, kiai menempati posisi strategis dalam masyarakat karena kiai memiliki otoritas, bahkan keberadaannya tidak hanya diakui sebagai elit sosial kemasyarakatan dan tatanan sosial politik dalam komunitas NU dan pesantren, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat yang lebih luas.

Masyarakat Kediri masih menganut pola paternalistik. Dalam kaitannya dengan kiai, masyarakat melibatkan kiai dalam setiap aktifitasnya, mulai proses kelahiran, pernikahan, kematian dan masalah-masalah sosial lainnya. Karena alasan elit inilah pejabat berusaha menjalin relasi dengan kiai. Dalam masyarakat yang demikian, pejabat mau tidak mau harus menggandeng kiai demi suksesnya program-program pemerintah, jika tidak maka berat program pemerintah bisa berhasil. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa posisi elit bagi kiai juga diakui oleh elit lain.

Cukup banyak program pemerintah yang berhasil dengan menggandeng atau melibatkan kiai, mulai masalah resolusi konflik sampai masalah kesehatan, kiai turut serta dalam mensukseskan program-program tersebut.

Posisinya sebagai elit masyarakat juga telah menjadikan kiai sebagai “magnet” pendulang suara dalam konstelasi politik lokal maupun nasional. Saat Pilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub) tahun lalu, kiai menjadi rebutan para kandidat, begitu juga saat terjadi Pilihan Walikota Kediri, kiai juga menjadi rebutan para kandidat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagai elit, kiai masih diperhitungkan baik pada level lokal maupun nasional. Di sinilah kiai sebenarnya bisa berperan (*play maker*) menjadi kekuatan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat seluas-luasnya.

- **Teori Interaksi Simbolik**

Dari pengamatan yang telah peneliti lakukan selama penelitian berlangsung, telah menemukan bentuk relasi sosial antara kiai dan pejabat pemerintah kota Kediri bergerak tidak

secara linier (fluktuatif), apabila hal ini dikorelasikan dengan teori sosial yang ada, maka kondisi semacam ini sejalan dengan teori interaksi simbolik.

Secara umum teori interaksi simbolik (Blumer 1986:1) menyebutkan *it has come into use as a label for a relatively distinctive approach to the study of human group life and human conduct*. Menurut Blumer sebagaimana dikutip oleh Poloma (2003:258) merumuskan dalam teorinya tentang interaksi simbolik yang bertumpu pada tiga premis:

1. Manusia melakukan sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu sendiri.
2. Makna sesuatu itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Kemudian makna-makna tersebut disempurnakan ketika proses interaksi sosial berlangsung.

Pemaknaan dan pijakan kerangka pikir yang dilakukan oleh kiai untuk membangun relasinya dengan pejabat pemerintah adalah dalam kerangka menjalankan perintah ajaran agama, atau lebih spesifik lagi dalam rangka mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Jadi perubahan suatu perilaku tertentu ke perilaku lainnya akan selalu didasarkan pada dalil (petuntuk agama). Inkonsistensi dalam sikap atau dalam kalimat, fluktuasi relasi kiai dengan pejabat harus dipahami dengan merujuk pada prinsip ini. (M. Ali Hasan, 1994). Jika tidak maka yang terlihat dalam dunia kiai hanya oportunistik.

Dengan landasan itu, maka dapat ditilik lebih dalam bahwa perubahan sikap kiai dalam menyikapi dan melakoni kehidupan bersosial ditengah masyarakat adalah perubahan paradigmatik, karena fakta fikih memberikan keleluasaan kepada kiai untuk berpindah dari satu paradigma ke paradigma yang lain.

Dengan demikian dunia kiai sebenarnya adalah sangat dinamis. Karena perubahan sikap kiai itu hampir selalu didasarkan

atas norma-norma tertentu yang diyakininya sebagai sesuatu yang transendental dan dikonseptualisasikan dalam kerangka ajaran Islam dan pemahaman kiai terhadapnya.

Di sinilah kemudian kiai bisa keras dan tidak mau kompromi ketika mereka dihadapkan pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam, namun ia juga bisa menjadi yang paling akomodatif ketika hal-hal itu diterima dalam pandangan Islam.

Hanya sedikit yang jadi masalah model kerangka berpikir kiai itu yang belum bisa seragam, adakalanya kiai tertentu mengambil keputusan bisa tapi oleh kiai yang lain dikatakan tidak, keduanya sama-sama punya otoritas, sehingga sama-sama merasa boleh dan bisa mengaplikasikan hasil pijakan kerangka berpikir masing-masing, meski tidak sama. Bila sudah masuk wilayah yang demikian ini, kadang kala membuat masyarakat terbelah ada yang ragu dan ada yang mengikuti saja.

Dan dari sinilah kemudian lahir berbagai versi interpretasi *amar ma'ruf nahi munkar*. Interpretasi terhadap *amar ma'ruf nahi munkar* antara satu kiai dengan kiai lainnya kemudian memunculkan perbedaan dalam pola berinteraksi dengan pejabat. Ada di antara kiai yang sangat longgar atau terbuka dalam menjalin relasi dengan pejabat, yang berlanjut pada komunikasi-komunikasi pribadi, sementara ada kiai yang sangat tertutup, ia hanya berkomunikasi dalam acara-acara resmi, atau dalam wadah organisasi dan tema yang dibahaspun harus jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Baqi, Muhammad Fuad, *Al Mu'jam al Mufahras li alfad al Qur'an al Karim*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Abdullah, Haswab, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, Surabaya: Al Ikhlas, tt.
- Abdurrahman, Muslim, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Atjeh, Aboebakar, *Perbandingan Mazhab Ahlu Sunnah Wal Djama'ah*, Jakarta: Yayasan Baitul Mal, 1968
- Adiana, Yoga, K.H. Mohd. Ilyas Ruhiat, *ajengan santun dari Cipasung: membedah sejarah hidup dan wacana pemikiran Islam keumatan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999
- al Hasan, Nizham ad Din, *Tafsir Gharaib al Qur'an wa Raghaib al Furqan*, juz v, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996
- al Majlisi, Syeikh Muhammad Baqir, *Bihar al Anwar al Jami'ah li Durar al Akhbar al Aimmah al Athar*, juz. II, Beirut: Dar al Ihya' Turats al Arabi, tt.
- al Qurthubi, Al Imam Abu Abd Allah Muhammad ibn Ahmad Al Anshari, *al Jami'li al Ahkam Bayan al Qur'an*, Juz. XIV, Beirut,: Dar al Kutub al Ilmiyah, tt.

- al Zauhaili, Wahbah, *Tafsir al Munir fi al Aqidah wa asy Syari'ah wa al Manhaj*, Juz. XXII, Beirut: Dar al Fikr al Mua'ashr, 1998
- Ali, Fahry dan Bahtiar Efendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1992
- Almond, Gabriel A., "Kelompok Kepentingan dan Partai Politik" dalam Mochtar Mas'ud & Andrews, Colin Mac, *Perbandingan Sistem Politik*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Amin, M. Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: al Amin Press, 1996
- Amin, M. Masyhur, *Teologi Pembangunan: Paradigma Baru Pemikiran Islam*, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.
- Amin Rais, *Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1991
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kiai Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang : Kalimasahada Press, 1993
- Asep Muhyiddin, Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 124-125
- Atjeh, Aboebakar, *Perbandingan Mazhab Ahlu Sunnah Wal Djama'ah*, Jakarta: Yayasan Baitul Mal, 1968.
- Attarmizi, Yoga Adiana, M. Yazid Kalam, K.H. Mohd. Ilyas Ruhiat, *Ajengan Santun Dari Cipasung: Membedah Sejarah Hidup Dan Wacana Pemikiran Islam Keumatan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999

- Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Fil Islam Wa Adillatuha*, Beirut, Dar al Fikri, 1989
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *Tafsir Klasifikasi atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1990
- , *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Klasifikasi*, Jakarta: LP3ES, 1991
- , dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3S, 1990
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990
- Blau dan Meyer dalam Setiawan, Akhmad, *Perilaku birokrasi dalam pengaruh paham kekuasaan Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bootormore, T.B., *Elite dan Masyarakat*, terj. Abdul Haris, Sayid Umar, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999
- , *NU, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993
- Bungin, Burhan (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2004, hlm. 62-63.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Charon, Joel M., *Symbolic Interactionism: an Interpretation*, New Jersey: Prentice Hall, 1989

- Daulay, Haidar P., *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Daymon, Christine dan Immy Holloway, *Riset Kualitatif: Metode-metode Riset Kualitatif*, Yogyakarta: Bentang, 2008
- Dhofier, Zamahsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1993
- Faisal, Sanapiah, "Varian-varian kontemporer Penelitian Klasifikasi" dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Visualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Faqih, Ahmad, "Perubahan Wewenang Kharismatik Kiai" dalam *Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa*, Semarang: Gama Media & IAIN Walisongo, 2004
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terj. Farid Wajidi & Mulni Adelina Bachtar, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Formen, Ali, "Etnografi: James Spradley dan Alu Maju Bertahap" dalam Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Klasifikasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989
- , *The Religion of Java*, New York: Free Press Glencoe, 1960
- Guba, Egon (ed.), *The Paradigm Dialog*, London: Sage, 1990.
- Hadi W.M., Abdul, "Syeikh Hamzah Fansuri" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. IV Vol. V., tahun 1994.

- Haidar, M. Ali, *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Hamka, *Tafsir al Azhar, Juz. XXII*, Jakarta: Psutaka Panjimas, 2002.
- Haramain, Malik dan MF Nur Huda, *Menuju Transisi Demokrasi, Refleksi dan Laporan Pemantauan Pemilu 1999*, Jakarta: JAMPPI, UNDP, 1999
- Harits, A. Busyairi, *Ilmu Laduni dalam Perspektif Teori Belajar Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Hasan, Abdul Aziz, "Pembelaan terhadap Wahdat al-Wujud: Tasawuf Syamsuddin Sumaterani" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.III No.III tahun 1992.
- Hendarso, "Penelitian Kualitatif" dalam Bagong Suyanto, dkk (ed.) *Metode Penelitian Klasifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995
- Herbert, Blumer, *Symbolic Interactionism, Perspective and Method*, California: The United States of America, 1986
- Horikhosi, Hirokho, *Kiai dan Perubahan Klasifikasi*, Jakarta: P3M, 1987
- Idrus, Muhammad, *Metode Peneletian Ilmu-ilmu Klasifikasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Irsyam, Machrus, "Bendera Hijau di Cakrawala Politik Indonesia, *Panji Masyarakat*, No. 283, 1981
- Ismail, Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa: Perananannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Jamil, M. Muhsin, *Tarekat dan Dinamika Klasifikasi Politik: Tafsir Klasifikasi Sufi Nusantara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Juergensmeyer, Mark, *Nasionalisme Religius: menentang negara sekuler*, Bandung: Mizan, 1998

- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Jorgensen, Marianne W. Jorgensen, *Analisis Wacana: Teori dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Kafrawi, *Pembaharuan Sistem Pondok Pesantrem sebagai usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Cemara Indah, 1978.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- Karim, A. Ghaffar, *Metomorfosis NU: Politisasi Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Karim, M. Ruslim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989
- Keller, Susanne, *Penguasa dan Kelompok Elit*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta, t.t
- Lauer, Robert H, *Perspektif Tentang Perubahan Klasifikasi*, terj. Alimandan, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Ma'luf, Louis, *Qamus Munjid*, cet.xii, Beirut: Al Matba'ah al Kathulikiah, 1952
- Machfoedz, Maksoem, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat, tt..
- Mahfudh, Ahmad Sahal, "Pengalaman Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat" *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional di Cisarua, Bogor 11-13 April 1988

- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Mas'ud, Abdurahman, "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Tiara Wacana, 2002
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Mastuki, HS., "Neo Sufisme di Nusantara: Kesenambungan dan Perubahan" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.VI No.VII tahun 1997
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 198
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Klasifikasi Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007
- Mubin, Nurul, *Gagap Politik Kaum Santri*, Bantul: Rumah Mistiko, 2006
- Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Muhtarom, H.M., *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi: Resistensi Tradisional Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pejajar, 2005.
- Narwoko, J. Dwi, Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi: Suatu Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Noeh, Z.A., "Kepustakaan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam" dalam A. Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Nurhasim, Moch. (ed.), *Konflik antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Patoni, Ahmad, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- PBNU, *Hasil-hasil Muktamar Nahdhatul Ulama ke-29*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, 1996
- Poloma, Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 1994, hlm. 264-266
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Rifai, M Rofii, *Dakwah Tuan Guru Kiai H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam rangka pembaruan Islam di Lombok, NTB*, Mataram: FKIP Universitas Mataram, 2005.
- Robert, Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Sadewo, FX Sri, "Model Analisis Etnografi dalam Penelitian Kualitatif" dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Salim, Agus, *Perubahan Klasifikasi: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- , *Teori dan Paradigma Penelitian Klasifikasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Sartono Kartodirjo, *Elit dalam perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1981

- Septiana, K. Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Setiawan, Akhmad, *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Shihab, M. Quraish, *Dia di Mana-mana, "Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- , *Tafsir al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jil. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Secercah Cahaya al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Siddiq, Achmad, *Pedoman Berpikir 'Nahdlatul Ulama*, Djember: PMII Cabang Jember, 1969.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1977.
- Soeprapto, R. Riyadi, *Interaksionisme Simbolik: Perspektif Sosiologi Modern*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Sofyan, Ahmadi, "Robohnya Pesantren Kami: Perselingkuhan Ulama' Dan Umara'" Dalam *Perebutan Kekuasaan*, Yogyakarta, Listas Pustaka, 2006.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu Ofset, 1997.
- Subakir, Ahmad, "Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Agama dan Kritik Klasifikasi di Tengah Arus Kapitalisme Global", Yogyakarta: Ircisod dan STAIN Kediri, 2006.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Klasifikasi-Agama*, Bandung: Rosdakarya, 2001.

- , *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Syachrial Bahri ed., *Kediri Kota Masa Depan*, Pemerintah Kota Kediri, 2006.
- Taufiqur Rohmat, *Upaya KH. Muhamad Anwar Iskandar Dalam Mengembangkan Pendidikan di Pondok Pesantren al-Amien Rejomulyo, Kediri 2008*.
- Thoha, Miftah, *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*, Yogyakarta: MW Mandala, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Turmudzi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ummatin, Khoiru, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Utama, Dede, "Teori Klasifikasi Mikro" dalam Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Varma, SP., *Teori Politik Modern*, penyunting Tohir Efendi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Dharma Bakhti, 1984.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- I. Wayan Suyadnya diganti dengan Sanderson, Stephen K., *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas*

Sosial, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Yahya, lip D., *Ajengan Cipasung: biografi KH. Moh. Ilyas Ruhiat*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Klasifikasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992.

Ziemek, Manfred, *Pesantren dan Perubahan Klasifikasi*, Jakarta: P3M, 1986.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Koran Harian atau media lain

Kompas, 12 April 2000 "Pabrik Gudang Garam ditutup Sementara".

-----, 22 Maret 2002, "Mengejar Ketertinggalan Daerah".

Suara Merdeka, 1 Desember 2003.

www.Mertotvnews.com.